



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Dengan menghaturkan Sesanti Angayubagia / puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, berkat Asung Kertha Wara Nugraha – Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016. Adanya dukungan semua pihak dan sinergitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng berimplikasi pada ketepatan waktu penyelesaian penyusunan laporan.

Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategi nasional untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan LPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 ini adalah bentuk kewajiban kami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sistematika penyusunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 mencakup gambaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng secara utuh sepanjang Tahun 2016, dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan berdasarkan tolak ukur kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2012 – 2017, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2016. Dengan demikian gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Semoga melalui penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih dengan harapan semoga segala daya dan upaya kita dalam rangka membangun Bumi Panji Sakti tercinta akan senantiasa mendapatkan tuntunan dan petunjuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa.

Om Cantih,Cantih,Cantih Om.

Singaraja, 20 Maret 2017

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA,ST.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN BULELENG.	1
A. Sejarah Kota Singaraja.	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buleleng.	3
2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG.	6
A. Kondisi Geografis Daerah.	6
B. Gambaran Umum Demografis Daerah.	13
C. Kondisi Ekonomi Daerah.	25
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.	38
A. VISI DAN MISI.	38
B. SETRATEGI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH.	42
C. PRIORITAS DAERAH.	49
BAB III URUSAN DESENTRALISASI.	59
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.	59
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan.	68
1. Urusan Pendidikan.	68
2. Urusan Kesehatan.	97
3. Urusan lingkungan hidup	141
4. Urusan Pekerjaan Umum	165
5. Urusan Tata Ruang	191
6. Urusan Perencanaan Pembangunan	192
7. Urusan Perumahan	203
8. Urusan Pemuda dan Olah Raga	206
9. Urusan Penanaman Modal	210
10. Urusan Koperasi dan UKM	217
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	221
12. Urusan Tenaga Kerja	231
13. Urusan Ketahanan Pangan	239
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	245
15. Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	252

	16. Urusan Perhubungan	260
	17. Urusan Komunikasi dan Informatika	274
	18. Urusan Pertanahan	281
	19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	283
	20. Urusan Otonomi Daerah	298
	21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat	403
	22. Urusan Sosial	412
	23. Urusan Budaya	424
	24. Urusan Kearsipan	434
	25. Urusan Perpustakaan	436
C.	Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan.	441
	1. Urusan Perikanan.	441
	2. Urusan Pertanian.	448
	3. Urusan Kehutanan.	457
	4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.	460
	5. Urusan Pariwisata.	463
	6. Urusan Perdagangan.	468
	7. Urusan Industri.	471
	8. Urusan Transmigrasi.	473
D.	Indikator Kinerja Kunci (IKK).	476
	1. Tataran Pengambil Kebijakan.	476
	2. Tataran Pelaksana Kebijakan.	491
	3. Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.	493
BAB IV	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	497
	A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	497
	B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan	509
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	510
	A. Kerjasama Antar Daerah.	510
	B. Kerjasama Antar Pemerintah	515
	C. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.	519
	D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.	524
	E. Pembinaan Batas Wilayah.	527
	F. Penanggulangan Dan Pencegahan Bencana.	544
	G. Pengelolaan Kawasan Khusus.	546
	Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban.	551
BAB VI	PENUTUP.	554
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

1. Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tataran Pengambil Kebijakan.
2. Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tataran Pelaksana Kebijakan.
3. Lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

NO TABEL	JUDUL TABEL /GAMBAR	HAL
TABEL 1	: Luas Kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2016	7
TABEL 2	: Kondisi Beberapa Unsur Iklim di Kabupaten Buleleng,2016	12
TABEL 3	: Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Buleleng, Tahun 2015	13
TABEL 4	: Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng, 2015	14
TABEL 5	: Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Buleleng, Tahun 2012-2015	15
TABEL 6	: Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Kabupaten Buleleng, 2015	16
TABEL 7	: Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Struktur Usia Kecamatan Tahun 2015	17
TABEL 8	: Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015	18
TABEL 9	: Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2015	21
TABEL 10	: PDRB harga berlaku Kabupaten Buleleng,menurut lapangan usaha,Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (jutaan rupiah) Tahun 2014 – 2015	29
TABEL 11	: Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha, 2012-2015 (persen)	32
TABEL 12	: Indikator Agregat PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2011 – 2015	37
TABEL 13	: Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib	59
TABEL 14	: Alokasi Dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan.	62
TABEL 15	: Susunan Perangkat Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2016	64
TABEL 16	: Susunan Perangkat Daerah kabupaten Buleleng berdasarkan Perda No.13 Tahun 2016	66
TABEL 17	: Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	77
TABEL 18	: SPM Bidang Kesehatan	101
TABEL 19	: Capaian Indikator Program/Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2016	102
TABEL 20	: Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2016	105
TABEL 21	: Cakupan Imunisasi Bayi dan Ibu Hamil Tahun 2016	106
TABEL 22	: Penyakit yang paling banyak diderita Tahun 2016	107
TABEL 23	: Sarana Prasarana Pengobatan tahun 2016	108
TABEL 24	: Realisasi Program dan Kegiatan dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016	113
TABEL 25	: Capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2016	125
TABEL 26	: Kondisi Pegawai pada Badan lingkungan Hidup kabupaten Buleleng, 2016	144
TABEL 27	: Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup	150
TABEL 28	: Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah	154
TABEL 29	: Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Buleleng	155

TABEL	30	: Kondisi Pegawai Urusan Pekerjaan Umum, 2016	167
TABEL	31	: SPM Bidang Pekerjaan Umum	170
TABEL	32	: Indikator Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	173
TABEL	33	: Indikator Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per Individu Melakukan Perjalanan	182
TABEL	34	: Indikator Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per Individu Melakukan Perjalanan	183
TABEL	35	: Indikator Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per Individu Melakukan Perjalanan	184
TABEL	36	: Indikator Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per Individu Melakukan Perjalanan	185
TABEL	37	: Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	186
TABEL	38	: Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	187
TABEL	39	: Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	188
TABEL	40	: Indikator Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	189
TABEL	41	: Indikator Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kab/kota	190
TABEL	42	: Jumlah Program di RPJMD 2012 – 2017	197
TABEL	43	: Jumlah Program di RKPD 2016	198
TABEL	44	: Kondisi Kepegawaian Bappeda Kabupaten Buleleng	201
TABEL	45	: Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	203
TABEL	46	: Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal	212
TABEL	47	: Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Penanaman Modal	215
TABEL	48	: Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Koperasi dan UKM	220
TABEL	49	: Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan	233
TABEL	50	: Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja	234
TABEL	51	: Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Tenaga Kerja	237
TABEL	52	: Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan	240
TABEL	53	: Kondisi Pegawai Urusan Ketahanan Pangan	242
TABEL	54	: SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	245
TABEL	55	: Kondisi Pegawai Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	250
TABEL	56	: Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	254
TABEL	57	: SPM Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	256
TABEL	58	: Kondisi Pegawai pada Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	258
TABEL	59	: Capaian kinerja bidang perhubungan yang telah dicapai sepanjang	263

TABEL	60	:	Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasi	276
TABEL	61	:	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	299
TABEL	62	:	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016	342
TABEL	63	:	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Tahun 2016	350
TABEL	64	:	Kondisi Kepegawaian Pada BPKAD Kabupaten Buleleng Tahun 2016	361
TABEL	65	:	realisasi anggaran program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Buleleng Tahun 2016	365
TABEL	66	:	alokasi dan realisasi anggaran kecamatan se- Kabupaten Buleleng Tahun 2016	374
TABEL	67	:	Kondisi Kepegawaian pada BPMPD Kabupaten Buleleng	405
TABEL	68	:	alokasi dan realisasi anggaran BPMPD Kabupaten Buleleng	408
TABEL	69	:	Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan	427
TABEL	70	:	Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan pada Tahun 2016	430
TABEL	71	:	Kondisi Kepegawaian Urusan Kearsipan	435
TABEL	72	:	Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan	438
TABEL	73	:	Kondisi Kepegawaian Urusan Perpustakaan	439
TABEL	74	:	Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Pertanian	454
TABEL	75	:	Kondisi Pegawai Yang Menangani Urusan kehutanan	459
TABEL	76	:	Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng	464
TABEL	77	:	Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Pariwisata	466
TABEL	78	:	Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Buleleng	469
TABEL	79	:	Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Perdagangan	469
TABEL	80	:	Komponen Urusan Industri	471
TABEL	81	:	Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Industri	472
TABEL	82	:	Pegawai Pelaksana Urusan Transmigrasi	474
GAMBAR	1	:	Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	6
GAMBAR	2	:	Grafik persentase luas kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2015	8
GAMBAR	3	:	Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan Ketinggian Tempat, 2015	9
GAMBAR	4	:	Pertumbuhan Penduduk Kab. Buleleng 2012-2015	15
GAMBAR	5	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2011 - 2015 (persen)	30
GAMBAR	6	:	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali , 2011-2015 (persen)	33
GAMBAR	7	:	Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Buleleng 2015 (persen)	34
GAMBAR	8	:	Lima kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Buleleng 2015	35
GAMBAR	9	:	Kontribusi Kategori pertanian dalam pembentukan PDRB kabupaten Buleleng 2015	36
GAMBAR	10	:	Persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten Tahun 2016	371
GAMBAR	11	:	Capaian Produktifitas padi 1	450

GAMBAR	12	:	Capaian Produktifitas padi 2	451
GAMBAR	13	:	Capaian Produksi Buah - Buahan	452
GAMBAR	14	:	Grafik Capaian Produksi Sayur - sayuran	452

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN BULELENG.

1. Sejarah Kota Singaraja.

Sejarah kota Singaraja tidak bisa lepas dari munculnya seorang penguasa di Bali Utara pada pertengahan abad XVII, yang berhasil membangun daerah tersebut sehingga maju dan disegani oleh daerah – daerah lain baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Beliau adalah I Gusti Ngurah Panji Sakti. Putra dari Dalem Sagening yang pusat kekuasaannya di Gelgel dan ibunya bernama Si Luh Pasek Panji. Masa pemerintahan I Gusti Ngurah Panji Sakti di Bali Utara cukup lama kurang lebih 81 tahun yaitu dari tahun 1599 – 1680. Beliau bersama ibunya diperintahkan kembali ke Den Bukit oleh ayahandanya yaitu Dalem Sagening disertai pasukan pengawal sebanyak 40 orang dengan pimpinannya Ki Kadosot dan Ki Dumpyung. Dalem Sagening memberikan bekal Ki Barak (nama kecil I Gusti Ngurah Panji Sakti) sebuah tombak yang kemudian terkenal dengan nama Pangkaja Tatwa dan sebuah keris anugrah dewata bernama Ki Mundaran Cacaran Babang. Setelah sampai di desa Panji beliau tinggal bersama ibundanya Si Luh Pasek Panji di rumah kakeknya bernama Pasek Gobleg. Sedang pengiringnya berjumlah 40 orang kembali ke Gelgel kecuali Ki Kadosot dan Ki Dumpyung yang selalu mengemban dan mendampingi Ki Barak Panji sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Dalem Sagening. Pada waktu itu di daerah Gendis dikuasai oleh seorang penguasa bernama Pungakan Gendis, yang menurut cerita suka bermain judi dan mabuk-mabukkan. Karena itu ia kurang disenangi oleh rakyatnya.

Setelah Ki Barak menginjak dewasa dan berkat bimbingan dari Ki Kadosot dan Ki Dumpyung beliau menjadi seorang pemuda yang mempunyai karisma dan mempunyai daya tarik sendiri, sehingga sangat disenangi dan disayangi oleh lingkungannya. Dan selanjutnya diceritakan bahwa Ki Barak Panji dapat mengalahkan Ki Pungakan Gendis. Mulai saat

itu Ki Barak Panji mulai dilirik oleh masyarakat Gendis untuk menjadi pimpinannya. Masyarakat Desa Gendis sangat terkagum – kagum setelah Ki Barak Panji dapat membantu kandasnya sebuah perahu milik saudagar dari Cina dan saudagar Cina tersebut menghadiahkan banyak barang – barang seperti kain – kain sutra, barang – barang keramik, yang dibawa oleh saudagar Cina tersebut. Setelah kejadian di Segara Penimbangan tersebut beliau kemudian secara aklamasi diangkat sebagai penguasa di daerah Gendis dan selanjutnya beliau membangun sebuah istana di desa Panji. Kemudian menyunting anak satu- satunya Ki Pungkakan Gendis menjadi Permaisurinya. Setelah menjadi penguasa di Panji beliau secara berencana membentuk suatu kelompok prajurit tersebut terkenal dengan nama “Taruna Goak”.

Karena pertimbangan – pertimbangan politis dan strategis I Gusti Ngurah Panji memindahkan ibukotanya yang didiami hampir sepuluh tahun kearah timur yaitu Sukasada. Di istana yang baru inilah bintang beliau secara cepat bersinar terang. Karena prajurit – prajurit Taruna Goaknya semakin kuat berkat merekrut tenaga – tenaga pelarian dari VOC. Seperti Hendrik Berede Roode dengan anak buahnya, yang diangkat sebagai instruktur Taruna Goak. Setelah merasa diri kuat sesuai petunjuk pawisik yang diterima dan setelah 8 tahun pemerintahannya di Istana Sukasada ki Gusti Ngurah Panji menyerang daerah Blangbangan. Dalam penyerangan tersebut akal dan pikiran yang cemerlang beliau bekerja sama dengan sama dengan prajurit mataram pimpinan Tumenggung Danupaya (Tahun 1602 M). Dari kerja sama ini dalam waktu yang relatif singkat Blangbangan dapat di taklukkan. Kemenangan terhadap Blangbangan di samping kegembiraan bagi prajurit Taruna Goak tetapi sangat sedih karena anak Ki Gusti Ngurah Panji Sakti yang Ketiga yang lahir dari permaisuri Ni Ayu Juru, gugur dalam pertempuran. Hal ini sangat dirasakan sebagai pukulan yang hebat, bagi beliau karena Ki Danu Dresta sangat diharapkan nantinya sebagai pengganti beliau. Akibat hal itu beliau mengasingkan diri ke sebelah utara sukasada, dimana didaerah tegalan tersebut tumbuh pohon Buleleng (jagung gembal). Selanjutnya setelah 18 tahun beliau beristana di Sukasada secara bertahap

ditinggalkannya dan dibangunlah istana yang baru di sebelah utara Sukasada. Dan istana yang baru tersebut diberi nama SINGARAJA, untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti seperti seekor Singa. Dari Puri inilah berkembang dan dikembangkan pembentukan kota baru yang kita kenal bernama KOTA SINGARAJA. Kota yang kelak menjadi Ibu Kota Kabupaten Buleleng hingga sekarang. Singaraja menjadi pusat Kerajaan Buleleng pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Tahun 1846 Belanda menjadikan Singaraja sebagai ibu kota Kepulauan Sunda Kecil. Dan Tahun 1958 Buleleng adalah pusat Pemerintahan Provinsi Sunda Kecil dengan Gubernur MR.I Gusti Ketut Pudja, putra Buleleng yang berasal dari Sukasada. Tahun 1960 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No Des.52/2/36-136 Tanggal 23 Juni 1960, ibu kota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar.

2. Dasar Hukum Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng.

Dasar hukum yang melandasi pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 13),
21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 253); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 30);

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG.

1. Kondisi Geografis Daerah.

a. Batas Administrasi Daerah.

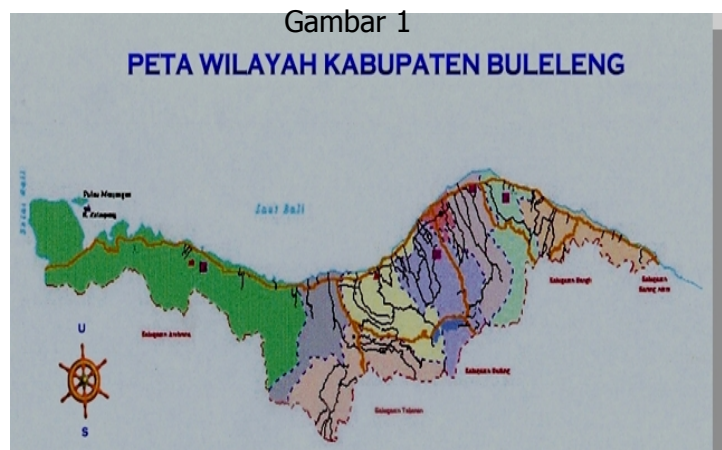
Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi $6^{\circ}03'40''$ - $8^{\circ}23'00''$ LS dan $114^{\circ}25'55''$ - $115^{\circ}27'28''$ BT; berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan pegunungan yang membentang di Bagian Selatan, sedangkan di Bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai *Nyegara Gunung*, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (*ulun*) dan hilir (*teben*). Dengan batas-batas wilayah di Sebelah Barat Kabupaten Jembrana, Sebelah Utara Laut Bali, Sebelah Timur Kabupaten Karangasem dan di Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli.

b. Luas Wilayah.

Kabupaten Buleleng memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu $1.365,88 \text{ Km}^2$ atau 24,25% dari luas Provinsi Bali.

Kabupaten Buleleng merupakan

Kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Bali. Dengan wilayah pantai sepanjang 157,05



Km², membentang sepanjang pesisir utara Pulau Bali. Secara administrasi wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, 546 banjar dinas, 63 lingkungan dan 169 Desa Pakraman/ Desa Adat.

Tabel 1
Luas Kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2016

Kecamatan	Panjang Pantai Km	Luas Wilayah Km2
(1)	(2)	(3)
1. Gerokgak	76,89	356,57
2. Seririt	11,61	111,78
3. Busungbiu	-	196,62
4. Banjar	8,06	172,60
5. Sukasada	-	172,93
6. Buleleng	16,52	46,94
7. Sawan	6,92	92,52
8. Kubutambahan	9,82	118,24
9. Tejakula	27,23	97,68
Jumlah/ Total :	157,05	1 365,88

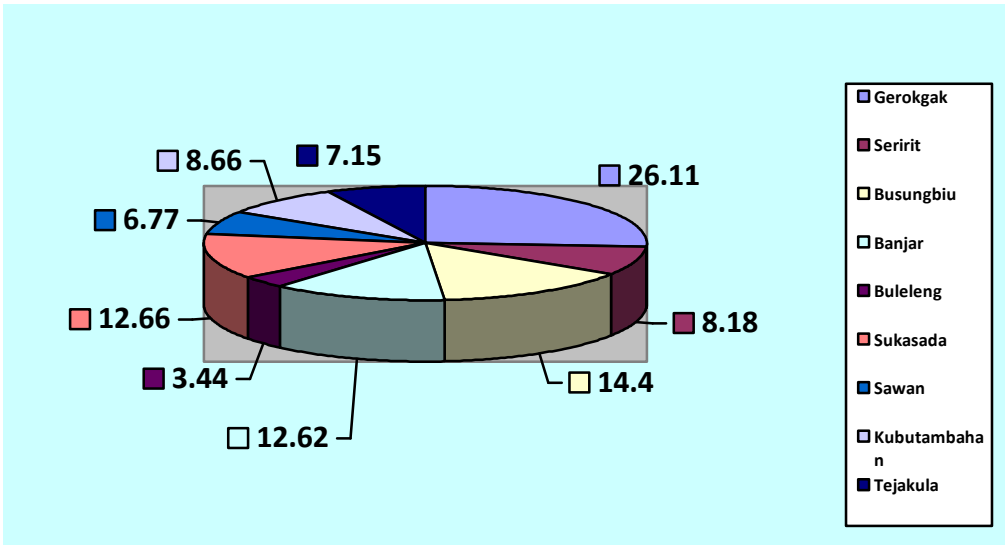
Sumber : Buleleng Membangun, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan di Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah terluas yaitu 356,57 Km2 dan memiliki pantai sepanjang 76,89 Km2. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Buleleng, yang juga merupakan ibukota Kabupaten Buleleng yaitu 46,94 Km2. Hampir semua kecamatan memiliki pantai kecuali Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Busungbiu. Kecamatan Gerokgak memiliki luas wilayah dengan persentase mencapai 26,11 persen dari luas kabupaten. Disusul Kecamatan Busungbiu 14,40 persen, Kecamatan Sukasada 12,66 persen, Kecamatan Banjar 12,62 persen, Kecamatan Kubutambahan 8,66 persen, Kecamatan Seririt, 8,18 Persen, Kecamatan Tejakula 7,15 persen, Kecamatan sawan 6,77 Persen dan Kecamatan Buleleng sebesar 3,44 persen.

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Gerokgak terdiri atas 14 desa dan 75 banjar dinas. Kecamatan Busungbiu meliputi 15 desa dan 41 banjar dinas. Kecamatan Sukasada terdiri atas 14 desa dan 1 kelurahan, 68 banjar dinas dan 5 lingkungan. Banjar dengan wilayah administrasi meliputi 17 desa dan 17 banjar dinas. Selanjutnya Kecamatan Kubutambahan dengan 13 desa dan 46 banjar dinas. Kecamatan Seririt

terdiri atas 20 desa , 1 kelurahan, 80 banjar dinas dan 5 lingkungan. Kecamatan Sawan yang terdiri atas 14 desa dan 68 banjar dinas. Kecamatan Tejakula secara admistrasi terbagi atas 10 desa dan 60 banjar dinas serta Kecamatan Buleleng mencakup, 12 desa dan 17 kelurahan, 41 banjar dinas, 53 lingkungan dan desa pakraman yang bersifat otonom sebanyak 21 desa pakraman.

Gambar 2
Grafik persentase luas kecamatan di Kabupaten Buleleng, 2016



Sumber : Buleleng Membangun, 2016

c. Topografi.

1) Kemiringan Lahan.

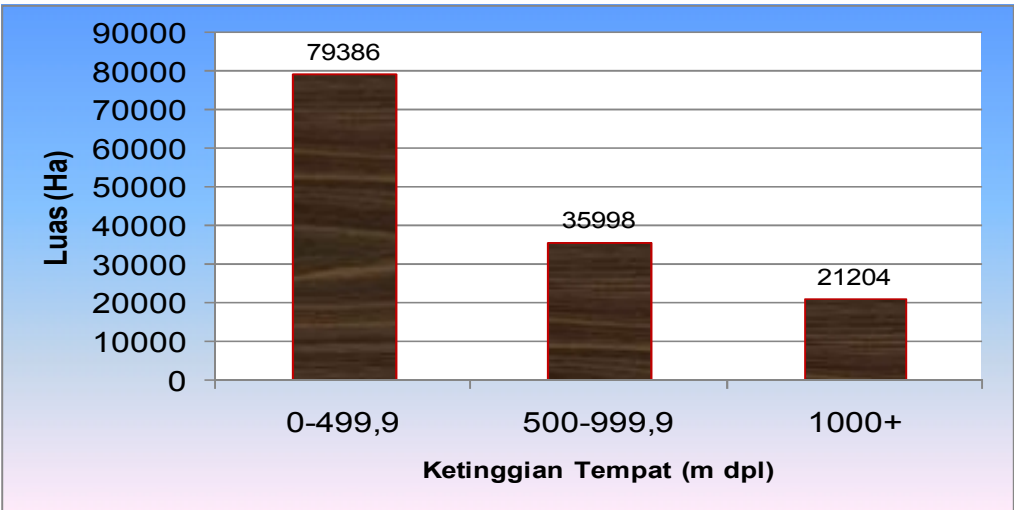
Wilayah Kabupaten Buleleng sebagian besar (53,81%) berada pada fisiografi lahan tergolong landai (kemiringan lahan 0-25%). Sisanya tersebar pada kemiringan 25-40% dan di atas 40%. Kecamatan Gerokgak yang memiliki wilayah paling luas, sebagian besar (82,68%) wilayahnya tergolong landai. Sedangkan Kecamatan Busungbiu dengan luas wilayah 9.528 Ha sebagian besar (74,31%) berada pada fisiografi lahan tergolong miring.

2) Ketinggian Tempat.

Ditinjau dari ketinggian tempat, sebagian besar (58,12%) wilayah Kabupaten Buleleng berada pada ketinggian 0-499,9 m dpl.

Daerah yang berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. hanya sekitar 15,52%, sebagaimana dapat disimak pada Gambar I.3

Gambar 3
Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Ketinggian Tempat, 2016



Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng, 2016 (data diolah)

3) Geologi.

a. Struktur dan Karakteristik Geologi.

Struktur geologi wilayah Kabupaten Buleleng tersusun oleh : (1) lapisan aluvial yang tersebar di bagian Utara, (2) batuan gunung berapi tersebar di bagian Selatan, dan (3) formasi Asah, formasi Palasari, dan formasi Prapat Agung tersebar di bagian Barat.

b. Potensi Geologi.

Kabupaten Buleleng mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas. Jenis batuan yang ada antara lain batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belum optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

4) Hidrologi.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir difokuskan pada DAS prioritas I dan II. Das prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan biofisik dan sosek DAS paling kritis atau tidak sehat. Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas pengelolaannya sedang.

Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu Unda (prioritas 1), Blingkrank Anyar (prioritas 1), Teluk Terima Pancoran (prioritas 2), Pangiaiyung (prioritas 2), Saba Daya (prioritas 2), Biluk Poh Gumbrih (prioritas 2), Klatakan Lubang (prioritas 2), Leh Balian (prioritas 2) dan Oten Sungai (prioritas 2).

b. Sungai.

1) Kuantitas Sungai.

Secara kuantitatif, ada 88 sungai di Kabupaten Buleleng; 61 sungai (69%) diantaranya merupakan sungai tadah hujan, yaitu sungai yang hanya mengalirkan air pada musim hujan, sisanya 31% merupakan sungai mengalir sepanjang tahun. Panjang sungai antara 2,3 - 23,2 Km. Tukad Saba merupakan sungai terpanjang yaitu 23,2 Km. Sedangkan yang terpendek adalah Tukad Sema hanya 2,3 Km. Debit maksimal sungai bervariasi antara 112.000 - 62.119.000 m³/tahun. Sungai yang memiliki debit air tahunan terbesar adalah Tukad Saba mencapai 62.119.000 m³/tahun, sedangkan yang terkecil adalah Tukad Pekecor hanya 112.000 m³/tahun.

2) Kualitas Air Sungai.

Secara umum kualitas air sungai (Tukad Buleleng, Tukad Saba dan Tukad Banyumala) di bagian hulu dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan

tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), Total Fosfat sebagai P, Besi, Nitrit Sebagai N, Fecal Coliform dan Total Coliform melampaui baku mutu air minum.

c. Air Danau/Waduk/Bendung/Embung.

Terdapat dua buah danau, satu buah waduk, 24 bendung dan satu buah embung di Kabupaten Buleleng dengan total volume air sekitar 123.603.500 m³. Volume air yang tertampung di danau Buyan sekitar 92.00.000 m³. Sedangkan di danau Tamblingan sekitar 27.050.000 m³. Danau Buyan dan Tamblingan merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dan merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Kondisi danau Buyan maupun Tamblingan lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Proses sedimentasi dan pendangkalan danau ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian di pinggir danau yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrisi yang memacu pertumbuhan tumbuhan air di danau. Selain danau, juga terdapat waduk dan embung, yaitu waduk Gerokgak di Kecamatan Gerokgak dan embung Tembok di Desa Tembok Kecamatan Tejakula. Secara potensial, volume air waduk Gerokgak rata-rata 3.750.000 m³ dan kondisinya berfluktuasi menurut musim selama lima tahun terakhir. Pada musim hujan volume air yang tertampung lebih banyak, namun pada musim kemarau akan menurun. Sampai dengan tahun 2011 telah dipersiapkan rencana pembangunan Bendungan Titab di Kecamatan Busungbiu. Pembangunan bendungan ini diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Buleleng, yang utamanya terkendala karena keterbatasan air irigasi.

d. Mata Air.

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber air baku dan air irigasi, juga punya fungsi religi, yaitu sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama. Kedepan kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan. Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528 juta m²/tahun.

Tabel 2
Kondisi Beberapa Unsur Iklim di Kabupaten Buleleng, 2016

No	Unsur Iklim	Stasiun Pengamatan			
		Meteorologi Ngurah Rai	Geofisika Sanglah	Geofisika Karangasem	Klimatologi Negara
1.	Temperatur (°C)				
	Maksimum	30,8	32,7	30,3	30,8
	Minimum	25,3	24,32	24,4	23,9
	Rata-rata	27,6	28,0	27,2	26,8
2.	Kelembaban Udara (%)				
	Maksimum	91	90	90	94
	Minimum	76	73	79	87
	Rata-rata	84	82	69	87
3.	Tekanan Udara (mb)	1.008,8	1.009,3	1.006,8	1.011,4
4.	Kecepatan Angin (knot)	6	5	7	3
5.	Curah Hujan (mm)	2.524,8	2.812,6	2.288,6	3.3001,7
6.	Penyinaran Matahari (%)	73	68	52	62

Sumber data : Buleleng Membangun, 2016

5) Klimatologi.

Tipe iklim wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi Schmidth – Ferguson bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai Q = 50,68) di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai Q = 170,73 - 244,33) di Pemuteran Kecamatan Gerokgak dan sekitarnya. Suhu udara rata-rata 28,0°C; kelembaban udara rata-rata mencapai 87%, curah hujan antara 2.288,3 - 3.001,7 mm/tahun atau 190,69 - 250,14 mm/bulan; dan penyiraran matahari mencapai 73%, sebagaimana dapat disimak pada Tabel 2.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS DAERAH.

Pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sebanyak 807.598 jiwa yang terdiri dari 404.274 penduduk laki – laki dan 403.324 penduduk perempuan. Penduduk tersebut menyebar di 9 (Sembilan) wilayah kecamatan, sebagaimana tersaji pada tabel 3. Kecamatan Buleleng mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu 146.198 jiwa atau 18,10 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng. Besarnya penduduk di Kecamatan Buleleng dipengaruhi faktor bahwa Kecamatan Buleleng merupakan pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, social, budaya dan lainnya sehingga pembangunan perkantoran, perumahan, perdagangan, transportasi terpusat di wilayah Kecamatan Buleleng. Hal tersebut yang mempengaruhi banyaknya penduduk pendatang yang memilih berdomisili di wilayah Kecamatan Buleleng. Sebaliknya Kecamatan Busungbiu memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 58.662 jiwa atau 7,26 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng. Kondisi wilayah Kecamatan Busungbiu yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan berpengaruh terhadap besarnya populasi yang mendiami daerah tersebut.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Buleleng,
Tahun 2015

Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Gerokgak	48,573	48,302	96,875
Seririt	51,817	52,618	104,435
Busungbiu	29,178	29,484	58,662
Banjar	46,603	46,468	93,071
Sukasada	41,034	41,201	82,235
Buleleng	73,296	72,902	146,198
Sawan	41,233	41,515	82,748
Kubutambahan	32,485	32,153	64,638
Tejakula	40,055	38,681	78,736
Kab. Buleleng	404,274	403,324	807,598

Sumber Data : Disdukcapil Kab. Buleleng

Kepadatan penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 mencapai 591,27 orang /Km2. Ini berarti bahwa dalam setiap kilometer persegi wilayah Kabupaten Buleleng dihuni kurang lebih 591 penduduk. Jika dilihat per kecamatan maka rasio kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan

Buleleng yaitu sebesar 3.114,57 orang/km2, disusul masing – masing oleh Kecamatan Seririt dengan kepadatan mencapai 934,29 orang/Km2, Kecamatan Sawan dengan kepadatan sebesar 894,38 orang/Km2, Kecamatan Tejakula ; 806,06 orang/Km2, Kecamatan Banjar ; 539,23 orang/Km2, Kecamatan Kubutambahan ; 546,67 orang/Km2, Kecamatan Sukasada ; 475,54 orang/Km2, Kecamatan Busungbiu dengan kepadatan mencapai 298,35 orang/km2 serta Kecamatan Gerokgak dengan kepadatan penduduk sebesar 270,93 orang/Km2.

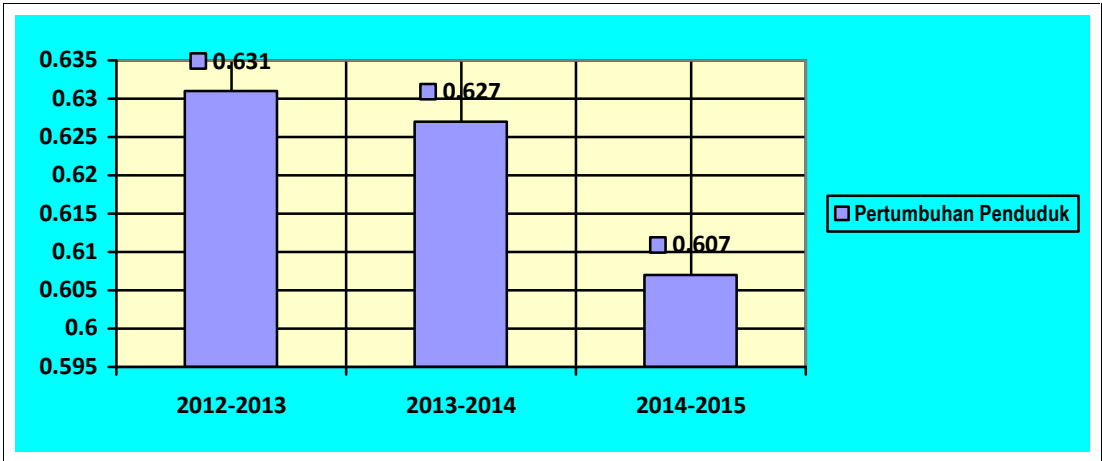
Tabel 4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng. 2015

Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah Km2	Kepadatan
1	2	4	6	7	8
Gerokgak	48,573	48,302	96,875	357.57	270.93
Seririt	51,817	52,618	104,435	111.78	934.29
Busungbiu	29,178	29,484	58,662	196.62	298.35
Banjar	46,603	46,468	93,071	172.60	539.23
Sukasada	41,034	41,201	82,235	172.93	475.54
Buleleng	73,296	72,902	146,198	46.94	3,114.57
Sawan	41,233	41,515	82,748	92.52	894.38
Kubutambahan	32,485	32,153	64,638	118.24	546.67
Tejakula	40,055	38,681	78,736	97.68	806.06
Kab. Buleleng	404,274	403,324	807,598	1,365.88	591.27

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan. Kurun waktu 2011-2012 pertumbuhannya mencapai 0,635, Tahun 2012-2013 tingkat pertumbuhan menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya yakni sebesar 0,631 dan pada Tahun 2013-2014 laju pertumbuhan mencapai 0,627. Gambaran pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng ditunjukkan gambar 4 berikut ini.

Gambar 4
Pertumbuhan Penduduk Kab. Buleleng 2012-2015



Sumber data : Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016.

Kurun waktu Tahun 2012 – 2015 pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Sukasada yaitu sebesar berturut – turut, 0.936 antara Tahun 2012-2013 dan 0.954 pada Tahun 2013-2014 dan 0,865 kurun waktu Tahun 2014-2015. Hal ini dipengaruhi factor bahwa wilayah ini merupakan wilayah berkembang yang dekat dengan pusat kegiatan perekonomian, pendidikan, pemerintahan dan sector jasa. Besarnya pertumbuhan penduduk juga terjadi di Kecamatan Gerokgak yang mencapai 0,845 pada kurun Tahun 2014-2015.

Tabel 5
Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Buleleng,
Tahun 2012-2015

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Gerokgak	0.869	0.886	0.845
Seririt	0.609	0.549	0.476
Busungbiu	0.399	0.447	0.198
Banjar	0.628	0.666	0.606
Sukasada	0.936	0.954	0.865
Buleleng	0.775	0.769	0.786
Sawan	0.506	0.420	0.401
Kubutambahan	0.386	0.421	0.456
Tejakula	0.093	0.056	0.111
Kab. Buleleng	0.631	0.627	0.607

Sumber data : Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016

Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Tejakula dengan pertumbuhan penduduk pada kurun Tahun 2012-2015 rata – rata 0,086.

Berdasarkan data *Buleleng Membangun 2016* bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 sebesar 99,26 yang berarti dari setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Buleleng terdapat sebanyak 99 orang penduduk laki – laki. Namun dari Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan data penduduk Tahun 2015, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Buleleng sebesar 100,24. Angka ini menunjukkan adanya perimbangan antara penduduk laki – laki dan perempuan di Kabupaten Buleleng.

Tabel 6
Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Kabupaten Buleleng

Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	RJK
1	2	3	4	5
Gerokgak	48,573	48,302	96,875	100.56
Seririt	51,817	52,618	104,435	98.48
Busungbiu	29,178	29,484	58,662	98.96
Banjar	46,603	46,468	93,071	100.29
Sukasada	41,034	41,201	82,235	99.59
Buleleng	73,296	72,902	146,198	100.54
Sawan	41,233	41,515	82,748	99.32
Kubutambahan	32,485	32,153	64,638	101.03
Tejakula	40,055	38,681	78,736	103.55
Kab. Buleleng	404,274	403,324	807,598	100.24

Sumber data : Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016

Mengacu pada rasio jenis kelamin penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Buleleng terdapat 5 Kecamatan yang sex rasio penduduknya lebih dari 100, yang berarti bahwa di wilayah tersebut jumlah penduduknya didominasi oleh penduduk laki – laki. Sex Rasio Penduduk di Kecamatan Gerokgak (100,56), Kecamatan Banjar (100,29), Kecamatan Buleleng (100,54), Kecamatan Kubutambahan (101,03), Kecamatan Tejakula (103,55).

Jika mengacu pada Struktur Usia maka Penduduk Kabupaten Buleleng paling banyak berada pada struktur usia 10-14 Tahun dan 30-34 Tahun. Sekitar 70,977 jiwa atau sekitar 8,79 persen penduduk kabupaten Buleleng berada pada struktur usia 30-34 Tahun. Sedangkan pada Struktur Usia 10-14 Tahun penduduk kabupaten Buleleng sebanyak 69,997 jiwa atau 8,67 persen dari keseluruhan Penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015.

Tabel 7
Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Struktur Usia Per Kecamatan Tahun 2015

Setruktur Usia	KECAMATAN									Jumlah
	Gerokgak	Busungbiu	Seririt	Banjar	Sukasada	Buleleng	Sawan	Kubtambahn	Tejakula	
00-04	5,111	2,419	4,471	3,475	4,214	8,346	4,252	3,134	3,925	39,347
05-09	9,060	4,623	8,041	7,259	7,748	12,480	7,206	5,769	6,880	69,066
10-14	8,712	4,782	9,081	8,377	7,479	12,226	6,904	5,637	6,799	69,997
15-19	8,232	4,498	8,767	7,579	7,055	11,727	6,522	5,480	6,476	66,336
20-24	7,815	4,183	7,911	6,840	6,618	11,567	6,607	5,709	6,463	63,713
25-29	7,558	4,225	7,640	7,075	6,580	12,088	6,724	5,639	6,329	63,858
30-34	8,286	4,845	8,704	7,779	7,317	13,607	7,632	5,666	7,141	70,977
35-39	8,490	4,796	8,976	7,893	6,815	12,229	7,006	5,149	6,083	67,437
40-44	7,798	4,330	7,682	7,308	6,077	10,590	5,831	4,569	5,653	59,838
45-49	6,201	4,212	7,270	6,638	5,200	9,586	5,300	4,212	5,648	54,267
50-54	5,594	3,458	5,787	5,514	4,264	8,351	4,463	3,463	4,269	45,163
55-59	4,316	3,290	5,385	4,728	3,783	7,330	3,980	2,994	3,682	39,488
60-64	2,922	2,608	3,908	3,408	2,673	5,253	3,014	2,027	2,981	28,794
65-69	2,229	2,020	3,194	2,889	2,183	3,810	2,587	1,739	2,361	23,012
70-74	1,865	1,776	2,787	2,412	1,668	3,055	2,026	1,336	1,756	18,681
75+	2,686	2,597	4,831	3,897	2,561	3,953	2,694	2,115	2,290	27,624
Jumlah	96,875	58,662	104,435	93,071	82,235	146,198	82,748	64,638	78,736	807,598

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng, 2015

Sedangkan untuk struktur usia yang paling sedikit jumlahnya berada pada tingkatan usia 70-74 Tahun yakni berjumlah 18,681 jiwa. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kabupaten Buleleng sebesar 178.410 jiwa. Penduduk usia tua (≥ 65 tahun) ; 69.317 jiwa dan penduduk usia produktif 559.871 jiwa.

Berdasarkan tingkat pendidikan maka Penduduk Kabupaten Buleleng dapat dirinci sebagai berikut, belum bersekolah 190.095 jiwa, 56.189 jiwa tidak tamat SD, 277.683 duduk di jenjang Sekolah Dasar, 100.814 berada pada tingkatan pendidikan SMP. Pada jenjang pendidikan menengah, yakni pada tingkat SMA terdapat 145.897 jiwa dan pada jenjang pendidikan tinggi yaitu pada jenjang Diploma II ; 8.337 jiwa, Diploma III ; 7.017 jiwa, Strata I ; 20.336 jiwa Strata II ; 1.091 jiwa dan Strata III ; 139 jiwa.

Tabel 8
Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	91,559	98,536	190,095
2	BELUM TAMAT SD	27,579	28,610	56,189
3	TAMAT SD	125,612	152,071	277,683
4	TAMAT SLTP	52,833	47,981	100,814
5	TAMAT SLTA	85,155	60,742	145,897
6	D1/D2	5,225	3,112	8,337
7	D3/SARJANA MUDA	3,686	3,331	7,017
8	D4/STRATA 1	11,759	8,577	20,336
9	S2	768	323	1,091
10	S3	98	41	139
	Jumlah	404,274	403,324	807,598

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Buleleng.

Jika dilihat dari jenis kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan maka komposisi Penduduk Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : Penduduk yang belum bekerja berjumlah 214,655 jiwa, mengurus rumah tangga 74,307 jiwa, Mahasiswa / Pelajar sebanyak 107,031 jiwa, PNS sebanyak 13,077 jiwa dan sisanya bekerja pada sector lainnya.

Secara rinci komposisi penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 10.

Aspek lain yang tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan kependudukan adalah ketersediaan pemukiman yang layak. Pada Tahun 2016 jumlah rumah yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng 171.218 rumah yang terinci sebagai berikut ; **di Kecamatan Banjar** terdapat 2.512 unit rumah mewah, 14.484 unit rumah sederhana, dan 4025 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 745 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 160 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Buleleng** terdapat 27.073 unit rumah yang terdiri atas 6.207 unit rumah mewah, 25.652 unit rumah sederhana, dan 3.101 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 32 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 1.070 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Busungbiu** terdapat 11.505 unit rumah yang terdiri atas 1.232 unit rumah mewah, 8.846 unit rumah sederhana, dan 1.427 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 1 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 113 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Gerokgak** terdapat 22.601 unit rumah yang terdiri atas 3.198 unit rumah mewah, 13.668 unit rumah sederhana, dan 5.735 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 9 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 1.506 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Kubutambahan** terdapat 13.525 unit rumah yang terdiri atas 485 unit rumah mewah, 8.561 unit rumah sederhana, dan 4.479 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 8 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 648 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Tejakula** terdapat 15.229 unit rumah yang terdiri atas 743 unit rumah mewah, 11.334 unit rumah sederhana, dan 2.730 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 28 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 452 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Seririt** terdapat 20.395 unit rumah yang terdiri atas 3.093 unit rumah mewah, 14.787 unit rumah sederhana, dan 2.515 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 58 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 449 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan**

Sukasada terdapat 22.668 unit rumah yang terdiri atas 2.306 unit rumah mewah, 13.570 unit rumah sederhana, dan 2.003 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 132 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 408 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan sawan** terdapat 17.500 unit rumah yang terdiri atas 2.306 unit rumah mewah, 13.570 unit rumah sederhana, dan 1.712 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 28 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 452 unit merupakan rumah rawan bencana

Tabel 9
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2015

NO	NAMA KECAMATAN	BELUM/ TIDAK BEKERJA	MENGURUS RUMAH TANGGA	PELAJAR MAHASISWA	PENSIUNAN	PEGAWAI NEGERI SIPII	TNI	POLRI	PEDAGANG	PETANI /PEKEBUN	PETERNAK	NELAYAN	INDUSTRI	KONSTRUKSI
1	GEROKGAK	27,046	12,888	11,562	124	976	119	156	118	24,632	30	864	4	1
2	SERIRIT	30,730	10,042	11,353	757	1,295	298	282	1,085	12,570	169	308	15	25
3	BUSUNGBIU	14,466	3,503	7,587	222	733	54	106	106	18,433	16	1	5	25
4	BANJAR	22,725	8,999	11,779	357	1,162	151	155	187	19,273	5	174	4,001	10
5	SUKASADA	22,862	5,037	11,760	296	1,469	98	192	50	16,975	10	-	3	1
6	BULELENG	39,824	14,310	22,738	1,566	5,009	837	774	406	2,081	3	258	2	2
7	SAWAN	21,482	6,086	11,344	351	1,121	139	166	81	7,141	2	144	5	3
8	KUBUTAMBAHA	16,332	2,665	8,857	112	613	168	101	31	15,602	5	356	1	4
9	TEJAKULA	19,188	10,777	10,051	164	699	24	72	42	15,191	7	556	8	2
		214,655	74,307	107,031	3,949	13,077	1,888	2,004	2,106	131,898	247	2,661	4,044	73

NO	NAMA KECAMATAN	TRANSPORTASI	KARYAWAN SWASTA	KARYAWAN BUMN	KARYAWAN BUMD	KARYAWAN HONORER	BURUH HARIAN LEPAS	BURUH TANI PERKEBUNAN	BURUH NELAYAN PERIKANAN	BURUH PETERNAKAN	PEMBANTU RUMAH TANGGA	TUKANG CUKUR	TUKANG LISTRIK	TUKANG BATU
1	GEROKGAK	290	9,689	18	-	24	2,786	619	33	-	13	6	-	7
2	SERIRIT	595	12,090	41	19	215	8,666	4,162	200	41	175	11	12	113
3	BUSUNGBIU	153	6,159	17	5	83	393	2,184	7	5	27	4	-	7
4	BANJAR	175	9,836	27	4	89	3,734	3,695	4	4	32	1	2	26
5	SUKASADA	3	6,540	26	2	164	1,569	8,411	3	1	9	1	-	11
6	BULELENG	356	21,064	237	54	452	15,668	130	10	1	33	1	-	4
7	SAWAN	94	13,045	50	10	176	13,353	505	5	1	22	2	1	8
8	KUBUTAMBAHA	203	7,046	8	1	33	8,956	236	2	1	8	-	-	8
9	TEJAKULA	88	14,518	13	-	67	2,716	63	3	4	93	4	-	126
		1,957	99,987	437	95	1,303	57,841	20,005	267	58	412	30	15	310
NO	NAMA KECAMATAN	DOSEN	GURU	PILOT	PENGACARA	NOTARIS	ARSITEK	AKUNTAN	KONSULTAN	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	PSIKIATER PSIKOLOG
1	GEROKGAK	6	235	-	-	-	-	-	-	12	13	8	-	-
2	SERIRIT	13	544	-	2	2	1	3	3	27	31	36	5	1
3	BUSUNGBIU	9	262	-	1	-	2	-	1	4	11	16	1	-
4	BANJAR	9	190	-	4	2	-	-	2	11	16	19	1	-
5	SUKASADA	16	277	-	2	-	-	-	-	3	6	8	-	-
6	BULELENG	141	1,017	-	6	8	-	-	1	66	54	75	4	-
7	SAWAN	16	251	-	2	4	-	-	-	15	8	17	3	-
8	KUBUTAMBAHA	5	109	-	-	-	-	-	-	4	6	14	1	-
9	TEJAKULA	4	127	-	1	1	-	-	-	12	4	7	-	-
		219	3,012	-	18	17	3	3	7	154	149	200	15	1

NO	NAMA KECAMATAN	TRANSPORTASI	KARYAWAN SWASTA	KARYAWAN BUMN	KARYAWAN BUMD	KARYAWAN HONORER	BURUH HARIAN LEPAS	BURUH TANI PERKEBUNAN	BURUH NELAYAN PERIKANAN	BURUH PETERNAKAN	PEMBANTU RUMAH TANGGA	TUKANG CUKUR	TUKANG LISTRIK	TUKANG BATU
1	GEROKGAK	290	9,689	18	-	24	2,786	619	33	-	13	6	-	7
2	SERIRIT	595	12,090	41	19	215	8,666	4,162	200	41	175	11	12	113
3	BUSUNGBIU	153	6,159	17	5	83	393	2,184	7	5	27	4	-	7
4	BANJAR	175	9,836	27	4	89	3,734	3,695	4	4	32	1	2	26
5	SUKASADA	3	6,540	26	2	164	1,569	8,411	3	1	9	1	-	11
6	BULELENG	356	21,064	237	54	452	15,668	130	10	1	33	1	-	4
7	SAWAN	94	13,045	50	10	176	13,353	505	5	1	22	2	1	8
8	KUBUTAMBAHA	203	7,046	8	1	33	8,956	236	2	1	8	-	-	8
9	TEJAKULA	88	14,518	13	-	67	2,716	63	3	4	93	4	-	126
		1,957	99,987	437	95	1,303	57,841	20,005	267	58	412	30	15	310

NO	NAMA KECAMATAN	TUKANG_KAYU	TUKANG SOLSEPATU	TUKANG LAS PANDAI BESI	TUKANG JAHIT	TUKANG GIGI	PENATA RIAS	PENATA BUSANA	PENATA RAMBUT	MEKANIK	SENIMAN	TABIB	PARAJIN	PERANCANG BUSANA
1	GEROKGAK	18	-	7	25	1	-	-	-	16	-	1	2	-
2	SERIRIT	250	6	55	142	-	9	-	3	49	9	4	2	3
3	BUSUNGBIU	37	-	8	41	-	-	-	-	6	-	1	-	-
4	BANJAR	29	1	5	22	-	4	-	1	12	5	1	-	-
5	SUKASADA	7	-	1	13	-	-	1	-	2	-	-	2	-
6	BULELENG	-	-	3	129	-	-	-	1	15	2	-	1	-
7	SAWAN	17	-	13	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KUBUTAMBAHA	3	-	3	13	-	-	-	-	3	-	-	-	-
9	TEJAKULA	56	-	2	35	-	3	-	-	1	8	-	-	-
		417	7	97	445	1	16	1	5	104	24	7	7	3

NO	NAMA KECAMATAN	PENTERJEMAH	IMAM MESJID	PENDETA	PASTOR	WARTAWAN	USTADZ MUBALIGH	JURU MASAK	PROMOTOR ACARA	ANGGOTA DPR RI	ANGGOTA DPD	KEPALA DESA	BIARAWATI	WIRASWASTA
1	GEROKGAK	1	-	3	1	-	5	-	-	1	-	3	-	2,889
2	SERIRIT	2	-	12	-	1	-	6	-	1	-	17	1	3,573
3	BUSUNGBIU	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	9	-	2,593
4	BANJAR	-	-	5	-	2	-	5	-	-	1	3	1	3,635
5	SUKASADA	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	3	-	4,791
6	BULELENG	-	-	32	1	5	-	-	-	-	-	1	6	12,663
7	SAWAN	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3,263
8	KUBUTAMBAHAN	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	1	1,857
9	TEJAKULA	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	5	-	1,735
		3	-	66	2	11	6	18	-	3	1	129	9	36,999

NO	NAMA KECAMATAN	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO	PELAUT	PENELITI	SOPIR	PIALANG	PARANORMAL	PEDAGANG	PERANGKAT DESA	LAINNYA	JML PENDUDUK
1	GEROKGAK	-	2	4	2	186	-	-	1,397	28	3	96,875
2	SERIRIT	-	-	12	1	289	3	4	3,925	103	7	104,435
3	BUSUNGBIU	-	-	-	1	190	1	-	1,036	76	45	58,662
4	BANJAR	-	-	3	5	132	-	4	2,269	30	34	93,071
5	SUKASADA	-	-	1	-	80	-	-	1,503	7	12	82,235
6	BULELENG	-	-	5	-	499	2	1	5,534	3	99	146,198
7	SAWAN	-	-	1	-	398	1	3	3,309	18	40	82,748
8	KUBUTAMBAHAN	-	-	-	-	81	-	-	1,116	3	57	64,638
9	TEJAKULA	-	-	-	-	451	-	1	1,771	27	5	78,736
		-	2	26	9	2,306	7	13	21,860	295	302	807,598

Sumber data :Disdukcapil Kab. Buleleng.

3. KONDISI EKONOMI KABUPATEN BULELENG.

a. Potensi Unggulan Daerah.

Kabupaten Buleleng dengan berbagai potensinya mempunyai beberapa produk unggulan yaitu :

- Pertanian tanaman pangan, yaitu mangga, jeruk, anggur, durian, pisang, stroberry, wani ngumpen dan tamarillo.
- Perkebunan, yaitu kopi robusta.
- Peternakan, yaitu sapi Bali.
- Perikanan, terdiri dari ikan kerapu, ikan bandeng.
- Industri kecil/kerajinan, terdiri dari anyaman inovatif, anyaman bambu serta kerajinan kain tenun ikat (endek) Buleleng.

Produk unggulan Kabupaten Buleleng berkembang karena ditunjang oleh keunggulan alamiah dan keunggulan kompetitif. Keunggulan alamiah berupa kecocokan lahan dengan tanaman di atasnya dan kultur masyarakat Buleleng yang senang bekerja. Sedangkan keunggulan kompetitif perlu ditingkatkan dengan meningkatkan teknologi inovatif, efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, keberlanjutan dan ramah lingkungan, produksi bersih dari penggunaan bahan kimia yang tidak bisa ditoleransi oleh alam. Selain itu telah dilakukan namun masih perlu peningkatan berupa upaya-upaya perbaikan dan perluasan aspek pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

▪ Produk Unggulan Tanaman Pangan.

Produk hasil Tanaman pangan di Kabupaten Buleleng didominasi oleh hasil tanaman buah – buahan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Beberapa produk tanaman buah – buahan yang sudah diakui oleh pangsa pasar baik lokal maupun nasional diantaranya adalah anggur bali, anggur prabubestari, mangga arumanis, mangga legong (amlem sari), durian bestala, jeruk keprok tejakula, pisang hijau taiwan, buah naga merah, wani ngumpen, stroberi dan tamarillo. Variaetas Anggur Hitam yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Buleleng adalah Anggur Bali, dengan kulit

tipis dan rasanya yang masis segar sehingga cocok sebagai bahan olahan minuman. Anggur jenis ini banyak dibudidayakan di Desa Temukus, Desa Dencarik dan Desa Banjar di Kecamatan Banjar, Desa Banyupoh di Kecamatan Gerokgak dan beberapa wilayah di Kecamatan Seririt. Produktifitas \pm 20 ton /ha/th dengan masa panen 3 kali setahun kisaran Bulan Pebruari – Maret, Juni – Agustus dan Bulan Nopember.

▪ **Produk Unggulan Perkebunan.**

Tanaman kopi dibudidayakan dan berkembang dengan baik di dataran tinggi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng kecuali Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Buleleng yang wilayahnya berada di dataran rendah. Petani kopi di Kabupaten Buleleng sudah menguasai teknik budidaya kopi dengan teknik menyambung sehingga ketinggian pohon dan jumlah cabang dalam satu pohon bisa diatur. Dengan pengaturan ketinggian dan cabang, memungkinkan petik merah sehingga kualitas kopi terjamin. Areal pengembangan kopi robusta mencapai seluas 10.745 Ha dengan produksi sebanyak 2.106,71 ton. Pemasaran kopi menjangkau pasar lokal, nasional dan ekspor. Selain dipasarkan dalam bentuk bijian, di Buleleng sudah ada industri yang mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk. Pemasaran kopi bubuk menjangkau pasar lokal dan nasional.

▪ **Produk Unggulan Peternakan.**

Ternak sapi dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng. Dengan melibatkan kelompok-kelompok tani ternak khususnya di wilayah Kecamatan Gerokgak, Banjar, Tejakula, dan Kubutambahan yang merupakan penghasil ternak sapi potong yang cukup banyak di Kabupaten Buleleng. Populasi sapi potong di Kabupaten Buleleng mencapai 121.613 ekor. Pemasaran daging sapi sementara ini masih memenuhi pasar lokal Bali. Sedangkan ternak sapi selain dipasarkan di pasar lokal Bali, juga pasar nasional sampai ke Jakarta.

▪ **Produk Unggulan Perikanan.**

Produk unggulan perikanan terutama budidaya ikan bandeng, ikan kerapu, rumput laut dan mutiara yang dilakukan di Kecamatan Gerokgak. Pembenihan ini didukung oleh keberadaan Balai Besar Penelitian Budidaya Perikanan Laut Gondol. Produksi perikanan budidaya mencapai 280,3 ton kerapu, 22,9 ton bandeng, dengan luas budidaya 64,9 Ha atau 12,98 persen dari potensi budidaya yang seluas 500 Ha. Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut seluas 250 Ha dengan pemanfaatan baru mencapai 14,0 Ha (5,60 %) dengan hasil produksi sebesar 84,9 ton, masih tersisa peluang investasi seluas 236,0 Ha (94,4%). Potensi yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya mutiara seluas 250 Ha dan pemanfaatan baru mencapai seluas 130,0 Ha (52,0%), dengan hasil produksi mencapai 5 ton dan sisa peluang investasi seluas 120,0 Ha (48,0%) Pemasaran benih bandeng selain memenuhi pasar nasional juga pasar internasional. Pemasaran benih bandeng sangat fluktuatif. Pemasaran kerapu konsumsi menjangkau pasar nasional.

▪ **Produk Unggulan Industri.**

Produk industri yang dapat dikembangkan berupa industri rumahan kerajinan anyaman bambu yang terutama dikembangkan di Desa Sangket Kecamatan Sukasada, dan anyaman inovatif terutama dikembangkan di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada. Dengan bimbingan dan arahan instansi terkait kedua jenis produksi kerajinan itu selain telah memasuki pasar lokal, juga menjangkau pasar nasional dan pasar internasional. Namun demikian masih dirasa ada kekurangan karena produksi kerajinan inovatif Desa Ambengan yang mestinya sudah bisa memberi merk sendiri sampai saat ini belum memiliki merk sendiri. Hasil kerajinan ini diberi merk dan dipasarkan ke pasar internasional oleh pengusaha dari Denpasar dan Gianyar. Dengan adanya merk dan ciri khas daerah asal, diharapkan akan meningkatkan daya jual dan pada akhirnya akan mensejahterakan para perajinnya.

Kerajinan tenun ikat (endek) khas Buleleng, sebagai salah satu hasil industri kerajinan yang sangat potensial, dikembangkan dalam rangka menggali kembali kekayaan di bidang sandang. Tenun ikat Buleleng sampai saat ini memiliki 19 motif khas, dari motif yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda hingga motif modern yang mulai dikembangkan. Salah satu strategi untuk melestarikan, mengembangkan sekaligus memperkenalkan desain – desain endek atau tenun ikat khas Buleleng di mata dunia dilaksanakan melalui event Buleleng Endek Carnaval.

b. Tinjauan Perkembangan Ekonomi.

1. PDRB.

Kabupaten Buleleng memiliki luas seperempat bagian dari luas Pulau Bali secara keseluruhan. Dengan luas wilayah yang paling luas diantara seluruh kabupaten/kota di Bali, maka dapat dipastikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng juga melimpah. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng selain pembangunan infrasetruktur yang terus dibenahi. Tercatat PDRB Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 sebesar 25,49 triliun rupiah. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk Tahun 2014 mencapai 22,33 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 3,16 triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada Tahun 2015, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,39 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali.

Sementara potret perekonomian Kabupaten Buleleng tanpa melihat pengaruh perubahan harga, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB Tahun 2015 sebesar 18,82 triliun rupiah. Nilai ini juga mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17,74 triliun rupiah. Hal ini merupakan gambaran yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

Tabel 10
PDRB Kabupaten Buleleng, menurut lapangan usaha,
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan (jutaan rupiah)
Tahun 2014 – 2015

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2014	2015	2014	2015
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,962,772.75	5,827,841.72	3,852,901.95	4,047,026.08
2	Pertambangan dan penggalian	312,473.15	309,350.65	244,957.29	226,095.58
3	Industri pengolahan	1,312,046.64	1,523,192.24	1,045,296.50	1,124,680.82
4	Pengadaan listrik dan gas	21,185.68	28,270.31	23,815.09	24,050.79
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	30,316.16	33,362.67	29,017.74	29,612.60
6	Konstruksi	1,911,311.29	2,179,944.08	1,520,223.00	1,594,865.95
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	2,552,611.37	2,915,780.27	2,073,157.03	2,231,121.31
8	Transportasi dan pergudangan	299,768.45	318,169.35	244,231.42	248,788.00
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,976,744.14	4,568,390.83	2,685,427.10	2,850,331.99
10	Informasi dan komunikasi	1,156,206.32	1,329,434.19	1,107,804.07	1,216,479.65
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,033,479.65	1,112,633.96	796,663.86	836,819.39
12	Real Estate	1,155,815.06	1,219,217.11	983,398.40	1,013,232.39
13	Jasa Perusahaan	140,228.18	161,312.55	117,960.08	126,166.48
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,196,011.12	1,302,672.06	1,103,406.64	1,175,870.56
15	Jasa pendidikan	1,480,762.15	1,705,187.86	1,226,308.70	1,337,772.90
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	444,753.21	512,723.54	378,005.37	410,224.98
	Jasa lainnya	388,651.16	444,314.11	308,258.66	331,702.85
	PDRB	22,339,136.48	25,491,797.49	17,740,832.90	38,824,842.31

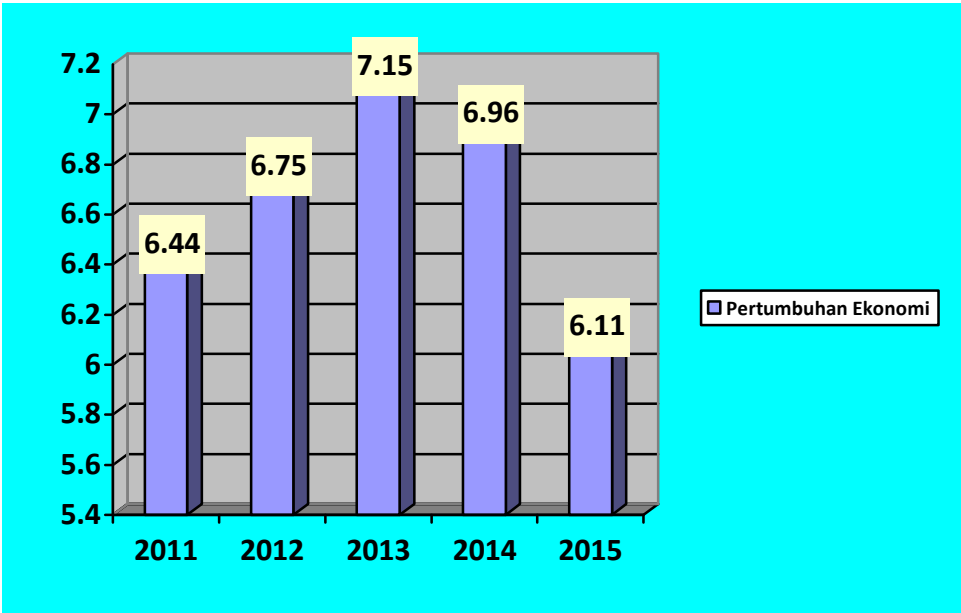
Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

2. Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sepanjang Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami fluktuasi. Peningkatan laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng terjadi selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013. Hal ini diduga karena digulirkannya wacana pendirian Bandar Udara yang akan dibangun di wilayah Kabupaten Buleleng. Salah satu efek domino dari adanya wacana tersebut adalah terdongkraknya berbagai aktivitas ekonomi terutama percepatan investasi dan pembangunan properti di Kabupaten Buleleng. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan kategori konstruksi yang pada Tahun 2012 meningkat tajam sebesar 19,62 persen. Kategori lain yang juga meningkat cukup tajam pada tahun tersebut kategori pengadaan listrik, gas dan air bersih. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya percepatan pembangunan property yang sedang berjalan pada tahun tersebut karena adanya peningkatan permintaan pasokan listrik dan air. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan listrik yaitu sebesar 12.429 pelanggan.

Gambar 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng
Tahun 2011 – 2015 (persen)



Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten Buleleng terjadi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 7,15 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh jasa keuangan dan asuransi 14,35 persen, jasa pendidikan 14,62 persen serta jasa kesehatan sebesar 13,65 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada kategori jasa dan keuangan didorong oleh meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan sebagai dampak dari diturunkannya BI Rate menjadi 5,75 pada Tahun 2012. Disisi lain dorongan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng yang berasal dari kategori pendidikan disebabkan oleh pembukaan fakultas baru di salah satu perguruan tinggi negeri di Kabupaten Buleleng serta berbagai fasilitas pendidikan lainnya semakin menambah kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di wilayah Kabupaten Buleleng. Dari kategori kesehatan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang memiliki KTP Provinsi Bali dalam bentuk Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Pada Tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mencapai 6,96 persen. Pada tahun ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki Tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan hingga mencapai 6,11 persen. Namun perlu diapresiasi bahwa Kabupaten Buleleng mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap diatas 6 persen. Bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang juga mengalami perlambatan hingga mencapai 6,04 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 didorong oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 9,81 persen. Kemudian diikuti oleh jasa pendidikan yang mencapai sebesar 9,09 persen. Sedangkan kategori lainnya memiliki pertumbuhan dibawah 9 persen pada Tahun 2015

Tabel 11

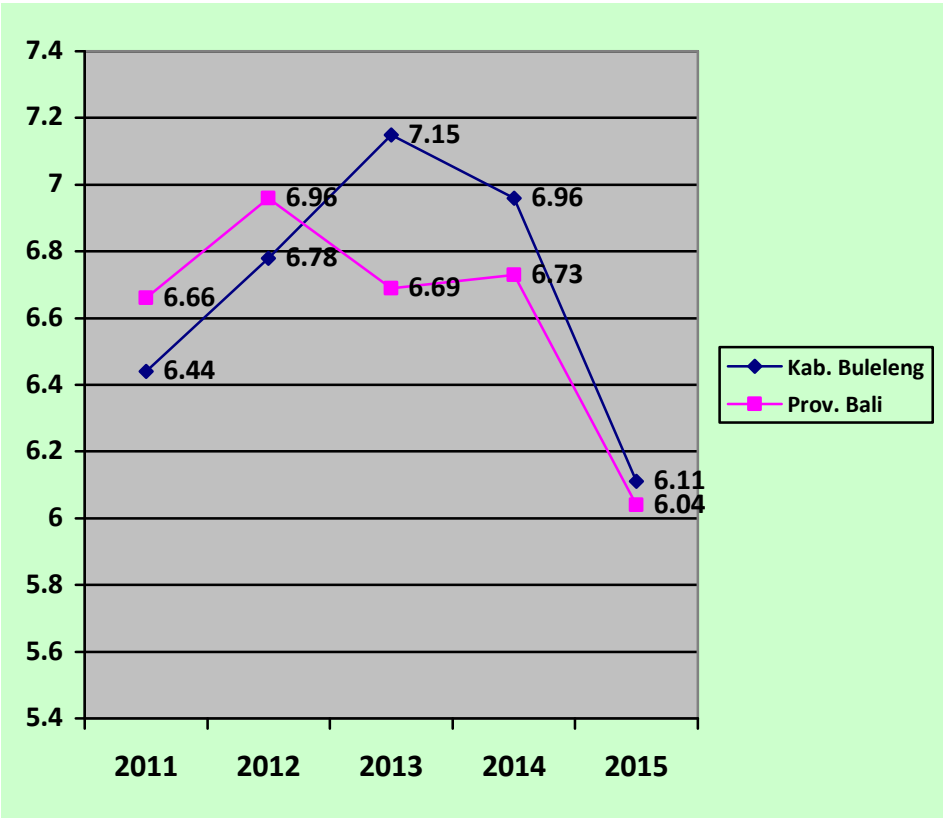
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Buleleng
Menurut Lapangan Usaha, 2012 – 2015 (persen)

No	Lapangan Usaha	Harga Konstan			
		2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.67	2.85	4.90	5.04
2	Pertambangan dan penggalian	16.05	8.20	(0.23)	(7.70)
3	Industri pengolahan	6.43	9.46	9.26	7.59
4	Pengadaan listrik dan gas	11.31	8.97	2.70	0.99
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	3.34	6.34	7.27	2.05
6	Konstruksi	19.62	6.77	1.75	4.91
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	6.20	9.89	7.29	7.62
8	Transportasi dan pergudangan	5.53	7.59	9.33	1.87
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7.36	7.91	6.78	6.14
10	Informasi dan komunikasi	8.35	6.57	7.11	9.81
11	Jasa keuangan dan asuransi	9.27	14.35	9.66	5.04
12	Real Estate	6.61	7.77	8.94	3.03
13	Jasa Perusahaan	2.27	10.05	7.63	6.96
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.26	0.67	10.89	6.57
15	Jasa pendidikan	0.49	14.62	10.76	9.09
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6.24	13.65	12.56	8.52
	Jasa lainnya	5.14	4.93	7.84	7.61
	PDRB	6.78	7.15	6.69	6.11

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Bahkan terdapat satu kategori yang mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2015 yaitu pertambangan dan penggalian dengan kontraksi sebesar 7,70 persen. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan larangan terhadap usaha – usaha penggalian pasir liar yang tidak memiliki ijin usaha.

Gambar 6
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali, 2011 – 2015
(persen)



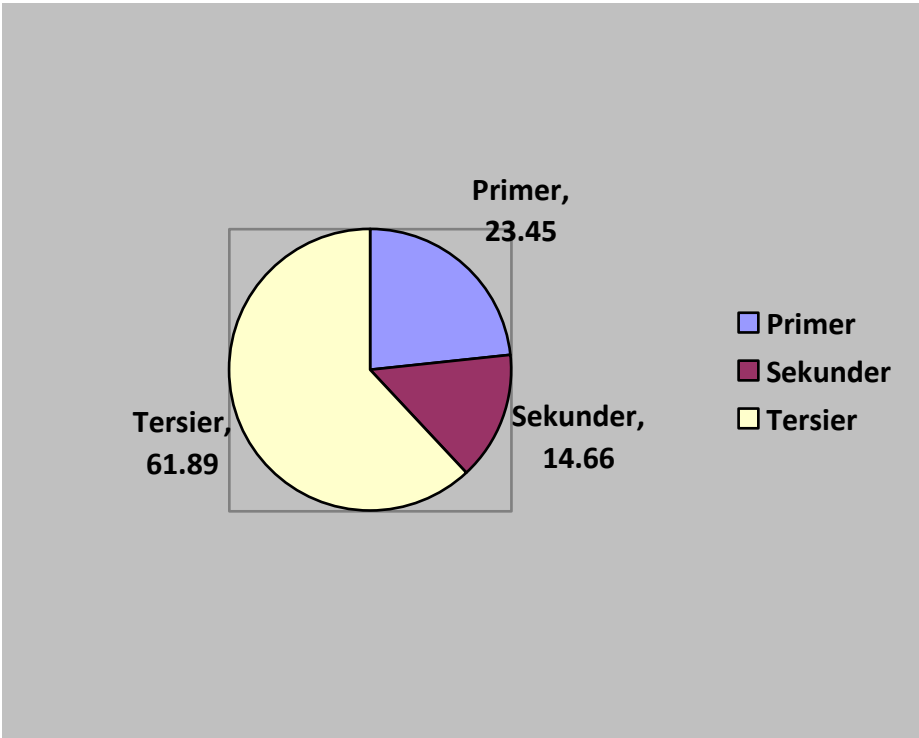
Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

3. Struktur Ekonomi.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat potensi sektoral suatu wilayah adalah struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing – masing sector menurut lapangan usaha perekonomian. Struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan masing – masing kategori dalam pembangunan ekonomi sehingga dapat dipetakan potensi dari wialayah tersebut. Salah satu indicator yang sering dipergunakan untuk mengamati struktur perekonomian adalah distribusi presentase dari nilai tambah bruto lapangan usaha.

Gambar 7

Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier
Dalam PDRB Kabupaten Buleleng, 2015 (persen)



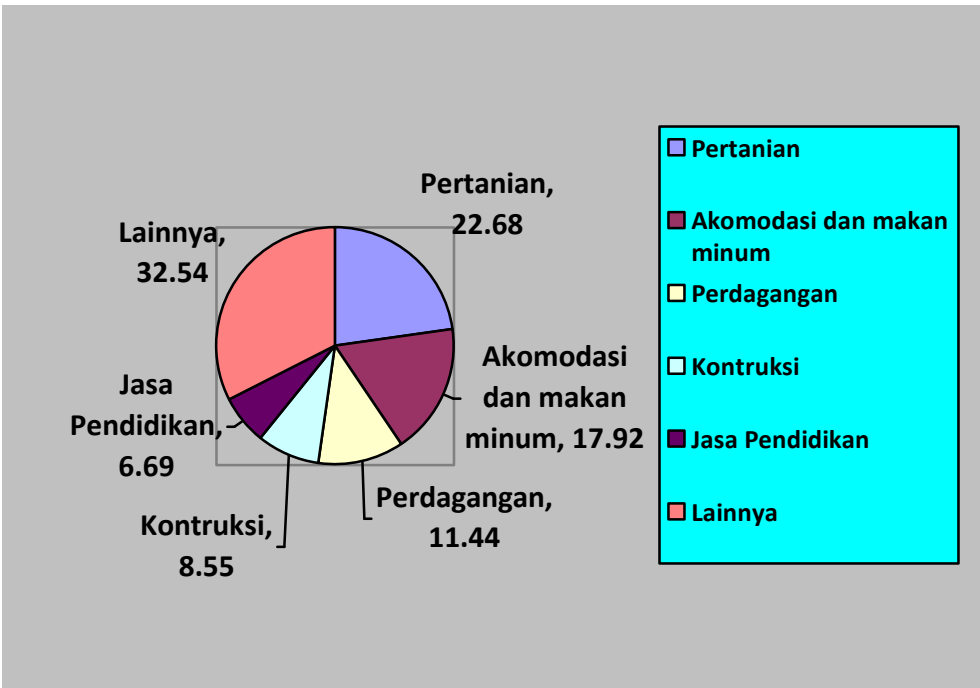
Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa peranan sector tersier masih mendominasi di Kabupaten Buleleng dengan total capaian share pada Tahun 2015 sebesar 61,16 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan angka capaian pada Tahun 2014 yang mencapai 61,89 persen. Hal ini terjadi karena adanya penguatan pada sector primer yang didominasi oleh kategori pertanian sebagai akibat suksesnya Upaya Khusus (UPSUS) Pertanian yang dilaksanakan Tahun 2015. Sehingga pada Tahun 2015 sektor primer memberikan share sebesar 24,08 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 23,45 persen.

Secara lebih rinci dalam kategori pembentuk PDRB, Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada Tahun 2015, kategori pertanian

masih mendominasi perekonomian Kabupaten Buleleng dengan share sebesar 22,86 persen. Di posisi berikutnya adalah kategori pariwisata yang diwakili oleh kategori akomodasi dan penyediaan makan minum yang memberikan kontribusi sebesar 17,92 persen. Kategori lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Buleleng adalah perdagangan besar dan eceran. Tahun 2015 kontribusi perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Buleleng sebesar 11,44 persen. Kemudian berikutnya kategori kontruksi dan jasa pendidikan yang masing – masing memberikan kontribusi sebesar 8,55 persen dan 6,69 persen.

Gambar 8
Lima Kontributor Terbesar
PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2015 (persen)

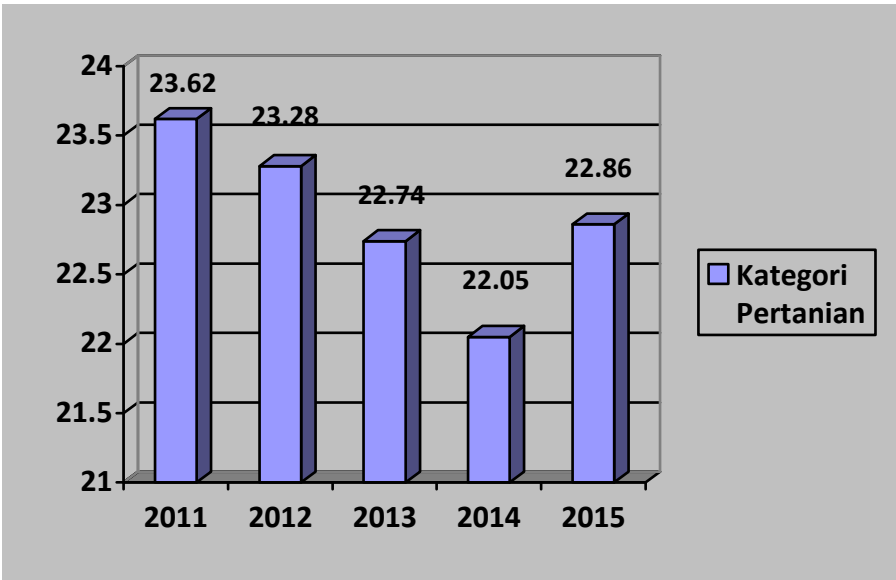


Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Tidak bisa dipungkiri bahwa kategori pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Buleleng. Walaupun mengalami kecendrungan penurunan, kategori pertanian Tahun 2015 mampu meningkatkan share terhadap perekonomian di Kabupaten

Buleleng dari total share 22,05 persen menjadi 22,86 persen. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat bahwa potensi Kabupaten Buleleng masih di dominasi oleh sector pertanian. Dengan total luas lahan sawah sebesar 10.780 Ha, Kabupaten Buleleng masih mampu menjaga ketahanan pangannya bahkan menjadi penyuplai beras kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Tabanan.

Gambar 9
Kontribusi Kategori Pertanian
Dalam Pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng, 2015



Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Atas dasar harga Berlaku pada Tahun 2015 tercatat sebesar 34,78 juta rupiah. Angka ini masih dibawah PDRB Perkapita Provinsi Bali yang mencapai 42,66 juta rupiah. Namun disisi lain angka ini merupakan peningkatan sebesar 4,67 juta rupiah atau 14,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selama Tahun 2011 – 2015 rata – rata pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 31 juta rupiah.

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, maka PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Tahun 2015 sebesar 29,13 juta rupiah. Laju

peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai 5,47 persen masih jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng yang hanya mencapao 0,6 persen.

Tabel 12
Indikator Agregatif PDRB Kabupaten Buleleng
2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PDRB Harga Berlaku (Miliar Rp)	15.190,23	16.927,30	19.144,31	22.339,14	25.491,80
2	PDRB Harga Konstan (Miliar Rp)	14.497,37	15.480,21	16.587,19	17.740,83	18.824,84
3	Jumlah penduduk pertengahan tahun (000 org)	630,3	634,3	638,3	642,3	646,2
4	PDRB perkapita harga berlaku (Juta Rp)	24,10	26,69	29,99	34,78	39,46
5	PDRB perkapita harga konstan (Juta Rp)	23,00	24,41	25,99	27,62	29,13

Sumber data : Tinjauan Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali maka nilai PDRB perkapita Kabupaten Buleleng berada di posisi kelima yaitu sebesar 39,45 juta rupiah. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan empat kabupaten/kota lain di Bali yaitu Kabupaten Badung (66,97 juta rupiah), Kota Denpasar (43,68 juta rupiah) Kabupaten Gianyar (40,50 juta rupiah) dan Kabupaten Tabanan (39,47 juta rupiah). Hal ini disebabkan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng lebih besar dibandingkan jumlah penduduk keempat kabupaten/kota diatas.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2017 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA
KARANA"**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1) Mandiri, diukur dengan:

- a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berbasis kinerja.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good and Clean Governance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
- c. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- d. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah.
- e. Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
- f. Terwujudnya pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam yang unik, serta terbangunya sinergitas dengan sektor pertanian.

2) Sejahtera, diukur dengan :

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh:
 - 1. Tingkat Pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan terendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan.
 - 2. Tingkat Kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan.
 - 3. Kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.
- b. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
- c. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan kesempatan berusaha).

- d. Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
- e. Tersedianya jaringan Infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian perdesaan.

3) Damai, diukur dengan:

- a. Teraktualisasinya keragaman budaya lokal.
- b. Terjaminnya kebebasan beribadah.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan supremasi hukum.

4) Lestari, diukur dengan:

- a. Terkelolanya lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
- b. Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya Bali sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal.
- d. Terwujudnya penggunaan ruang dan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas.
- 2) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral.

- 4) Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan.
- 5) Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat.
- 6) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
- 7) Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development).

3. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah.
- 3) Meningkatkan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan produksi dan daya saing produk unggulan daerah.
- 5) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
- 7) Lestarinya kebudayaan Bali yang adiluhung.
- 8) Mewujudkan keadilan di semua bidang pembangunan, dan
- 9) Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan.

4. Sasaran.

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
- 2) Meningkatnya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.
- 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat.
- 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah.
- 5) Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah di pasaran.

- 6) Terwujudnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis unggulan daerah.
- 7) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- 8) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 9) Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.
- 10) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 11) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.
- 12) Tumbuhnya rasa memiliki dikalangan pemangku kepentingan.
- 13) Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.
- 14) Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang adiluhung.
- 15) Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya Bali.
- 16) Tegaknya supremasi hukum, ketentraman, dan keadilan disemua aspek kehidupan.
- 17) Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.
- 18) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan.
- 19) Terjaganya kualitas sumber daya alam.
- 20) Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- 21) Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH.

1. Strategi Pembangunan.

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dicanangkan, ditempuh melalui 6 (enam) strategi umum yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam strategi khusus yang bersifat operasional. Keenam strategi umum dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Strategi Percepatan Reformasi Pemerintahan.

Strategi ini mencakup upaya perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih dinamis dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman,

ditunjang oleh sikap mental dan perilaku aparatur pemerintah yang jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja tinggi, santun, dan berbudaya.

2) Strategi Pemberdayaan SDM.

Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar memiliki daya saing dalam kehidupan global dengan tetap menjunjung nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koodinasi dan keterbukaan.

3) Strategi Partisipatif

Penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat mampu berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.

4) Strategi Pemerataan.

Menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara manusiawi dan berkeadilan.

5) Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sinergi antar sector.

Mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam mewujudkan Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari.

6) Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur perdesaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan bidang pembangunan lainnya dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Strategi umum di atas dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa strategi yang sifatnya lebih operasional sejalan dengan tujuan dan sasaran masing-masing misi, sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkembangkan perekonomian berbasis masyarakat Meningkatkan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi.
- 2) Pemetaan potensi dan promosi investasi daerah.
- 3) Peningkatan penyerapan tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah.
- 5) Meningkatkan penanganan panen dan pasca produksi dalam rangka peningkatan daya saing.
- 6) Pemetaan dan pengembangan struktur perekonomian yang berbasis unggulan daerah.
- 7) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan disemua jenjang.
- 8) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa.
- 9) Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.
- 10) Penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan jujur.
- 11) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.
- 12) Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.
- 13) Meningkatkan penggalian, pengembangan dan pelestarian kebudayaan Bali yang adiluhung.
- 14) Meningkatkan penggalian, pengembangan dan pelestarian kesenian berbasis budaya Bali.
- 15) Meningkatkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- 16) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
- 17) Pangerusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
- 18) Pengembangan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan.
- 19) Peningkatan kualitas penanganan bencana.
- 20) Pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

2. Arah Kebijakan.

Kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditempuh selama kurun waktu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan zonasi pemanfaatan kawasan sesuai potensinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas input produksi baik dengan dukungan penelitian maupun penerapan Iptek.
- 3) Pemetaan potensi dan zonasi kawasan pertanian untuk mendorong produksi skala ekonomi, kontinuitas produksi dan mengefektifkan pembinaan peningkatan mutu produk.
- 4) Mendorong terbentuknya kawasan pertanian organik yang terstandarisasi dan tersertifikasi sehingga dapat bersaing dalam segmen pasar premium.
- 5) Memperkuat dan memberdayakan petani, nelayan, petambak, pedagang dan pengrajin/pelaku industri kreatif.
- 6) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) sektor pertanian, koperasi, perdagangan, UMKM dan pariwisata.
- 7) Meningkatkan dan rehabilitasi infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi.
- 8) Meningkatkan kondisi jalan di perdesaan, termasuk jalan usaha tani.
- 9) Menjamin akses perekonomian masyarakat.
- 10) Menyediakan pelayanan dan akses air bersih dan listrik dengan harga terjangkau
- 11) Pengembangan sarana prasarana pemasaran produk pertanian, industri kreatif/kerajinan/UKM.
- 12) Penyusunan profil investasi daerah.
- 13) Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri.
- 14) Mewujudkan proses perijinan yang cepat, mudah dan tidak berbeaya tinggi.
- 15) Menjamin keamanan dan ketertiban berinvestasi.

- 16) Menyediakan pelayanan kepada publik secara terpadu.
- 17) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja agar mempunyai daya saing.
- 18) Pendidikan dan latihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah dalam mendukung inovasi dan kreativitas.
- 19) Meningkatkan investasi untuk terciptanya lapangan kerja.
- 20) Pemetaan potensi produk unggulan daerah yang mempunyai daya saing dan layak jual.
- 21) Meningkatkan produksi dan kualitas produk unggulan daerah.
- 22) Meningkatkan kualitas dan kemasan produk olahan agar mempunyai daya tarik dan daya saing.
- 23) Meningkatkan sentuhan Iptek dan inovasi terhadap produk-produk pertanian maupun industri kreatif/kerajinan/UKM.
- 24) Revitalisasi pasar tradisional melalui peningkatan kenyamanan, kemampuan bersaing, penguatan permodalan, dsb.
- 25) Mengembangkan sektor-sektor/lapangan usaha yang basis dan memberikan kontribusi tinggi dalam membentuk struktur perekonomian daerah.
- 26) Mengembangkan sektor-sektor/lapangan usaha yang pertumbuhannya tinggi dan mempunyai keunggulan komparatif.
- 27) Mendorong perkembangan kawasan-kawasan ekonomi penyangga, khususnya pusat-pusat ekonomi di tingkat kecamatan.
- 28) Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan tahun yang merata dan bermutu.
- 29) Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik
- 30) Meningkatkan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah yang berkualitas.
- 31) Meningkatkan kualitas Pendidikan Luar Sekolah.
- 32) Peningkatan akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan.
- 33) Pemantapan sekolah nasional bertaraf internasional.
- 34) Peningkatan prestasi olahraga.

- 35) Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 36) Mendekatkan pelayanan paripurna dengan masyarakat di seluruh pelosok wilayah.
- 37) Peningkatan kualifikasi RSUD.
- 38) Peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal.
- 39) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
- 40) Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita.
- 41) Meningkatkan disiplin dan waskat bagi Aparatur di lingkungan Pemkab Buleleng.
- 42) Meningkatkan kualitas Aparatur Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 43) Mengembangkan dan menata sistem kepegawaian daerah sesuai dengan kebutuhan struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 44) Penerapan sistem rekrutmen dan pengembangan karier PNS secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based).
- 45) Meningkatkan prosedur pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
- 46) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan standar pelayanan minimum yang pelaksanaannya dapat diakses oleh masyarakat.
- 47) Meningkatkan dan menata prosedur kerja, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan.
- 48) Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi dan keterbukaan.
- 49) Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengendalian pembangunan.

- 50) Pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung.
- 51) Melestarikan kesenian-kesenian khas Buleleng.
- 52) Menumbuhkembangkan suasana kebebasan berkreasi dibidang seni dan budaya.
- 53) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan.
- 54) Memberikan insentif kepada kegiatan seni dan budaya.
- 55) Mengembangkan budaya dan kesadaran hukum dikalangan aparat dan masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hukum.
- 56) Menciptakan dan mengembangkan kondisi sosial budaya yang kondusif bagi tumbuhkembangnya kesadaran HAM masyarakat.
- 57) Meningkatkan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (prolegda).
- 58) Sosialisasi produk hukum daerah pada stakeholders dan masyarakat luas.
- 59) Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah social.
- 60) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah sosial/masyarakat miskin.
- 61) Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap penyandang masalah social.
- 62) Perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik, terutama jalan, jaringan air bersih dan listrik di perdesaan.
- 63) Pengendalian pertumbuhan penduduk.
- 64) Pelembagaan pangarusutamaan gender dan anak.
- 65) Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan.
- 66) Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam berbagai aktivitas pembangunan.

- 67) Optimalisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lahan kritis, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian hutan.
- 68) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian hutan dan SDA lainnya.
- 69) Melakukan konservasi sumber mata air.
- 70) Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable), termasuk optimalisasi Ruang Terbuka Hijau.
- 71) Memberikan insentif kepada kelompok maupun orang perorangan yang berperan aktif/berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup.
- 72) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanganan bencana dan pasca bencana.
- 73) Relokasi penduduk pesisir yang rawan terjadi bencana.
- 74) Menetapkan jalur dan ruang evakuasi bagi penduduk rawan terkena bencana.
- 75) Pengembangan kajian dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan.

C. PRIORITAS DAERAH.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2012-2017, dicanangkan 12 Agenda Prioritas atau Prioritas Agenda Strategis (12 PAS) sebagai berikut :

1. Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah.

Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah menjadi prioritas dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah serta mewujudkan *Good Governance* dalam mengelola potensi serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

2. Penanggulangan Kemiskinan.

Dinamis dan kompleksnya permasalahan kemiskinan sehingga dalam penanganannya memerlukan integrasi berbagai program kegiatan dan

lintas sektoral. Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang harus ditangani secara berkesinambungan dan sistemik melalui berbagai urusan dengan program dan kegiatan yang mampu mengentaskan kondisi miskinnya atau sifatnya pengamanan terhadap penderitaan keluarga miskin agar jangan terjerumus kedalam kondisi yang lebih terpuruk.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.

Pembangunan urusan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karenanya, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan menjadi agenda prioritas karena permasalahan yang dihadapi adalah belum meratanya masyarakat usia belajar dapat mengakses kesempatan belajar pada pendidikan formal maupun non formal, sehingga Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum mencapai seratus persen, demikian juga kualitas SDM-nya masih perlu peningkatan. Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, secara simultan dilakukan peningkatan persentase kelulusan siswa serta kualitas lulusan, sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun Bangsa dan Negara, serta mampu bersaing merebut pasar kerja baik dalam tataran regional, nasional maupun internasional.

4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan dan peningkatan IPM. Kualitas kesehatan masyarakat yang indikasinya tercermin melalui peningkatan umur harapan hidup merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan seluruh pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan lintas urusan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai dan harga hidup sehat, maka pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis

yang berkualitas dengan pelayanan prima. Untuk itu pembangunan kesehatan masih perlu ditingkatkan dan menjadi prioritas pembangunan.

5. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja.

Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja, pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibandingkan kemampuan penciptaan kesempatan/perluasan lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja untuk menciptakan kesempatan kerja baru secara mandiri masih kurang merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah bersama *stakeholders* lainnya yang harus ditangani secara serius, sistematis dan terarah. Sehubungan dengan itu, maka agenda Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja menjadi prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Agenda ini searah dengan agenda Perbaikan iklim investasi. Investasi yang semakin berkembang dan meningkat, akan berdampak pada tumbuhnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

6. Pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah yang indikatornya tercermin dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan sejauh mana peningkatan produktivitas sektoral memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Mencermati kondisi dan potensi ekonomi Buleleng yang berbasis pada pertanian dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan perdesaan, maka pembangunan pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan), industri kecil dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan perekonomian Buleleng menjadi domain agenda prioritas pembangunan ekonomi. Bangkit dan berkembangnya kegiatan pertanian di perdesaan akan mampu meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan petani yang berdampak positif terhadap

penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya relatif cukup besar di sektor lapangan usaha pertanian tersebut.

7. Pembangunan Infrastruktur.

Keberhasilan pembangunan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dan mantap. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna mengakselerasi pembangunan daerah dalam segala aspek dimaksud.

8. Perbaikan Iklim Investasi.

Perbaikan iklim investasi menjadi agenda prioritas sejalan dengan perkembangan kependudukan, khususnya ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan usaha/lapangan kerja dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan investasi didorong melalui upaya-upaya berkesinambungan menyangkut penyempurnaan pelayanan perijinan, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, promosi peluang investasi, dan menggerakkan sektor riil. Peningkatan investasi diharapkan mampu semakin memperkuat keandirian keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban.

Agenda Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban menjadi prioritas pembangunan dalam upaya menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum/supremasi hukum serta menghargai hak azasi manusia. Demikian juga ketentraman dan ketertiban dimaksudkan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi investor dalam berinvestasi.

10. Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan.

Agenda Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi prioritas sejalan dengan Bali sebagai daerah tujuan wisata budaya. Dengan adanya agenda prioritas ini, maka akan digali, diidentifikasi dan dikembangkan potensi budaya daerah, serta dilestarikannya kebudayaan dan kesenian daerah yang khas dan adiluhung.

11. Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana.

Agenda Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana menjadi prioritas sehubungan dengan wilayah Kabupaten Buleleng yang rentan/rawan bencana. Dengan meningkatnya kualitas penanganan bencana diharapkan segala kemungkinan bencana yang akan terjadi dapat diantisipasi dan dimitigasi.

12. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan.

Tidak bisa dihindari, peningkatan pembangunan akan memberikan tekanan terhadap lingkungan. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian hasil-hasil pembangunan membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas pembangunan agar kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Penjabaran lebih lanjut 12 Prioritas Agenda Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Penataan Birokrasi dan kemandirian aparatur pemerintahan meliputi :
 - a. Penerapan sistem rekrutmen dan perkembangan karier PNS secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (*merit based*).
 - b. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
 - c. Memperbaiki kesejahteraan pegawai sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.
 - d. Melakukan pengawasan kinerja, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin serta hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
 - e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.
- 2) Penanggulangan kemiskinan, meliputi :

- a. Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan sebagai pendukung program PNPM-Mandiri.
 - b. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan (community based monitoring).
 - c. Intensifikasi pelaksanaan program-program berlapis untuk rakyat miskin.
- 3) Perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik, terutama jalan di perdesaan, air bersih dan jaringan irigasi.
- a. Peningkatan peran Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan meliputi :
 - c. Pemetaan minat dan bakat siswa di masing-masing jenjang sekolah.
 - d. Melakukan pengkajian kebutuhan kualifikasi SDM/tenaga kerja saat ini dan akan datang.
 - e. Perbaikan secara mendasar kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas.
 - f. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran.
 - g. Pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan pada APBD secara optimal untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat secara adil.
 - h. Penyempurnaan data base guru, pemetaan potensi guru, dan pemerataan sebaran guru di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.
 - i. Melanjutkan upaya perbaikan penghasilan guru.
 - j. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
- 4) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan, terdiri dari :
- a. Mendekatkan pelayanan paripurna dengan masyarakat ke seluruh pelosok wilayah.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas, Pustu dan Polindes.

- c. Membangun 2 (dua) rumah sakit tanpa kelas di wilayah Timur dan Barat.
 - d. Meningkatkan kualifikasi RSUD menjadi rumah sakit tipe A sehingga bisa menjadi rumah sakit pendidikan.
 - e. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat Bali Mandara (JKBM) dan program jaminan kesehatan lainnya.
 - f. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit menular lainnya.
 - g. Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita.
 - h. Penguatan program keluarga berencana.
 - i. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga medis dan paramedis.
- 5) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja, yang meliputi:
- a. Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya.
 - b. Penyiapan tenaga kerja terdidik dan terampil untuk bekerja di luar negeri.
 - c. Perbaikan iklim investasi.
 - d. Penyusunan profil investasi.
 - e. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik.
 - f. Revitalisasi pasar tradisional melalui peningkatan kenyamanan, kemampuan bersaing, penguatan permodalan, dsb.
 - g. Memperluas permintaan dan meningkatkan kualitas produk-produk domestik.
 - h. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif.
 - i. Pemetaan potensi UKM, pengembangan potensi secara terarah dan terukur sehingga menghasilkan produk berdaya saing tinggi dan layak jual.
 - j. Mendorong perkembangan kawasan-kawasan ekonomi penyangga, khususnya pusat-pusat ekonomi di tingkat kecamatan.

- k. Penciptaan dan mengembangkan pendidikan untuk menumbuhkan wirausaha (entrepreneur) baru di tingkat paling bawah dan menengah; serta mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat/pengusaha dalam menciptakan dan menginovasi produk sehingga mampu bersaing di pasaran yang lebih luas dalam iklim persaingan yang sehat, dan
 - l. Mendorong pengembangan pariwisata melalui strategi keunikan dan berbasis pertanian.
- 6) Pembangunan ekonomi yang meliputi :
- a. Perbaikan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi.
 - b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan/Kawasan yang di dalamnya mewadahi skala prioritas dalam pengembangannya.
 - c. Membentuk regulasi untuk mensinergikan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.
 - d. Meningkatkan kualitas input produksi baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, serta penyuluhan sehingga dapat diterapkan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga.
 - e. Menerapkan zonasi pemanfaatan kawasan pesisir, pantai dan laut untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata, perikanan dan kelautan.
 - f. Menerapkan zonasi kawasan pertanian untuk mendorong produksi skala ekonomi, menjamin kontinuitas produksi, dan mengefektifkan pembinaan dalam peningkatan mutu produk.
 - g. Mendorong terbentuknya kawasan pertanian organik yang terstandarisasi dan tersertifikasi sehingga dapat bersaing dalam segmen pasar premium. Contoh: beras sudaji, beras merah Banyuwatis, dll.
 - h. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir (pasca panen dan pemasaran) pertanian.
 - i. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan petambak.
 - j. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) sektor pertanian, koperasi, perdagangan, industri kreatif/UMKM dan pariwisata, serta

- k. Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar yang akurat dan *up to date* kepada petani dan nelayan.
- 7) Pembangunan infrastruktur meliputi :
- a. Peningkatan kondisi jalan kabupaten dan jalan di perdesaan, termasuk jalan usaha tani.
 - b. Peningkatan akses prasarana perhubungan laut dan udara.
 - c. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau.
 - d. Terjaminnya akses prasarana penunjang perekonomian masyarakat.
 - e. Perbaikan dan pembangunan sarana irigasi pertanian.
- 8) Perbaikan iklim investasi yang terdiri dari :
- a. Proses perijinan yang cepat, mudah dan tidak berbeaya tinggi.
 - b. Terjaminnya keamanan dan ketertiban berinvestasi.
 - c. Ketersedian pelayanan kepada publik secara terpadu.
- 9) Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban meliputi :
- a. Perbaikan law enforcement berkaitan dengan produk hukum daerah.
 - b. Pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Perbaikan produk hukum daerah untuk mendukung pembangunan daerah.
 - d. Sosialisasi produk hukum daerah pada stakeholder dan masyarakat luas.
- 10) Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, yang meliputi :
- a. Pengembangan dan konservasi keunikan budaya, seperti Gedong Kertia, Rumah Orang Tua Bung Karno, dan kondisi lingkungan yang kondusif untuk menunjang pembangunan pariwisata.
 - b. Melestarikan kesenian-kesenian khas Buleleng, seperti Gong Kebyar, Topeng, Joged Bumbung dan sebagainya.
 - c. Menjaga suasana kebebasan berkreasi dibidang seni dan budaya.
 - d. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan, dan
 - e. Memberikan insentif kepada kegiatan seni dan budaya.
- 11) Peningkatan kualitas penanganan bencana alam meliputi :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana tanah longsor berupa escavator dan pendukung lainnya.
 - b. Menambah ketersediaan hidran dipemukiman padat penduduk yang tidak terjangkau mobil pemadam kebakaran.
 - c. Tersedianya jalur atau ruang evakuasi penduduk di lokasi rawan bencana.
- 12) Peningkatan kualitas dan pelestarian fungsi lingkungan yang meliputi :
- a. Optimalisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lahan kritis, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian hutan.
 - b. Melakukan konservasi sumber mata air.
 - c. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).
 - d. Memberdayakan keseluruhan komponen masyarakat maupun dunia usaha untuk secara lebih aktif menjaga lingkungan.
 - e. Memberikan insentif kepada kelompok maupun orang perorangan yang berperan aktif/berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup, dan
 - f. Menyempurnakan sistem pengelolaan sampah dengan penguatan melalui pembuatan peraturan daerah.

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.

1. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib.

Tabel 13
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib.

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Langsung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			Prosentase Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Pendidikan	764.311.688.937,18	16.846.048.448,90	112.221.578.306,11	66.038.990.887,00	678.233.793.411,00	26.509.855.561,07	120.795.348.321,55	62.104.483.584,44	107,33	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Urusan Kesehatan.	48,986,815,500.00	1,553,780,000.00	57,494,732,731.82.00	63,398,640,053.67.00	48.881.452.509,00	1.320.215.000,00	45.178.281.112,98	46.936.948.752,25	83,02	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
	35,046,412,000.00	1,017,682,000.00	125,519,125,163.00	57,484,804,359.49	34.888.834.033,00	10.800.000,00	122.886.743.057,12	55.027.050.666,27	97,14	RSUD Kabupaten Buleleng
Urusan lingkungan hidup	2,704,811,000.00	267.745,000.00	3,295,541,703.89	1,273,590,700.00	2.684.132.237,00	262.895.000,00	3.075.571.162,00	1.212.270.300,00	95,94	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
	5,995,939,000.00	1,156,368,000.00	14,814,173,000.00	13,637,515,000.00	5.917.319.327,00	1.151.469.000,00	12.340.320.324,00	12.158.975.500,00	88,66	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng
Urusan Pekerjaan Umum	11.583.669.000,00	1.082.480.000,00	9.160.493.303,24	146.545.658.852,73	11.583.669.000,00	968.945.000,00	6.684.428.743,00	113.089.929.202,00	77,08	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Tata Ruang		15.300.000,00	47.281.700,00			13.800.000,00	45.258.950,00		94,37	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Perencanaan Pembangunan.	4,018,869,597.00	2,528,315,000.00	8,586,659,113.75	198,060,000.00	3.959.165.569,00	2.445.630.000,00	8.294.735.258,00	193.740.000,00	97,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

										Kabupaten Buleleng
Urusan Perumahan		6.000.000,00	93.439.261,00	-	-	4.485.000,00	85.025.000,00		90,01	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Pemuda dan Olah Raga		213.225.000,00	5.244.142.525,00	200.425.400,00		201.025.000,00	4.684.898.109,00	31.523.800,00	86,91	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Urusan Penanaman Modal	2.259,467,050.00	314,315,000.00	1,644,742,124,00	24,000,000.00	2.430.688.005,00	313.529.000,00	1.628.455.292,00	23.699.500,00	97,43	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng
Urusan Koperasi dan UKM	4.526.356.000,00	255.195.000,00	2.080.138.376,00	127.040.000,00	4.438.778.943,00	206.935.000,00	1.551.224.095,00	-	76,85	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	3,082,421,000.00	485,680,000.00	3,560,329,100.00	188,640,000.00	3,054,730,643,00	485,221,000.00	3,523,864,479,00	184,830,500,00	99,06	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
Urusan Tenaga Kerja	5,361,725,000.00	502,230,000.00	2,226,695,935,00	104,000,000.00	5,273,480,866,00	491,575,000.00	2,082,954,358,00	90,645,000.00	96,88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng
Urusan Ketahanan Pangan		57.580.000,00	1.245.715.345,57			54.090.000,00	1.193.379.965,00		95,72	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	354.187. 200,00		521.301.385,00	94.305.500,00	325.221.994,00		466.153.243,00	94.305.500,00	91,32	Badan KB dan PP Kabupaten Buleleng
Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	4.073.152.800,00	186.640.000,00	3.833.563.786,58,00	1.340.489.755.00	3.740.052.930,00	137.015.000,00	2.988.613.916,00	1.027.082.255,00	83,66	Badan KB dan PP Kabupaten Buleleng
Urusan Perhubungan	8,101,631,749.00	768,325,000.00	3,503,751,028.00	1,932,490,727.00	8.023.466.112,00	767.760.000,00	3.491.420.803,00	1.930.551.450,00	99,35	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
Urusan Komunikasi dan Informatika	3,446,052,000.00	482,960,000.00	2,968,608,000.00	299,072,000.00	3.391.406.792,00	478.790.000,00	2.924.921.691,00	298.247.000,00	98,56	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2,600,244,000.00	403,280,000.00	1,853,728,500.00	133,479,500.00	2.541.638.398,00	397.000.000,00	1.807.059.846,00	133.479.500,00	97,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
Urusan Otonomi Daerah	12,168,782,000.00	4,119,475,000.00	38,541,695,194.58	4,963,046,919.96	12.101.873.595,00	4.025.255.000,00	35.687.489.384,70	4.527.304.325,00	94,23	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
	4,971,518,000.00	873,524,750.00	37,094,876,250.00	756,130,000.00	4.948.606.769,00	847.435.000,00	36.093.449.740,00	727.817.810,00	97,53	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
	3,825,692,000.00	456,880,000.00	2,192,942,000.00	897,178,000.00	3.803.153.219,00	456.880.000,00	2.173.420.062,00	896.622.000,00	99,42	Inspektorat Kabupaten Buleleng
	4,659,894,000.00	679,715,000.00	5,687,877,000.00	152,218,000.00	4.543.566.724,00	662.770.000,00	5.397.771.095,00	152.405.000,00	96,20	Badan Kepegawaian

										Daerah Kabupaten Buleleng
	15,329,838,366.46	1,665,825,000.00	6,788,989,600.00	525,185,400.00	12,325,681,865.00	1,532,930,000.00	5,561,633,446.00	509,199,000.00	81,98	Dinas Pendapatan kabupaten Buleleng
	5,416,747,000.00	7,536,260,000.00	11,998,952,127.00	1,605,417,337.00	5,413,096,126.00	7,128,135,000.00	10,566,912,878.00	1,506,955,402.00	92,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
	11,583,669,000.00	1,121,905,000.00	27,944,252,933.44	150,661,869,852.73	11,515,844,815.00	1,005,355,000.00	24,570,791,351		96,97	Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
	2,126,197,000.00	237,200,000.00	1,627,283,056.34		2,109,704,258.00	222,000,000.00	1,443,818,302.00		94,61	Kecamatan Tejakula
	2,524,812,000.00	153,370,000.00	1,575,000,000.00	64,200,000.00	2,501,453,487.00	143,795,000.00	1,542,968,782.00	63,362,100.00	98,48	Kecamatan Kubutambahan
	2,629,639,000.00	248,020,000.00	1,572,095,620.66		2,594,486,323.00	246,405,000.00	1,525,311,043.00		98,12	Kecamatan Sawan
	13,261,841,000.00	936,315,000.00	5,362,191,988.48	308,485,000.00	13,115,901,769.00	932,025,000.00	4,979,882,818.00	302,578,990.00	97,29	Kecamatan Buleleng
	3,313,386,000.00	244,665,000.00	2,100,128,000.00	83,800,000.00	3,313,602,039.00	242,265,000.00	2,064,577,954.00	83,800,000.00	99,26	Kecamatan Sukasada
	2,226,081,000.00	239,770,000.00	1,740,784,822.22	330,040,000.00	2,168,915,742.00	228,115,000.00	1,690,766,947.00	326,958,050.00	97,31	Kecamatan Banjar
	3,940,956,000.00	183,860,000.00	2,353,168,412.16	2,646,363,000.00	3,890,275,754.00	182,255,000.00	2,331,281,003.00	2,644,857,750.00	99,17	Kecamatan Seririt
	2,343,652,000.00	157,380,000.00	1,446,907,667.84	713,750,000.00	2,327,312,416.00	156,830,000.00	1,427,220,001.00	712,436,700.00	99,19	Kecamatan Busungbiu
	2,504,453,000.00	155,080,000.00	1,611,545,000.00	573,903,000.00	2,471,203,651.00	153,340,000.00	1,576,425,306.00	566,205,000.00	98,39	Kecamatan Gerokgak
	5,078,522,000.00	638,675,000.00	3,033,123,870.00	476,679,800.00	5,071,161,029.00	628,675,000.00	2,960,194,265.00	474,884,920.00	99,00	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Urusan Pemberdayaan Masyarakat	3,204,665,000.00	381,050,000.00	3,839,828,168.26	33,500,000.00	3,182,341,664.00	178,985,000.00	3,782,397,922.00	28,347,300.00	98,83	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng
Urusan Sosial	3,070,389,000.00	261,010,000.00	4,803,131,460.00	14,326,250,920.00	3,032,383,896.00	260,565,000.00	4,723,531,131.00	14,309,641,670.00	99,40	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Urusan Budaya	6,255,545,944.00	383,320,000.00	8,397,754,000.00	922,055,000.00	5,564,345,198.00	323,870,000.00	6,975,991,479.00	540,127,400.00	80,31	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
Urusan Kearsipan			99,699,830.00				84,744,818.00		83,19	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng
Urusan Perpustakaan	1,684,725,000.00	247,610,000.00	669,417,386.25	81,771,900.00	1,663,970,456.00	246,040,000.00	670,304,357.00	81,551,900.00	99,19	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng

2. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan.

Tabel 14
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan.

Urusan Wajib	Anggaran Belanja Tidak Langsung	Anggaran Belanja Langsung			Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung			Prosentase Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Perikanan.	5,287,731,000.00	391,120,000.00	4,754,557,316.95	1,545,783,500.00	5.247.792.427,00	389.820.000,00	3.796.771.279,00	1.464.100.600,00	95,78	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng
Urusan Pertanian.	12.841.802.000,00	462.075.000,00	11.274.639.955.57	1.676.681.863,00	12.716.866.204,00	451.070.000,00	10.956.129.278,00	1.510.963.000,00	97,64	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
Urusan Kehutanan.	7,318,626,000.00	313,515,000.00	5,997,877,647.89	355,500,000.00	7.040.305.367,00	305.395.000,00	4.111.982.496,00	335.209.000,00	85,42	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.		18.125.000,00	17.224.855.789,00	4.116.211.000,00	-	18.125.000,00	16.364.002.058,00	4.115.648.000,00	96,10	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng
Urusan Pariwisata.		98.575.000,00	2.390.735.000,00	2.280.963.229.85,00	5.564.345.198,00	59.655.000,00	1.961.806.083,00	1.303.923.900,00	80,31	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
Urusan Perdagangan.		21.510.000,00	480.847.725,00	15.193.933.890,00		11.000.000,00	235.603.490,00	10.977.955.120,00	71,51	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Urusan Industri.		5.700.000,00	383.095.300,00				305.958.500,00		78,69	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng
Urusan Transmigrasi.		7,755,000,00	166,285,935,00			7,305,000,00	153,859,600,00		92,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 untuk pembiayaan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berjumlah sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 dan terealisasi sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 atau mencapai 92,66 persen. Belanja Daerah Kabupaten Buleleng terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.369.560.719.162,71 yang terealisasi sebesar Rp. 1.274.346.715.665,05 atau 93,05 persen, meliputi Belanja Pegawai dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.052.739.186.901,40 dan terealisasi Rp. 961.075.607.179,00 atau 91,29, kemudian Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp. 82.499.834.000,00 dan terealisasi Rp. 81.808.234.000,00 atau 99,16 persen, Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan anggaran Rp. 15.347.391.380,00 yang realisasinya mencapai 100 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan partai Politik, yang dialokasikan sebesar Rp. 215.838.828.057,15 dan terealisasi Rp. 214.928.828.057,18 atau 99,58 persen serta Belanjua Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 2.985.478.824,16 dan terealisasi Rp. 1.186.655.048,90 atau 35,79 persen.

Untuk Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2016 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.005.026.304.268,52 terealisasi Rp. 926.008.941.682,38 atau tercapai 92,14 persen. Yang terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 49.544.098.198,90 dan terealisasi Rp. 56.935.214.561,07 atau 114,92 persen. Selanjutnya Belanja Barang dan jasa yang direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 547.829.973.574,92 dan terealisasi Rp. 523.004.439.475,35 atau 96,47 persen serta Belanja Modal dengan anggaran Rp.407.652.232.494,70 dan terealisasi Rp. 346.068.287.645,96 atau 84,89 persen.

Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.449.970.563.193,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.606.678.444,00 atau 90,04 persen, yang terdiri dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp. 982.698.080.000,00 atau 47,56 persen dari total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dan realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp. 293.888.358.759,00. Sumber pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp. 315.526.783.349,70

teralisasi sebesar Rp. 282.111.205.871,44 atau 89,41 persen. Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah dikarenakan beberapa pos pendapatan realisasinya kurang maksimal, yakni pada pos hasil pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar 76,19 persen dan retribusi daerah terealisasi 78,41 persen. Sedangkan untuk lain – lain pendapatan daerah yang sah dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 450.660.832.929,19 dan terealisasi Rp. 478.336.225.426,94 atau 106,14 persen.

3. **Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.**

SKPD Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Th. 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 15 Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah ; 9 Badan, 1 Kantor, RSUD. Satuan Polisi Pamong Praja, dan 9 Pemerintah Kecamatan.

Tabel 15
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016.

No	SKPD	Jumlah Personil (PNS)
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	138 orang
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	58 orang
3	Inspektorat Kabupaten Buleleng	44 orang
Dinas Daerah		
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng	6.257 orang
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	736 orang
6	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	36 orang
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng	40 orang
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng	89 orang
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng	88 orang
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng	36 orang
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng	62 orang
12	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri Kabupaten Buleleng	63 orang
13	Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng	104 orang

14	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng	62 orang
15	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng	198 orang
16	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	115 orang
17	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng	157 orang
18	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng	84 orang
Lembaga Teknis Daerah		
19	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng	65 orang
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Buleleng	39 orang
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng	50 orang
22	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	35 orang
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng	63 orang
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Buleleng	30 orang
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng	62 orang
26	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng	28 orang
27	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng	48 orang
28	RSUD Kabupaten Buleleng	523 orang
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Buleleng	23 orang
30	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	77 orang
Pemerintah Kecamatan		
31	Kecamatan Gerokgak	41 orang
32	Kecamatan Seririt	63 orang
33	Kecamatan Busungbiu	35 orang
34	Kecamatan Banjar	33 orang
35	Kecamatan Buleleng	173 orang
36	Kecamatan Sukasada	49 orang
37	Kecamatan Sawan	40 orang
38	Kecamatan Kubutambahan	37 orang
39	Kecamatan Tejakula	31 orang

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar. Untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, dan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berhasil menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2016. Adapun Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang baru secara rinci tersaji pada tabel berikut :

Tabel 16
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng No 13 Tahun 2016.

No	SKPD	Tipe
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	A
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	A
3	Inspektorat Kabupaten Buleleng	A
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng	A
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng	B
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	A
7	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng	B
8	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	B
9	Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	A
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	B
11	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng	B
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	B
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	A
14	Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	A
15	Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng	B
16	Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	B
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	A
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng	A
19	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng	B
20	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng	A
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng	A

22	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng	A
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng	B
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	A
25	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng	B
26	Dinas Statistik Kabupaten Buleleng	B
27	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng	A
29	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng	A
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng	A
31	Kecamatan Gerokgak	A
32	Kecamatan Seririt	A
33	Kecamatan Busungbiu	A
34	Kecamatan Banjar	A
35	Kecamatan Buleleng	A
36	Kecamatan Sukasada	A
37	Kecamatan Sawan	A
38	Kecamatan Kubutambahan	A
39	Kecamatan Tejakula	A

Sumber data : bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Buleleng yang baru terdapat perangkat daerah yang baru sebagai hasil kajian terhadap beban kerja urusan yang dilaksanakan. Perangkat Daerah yang baru meliputi ; Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Statistik, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan. Terdapat pula Perangkat daerah yang terbentuk karena merupakan pemecahan dari perangkat daerah terdahulu yang meliputi ; Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata yang dahulunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dahulunya Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian. Dan ada pula Perangkat Daerah yang digabung menjadi satu yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan gabungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah yang merupakan gabungan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas

Pendapatan. Serta Perangkat Daerah yang berubah status yang meliputi ; BPMPD menjadi Dinas PMD, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan KB dan PP menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPPT menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN.

Urusan Wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan berpedoman pada kewenangan penuh terhadap pelaksanaan urusan wajib yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka ada 25 urusan wajib yang dilaksanakan, yang artinya terdapat 1 urusan wajib yang tidak dilaksanakan yakni Urusan Urusan Statistik. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat Perangkat Daerah yang melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan tetapi ada juga 1 (satu) urusan yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.

Tahun 2016 pelaksanaan Urusan Wajib dijabarkan melalui 435 program dan 1.735 kegiatan, dengan pelaksanaan masing – masing urusan sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN.

Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 20, 21, 28 C ayat 1, pasal 31 dan pasal 32 Batang Tubuh UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berlandaskan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadikan warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*), sehingga mendorong pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka tujuan penyelenggaraan urusan pendidikan adalah:

- Meningkatkan kesempatan belajar masyarakat melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- Meningkatkan mutu pendidikan;
- Terpenuhinya mutu sarana dan prasarana pendidikan;
- Memantapkan kualitas satuan-satuan pendidikan;

Mengacu kepada tujuan penyelenggaraan pendidikan maka sasaran penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan pencapaian APK dan APM di setiap satuan pendidikan mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sasaran pokoknya adalah peningkatan kualifikasi tenaga pendidik yang berimplikasi pada optimalisasi peningkatan mutu proses belajar mengajar;
- Untuk tercapainya pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang bermutu, sasarannya terfokus pada terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan memadai dan layak untuk proses pembelajaran;
- Dalam rangka memantapkan kualitas satuan satuan pendidikan dengan sasaran seluruh satuan dan pengelola pendidikan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembangunan bidang pendidikan untuk Tahun 2016 meliputi 15 Program 102 Kegiatan, dengan Target/ Sasaran mencakup seluruh Satuan Pendidikan Formal dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, Nonformal (Kelompok bermain, Paket A, Paket B, Paket C dan Buta Aksara). Dari sejumlah Program dan kegiatan yang telah ditetapkan, secara umum meliputi:

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan dalam upaya menumbuh kembangkan semua potensi yang dimiliki oleh anak dalam usia ini (usia emas). Pendidikan Anak Usia Dini juga merupakan

pendidikan persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan formal (khususnya Sekolah Dasar).

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti TK, RA dan bentuk lain yang sederajat, serta jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Sasaran atau target grup dari program ini adalah penduduk usia 0-5 tahun yang perlu mendapat pendidikan sejak usia dini melalui TPA, kelompok-kelompok bermain, dan Taman Kanak-Kanak serta SDM dan sarana prasarana yang terkait dengan program ini.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 5 kegiatan dengan anggaran sejumlah RP.3.601.798.400. dengan realisasi sejumlah Rp.1.339.501.230. atau 37.19 % dengan realisasi fisik mencapai 40.00% dan hasil kinerja kegiatan 39.27% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan gedung sekolah.
- Pembangunan taman ,lapangan upacara dan fasilitas parker.
- rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah.
- Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini.

2) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Program ini disusun dalam rangka mendukung program pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Maksud dari program ini adalah untuk memperluas aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) menjadi meningkat, dan meminimalisasi Angka Putus Sekolah (APS). Sasaran atau target grup program adalah penduduk usia 7-15 tahun serta penyediaan SDM dan sarana prasarana yang terkait dengan program ini.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 23 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah Rp. 118.895.863.587,12. dengan realisasi sejumlah Rp 56.393.863.478,93. atau 47,43% dengan realisasi fisik

mencapai 98.91% dan hasil kinerja kegiatan 85.54%. Kegiatan tersebut antara lain :

- Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar.
- Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI.
- Pembangunan taman , lapangan upacara dan fasilitas parkir SD/MI.
- Pembangunan taman , lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP/MTs.
- pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI.
- Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD.
- Pengadaan Buku- Buku dan alat tulis siswa SD/MI.
- pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/ Mi.
- pengadaan mebeluer sekolah SD/MI.
- pengadaan mebeluer sekolah SMP/MTS.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI.
- rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI.
- Rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah SMP/ mts.
- Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah SMP/MTs.
- rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP/MTs.
- Penyediaan Bantuan Operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesanteren salafiah dan satuan pendidikan NON Islam setara SD.
- Penyediaan Bantuan Operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs/ SMPLB serta pesanteren salafiah dan satuan pendidikan NON Islam setara SMP.
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan Manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)di satuan pendidikan dasar (SD).
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan Manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)di satuan pendidikan dasar SMP.
- Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD/MI.
- Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP/MTs.
- Penyelenggaraan akreditasi sekolah SMP/MTS.
- monitoring evaluasi dan pelaporan untuk SMP/MTs.

3) **Program Pendidikan Menengah.**

Dengan adanya kewajiban anak usia sekolah wajib mengikuti wajar 9 tahun maka didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan SMP/MTs sebagai dampak positif pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan non formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk melalui pendidikan formal SMA/MA dan SMK. Sasaran atau target grup program adalah penduduk usia 16-18 tahun dan penyediaan sarana prasarana yang terkait dengan program Pendidikan Menengah.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 18 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah Rp.49.912.526.969,89 dengan realisasi sejumlah Rp 18.585.169.620,13. atau 37.24% dengan realisasi fisik mencapai 93.72% dan hasil kinerja kegiatan 88.27%. Kegiatan tersebut yaitu:

- Pengembangan data dan informasi pendidikan menengah.
- Pembangunan gedung sekolah SMA.
- Pembangunan gedung sekolah SMK.
- Pembangunan ruang kelas sekolah SMA.
- pembangunan ruang kelas sekolah SMK.
- pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (lab bahasa , komputer, IPA, IPS dan lain lain) SMA.
- pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (lab bahasa , komputer, IPA, IPS dan lain lain) SMK.
- Pembangunan , lapangan upacara dan fasilitas parkir SMK.
- pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMK.
- Pengadaan mebeluer sekolah SMA.
- Pengadaan mebeluer sekolah SMK.
- Rehabilitasi sedang /berat bangunan sekolah SMK.
- penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (SMK).
- Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah.

- Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah SMA.
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah SMK.
- penyediaan bantuan operasional manajemen mutu.

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tenaga pendidik yang berkualifikasi dan berkompetensi sangat mutlak diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Disamping memiliki kompetensi yang baik, kecukupan jumlah tenaga pendidik sangat menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Disamping itu pula program ini bertujuan melatih guru menjadi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi untuk siap tanding ditingkat propinsi maupun nasional.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 10 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah Rp.14.595.612.650 dengan realisasi sejumlah Rp.14.127.561.260 atau 96.79% dengan realisasi fisik mencapai 100% dan hasil kinerja kegiatan 100%. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

- Pelaksanaan sertifikasi pendidik.
- Pelaksanaan uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.
- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (TK/SD).
- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap propesi pendidik (TK/SD).
- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap propesi pendidik (Sekmen).
- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program propesi pendidik dan tenaga kependidikan (TK/SD).
- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program propesi pendidik dan tenaga kependidikan (Sekmen).

- Monitoring evaluasi dan pelaporan (sekmen).

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas lembaga, mengembangkan mekanisme perencanaan dan tata kelola, meningkatkan koordinasi, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan bidang pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan, pengembangan penerapan system informasi dan manajemen pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Sasaran atau target grup program adalah koordinasi antara lembaga, UPT, Sekolah-sekolah dan SKB serta penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan system informasi.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 6 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah Rp 2.460.195.685 dengan realisasi sejumlah Rp 2.234.040.726 atau 90.81% dengan realisasi fisik mencapai 100% dan hasil kinerja kegiatan 93.49 %. Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan meliputi kegiatan :

- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan yang membiayai serangkaian penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
- Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan dengan kegiatan berupa pelaksanaan Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 dan Peranan Sertifikasi dalam peningkatan mutu pendidikan;
- Pembinaan Dewan Pendidikan yaitu pemberian biaya operasional kegiatan Dewan Pendidikan;
- Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan yaitu pengembangan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) ke semua UPT dan Persekolahan lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
- Penyusunan Sistem Informasi dan Laporan Capaian Kinerja Pendidikan yaitu tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Koordinasi Perencanaan Pendidikan yaitu koordinasi seluruh rencana yang diprogramkan dengan stakeholder lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

6) Program Perencanaan Anggaran SKPD.

Program ini dilaksanakan untuk pembiayaan penginputan SIPKD dan proses pembuatan DPA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.170.490.500 realisasi keuangan Rp.167.403.600 atau 98.19% realisasi fisik 100% dan hasil kinerja kegiatan 99.09%.

7) Program Pendidikan Non Formal.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terutama keaksaraan fungsional (Buta Aksara), Program Keaksaraan (kejar paket B, dan C) dengan harapan meningkatnya angka melek huruf/menurunnya jumlah penduduk penyandang buta aksara.

Sasaran atau target grup program adalah masyarakat/ kelompok masyarakat, peningkatan kapastitas SDM (tutor program keaksaraan), serta pemberian sarana prasarana yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan non formal.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 1 Kegiatan dengan Anggaran keuangan sejumlah Rp 357.287.850 dengan realisasi sejumlah Rp 346.307.530. atau 96.93% dengan realisasi fisik mencapai 100% dan hasil kinerja kegiatan 98.46%: dengan kegiatan

- Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal.

8) Program – Program lainnya.

Beberapa program penunjang di luar fungsi pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan adalah program – program yang keterkaitan dengan fungsi pelayanan pemerintah umum ada 4 program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin Aparatur, Program informasi pembangunan Daerah.

Sasaran atau target grup program adalah koordinasi antara lembaga terkait, Dinas Pendidikan, UPT, sekolah dan SKB serta penyediaan SDM dan sarana prasarana yang terkait dengan program ini.

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam 24 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp.5.108.842.000,- dan realisasi sejumlah Rp. 4.955.900.667,- (97.01%), relaisasi fisik sebesar 100% dengan Total kinerja kegiatan sebesar 98.00%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Penyediaan jasa surat menyurat.

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional.
 - Pengadaan Tanah.
 - Penyelenggaraan dan pengadaan sarana / Prasarana upacara.
 - Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / Operasional.
 - pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
 - pembangunan sarana persembahyangan.
 - pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah.
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur.
- Program ini meliputi kegiatan pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu pembiayaanya melalui APBD kabupaten buleleng dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.190.100.000,- realisasi anggaran Rp.186.639.816,- atau 98.18 %, realisasi fisik 100 %.Total kinerja kegiatan sebesar 99.19%.
4. Program Informasi Pembangunan Daerah.
- Program ini meliputi kegiatan penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan pada HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan anggaran Rp. 47.788.000,realisasi Rp.41.935.110 atau 87.75% dengan realisasi fisik 100% kinerja kegiatan sebesar 93.88%.

Bidang Pendidikan Dasar merupakan salah satu bidang yang telah di tetapkan pemerintah dalam penerapan dan pencapaian SPM dengan 2 (dua)

pelayanan dasar dan 26 (dua puluh enam) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Buleleng dalam penerapan dan pencapaian SPM dibidang Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Pendidikan. Pada tabel berikut, dapat disajikan informasi tentang Indikator dan capaian SPM bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel 17
 Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar / Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM (%)			
	Level	CAPAIAN SPM 2014	CAPAIAN SPM 2015	CAPAIAN SPM 2016
		a/b*100 %	a/b*100 %	a/b*100%
Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	91.34	92.67	92.67
	MTs	100.00	100.00	100.00
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTS	100.00	100.00	100.00
3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	79.22	79.74	79.74
	MTS	85.71	85.71	85.71
	SMP	79.22	79.74	79.74
	MTs	85.71	85.71	85.71
4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00

untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTS	100.00	100.00	100.00
9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
11. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00

mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif				
50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan				
0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.				
14.Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
Pendidikan pelayanan dasar oleh satuan pendidikan 15.Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
16.Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
17.Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
18.Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00

19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar	100.00	100.00	100.00
Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	100.00	100.00	100.00
Kelas III : 24 jam per minggu	MI	100.00	100.00	100.00
Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP	100.00	100.00	100.00
Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs	100.00	100.00	100.00
21. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
22. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00

	MTs	100.00	100.00	100.00
24.Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
25.Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00
26.Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)	100.00	100.00	100.00
	SD	100.00	100.00	100.00
	MI	100.00	100.00	100.00
	SMP	100.00	100.00	100.00
	MTs	100.00	100.00	100.00

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng

Capaian kinerja pembangunan Urusan Pendidikan pada Tahun 2016 ditunjukkan melalui indikator – indikator sebagai berikut :

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 73.21 %,
- Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 59.62%, hasil ini merupakan persentase dari perbandingan jumlah penduduk usua 15 tahun keatas yang dapat baca tulis, 3.842 dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, 6444
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 81.32 %, dimana jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI /paket A, 61.612, dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, 75.763.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 85.77 %, dimana jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs /paket B, 29.946, dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, 34.916.
- Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 69.06 %, Angka dimana jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/paket C, 21.237, dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun, 61.502.
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.40%, jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI berjumlah 275, dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, 68.723
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,47%, dimana jumlah putus sekolah pada jenjang SMP/MTs berjumlah 159 dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SMP/MTs yang berjumlah 33.829.
- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,16 %, siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA, 450 dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SMA/SMK/MA yang berjumlah 27.667.
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00 %,
- Angka kelulusan SMP / MTs 100.00%
- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.99%
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 98,92 %,
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 98.92 %.

Pembangunan urusan pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng dan Unit – Unit Pelaksana Pendidikan Se-Kabupaten Buleleng.

Data pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun 2016. Pegawai Negeri Sipil : 73 orang ; Pegawai Honor Daerah / Pegawai Kontrak : 103 orang; Golongan IV: 7 orang; Golongan III : 39 orang; Golongan II :19 orang ; Golongan I : 5 orang;

Untuk penyelenggaraan urusan pendidikan Tahun 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 965.076.099.504,19,- dan terealisasi sebesar Rp. 840.810.001.138,96,- atau 87.12 % yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 764.311.688.937,18,- dan terealisasi Rp. 678.233.793.411,- atau 88.74 % dan belanja langsung sebesar Rp. 200.764.410.567,01,- dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.162.578.207.727,96, atau mencapai 80.98 % dan realisasi fisik 94.56 %, Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, terinci melalui realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 5 kegiatan dengan anggaran sejumlah RP.3.601.798.400. dengan realisasi sejumlah Rp.1.339.501.230. atau 37.19 % dengan realisasi fisik mencapai 40.00% dan hasil kinerja kegiatan 39.27% Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembangunan gedung sekolah, Kegiatan Pembangunan taman ,lapangan upacara dan fasilitas parkir, kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah, Ketiga kegiatan tersebut tidak bisa di realisasikan karena 1 Bantuan tersebut ditunjukan kepada lembaga swasta . 2 lembaga tersebut belum memiliki pengesahan dari kemenhumkam sesuai dengan prosedur hibah, 3 Lembaga yang diberikan hibah tidak tercantum nama lembaga dalam SK bupati tetapi muncul di dalam DPA, 4 Rehab yang di tunjukan bagi TK negeri pembina Kec seririt, setelah dicek belum mencapai 35 % tingkat kerusakannya adapun Solusinya adalan Bantuan tersebut di tunda pelaksanaanya.
- Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu proses pembelajaran pada TK pusat PAUD dan TK negeri Pembina, Tk di desa-desa berjalan dengan baik dan lancar sebanyak 17 TK Negeri dengan alokasi anggaran Rp.888.359.400, realisasi anggaran Rp.884.804.810 atau 99.60% dengan realisasi fisik 100%.
- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini, hasil yang dicapai yaitu terdapatnya TK yang siap mengikuti lomba gugus Tk tingkat provinsi dan /lomba kreativitas Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 488.439.000, realisasi anggaran Rp.454.696.420. atau 93.09%, dengan realisasi fisik 100%.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sejumlah Rp. 118.895.863.587,12, dan realisasi sejumlah Rp. 100.994.324.291,89. atau (84.94%) relaisasi fisik sebesar 98.91% dengan Total kinerja kegiatan sebesar 87.64%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pengembangan data dan informasi pendidikan dasar hasil yang dicapai yaitu terakurasinya data dan informasi pendidikan dasar sebanyak 3 dokumen , dengan alokasi anggaran sebesar Rp,

210.941.706,75, realisasi anggaran Rp, 198.456.565, atau 93.94%, dengan realisasi fisik 100%

- Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI, hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya pembangunan ruang kelas sekolah , sebanyak 7 ruang , dengan alokasi anggaran Rp.1.920.276.500, realisasi anggar Rp.1.079.281.150, atau 56.20%, realisasi fisik 100%
- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD, hasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya pengadaan Pembangunan taman, lapangan dan fasilitas parkir SD/MI sebanyak 52 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp,3.504.702.400, realisasi anggaran Rp.3.425.666.170 atau 97.74% dengan realisasi fisik 100%
- Pembangunan taman , lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP, hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya Senderan, Pemagaran serta Gorong-gorong SMP sebanyak 4 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp,563.193.920 realisasi anggaran Rp.554.242.900 atau 98.41% dengan realisasi fisik 100%
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI, hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya pembangunan perpustakaan sekolah SD / MI sebanyak 2 unit , dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.272.038.700. realisasi anggaran Rp.295.422.190. atau 13.00%, dengan realisasi fisik 100%, realisasi keuangan dibawah 50% karena Sisanya silpa pendidikan yang tidak bisa dijalankan tahun ini Rp.1.965.000.000, sisa penawaran dan sisa perjalanan dinas yang tidak bisa jalan karena terbentur waktu.
- Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitary SD, hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD sebanyak 2 SD, dialokasikan anggaran sebesar Rp.645.769.080. realisasi anggaran Rp.289.259.320. atau 44.79%, dengan realisasi fisik 100%, realisasi keuangan dibawah 50% karena Sisanya silpa pendidikan yang tidak bisa dijalankan tahun ini Rp.352.000.000, sisa penawaran dan sisa perjalanan dinas yang tidak bisa jalan karena terbentur waktu
- Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa SD, hasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya buku perpustakaan sekolah sebanyak 1 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.241.930.199 realisasi

anggaran Rp.992.895.090, atau 30.63%, realisasi dibawah 50% karena Sisanya silpa pendidikan yang tidak bisa dijalankan tahun ini Rp.2.222.377.499 sisa penawaran dan sisa belanja administrasi tender yang tidak di amprah

- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/Mi, hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI, sebanyak 11 sekolah , alokasi anggaran sebesar Rp.3.239.397.199, realisasi anggaran Rp.1.014.506.120 atau 31.32 % dengan realisasi fisik 100%
- Pengadaan meubelair sekolah SD/MI, hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah SD/MI sebanyak 8 sekolah , alokasi anggaran Rp.726.986.560, realisasi anggaran Rp,369.949.560 atau 50.89%, dengan realisasi fisik 100%
- Pengadaan meubelair sekolah SMP, hasil yang dicapai yaitu Tersedianya Sarana Meubelair SMP sebanyak 120 unit , alokasi anggaran Rp.115.736.440, realisasi anggaran Rp,114.859.800 atau 99.24%, dengan realisasi fisik 100%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI hasil yang dicapai yaitu Terwujudnya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SD/MI alokasi anggaran Rp. 237.152.500 realisasi anggaran Rp.234.455.500 atau 98.86% reasliasi keuangan 100%.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI, hasil yang dicapai yaitu terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar ,sebanyak 27 ruang kelas , alokasi anggaran Rp 4.874.105.400 realisasi anggaran Rp.1.696.651.620 atau 34.81%, dengan realisasi fisik 100%
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP/Mts, hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP ,sebanyak 35 unit , alokasi anggaran Rp 2.947.366.680, realisasi anggaran Rp.2.447.402.990 atau 83.04%, dengan realisasi fisik 100%
- Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah SMP/MTs, hasil yang dicapai yaitu, terlaksananya rehabilitasi laboratorium dan praktikum sebnyak 4 unit, dengan alokasi anggaran Rp. 368.300.000, realisasi anggaran Rp,271.824.000, atau 73.81%, realisasi fisik 90% karena ada kegiatan fisik finishing

ruang lab. bahasa smpn 3 seririt yang bersumber dari dana bkk provinsi, yang terpaksa ditunda pekerjaannya atau tidak terealisasi pada ta 2016, karena sekolah tersebut sudah mendapat bantuan dari sumber dana yang sejenis pada tahun ini, serta efisiensi anggaran dari sisa penawaran.

- Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP/MTs, hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya rehabilitasi ruang perpustakaan SMP sebanyak 2 unit , dengan alokasi anggaran Rp.210.800.000, realisasi anggaran Rp. 207.184.000. atau 98.28%, realisasi fisik 100%
- Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD sebanyak 483 sekolah dengan alokasi anggaran Rp 57.612.856.352 dengan realisasi anggaran Rp. 53.956.300.960,89 atau 93.65%, realisasi fisik 100%,
- Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SMP/Mts sebanyak 71 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.105.384.015,83. realisasi keuangan Rp.32.817.582.967 atau 93.48% dengan realisasi fisik 100% ,
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) satuan pendidikan dasar SD, hasil yang dicapai yaitu, Terwujudnya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar SD/MI sebanyak 483 sekolah , dengan alokasi anggaran sebesar Rp, 175.639.480, realisasi anggaran Rp.175.140.965, atau 99.72%, realisasi fisik 100%
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar SMP/MTs , hasil yang dicapai yaitu, Terpilihnya sekolah juara lomba UKS SMP dan Terselenggaranya Revitalisasi MGMP SMP Kab Buleleng sebanyak 1 sekolah dan 27 orang , dengan alokasi anggaran sebesar Rp, 325.590.900, realisasi anggaran Rp.317.288.910 atau 97.45%, realisasi fisik 100%

- Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD, hasil yang dicapai yaitu terwujudnya pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa SD/mi sebanyak 483 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp,211.261.980, realisasi anggaran Rp.210.994.615 atau 99.87 %, realisasi fisik 100%
- Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP, hasil yang dicapai yaitu Terseleksinya siswa teladan tingkat SMP sebanyak 6 orang, Terseleksinya siswa OSN tingkat SMP 10 orang, Terpilihnya siswa SMP berprestasi dalam Seni 30 orang, Terseleksinya siswa Lomba Motivasi Belajar Mandiri dan Keterampilan SMP Terbuka 3 orang, Terpilihnya Siswa Lomba Karikatur SMP , sebanyak 3 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp,210.496.635, realisasi anggaran Rp.163.983.979 atau 77.90 %, realisasi fisik 100%
- Penyelenggaraan akreditasi sekolah SMP, hasil yang dicapai yaitu terakreditasinya sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK sebanyak 50 sekolah, dengan alokasi anggaran Rp.38.764.100, realisasi anggaran Rp.38.712.180 atau 99.87%, realisasi fisik 100%
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP, hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya monitoring DAK SMP sebanyak 80 sekolah SMP dengan alokasi anggaran Rp.137.172.840, realisasi anggaran Rp.122.562.740, atau 89.35%, realisasi fisik 95% realisasi fisik dibawah 10% karena efisiensi anggaran pada perjalanan dinas dalam kabupaten untuk monitoring pelaksanaan fisik apbd dan bkk yang seharusnya dilaksanakan 4 (empat) kali perjalanan akan tetapi dilaksanakan dalam 2 (dua) kali perjalanan.

3. Program Pendidikan Menengah,

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sejumlah Rp. 49.912.526.696,89,- dan realisasi sejumlah Rp.33.489.721.514,07,- (67.10%) realisasi fisik sebesar 93.72% dengan Total kinerja kegiatan sebesar 89.26%.. Realisasi dan hasil kegiatan meliputi:

- Pengembangan data dan informasi Pendidikan Menengah. hasil yang dicapai yaitu terakurasi data pelaporan informasi pendidikan menengah dan Terlaksananya Validasi DAPODIKMEN sebanyak 63 SMA/SMK kab buleleng, dengan alokasi anggaran Rp 184.826.680 realisasi anggaran Rp 176.590.195 atau 95.54% realisasi fisik 100%

- Pembangunan gedung sekolah SMA, hasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya kebutuhan ruang aula pada SMAN 1 Sawan, Terpenuhinya kebutuhan ruang penunjang pembelajaran pada SMAN 2 Banjar sebanyak 2 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.022.320.923, realisasi anggaran Rp.846.416.050 ,atau 82.79% dengan realisasi fisik 100%
- Pembangunan ruang kelas sekolah SMA, hasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas pada SMAN Satu Atap Tejakula,sebanyak 2 ruang, dengan alokasi anggaran Rp 48.068.177, realisasi anggaran Rp,47.009.625 atau 97.80% , realisasi fisik mencapai 100%
- Pembangunan ruang kelas sekolah SMK, hasil yang dicapai yaitu Meningkatnya Daya Tampung Siswa pada SMKN 1 Busungbiu sebanyak 1 sekolah , dengan alokasi anggaran Rp 828.031.900 realisasi anggaran Rp,348.680.600 atau 42.11% , realisasi fisik mencapai 50% karena Pembangunan RKB pada SMKN 1 gerokgak tidak dijalankan karena sudah mendapatkan bantuan USB dari pusat
- Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa ,computer IPA,IPS dan lain-lain) SMA, hasil yang dicapai yaitu, Terwujudnya ruang Laboratorium Bahasa pada SMAN 1 Tejakula, Tersedianya Peralatan Kesenian (Alat Musik Modern) pada SMAN 1 Banjar Tersedianya Peralatan Kesenian (Alat Musik Tradisional) pada SMAN 2 Tejakula, Tersedianya Peralatan Olahraga untuk SMAN 2 Gerokgak sebanyak 4 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.639.000. realisasi anggaran Rp. 87.793.120. atau 97.94% , realisasi fisik 100%
- Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa ,computer IPA,IPS dan lain-lain) SMK, hasil yang dicapai yaitu, Tersedianya Ruang Praktikum Siswa pada SMKN 1 Sawan, dan SMKN 1 Sukasada sebanyak 3 Ruang Praktikum , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.128.457.900. realisasi anggaran Rp. 689.799.980. atau 61.13% , realisasi fisik 67% karena Pembangunan RPS pada SMKN 1 gerokgak tidak dijalankan karena sudah mendapatkan bantuan USB dari pusat

- Pembangunan taman , lapangan upacara dan pasilitas parkir SMK, hasil yang dicapai yaitu Tersedianya Senderan/tembok penyengker SMKN 2 Seririt, SMKN 1 Busungbiu, SMKN 1 Tejakula, SMKN 1 Sukasada, Parkir berlantai SMKN 1 Singaraja dan Pembangunan Taman SMKN 1 Sukasada sebanyak 5 sekolah, dengan alokasi anggaran Rp.873.193.700, realisasi anggaran Rp.749.417.780 atau 85.82% dengan realisasi fisik 100%
- Pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMK , hasil yang dicapai yaitu Tersedianya Laptop komputer, kamera, proyektor, dan alat praktik sekolah SMK sebanyak 5 Unit Laptop, 5 Unit Komputer, 3 Unit Kamera dan 2 Unit Proyektor, dan 3 Paket alat praktik siswa, dengan alokasi anggaran Rp 96.377.300, realisasi anggaran Rp.96.014.600, atau 99.62% realisasi fisik 100%
- Pengadaan mebeleur sekolah SMA,hasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya meja dan kursi siswa SMA 1 Kubutambahan, Terpenuhinya meja panjang ruang TRRC SMAN 2 Singaraja, Terpenuhinya kebutuhan Mebeluer lab kimia SMAN 1 Sawan,, Terpenuhinya kebutuhan Mebeluer lab biologi SMAN 4 Singaraja,, Terpenuhinya Kursi Ruang TRRC SMAN 2 Singaraja anggaran Rp.137.500.000 , realisasi anggaran Rp.135.287.850 atau 98.39% realisasi fisik 100%
- Pengadaan mebeleur sekolah SMK ,hasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya Sarana Prasarana Berupa Mebeluer sebanyak 5 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.391.400.600, realisasi anggaran Rp 285.418.600. atau 72.92% realisasi fisik 70% karena Pengadaan meubelair pada SMKN 1 gerokgak tidak dijalankan karena sudah mendapatkan bantuan USB dari pusat
- Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SMK , hasil yang dicapai yaitu, Terpenuhinya aula yang memadai pada SMKn 3 singaraja sebanyak 1 sekolah dengan alokasi anggaran Rp.472.828.000 realisasi anggaran Rp.382.339.000 atau 80.86% realisasi fisik 100%
- Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) SMK, hasil yang dicapai yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah SMK Kabupaten Buleleng sebanyak 1 tahun , dengan

alokasi anggaran Rp.98.261.700, realisasi anggaran Rp.86.239.770 atau 87.77% , realisasi fisik 100%

- Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu hasil yang dicapai Terealisasinya bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu dengan alokasi dana Rp.271.300.500 realisasi anggaran 245.196.520 atau 90.38% realisasi fisik 100%
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA, hasil yang dicapai yaitu Tersedianya duta kabupaten buleleng ke tingkat Provinsi dan nasional dalam lomba Olympiade Sains SMA Tersedianya duta kabupaten buleleng ke tingkat Provinsi dan nasional dalam Lomba Siswa Berprestasi SMA,Tersedianya duta kabupaten buleleng ke tingkat Provinsi dan nasional dalam Lomba sekolah sehat ,Tersedianya duta kabupaten buleleng ke tingkat Provinsi dan nasional dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.293.728.400 sebanyak 29 siswa dan 1 sekolah dan 3 team, realisasi anggaran Rp.259.682.620, atau 88.41% realisasi fisik 100%
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMK, hasil yang dicapai yaitu Terbinanya Peserta OST SMK, Buleleng Festival, Lomba LKS, Lomba Siswa Berprestasi, Pameran SMK sebanyak 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.377.543.700 realisasi anggaran Rp.365.516.151, atau 96.81% realisasi fisik 100%
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMA / SMK hasil yang dicapai yaitu Meningkatnya Kemampuan Dasar Kepemimpinan Siswa SMA, SMK dengan alokasi anggaran Rp.147.469.660 realisasi Rp.143.601.140 atau 97.38 realisasi keuangan 100%
- Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu BOMM (data Dikmen) hasil yang dicapai yaitu. Terinvestarisasinya data/permasalahan sebanyak 63 SMA/SMK negeri swasta , dengan alokasi anggaran Rp.42.201.223.630. realisasi anggaran 27.474.965.523,07. atau 65.10% realisasi fisik 100%.

4. Program Pendidikan Non Formal.

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sejumlah Rp. 357.287.850,- dengan realisasi keuangan sejumlah Rp. 346.307.530,- (96.93%), Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal, hasil yang dicapai yaitu meningkatnya kompetensi PTK-PNF kab buleleng yang siap mengikuti lomba PTK-PNF Tk provinsi dan nasional sebanyak 18 orang , meningkatnya kompetensi PTK-PNF Kabupaten Buleleng yang siap mengikuti lomba PTK-PNF tk. Nasional sebanyak 5 orang, pelaksanaan bimbingan teknis lembaga yang akan diakreditasi 40 tutor memiliki kompetensi sebanyak 30 lembaga dan Berkurangnya Angka Buta Aksara Kabupaten Buleleng sebanyak 1000 orang sebanyak 30 tutor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.357.287.850, realisasi anggaran Rp.346.307.530. atau 96.93% realisasi fisik 100%

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sejumlah Rp. 14.595.612.650,- dengan realisasi keuangan sejumlah Rp.14.127.561.260,-atau (97.78%), realisasi fisk sebesar 100% dengan Total kinerja kegiatan sebesar 97.78%. Realisasi dan hasil kegiatan meliputi:

- Pelaksanaan sertifikasi pendidik, hasil yang dicapai yaitu, Terseleksinya Kuota Calon Peserta Sertifikasi Guru Sosialisasi Calon Peserta Sertifikasi Jabatan Guru untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru berjumlah 5000 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.098.130, realisasi keuangan Rp.136.662.635, atau 97.55% dengan realisasi fisik 100%
- Pelaksanaan uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Tersedianya Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK berprestasi, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan OSN Guru yang mengikuti lomba di Tingkat Nasional sebanyak 200 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp..232.490.460. realisasi keuangan Rp.219.167.910, atau 94.27%, dengan realisasi fisik 100%

- Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi hasil yang dicapai Terpilihnya Calon Kepala Sekolah sebanyak 30 orang dengan alokasi anggaran Rp.418.386.100 realisasi keuangan Rp.347.973.490 atau 83.17% dan realisasi fisik 100%
- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan hasil kegiatan ini yaitu terpublikasinya hasil karya pengembangan profesi dan meningkatnya profesionalisme guru dalam menulis karya tulis sebanyak 28 orang hasil karya , alokasi anggaran sebesar Rp.126.638.260, realisasi anggaran Rp,121.583.070 atau 96.01%, dengan realisasi fisik 100%
- Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TK/SD), hasil kegiatan ini yaitu tercapainya data PTK tingkat TK,SD, analisis kebutuhan PTK sekolah, , terwujudnya validasi data NUPTK, sebanyak 626 sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp,32.073.900, realisasi anggaran Rp.29.351.950 atau 91.51% dengan realisasi fisik 100%
- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik TK/SD, hasil dari kegiatan ini yaitu terwujudnya kenaikan pangkat guru dan pengawas TK, SD 400 orang, Terwujudnya kenaikan pangkat pengawas TK/SD 40 orang, terwujudnya KGB dan inpasing guru, menilik Tk/SD 300 orang ,terwujudnya unsul pensiun dan purnabakti PTK 75 orang, terwujudnya usul karpeg, karis/karsu PTK 200 orang , terwujudnya usul satya lencana karya PTK 500 orang, terwujudnya pemberian cuti bagi PTK 50 orang , Terwujudnyasosialisasi angka kredit guru dan pengawas TK/SD 465 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.268.800, realisasi anggaran Rp. 32.263.225, atau 99.98 %, dengan realisasi fisik 100%
- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik SEKMEN, hasil dari kegiatan ini yaitu Terwujudnya kenaikan pangkat guru SMP,SMA,SMk 700 orang , Terwujudnya Kenaikan Pangkat Pengawas SMP,SMA, SMK 3000 orang, Terwujudnya KGB dan Impasing Guru SMP, SMA,SMK dan Pengawas Sekolah 75 orang, Terwujudnya usul pensiun dan Purna Bhakti PTK 200 orang ,Terwujudnya usulan Karpeg,Karis/karsu PTK 500 orang ,Terwujunya usulan satya lencana karya PTK 50

orang, Terwujudnya pemberian cuti bagi PTK 200 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.245.400, realisasi anggaran Rp. 241.890.030 atau 99.85 %, dengan realisasi fisik 100%

- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program Profesi PTK TK/SD hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terwujudnya penempatan, rasionalisasi dan mutasi PTK, TK/SD 200 orang, terwujudnya pengisian pormasi tugas tambahan TK/SD 40 orang, terwujudnya imbalan jasa tenaga magang , kontrak Tk/SD 1.015 orang, terseleksiya setudi kasus TK/SD 10 orang Terlaksananya Perekrutan Tenaga Kontrak Guru SD ,1000 orang dengan alokasi anggaran Rp.8.013.001.200 realisasi anggaran Rp,7.889.345.155, atau 98.46% realisasi fisik 100%
- Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program Profesi PTK SEKMEN hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terwujudnya penempatan, rasionalisasi dan mutasi SMP<SMA/SMK 100 orang, terwujudnya pengisian pormasi tugas tambahan SMP<SMA/SMK 200 orang, terwujudnya imbalan jasa tenaga magang , kontrak SMP<SMA/SMK 392 orang, terseleksiya setudi kasus SMP<SMA/SMK 25 kasus, dengan alokasi anggaran Rp.5.315.616.200, realisasi anggaran Rp,5.066.784.450, atau 95.32% realisasi fisik 100%
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Sekmen) hasil yang dicapai Terwujudnya Laporan Hasil Kinerja Kepala SMP, SMA, SMK sebanyak 30 kepala sekolah alokasi dana Rp.42.794.200 realisasi keuangan 42.539.345 atau 99.40% realisasi fisik 100%.

6. Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan,

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp 2.460.195.685,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.234.040.726,- (90.81 %) relaisasi fisik sebesar 100% dengan Total kinerja kegiatan sebesar 93.49%. Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan, hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya ujian Nasional dan ujian sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK sebanyak 653 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.436.896.094, realisasi anggaran Rp. 1.389.990.991, atau 96.74%, realisasi fisik 100%

- Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan, hasil kegiatan ini yaitu kesek guru paham akan berbagai peraturan pemerintah bidang pendidikan, sebanyak 648 orang/ sekolah, dengan alokasi anggaran Rp.79.870.250, realisasi anggaran Rp.73.958.040, atau 92.60 %,realisasi fisik 100%
- Pembinaan dewan pendidikan, hasil kegiatan ini yaitu terciptanya tata kelola dan pencitraan publik yang baik sebanyak 1 lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp, 100.000.000. realisasi anggaran Rp. 95.735.120, atau 95.74%, realisasi fisik 100%
- Penerapan Sistem dan informasi Manajemen Pendidikan, hasil dari kegiatan ini yaitu berfungsinya jaringan sistem dan informasi manajemen pendidikan kesetiap UPP kecamatan sebanyak 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.246.744.400, realisasi anggaran Rp 177.480.390, atau 71.93%, realisasi fisik 100%
- Penyusunan sistem informasi dan laporan capaian kinerja pendidikan, hasil dari kegiatan ini yaitu terdapatnya laporan capain kinerja dinas pendidikan sebanyak 15 laporan , dengan alokasi anggaran Rp.170.243.500, realisasi anggaran Rp.136.906.010 ,atau 80.42%, realisasi fisik 100%,
- Koordinasi perencanaan pendidikan, hasil dari kegiatan ini yaitu, tersedianya rencana kerja Dinas pendidikan kab buleleng sebanyak 1 dokumen , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.426.441.441, realisasi anggaran Rp.359.970.175, atau 84.41%, realisasi fisik 100%.

7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.192.412.100, realisasi anggaran Rp.176.498.420. atau 91.73%,realisasi fisik 100% dengan total keluaran kegiatan 96.42%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program ini adalah:

- Peningkatan keimanan ketakwaan kepemudaan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman pemuda pelajar akan nilai-nilai pendidikan dan sejarah perjuangan bangsa sebanyak 1.200. orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.553.800, realisasi anggaran Rp.72.922.620 atau 97.81%, realisasi fisik 100%

- Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan, hasil dari kegiatan ini yaitu pencapain sikap kepeloporan dan kemandirian pemuda sebanyak 50 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.858.300, realisasi anggaran Rp.103.575.800, atau 87.88%, fisik 100%

8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Program ini di alokasi anggaran Rp.1.053.320.400, realisasi anggaran Rp. 1.004.158.960, atau 96.76%,. Program ini dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan organisasi kepemudaan, hasil dari kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman nilai –nilai perjuangan dilingkungan pemuda sebanyak 150 orang , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.287.300 realisasi anggaran Rp.154.425.160 atau 97.56%, realisasi fisik 100%
- Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, hasil dari kegiatan ini yaitu peningkatan jiwa kepemimpinan dan sikap disiplin pemuda pelajar sebanyak 90 orang, dengan alokasi anggaran sebesar, Rp 756.923.200 realisasi anggaran Rp730.236.150 atau 96.47% realisasi fisik 100%
- Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda hasil yang dicapai Terlaksananya Lomba Janger, Lomba Tari Kreasi sebanyak 250 orang dengan anggaran Rp.138.109.900 realisasi keuangan Rp.119.497.650 atau (86.52%) realisasi keuangan 100%.

Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Forum SKPD menghasilkan rancangan Renja SKPD yang akan dirumuskan dalam rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan masukan dari kebijakan pemerintah dan hasil evaluasi untuk bahan Musrenbang Kabupaten.
2. Musrenbang menghasilkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) diantaranya : Kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan

- sebagai masukan utama untuk penyempurnaan rancangan RKPD dan Renja SKPD. Sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. RKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada Bulan Mei 2016, yang antara lain ditetapkannya KUA (Kebijakan Umum APBD).
 4. KUA dilaksanakan pada Bulan Desember 2016 yang menghasilkan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).
 5. KUA dan PPAS dibahas bersama-sama dengan DPRD pada Bulan Nopember 2016.
 6. Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS.
 7. Berdasarkan KUA dan PPAS selanjutnya dilakukan penelitian RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng
 8. Kompilasi RKA yang telah dibahas oleh Tim Anggaran menjadi Rancangan APBD diajukan dan dibahas dengan DPRD pada Bulan Desember 2016 dan selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur Bali
 9. Penetapan APBD dengan PERDA dilaksanakan setelah turunnya hasil verifikasi dari Gubernur
 10. Setelah APBD ditetapkan disusun DPA dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tidak menemukan kendala yang berarti. Namun ada beberapa Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yang disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah 1) penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/ rekanan jauh dibawah HPS sehingga terjadi sisa penawaran yang secara otomatis akan menjadi sisa anggaran, 2) Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2016 ditetapkan dan / atau sampai di Kabupaten Buleleng khususnya di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng sangat terlambat yang mengakibatkan terdapatnya banyak paket kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan, karena Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2016 baru ditetapkan tanggal 9 November 2016. Namun demikian pada tahun 2017 mendatang, akan dilakukan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif terhadap semua

kegiatan sehingga semua kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. URUSAN KESEHATAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 21 program dan 127 kegiatan, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/Dalam Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubelair
- Penyelenggaraan dan pengadaan sarana dan prasarana upacara
- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas/Operasional
- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Penilaian dan Pengembangan Pegawai
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Program Perencanaan Anggaran SKPD.
 - Penyusunan Anggaran SKPD
- 7) Program Informasi Pembangunan Daerah.
 - Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan
- 8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 9) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
 - Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah
 - Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
 - Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
- 10) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan
- 11) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat
 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - Peningkatan Peranserta Masyarakat
- 12) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
 - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
 - Penanggulangan Kurang Energi dan Protein (KEP) , Anemia, Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kurang Zat Gizi mikro Lainnya
 - Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi perjuangan

- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 13) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
 - Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 14) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk
 - Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
 - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
 - Peningkatan Imunisasi
 - Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 15) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- Evaluasi dan Pengemangan Standar Pelayanan Kesehatan
- 16) Program Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
 - Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter dan Paramedis
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes
 - Rehabilitasi Puskesmas
- 17) Program Pengadaan peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru, Rumah Sakit Mata.
- Pembangunan Rumah Sakit
- 18) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- 19) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- Penyuluhan Kesehatan Anak Balita.
 - Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita.
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- 20) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan.

- Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan.
- Pelayanan Kesehatan.
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

21) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

- Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu.
- Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang mampu.
- Pemeliharaan Kesehatan Ibu.
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Standar pelayanan minimal atau biasa disingkat SPM adalah standar pelayanan minimal yang harus didapatkan oleh masyarakat dan menjadi program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaanya diwajibkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya dan kemampuan daerah. Tahun 2013 ditetapkan 18 indikator SPM Kesehatan yaitu cakupan kunjungan ibu hamil K4 target 88 persen. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani target 73 persen. Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan target 88 persen. Cakupan pelayanan nifas target 88 persen. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani target 70 persen. Cakupan kunjungan bayi target 86 persen. Cakupan kelurahan/desa Uci target 90 persen. Cakupan pelayanan anak balita 81 persen. Cakupan pemberian MPAsi pada anak usia 6 sampai 24 bulan keluarga miskin target 100 persen. Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan target 100 persen. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat target 100 persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP, pneumonia balita, TB paru, DBD dan Diare. Cakupan yankesdas masyarakat miskin target 100 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin. Cakupan pelayanan Gadar level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan kabupaten/kota. Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 24 jam target 100 persen. Cakupan desa siaga aktif target 100 persen. Apabila kita cermati lebih jauh dari 18 indikator SPM seperti yang disebutkan diatas maka bisa dipastikan bahwa 17 indikator adalah merupakan beban dan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan strata 1 yaitu puskesmas kecuali indikator untuk pelayanan gawat darurat RS.

Capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 18
SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator SPM	Capaian Tahun 2015 (%)	Capaian Tahun 2016 (%)
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92.50	82.65
2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	100.00	69.12
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96.23	87.31
4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	93.55	86.65
5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	100.00	35.41
6	Cakupan kunjungan bayi	96.95	97.76
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97.97	72.30
8	Cakupan pelayanan anak balita	74.97	34.68
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100.00	100.00
10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100.00	100.00
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	-	-
12	Cakupan peserta KB Aktif	60.92	65.99
13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit	-	-
a	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	4.67	3.89
b	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	8.62	15.76
c	Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	56.64	40.31
d	Penderita DBD yang Ditangani	100.00	100.00
f	Penemuan Penderita Diare	5.43	4.77
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	47.90	25.01
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	3.94	0.39
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100.00	100.00
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100.00	100.00
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	100.00	100.00

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, cakupan kunjungan ibu hamil K4 Tahun 2016 sebesar 82,65 persen masih dibawah target nasional yang ditetapkan sebesar 88 persen. Cakupan kompllikasi kebidanan yang ditangani dengan target 73 persen tercapai 69,12 persen. Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan tercapai 87,31 persen dari target 88 persen. Cakupan pelayanan nifas tercapai 86,65 persen dari target 88 persen. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani capaiannya masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 70 persen, indikator ini tercapai 34,68 persen. Cakupan kunjungan bayi tercapai 97,76 persen dari target 86 persen. Cakupan kelurahan/desa Uci tercapai 72,30

persen dari target 90 persen. Cakupan pelayanan anak balita tercapai 34,68 persen dari target 81 persen. Cakupan pemberian MPAsi pada anak usia 6 sampai 24 bulan keluarga miskin tercapai sesuai target yakni 100 persen. Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan juga tercapai sesuai target yakni 100 persen. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP tercapai 3,89 persen, pneumonia balita ; 15,76 persen, TB paru ; 40,31 persen, DBD yang ditangani mencapai 100 persen dan penemuan penderita Diare ; 4,77 persen. Cakupan yankesdas masyarakat miskin target 100 persen baru tercapai 25,01 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin Tahun 2016 tercapai 0,29 persen. Cakupan pelayanan Gadar level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan kabupaten/kota tercapai 100 persen. Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 《24 jam tercapai sesuai target yaitu 100 persen. Cakupan desa siaga aktif juga tercapai sesuai target yakni sebesar 100 persen.

Kemudian berdasarkan indikator program dan sasaran Urusan Kesehatan pada Tahun 2016 capaiannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 19
Capaian Indikator Program/Sasaran
Urusan Kesehatan Tahun 2016

NO	INDIKATOR PROGRAM/SASARAN	TARGET	PRESENTASE REALISASI 2016
1	2	3	
I	Program Peningkatan Derajat Kesehatan		
1	Menurunnya AKB	<=23 per 1000 kh	5,00
2	Menurunnya AKI melahirkan.	<= 102 per 100.000 KH	98,14
II	Program Menurunkan Peningkatan kesehatan ibu		
1	Persentase Cakupan kunjungan Bumil (K4)	95	82,66
2	Persentase Cakupan Persalinan oleh Bidan / Nakes	95	87
3	Persentase Cakupan peserta KB aktif	84	65,99
4	Persentase Bumil risti /komplikasi yang dirujuk	100	69,66
5	Persentase Bumil risti/komplikasi yang ditangani	100	69,66
6	Persentase Neonatal resiko tinggi/ komplikasi yangg ditangani	100	35,41
7	Persentase Pasangan Usia Subur Menjadi Akseptor KB	70	71
III	Program Peningkatan Kesehatan Anak		

1	Persentase Cakupan kunjungan neonates	95	82,65
2	Persentase Cakupan kunjungan bayi	99	97,76
3	Persentase Cakupan dideteksi tumbuh balita & kembang anak pra sekolah	60	-
4	Persentase Balita yang Naik Berat Badannya	80	74,54
5	Persentase Balita bawah garis merah	1,4	0,67
6	Persentase Cakupan BBLR yang ditangani	100	100
7	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh tenaga kesehatan/ tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil)	100	100
8	Persentase Cakupan yankes remaja	80	83,40
9	Persentase Murid SD / Madrasah Mendapat Pemeriksaan Gigi Mulut	95	90
IV	Program pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesehatan lingkungan		
1	Persentase Desa/Kelurahan UCI	100	100
2	Persentase Desa/Kelurahan KLB yang ditangani < 24 jam	100	100
3	Persentase Kecamatan bebas rawan gizi	100	100
4	AFP rate per 100.000 penduduk <15 TH	2/100.000 pdd	3,89
5	Persentase Kesembuhan TB-BTA (+)	85	58,25
6	Persentase Penderita DBD ditangani	100	100
7	Persentase Balita Diare Ditangani	100	4,77
8	Persentase Institusi yang dibina Kesling	100	100
9	Persentase ABJ	95	100
10	Persentase Cakupan balita dg Pneumonia ditangani	100	15,76
11	Persentase Klien mendapat pelayanan HIV-AIDS	100	100
12	Persentase IMS diobati	100	100
13	Persentase Donor Darah Diskrining terhadap HIV- AIDS	100	100
14	Persentase Penderita Malaria yang diobati	100	100
15	Persentase RFT Rate	90	50
16	Persentase Kasus Filaria yang ditangani	100	0
17	Persentase TTU memenuhi syarat	100	98,81
18	Angka Kesakitan Malaria per 1000 pddk	0,001	0
19	Prevalensi HIV terhdp pddk berisiko	-	
20	Angka Kesakitan DBD CFR	< 1	
21	Persentase Rumah Sehat	85	
22	Persentase keluarga memp. Akses thd air bersih	90	
V	Program pelayanan kesehatan dasar		
1	Persentase Cakupan rawat jalan	15	90.5
2	Persentase Cakupan rawat inap	0,8	6,9
3	Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum	100	100

4	Persentase Sarana kesehatan dg kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat.	100	100
5	Persentase Penduduk memanfaatkan puskesmas	80	80
6	Persentase Penduduk memanfaatkan RS	20	105
7	Persentase Sarkes dg kemampuan Lab.kes.	80	61
8	Persentase RS menyelengg. 4 yankes spesialis dasar	100	100
VI	Program perbaikan status gizi masyarakat		
1	Persentase Cakupan balita mendapat vit. A 2 kali per tahun	100	98,6
2	Persentase Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	100	83,46
3	Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100
4	Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif	70	71,9
5	Persentase Balita dengan gizi buruk	15	0,04
6	Prevalensi KEK ibu hamil	2	5
VII	Program perilaku hidup bersih dan sehat		
1	Persentase RT sehat	100	100
2	Persentase Desa dengan garam beryodium baik	90	75
3	Persentase Posyandu Purnama	43	54,53
4	Persentase RT PHBS	80	74,03
5	Sekolah dengan UKS	100	100
6	Sekolah dengan SBH	9	120
7	Persentase Desa Siaga Aktif	41	100
8	Persentase UKBM Aktif	10	100
9	Penyuluhan Napza dan Kesehatan	50	-
10	Persentase KK yang mempunyai TOGA	30	900
VIII	Program peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan		
1	Persentase Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	100
2	Persentase Pengadaan Obat Esensial	100	92,61
3	Persentase Pengadaan obat generic	100	84,66
4	Persentase Obat Generik berlogo dlm persediaan obat	80	89,61
5	Persentase pnulisan resep obat generic	90	99,64
IX	Program Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan		
1	Persentase Cakupan JPKM pra bayar	50	59
2	Persentase Cakupan JPK Gakin dan masyarakat rentan	100	100
3	Persentase Cakupan yankes pra & usila	80	80
4	Persentase penddk sbg peserta JPKM	70	63,8
5	Persentase Keluarga miskin dpt yankes	100	100

6	Persentase pekerja dpt pelayanan kesh. Kerja	-	-
X	Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan		
1	Persentase Puskesmas direhab	2	3
2	Persentase Puskesmas Pembantu direhab	12	3
3	Persentase Polindes di rehab	6	0

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng

Hal lain yang kalah penting dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan adalah terkait kesehatan ibu dan anak, dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dapat diketahui Indikator Keberhasilan Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2016. Angka kematian bayi pada Tahun 2016 sebesar 5 per 1000 kelahiran. Yang artinya terdapat 5 bayi yang meninggal saat kelahiran dari 1000 bayi yang lahir di Kabupaten Buleleng Tahun 2016. Angka ini meningkat dibandingkan capaian pada Tahun 2015 dimana angka kematian bayi (per 1000 kelahiran bayi) sebesar 4,02. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan capaian keberhasilan. Selanjutnya angka kematian ibu pada Tahun 2016 tercatat 98,14 orang, menurun dibandingkan Tahun 2015 dimana tercatat angka kematian ibu mencapai 130,95 orang. Hal ini merupakan keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng didalam menekan jumlah kematian ibu (saat melahirkan). Sedangkan angka kematian balita pada Tahun 2016 tercatat 0,79 per 1000 kelahiran hidup. Terjadi penurunan tingkat capaian dibandingkan Tahun 2015 yang tercapai 0,43 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 20
Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2016

No	Indikator Keberhasilan	2015	2016
1	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	40.02	5
2	Angka Kematian Ibu (Orang)	130.95	98.14
3	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	0.43	0.97

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng

Menurunnya kematian ibu melahirkan pada Tahun 2016 didukung oleh cakupan pelayanan imunisasi bayi dan ibu hamil sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 21
Cakupan Imunisasi Bayi dan Ibu Hamil Tahun 2016

No.	Antigen	Target Tahunan (%)	2015	2016
1	BCG	100	100,8	91,1
2	DPT 1-H-HIb 1	100	100,4	92,1
3	DPT 2- HB-HIb- 2	100	100,3	91,7
4	DPT 3–HB-HIb 3	100	99,2	91,3
5	Polio 1	100	100,3	90,9
6	Polio 2	100	100,3	91,5
7	Polio 3	100	99,9	91,3
8	Polio 4	100	99,8	90,6
9	Hb 0-7 hari	100	98,2	90,9
10	Campak	100	101,2	93,1
11	TT+bumil	100	89,1	91,1

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng

Tahun 2016 terdapat 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Yang paling dominan adalah sakit Hipertensi Primer yang diderita oleh 9.705 orang. Ada beberapa kemungkinan penyebab hipertensi primer. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, hipertensi jenis ini tidak mengikuti pola penyakit yang diturunkan pada umumnya. Salah satu hal yang mungkin menyebabkan hipertensi ini adalah kelainan gen tunggal yang mempengaruhi metabolisme natrium sehingga menimbulkan hipertensi. Penyebab hipertensi primer terbesar adalah faktor keturunan dan gaya hidup tertentu. Penyakit lainnya yang paling banyak diderita masyarakat Kabupaten Buleleng meliputi Nasofaringitis Akut (common cold), Rhematoid Artritis lainnya, Gastritis (tidak ditentukan), Faringitis Akut, Kecelakaan dan Ruda Paksa, Diabetes Millitus Type I, Dermatitis Kontak Alergi, Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental, Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal.

Tabel 22
Penyakit Yang Paling Banyak Diderita Tahun 2016

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Hipertensi primer	9705
2	Nasofaringitis akut (common cold)	8296
3	Rhematoid Artritis lainnya	5222
4	Gastritis (tidak ditentukan)	4259
5	Faringitis akut	3862
6	Kecelakaan dan ruda paksa	3263
7	Diabetes millitus type I	3094
8	Dermatitis kontak alergi	2967
9	Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental	2749
10	Penyakit pulpa dan jaringan periapikal	2654

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan juga dipengaruhi oleh penyediaan sarana prasarana kesehatan sebagai petunjang didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng didalam menyediakan sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat diwujudkan melalui pembangunan Rumah Sakit Pratamana di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt, yang telah diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 16 Juni 2016. Pembangunan RS Pratama ini melengkapi sarana prasarana pelayanan kesehatan yang telah ada. Sampai Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng terdapat 6 Rumah Sakit, 20 Puskesmas Rawat Jalan, 4 Puskesmas Rawat Inap, 74 Puskesmas Pembantu, 717 Posyandu, 82 Polindes/Poskesdes, 30 Balai Pengobatan, 7 BKIA, 318 Dokter Praktek Swasta, 211 Bidan Praktek Swasta.

Jumlah Tenaga Paramedis Non Perawat Tahun 2016 berjumlah 119 orang yang terbagi atas ; Tenaga sanitasi 51 orang, Tenaga Kesehatan masyarakat 23 orang, Tenaga Gizi 28 orang, Tenaga Analis Kesehatan 6 orang dan tenaga farmasi 11 orang. Sedangkan Tenaga Paramedis Perawat Kesehatan, Perawat ; 203 orang, Bidan ; 261 orang dengan kualifikasi pendidikan ; Sarjana Keperawatan ; 46 orang, D-III Keperawatan ; 86 orang,

SPK ; 71 orang, D-III Kebidanan ; 231 orang, D-I Kebidanan ; 30 orang. Untuk Tenaga Medis Kesehatan (dokter) yang ada sampai Tahun 2016 berjumlah 81 orang, meliputi Dokter Umum ; 54 orang dan Dokter Gigi ; 27 orang.

Tabel 23
Sarana Prasarana Pengobatan Tahun 2016

No.	Jenis Tempat Berobat	2015	2016
1	Rumah Sakit	6	6
2	Puskesmas Rawat Jalan	16	20
3	Puskesmas Rawat Inap	4	4
4	Puskesmas Pembantu	74	74
5	Posyandu	714	717
6	Polindes/Poskesdes	82	82
7	Balai Pengobatan	3	30
8	BKIA	2	7
9	Dokter Praktek Swasta	237	318
10	Bidan Praktek Swasta		211

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng

Pembangunan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Dengan Kantor yang berlokasi di Jalan Veteran No. 15 Singaraja, 81117, Telepon(0362) 21789. Dengan struktur organisasi terdiri atas ; KEPALA DINAS (Eselon II/b) dibantu oleh Sekretaris Dinas (Eselon III/a), 4 Kepala Bidang ; Bidang P2M dan PL, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Bina Kesehatan Keluarga, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 12 Kepala Seksi ; Seksi Pencegahan Penyakit Menular, Seksi Pemberantasan Penyakit Menular, Seksi Kesehatan lingkungan, Seksi Penyuluhan Kesehatan masyarakat, Seksi Peran Serta Masyarakat, Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat, Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia, Seksi Gizi, Seksi Yankes dasar dan rujukan, Seksi Perijinan dan sertifikasi, Seksi Kefarmasian dan alat Kesehatan. 3 Kasubabg di bawah Sekretaris Dinas ; Ksb. Umum, Ksb. Perencanaan, Ksb. Keuangan. UPTD ; 20 Kepala Puskesmas, Kepala Defo Farmasi, Kepala Lab Kesehatan Masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan 20 Puskesmas berjumlah 736 orang. **Dengan**

pangkat dan golongan terdiri atas : Pembina Utama Madya (IV/d) ; 2 orang Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 5 orang, Pembina (IV/a) ; 41 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 147 orang, Penata (III/c) ; 108 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 112 orang, Penata Muda (III/a) ; 72 orang, Pengatur Tk.I (II/d) ; 130 orang, Pengatur (II/c) ; 85 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 23 orang, Pengatur Muda ; 7 orang, Juru (I/c) ; 1 orang, Juru Muda Tk.I (I/b) ; 2 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan (Dinas Kesehatan)** : Strata 2 (S2) ; 11 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 37 orang, Diploma 3 (D3) ; 19 orang, Diploma 2 (D2); 4 orang, SMA/SMK/Mts ; 27 orang, SD ; 3 orang. **Jumlah Pejabat Struktural (Dinas Kesehatan)** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 17 pejabat. **Pejabat Fungsional (Dinas Kesehatan);** Perawat ; 3 orang, Perawat Gigi ; 1 orang, Bidan ; 2 orang, Gizi ; 1 orang, Asisten Apoteker; 1 orang, Sanitarian ; 5 orang, Penyuluh Kesehatan Masyarakat ; 7 orang, Penata Laboratorium Kesehatan Masyarakat ; 3 orang.

Untuk penyelenggaraan Urusan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.171.433.968.285,49 dan terealisasi sebesar Rp. 142.316.933.374,23 atau 83,02 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.48.986.815.500 dan terealisasi Rp.48.881.452.509 atau 99,78 persen dan belanja langsung sebesar Rp.122.447.152.785,49 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.93.435.480.865,23 atau mencapai 78,31 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.1.553.780.000 dan terealisasi Rp.1.320.215.000 atau 84,79 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp 57.494.732.731,82 dan terealisasi Rp. 45.178.281.112,98 atau mencapai 78,58 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp 63.398.640.053,67 dan terealisasi Rp 46.936.984.752,25 atau 74,03 persen. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan serta hasil kegiatan meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 5,016,462,699 dan terealisasi Rp. 3,854,452,897, atau 78,64 persen.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 2,347,517,000 dan terealisasi Rp. 1,546,303,578, atau 65,87 persen.

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 88,100,000 dan terealisasi Rp. 88,052,800, atau 99,94 persen. Dan realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi .
- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 2,476,453,100, dan terealisasi Rp. 1,347,680,589, atau 54,41 persen. Dan realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi .
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 141,423,800, dan terealisasi Rp. 85,361,305, atau 60,35 persen. Dan realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi .
- Program Perencanaan Anggaran SKPD, Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 127.710.300 dan terealisasi Rp. 119.572.442, atau 93,63 persen. Dijabarkan melalui kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan realisasi fisik 100 persen.
- Program Informasi Pembangunan Daerah, Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000 dan terealisasi Rp. 29.650.000, atau 98,83 persen. Dijabarkan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan dengan realisasi fisik 100 persen.
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 5.011.235.880 dan terealisasi Rp.4.779.092.376,98, atau 95,37 persen.
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 47.522.160.021,19 dan terealisasi Rp.31.780.367.466, atau 66,87 persen.
- Program Pengawasan Obat dan Makanan. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 214.548.500 dan terealisasi Rp.160.697.399, atau 74,90 persen. Dijabarkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan dengan realisasi fisik 100 persen.
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 1.790.890.900 dan terealisasi Rp. 1.611.967.941, atau 90,01 persen.
- Program Perbikan Gizi asyarakat. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 1.090.319.850 dan terealisasi Rp.1.038.419.325, atau 95,24 persen.

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 193.342.500 dan terealisasi Rp. 107.086.583, atau 55,39 persen.
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 6.126.948.185 dan terealisasi Rp.4.449.437.301, atau 72,62 persen.
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 368.749.500 dan terealisasi Rp.359.099.060, atau 97,38 persen. Dijabarkan melalui kegiatan Evaluasi dan Pengemangan Standar Pelayanan Kesehatan dengan realisasi fisik 100 persen.
- Program Pengadaan Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 14.079.349.375 dan terealisasi Rp.13.667.899.483, atau 97,08 persen.
- Program Pengadaan peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru, Rumah Sakit Mata. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 31.877.374.350 dan terealisasi Rp 24.359.699.844, atau 76,42 persen.
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 245.924.000 dan terealisasi Rp. 157.249.913, atau 63,94 persen.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 152.111.000 dan terealisasi Rp. 147.627.620, atau 97,05 persen.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 402.623.000 dan terealisasi Rp.401.694.807, atau 99,77 persen.
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 3.036.208.825 dan terealisasi Rp.1.642.056.749, atau 54,08 persen.

Rincian realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Urusan Kesehatan tersaji melalui tabel 23.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD

digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kesehatan ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 85.765.153,56. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 85.623.000.963 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 245.764.190.

Belum dijumpai permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan pada Tahun 2016.

Tabel 24
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
Tahun 2016.

NO	PROGRAM		KEGIATAN	DANA (Rp.)	REALISASI		
					KEUANGAN		FISIK
					Rp.	%	%
1	2		3	4	5	6	7
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00	100,00
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	439.870.500,00	384.270.765,00	87,36	100,00
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	28.240.000,00	25.989.200,00	92,03	100,00
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.350.306.196,00	2.273.102.242,00	96,72	100,00
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	582.853.500,00	539.973.537,00	92,64	100,00
		6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	38.000.000,00	31.308.200,00	82,39	95,24
		7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	71.324.234,00	71.323.984,00	100,00	100,00
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.686.000,00	135.646.720,00	91,23	100,00
		9	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.017.000,00	90.913.790,00	95,68	100,00
		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	629.956.519,00	579.928.590,00	92,06	97,72
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.700.000,00	94,44	100,00
		12	Penyediaan Makanan dan Minuman	332.733.000,00	208.143.252,00	62,56	86,78
		13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/dalam Daerah	297.675.750,00	268.766.183,00	90,29	100,00

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	680.000.000,00	459.862.000,00	67,63	100,00
		2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	239.000.000,00	228.995.300,00	95,81	100,00
		3	Pengadaan Meubeleur	183.900.000,00	172.832.998,00	93,98	100,00
		4	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/prasarana Upacara	467.850.000,00	453.680.820,00	96,97	100,00
		5	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	514.467.000,00	440.904.000,00	85,70	100,00
		6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	78.000.000,00	58.179.000,00	74,59	100,00
		7	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	172.200.000,00	156.122.050,00	90,66	100,00
		8	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	80.100.000,00	76.036.410,00	94,93	100,00
		9	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah	10.000.000,00	9.975.000,00	99,75	100,00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	65.100.000,00	65.062.800,00	99,94	100,00
		2	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	23.000.000,00	22.990.000,00	99,96	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	2.433.750.000,00	1.669.669.089,00	68,60	77,92
		2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	42.703.100,00	35.073.948,00	82,13	100,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.165.300,00	74.840.787,00	93,36	100,00
		2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	61.258.500,00	58.871.890,00	96,10	100,00
6	Perencanaan Anggaran SKPD	1	Penyusunan Anggaran SKPD	127.710.300,00	119.572.442,00	93,63	100,00
7	Informasi Pembangunan Daerah	1	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	30.000.000,00	29.650.000,00	98,83	100,00
8	Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.846.957.280,00	4.619.021.768,98	95,30	100,00
		2	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	123.000.000,00	122.995.508,00	100,00	100,00

		3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	41.278.600,00	37.075.100,00	89,82	90,00
9	Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	654.897.807,00	620.229.089,00	94,71	100,00
		2	Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan wabah	101.486.500,00	90.076.977,00	88,76	90,28
		3	Perbaikan Gizi Masyarakat	266.200.000,00	252.710.750,00	94,93	100,00
		4	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	646.775.000,00	621.209.858,00	96,05	100,00
		5	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	2.081.143.994,19	1.604.815.159,00	77,11	100,00
		6	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	88.233.000,00	65.597.300,00	74,35	83,33
		7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula I	1.977.362.556,00	1.177.809.035,00	59,56	70,56
		8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Tejakula II	1.754.409.315,00	1.013.747.557,00	57,78	76,46
		9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan I	2.057.177.947,00	1.099.575.173,00	53,45	89,94
		10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Kubutambahan II	2.171.408.716,00	1.679.038.469,00	77,32	83,05
		11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan I	1.751.781.871,00	1.087.282.357,00	62,07	81,52
		12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sawan II	1.483.658.609,00	1.006.910.270,00	67,87	74,10
		13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng I	3.493.686.497,00	1.795.691.812,00	51,40	72,38
		14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng II	980.646.981,00	801.044.625,00	81,69	87,47
		15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Buleleng III	2.175.950.662,00	1.193.983.335,00	54,87	75,48
		16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada I	2.915.016.246,00	1.882.785.658,00	64,59	85,52

		17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Sukasada II	1.414.241.904,00	960.909.566,00	67,95	71,86
		18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar I	2.554.022.065,00	1.620.519.091,00	63,45	88,01
		19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Banjar II	1.070.740.430,00	701.088.713,00	65,48	83,63
		20	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt I	2.106.999.848,00	1.127.947.736,00	53,53	77,08
		21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt II	2.038.529.270,00	1.315.590.997,00	64,54	76,22
		22	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Seririt III	766.830.281,00	474.579.059,00	61,89	83,34
		23	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu I	1.524.007.650,00	927.358.150,00	60,85	84,09
		24	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Busungbiu II	886.928.150,00	496.647.850,00	56,00	90,69
		25	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak I	3.419.674.922,00	2.258.037.553,00	66,03	70,38
		26	Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP Puskesmas Gerokgak II	2.352.349.800,00	1.535.797.878,00	65,29	82,43
		27	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	241.666.000,00	232.303.500,00	96,13	100,00
			Tejakula I				
		28	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	226.561.000,00	214.840.125,00	94,83	100,00
			Tejakula II				
		29	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	226.561.000,00	226.216.900,00	99,85	100,00
			Kubutambahan I				
		30	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	241.666.000,00	224.360.100,00	92,84	100,00
			Kubutambahan II				

		31	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I	241.666.000,00	241.664.000,00	100,00	100,00
		32	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	226.561.000,00	199.604.701,00	88,10	100,00
			Sawan II				
		33	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	256.770.000,00	190.517.984,00	74,20	100,00
			Buleleng I				
		34	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	226.561.000,00	209.152.200,00	92,32	100,00
			Buleleng II				
		35	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	241.666.000,00	210.616.000,00	87,15	100,00
			Buleleng III				
		36	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	256.770.000,00	233.862.939,00	91,08	100,00
			Sukasada I				
		37	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	241.666.000,00	236.675.000,00	97,93	100,00
			Sukasada II				
		38	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	256.770.000,00	241.832.500,00	94,18	100,00
			Banjar I				
		39	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	226.561.000,00	214.241.000,00	94,56	100,00
			Banjar II				
		40	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	241.666.000,00	188.375.000,00	77,95	100,00
			Seririt I				
		41	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II	226.561.000,00	193.495.900,00	85,41	100,00

		42	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	226.561.000,00	201.996.300,00	89,16	100,00
			Seririt III				
		43	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	256.770.000,00	255.263.000,00	99,41	100,00
			Busungbiu I				
		44	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	226.561.000,00	183.430.500,00	80,96	100,00
			Busungbiu II				
		45	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	256.770.000,00	253.094.800,00	98,57	100,00
			Gerokgak I				
		46	Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	241.666.000,00	217.841.000,00	90,14	100,00
			Gerokgak II				
10	Pengawasan Obat dan Makanan	1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	214.548.500,00	160.697.399,00	74,90	100,00
11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	218.417.900,00	216.117.718,00	98,95	100,00
		2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	1.090.425.000,00	920.819.865,00	84,45	100,00
		3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19.965.000,00	19.481.600,00	97,58	100,00
		4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	462.083.000,00	455.548.758,00	98,59	100,00
12	Perbaikan Gizi Masyarakat	1	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	93.619.550,00	93.220.760,00	99,57	100,00
		2	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	578.144.250,00	577.069.275,00	99,81	100,00
		3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit. A & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	332.750.000,00	283.774.305,00	85,28	100,00
		4	Pemberdayaan Masyarakat utk. Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	66.440.000,00	66.131.195,00	99,54	100,00
		5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19.366.050,00	18.223.790,00	94,10	100,00

13	Pengembangan Lingkungan Sehat	1	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	75.690.500,00	45.673.583,00	60,34	75,00
		2	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	42.652.000,00	2.917.000,00	6,84	50,00
		3	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	55.000.000,00	49.121.000,00	89,31	92,86
		4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.000.000,00	9.375.000,00	46,88	75,00
14	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	902.593.400,00	894.522.504,00	99,11	100,00
		2	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak sekolah	358.560.000,00	331.767.310,00	92,53	100,00
		3	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.240.900.084,00	1.387.325.448,00	61,91	71,43
		4	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	243.995.250,00	243.745.000,00	99,90	100,00
		5	Peningkatan Imunisasi	48.961.000,00	42.208.598,00	86,21	90,00
		6	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	75.197.000,00	74.563.699,00	99,16	100,00
		7	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan	2.228.253.400,00	1.448.154.745,00	64,99	76,39
			Pemberantasan Penyakit				
		8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	28.488.051,00	27.149.997,00	95,30	100,00
15	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	Evaluasi dan Pengembagangan Standar Pelayanan Kesehatan	81.972.000,00	81.960.355,00	99,99	100,00
		2	Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	286.777.500,00	277.138.705,00	96,64	100,00
16	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	11.587.328.675,00	11.363.537.333,00	98,07	100,00
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	577.320.500,00	558.668.650,00	96,77	100,00
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Dokter dan Paramedis	889.935.200,00	876.980.800,00	98,54	100,00
		4	Rehabilitasi Puskesmas	1.024.765.000,00	868.712.700,00	84,77	100,00
17	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit	1	Pembangunan Rumah Sakit	25.883.639.500,00	20.080.462.000,00	77,58	100,00
		2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit	1.300.000.000,00	1.252.000.000,00	96,31	100,00
		3	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	3.455.543.850,00	1.836.833.794,00	53,16	66,67

	Paru-paru/Rumah Sakit Mata	4	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	857.316.000,00	857.316.000,00	100,00	100,00
		5	Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Tunggu dan Lain-lain)	380.875.000,00	333.088.050,00	87,45	90,63
18	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	216.612.000,00	131.217.074,00	60,58	66,67
		2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	29.312.000,00	26.032.839,00	88,81	100,00
19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	124.381.000,00	122.928.528,00	98,83	100,00
		2	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita	11.087.000,00	9.837.000,00	88,73	100,00
		3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	16.643.000,00	14.862.092,00	89,30	90,00
20	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	180.850.000,00	180.089.689,19	99,58	100,00
		2	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	64.900.000,00	64.863.469,00	99,94	100,00
		3	Pelayanan Kesehatan	94.650.000,00	94.523.150,00	99,87	100,00
		4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	62.223.000,00	62.218.499,00	99,99	100,00
21	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	582.020.000,00	570.832.366,00	98,08	100,00
		2	Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	234.600.000,00	230.557.047,00	98,28	100,00
		3	Pemeliharaan Kesehatan Ibu	1.950.655.825,00	668.277.499,00	34,26	55,56
		4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	268.933.000,00	172.389.837,00	64,10	75,00
	Total Kinerja Kegiatan		125	122.447.152.785,19	93.435.480.865,17	76,31	93,61

Sumber data : Diskes Kabupaten Buleleng, 2016

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG.

Urusan kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit sebagai unit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok RSUD Kabupaten Buleleng yaitu membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Sesuai dengan visi RSUD Kabupaten Buleleng, salah satu tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan pelayanan adalah menjadi Rumah Sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional dan pelayanan berbasis pendidikan. Kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Buleleng ditujukan untuk:

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Buleleng adalah:

- Terlayannya pasien di Rumah Sakit secara memadai sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung IGD.
- Terlaksananya kebutuhan alat kesehatan.
- Terlayannya pasien di rumah sakit secara memadai.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi, yaitu:

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan yaitu penyusunan standar kesehatan. Kegiatan ini merupakan persiapan dan penilaian akreditasi rumah sakit. Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Setiap rumah sakit baik pemerintah maupun swasta wajib untuk dilaksanakan penilaian akreditasi. Penilaian ini dilakukan oleh tim independent yang berasal dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

2. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk memenuhi hal tersebut, RSUD Kabupaten Buleleng telah melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap. Program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan ruang gawat darurat, dan kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit. Kegiatan pengembangan IGD tahun 2016 merupakan pembangunan IGD tahap II. Sedangkan kegiatan pengadaan alat-alat rumah sakit merupakan pengadaan alat kesehatan untuk melengkapi prasarana gedung IGD.

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD).

Program ini dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu pelayanan kesehatan (BLUD) yang merupakan kegiatan untuk menunjang SPM (Standar Pelayanan Minimal) rumah sakit. Kegiatan ini ditujukan untuk pembiayaan operasional rumah sakit yang dibagi menjadi 132 sub kegiatan, mulai dari pembiayaan pelayanan, pembiayaan umum dan administrasi, serta biaya investasi.

RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Pedoman penyusunan SPM, jenis pelayanan yang diukur berjumlah 22 jenis pelayanan dengan 172 indikator. ***Capaian SPM rumah sakit tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 24.***

Pembangunan urusan kesehatan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buleleng. Data kepegawaian pada RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2016, Jumlah Pegawai Negeri Sipil adalah 519 orang, jumlah pegawai kontrak adalah 619 orang. Dari 519 tenaga PNS, jumlah tenaga golongan IV adalah 59 orang; golongan III adalah 282 orang; golongan II adalah 168 orang; dan golongan I adalah 10 orang. Dari sejumlah PNS tersebut, jumlah eselon II adalah 1 orang; eselon III adalah 12 orang; eselon IV adalah 18 orang. Tenaga fungsional tenaga kesehatan adalah sejumlah 339 orang, dan tenaga staf adalah 149 orang.

Untuk penyelenggaraan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD tahun 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 219.068.023.522,49 dan sampai dengan bulan November 2016 terealisasi Rp. 177.924.593.723,89 atau 81,22% yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 35.046.412.000,00 dan terealisasi Rp. 32.162.937.772,00 atau 91,77%. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 184.021.611.522,49 dan terealisasi Rp. 141.495.423.774,05 atau 76,86%.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada RSUD Kabupaten Buleleng tahun 2016 terinci melalui realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Program ini pembiayaannya bersumber dari DAK non fisik tahun 2016 dengan anggaran Rp. 476.860.000,00 dan sampai dengan November 2016 terealisasi sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi keuangan dan fisik 0 %. Sesuai dengan Juknis DAK tahun 2016, anggaran ini diperuntukkan untuk rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi rumah sakit, sedangkan RSUD Kabupaten Buleleng telah melaksanakan penilaian akreditasi pada tahun 2015 sehingga kegiatan ini tidak bisa terealisasi.

2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

Anggaran dari program ini adalah Rp. 46.223.860.957,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.158.947.786,48 atau 95,53% dan realisasi fisik mencapai 99,04%. Realisasi dan hasil kegiatan meliputi pengembangan ruang gawat darurat, dengan terlaksananya lanjutan pembangunan gedung IGD 4 lantai, dialokasikan dengan anggaran Rp. 33.918.951.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.884.546.000 atau 99,90% dan realisasi fisik mencapai 100%. Pengadaan alat-alat kesehatan dengan anggaran total Rp. 12.304.909.457,00 terdiri dari DAK tahun 2016 sebesar Rp. 7.222.932.000,00; dana silpa DAK sebesar Rp. 71.382.357,00; dan dana APBD sebesar Rp. 5.010.595.100,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kebutuhan alat kesehatan untuk melengkapi prasarana gedung IGD , yang terealisasi Rp. 10.274.401.786,48 atau 83,50% dengan realisasi fisik mencapai 98,09%

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD).

Program ini pembiayaannya bersumber dari pendapatan BLUD yang terdiri dari silpa BLUD, jasa giro BLUD, dan pendapatan BLUD dengan anggaran

sebesar Rp. 137.320.890.565,49 dan sampai dengan November 2016 terealisasi sebesar Rp. 133.765.645.937,41 atau 97,41%, dengan realisasi fisik mencapai 99,16%.

Proses perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 melalui tahapan sebagai berikut: Forum SKPD menghasilkan rancangan Renja SKPD yang akan dirumuskan dalam rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan masukan dari kebijakan dan hasil evaluasi untuk bahan musrenbang kabupaten. Musrenbang menghasilkan RKPD diantaranya: Kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan sebagai masukan utama untuk penyempurnaan rancangan RKPD dan Renja SKPD. Sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati yang antara lain ditetapkannya KUA (Kebijakan Umum APBD). KUA dilaksanakan dan menghasilkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS dibahan bersama-sama dengan DPR. Nota kesepakatan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS. Berdasarkan KUA dan PPAS selanjutnya dilakukan penelitian RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kompilasi RKA yang telah dibahas oleh Tim Anggaran menjadi Rancangan APBD diajukan dan dibahas dengan DPRD dan selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur Bali. Penetapan APBD dengan PERDA dilaksanakan setelah turunnya hasil verifikasi dari Gubernur. Setelah APBD ditetapkan, disusun DPA dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Secara umum kondisi sarana dan parasaran yang dimiliki cukup memadai dalam menunjang pelayanan kesehatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Terbatasnya tenaga medis khususnya dokter spesialis dan sub spesialis.
- Dukungan anggaran untuk investasi bangunan dan sarana prasarana masih kurang.

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

- Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng maupun dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk rekrutmen tenaga dokter spesialis.
- Pengajuan usulan anggaran dana APBD maupun dana APBN untuk pembangunan maupun sarana prasarana rumah sakit.

Tabel 25
Capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2016

No	INDIKATOR	Tahun 2016	Standar	Capaian
1. PELAYANAN GAWAT DARURAT				
1	Kemampuan Menangani Life saving	93,75%	100%	Belum Memenuhi Standar
2	Pemberi Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat	92,00%	100%	Belum Memenuhi Standar
3	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	
4	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam	
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	2,56 menit	≤ 5 menit	
6	Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%	
7	Kematian pasien di IGD	4,34 per 1000	≤ 2 perseribu	Belum Memenuhi Standar
8	Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	100%	≥ 70 %	
2. PELAYANAN RAWAT JALAN				
1	Ketersediaan Pelayanan	100%	100 %	

2	Pemberi pelayanan di klinik spesialis	100%	100%	
3	Jam buka pelayanan rawat jalan	100%	100%	
4	Waktu tunggu rawat jalan	46,89 menit	≤ 60 Menit	
5	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	85,71%	100%	Belum Memenuhi Standar
6	Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	
7	Ketersediaan pelayanan VCT	Tersedia	Tersedia dengan tenaga terlatih	
8	Peresepan obat sesuai formularium	96,67%	100%	Belum Memenuhi Standar
9	Pencatatan dan pelaporan tuberculosi di rumah sakit	100%	100%	
10	Kepuasan pelanggan pada rawat jalan	100%	≥ 90%	
3. PELAYANAN RAWAT INAP				
1	Ketersediaan pelayanan rawat inap	81,82%	100%	Belum Memenuhi Standar
2	Pemberi pelayanan di rawat inap	95,96%	100%	Belum Memenuhi Standar
3	Tempat tidur dengan pengaman	83,06%	100%	Belum Memenuhi Standar

4	Kamar mandi dengan pengaman	90,48%	100%	Belum Memenuhi Standar
5	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100,00%	100%	
6	Jam visite dokter spesialis	96,20%	100%	Belum Memenuhi Standar
7	Kejadian infeksi pasca operasi	0,22%	$\leq 1,5 \%$	
8	Angka keadian infeksi nosokomial	0,48%	$\leq 9 \%$	
9	Tidak adanya kejadian pasien jatuh	99,96%	100%	Belum Memenuhi Standar
10	Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100,00%	100%	
11	Pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	100,00%	100%	
12	Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	0,38%	$\leq 5\%$	
13	Kematian pasien > 48 jam	29,85	$\leq 25/1000$	Belum Memenuhi Standar
14	Kepuasan pelanggan rawat inap	99,84%	$\geq 90 \%$	
4. PELAYANAN BEDAH SENTRAL				
1	Ketersediaan tim operator	63,16%	sesuai dengan kelas RS	Belum Memenuhi Standar

2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang operasi	87,33%	sesuai dengan kelas RS	Belum Memenuhi Standar
3	Kemampuan melakukan tindakan operatif	84,21%	100%	Belum Memenuhi Standar
4	Waktu tunggu operasi elektif	0,01 hari	≤ 2 hari	
5	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	
6	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	
7	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	
8	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah dioperasi	100%	100%	
9	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	≤ 6%	
10	Kajadian kematian di meja operasi	0%	≤ 1%	
11	Kepuasan pelanggan	100%	≥ 90%	
5. PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI				
1	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	
2	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedia	tersedia	

3	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	
4	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%	100%	
5	Kemampuan menangani bayi baru lahir dengan asfiksia	100%	100%	
6	Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	3,71%	≤ 20%	
7	Pelayanan Kontrasepsi mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten	100%	100%	
8	Pelayanan konseling pada akseptor kontrasepsi mantap	100%	100%	
9	Kejadian kematian ibu karena persalinan	0	Pendarahan ≤1%, Preeklamsi ≤30%, Sepsis ≤0,2%	
10	Kepuasan pelanggan		≥ 80%	data belum tersedia
6. PELAYANAN INTENSIF				
1	Pemberi pelayanan intensif	21,74%	100%	Belum Memenuhi Standar
2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU	50,00%	sesuai dengan kelas RS	Belum Memenuhi Standar
3	Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan	100%	sesuai dengan kelas	

	ventilator		RS	
4	Kepatuhan terhadap hand hygiene	100%	100%	
5	Kejadian infeksi nosokomial di ruang ICU	0,00%	≤ 9%	
6	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0	≤ 3%	
7	Kepuasan pelanggan	99,22%	≥ 70%	
7. PELAYANAN RADIOLOGI				
1	Pemberi pelayanan radiologi	80,77%	100%	Belum Memenuhi Standar
2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi	87,50%	sesuai dengan kelas RS	Belum Memenuhi Standar
3	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	55,8 menit	≤ 3 jam	
4	Kerusakan foto	1,85%	≤ 2%	
5	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian label	99,94%	100%	Belum Memenuhi Standar
6	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	100%	100%	
7	Kepuasan pelanggan	100%	≥ 80%	
8. PELAYANAN PATOLOGI KLINIK				

1	Pemberi pelayanan patologi klinik	80,00%	Dokter spesialis patologi klinik dan analisis sesuai dgn persyaratan RS	Belum Memenuhi Standar
2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan laboratorium patologi klinik	40,00%	sesuai kelas RS	Belum Memenuhi Standar
3	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium klinik	59,06menit	≤ 120 menit	
4	Tidak adanya kejadian tertukar specimen	100%	100%	
5	Kemampuan memeriksa HIV-AIDS	Tersedia	Tersedia	
6	Kemampuan mikroskopis TB paru	Tersedia	Tersedia	
7	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	89,61%	100%	Belum Memenuhi Standar
8	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	
9	Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100%	100%	
10	Kepuasan pelanggan	100%	≥ 80%	
9. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK				
1	Pemberi pelayanan rehabilitasi medik	belum sesuai	sesuai dgn ketentuan kelas RS	Belum Memenuhi Standar

2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan medik	belum sesuai	sesuai dengan kelas RS	Belum Memenuhi Standar
3	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100,00%	100%	
4	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rahabilitasi yang direncanakan	42,67%	$\leq 50\%$	
5	Kepuasan pelanggan	100,00%	$\geq 80\%$	
10. PELAYANAN FARMASI				
1	Pemberi pelayanan farmasi	66,67%	100%	Belum Memenuhi Standar
2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	sesuai	sesuai kelas RS	
3	Ketersediaan formularium	Tersedia	tersedia dan updated paling lama 3 tahun	
4	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	11,53 menit	≤ 30 menit	
5	Waktu tunggu pelayanan obat racik	31,25 menit	≤ 60 menit	
6	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	
7	Kepuasan pelanggan	100,00%	$\geq 90\%$	
11. PELAYANAN GIZI				

1	Pemberi pelayanan gizi	48,65%	sesuai dgn ketentuan kelas RS	Belum Memenuhi Standar
2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan gizi	67,72%	sesuai dgn kelas RS	Belum Memenuhi Standar
3	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	$\geq 90\%$	
4	Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100%	100%	Belum Memenuhi Standar
5	Sisa makanan yang tidak termakan pasien	13,68%	$\leq 20\%$	
6	Kepuasan pelanggan	97,86%	$\geq 80\%$	
12. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH				
1	Tenaga penyedia pelayanan bank darah	sesuai	sesuai dgn ketentuan pedoman bank darah RS	
2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah	sesuai	sesuai dgn ketentuan pedoman bank darah RS	
3	Kejadian reaksi transfusi	2,34%	$\leq 0,01\%$	Belum Memenuhi Standar
4	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100,00%	100%	
5	Kepuasan pelanggan		$\geq 80\%$	data belum tersedia

13. PELAYANAN KELUARGA MISKIN				
1	Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin	data belum tersedia	Tersedia	data belum tersedia
2	Kebijakan RS untuk pelayanan pasien keluarga miskin	data belum tersedia	ada	data belum tersedia
3	Waktu tunggu verifikasi kepesertaan	data belum tersedia	≤ 15 menit	data belum tersedia
4	Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	data belum tersedia	100%	data belum tersedia
5	Pasien keluarga miskin yang dilayani	data belum tersedia	100%	data belum tersedia
6	Kepuasan pelanggan	data belum tersedia	≥ 80%	data belum tersedia
14. PELAYANAN REKAM MEDIS				
1	Pemberi pelayanan rekam medis	51,55%	Sesuai dengan persyaratan kelas RS	Belum Memenuhi Standar
2	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	5,66	≤ 10 menit	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	5,19	≤ 15 menit	
4	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	94,54%	100%	Belum Memenuhi Standar
5	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan	94,95%	100%	Belum Memenuhi Standar

	informasi yang jelas			
6	Kepuasan Pelanggan	99,03%	≥ 80 %	
15. PENGOLAHAN LIMBAH				
1	Adanya pengggung jawab pengelolaan limbah Rumah Sakit	sesuai	sesuai dgn ketentuan kelas RS dan Permenkes No 1204 th 2004	
2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah RS	sesuai	sesuai dgn ketentuan kelas RS dan Permenkes No 1204 th 2004	
3	Pengelolaan limbah cair	sesuai	sesuai peraturan perundangan	
4	Pengelolaan limbah padat	sesuai	sesuai peraturan perundangan	
5	Baku mutu limbah cair	100%	BOD:30mg/l, COD:80mg/l, TSS:30 mg/l, Ph:6-9	
16. ADMINISTRASI MANAJEMEN				
1	Kelengkapan pengisian jabatan	100	≥90%	
2	Peraturan internal RS	ada	ada ditetapkan oleh pemilik	

3	Peraturan karyawan RS	ada	ada ditetapkan oleh direktur RS	
4	Daftar urutan kepangkatan	ada	ada ditetapkan oleh direktur RS	
5	Perencanaan strategis RS	ada	ada dokumen rencana strategis	
6	Perencanaan pengembangan SDM RS	ada	ada dokumen rencana pengembangan SDM	
7	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	Data belum tersedia	100%	data belum tersedia
8	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100	100%	
9	Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100	100%	
10	Pelaksanaan Rencana Pengembangan SDM	64,5	$\geq 90\%$	Belum Memenuhi Standar
11	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100	$\geq 90\%$	
12	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	1,99 jam	≤ 2 jam	
13	Cost recovery	88,08	$\geq 60\%$	
14	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	ada	100%	

15	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	20	≥ 60%	Belum Memenuhi Standar
16	Ketepatan waktu pemberian insentif	100	100%	
17. AMBULANS/KERETA JENAZAH				
1	Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah	24 jam	24 jam	
2	Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah	8	Supir ambulans/mobil jenazah yang mendapat pelatihan supir ambulans	
3	Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah	Mobil ambulans terpisah dari mobil jenazah	Mobil ambulans terpisah dari mobil jenazah	
4	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans /mobil jenazahdi RS	5,92	≤ 30menit	
5	Waktu tanggap memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah RS	8,77	≤ 30menit	
6	Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkab kecacatan atau kematian	100,00%	100%	
7	Kepuasan pelanggan		≥ 80%	data belum tersedia
18. PERAWATAN JENAZAH				
1	Ketersediaan pelayanan perawatan jenazah	Tersedia 24 jam	Tersedia 24 jam	

2	Ketersediaan fasilitas dan peralatan kamar jenazah	66,67%	sesuai dengan kelas RS	Belum Memenuhi Standar
3	Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah	77,78%	Sesuai dgn ketentuan kelas RS dan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK direktur	Belum Memenuhi Standar
4	Waktu tanggap pelayanan perawatan jenazah	100,00%	100%	
5	Perawatan jenazah sesuai universal precaution	100,00%	100%	
6	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah	100,00%	100%	
7	Kepuasan pelanggan	100%	≥ 80%	
19. PELAYANAN LAUNDRY				
1	Ketersediaan pelayanan laundry	Tersedia	Tersedia	
2	Adanya penanggung jawab pelayanan laundry	Ditetapkan dengan SK direktur	Ditetapkan dengan SK direktur	
3	Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan laundry	sesuai dengan kelas RS	sesuai dengan kelas RS	

4	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100,00%	100%	
5	Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100,00%	100%	
6	Ketersediaan linen	2,8	2,5 - 3 set untuk tiap tempat tidur	
7	Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	100,00%	100%	
20. PELAYANAN PEMELIHARAAN RS				
1	Adanya penanggung jawab pemeliharaan sarana RS	Ditetapkan dengan SK direktur	Ditetapkan dengan SK direktur	
2	Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia sesuai dengan kelas RS	Tersedia sesuai dengan kelas RS	
3	Waktu tanggap kerusakan alat	94,91%	≥ 80%	
4	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100,00%	100%	
5	Ketepatan waktu kalibrasi alat	70,90%	100%	Belum Memenuhi Standar
6	Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	87,50%	100%	Belum Memenuhi Standar
21. PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI				
1	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	100,00%	≥75%	

2	Ketersediaan APD (alat pelindung diri) di setiap instalasi/departemen	100,00%	≥75%	
3	Rencana program PPI	ada	Ada	
4	Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	94,12%	100%	
5	Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100,00%	100%	
6	Pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di RS	100,00%	≥75%	
22. PELAYANAN KEAMANAN				
1	Petugas keamanan bersertifikat keamanan	96,88	100%	Belum Memenuhi Standar
2	Sistem Pengamanan	0	100%	Belum Memenuhi Standar
3	Petugas keamanan melakukan pengawasan keliling RS	100	100%	
4	Evaluasi terhadap sistem pengamanan	100	100%	
5	Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang	94,44	100%	Belum Memenuhi Standar
6	Kepuasan pasien terhadap pelayanan keamanan		≥ 80%	data belum tersedia

Sumber data : RSUD Kabupaten Buleleng. 2016

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan hidup yang cenderung eksploitatif merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sedang giat – giatnya melaksanakan pembangunan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan luas mencapai wilayah 136.588 Ha, yang merupakan 24,25 persen dari luas Provinsi Bali dan jumlah penduduk sekitar 807.598 jiwa pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mengelola dinamika kependudukan dan kelestarian sumber daya alam guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan landasan falsafah Tri Hita Karana, sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Buleleng “terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana ” Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berkomitmen mewujudkan keserasian hubungan manusia dengan Penciptanya, keserasian hubungan manusia dengan sesamanya dan keserasian hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Visi tersebut sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka unsur konservasi dan pelestarian lingkungan hidup harus dimasukkan dalam kerangka proses pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk pelaksanaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Badan Lingkungan Hidup.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pada Badan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 14 program dan 48 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor / RT

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

e. Program Perencanaan Anggaran SKPD, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan Anggaran SKPD

f. Program Informasi Pembangunan Daerah, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

g. Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

i. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Pengkajian Dampak Lingkungan
- Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
- Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
- Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

j. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air
- Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna

k. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

l. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

m. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penegakan Hukum Lingkungan
- Penyuluhan

n. Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

- Pengembangan Desa Sadar Lingkungan
- Monev.

Standar pelayanan minimal bidang penataan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup pada Tahun 2016 tersaji pada tabel 26.

Pembangunan di bidang Lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Buleleng, yang didukung oleh personil sebagaimana tabel berikut ini.

TABEL 26
*Kondisi Pegawai Pada Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng, 2016*

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	34 orang
	Pegawai Kontrak	57 orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina (IV/a)	6
	Penata Tk. I (III/d)	4
	Penata (III/c)	6
	Penata Muda Tk.I (III/b)	3
	Pengatur Tk.I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	6
	Pengatur Muda (II/a)	1
	Juru (I/c)	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	4
	SI/D4	14
	D3	3
	D2	12
	SMA/SMK/MTs	1

4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon Iva	11

Sumber data : BLH Kabupaten Buleleng, 2016

Pembiayaan dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Badan lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dialokasikan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 terinci sebagaimana berikut ; Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.7.641.088.403,89 dan terealisasi sebesar Rp.7.234.868.699 atau 95,94 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.2.704.811.000 dan terealisasi Rp. 2.684.122.237 atau 99,24 persen dan belanja langsung sebesar Rp.4.836.277.403,89 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 4.550.736.462 atau mencapai 94,10 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 267.145.000 dan terealisasi Rp.262.895.000, atau 98,41 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 3.295.541.703,89 dan terealisasi Rp.3.075.571.162 atau mencapai 93,33 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.1.273.590.700 dan terealisasi Rp. 1.212.270.300 atau 95,19 persen.

Out come pelaksanaan kegiatan pokok pada Tahun Anggaran 2016 diantaranya adalah :

- Tersedianya 50 unit alat biopori, unit mesin pencacah sampah organik, 7 unit mesin pencacah sampah plastik, , 4 unit sepeda motor roda 3 pengangkut sampah, 4 unit mesin pres sampah plastik, 96 komposter, 600 buah keranjang sampah, 200 buah karung sampah, 284 buah bak sampah dan terbangunnya 2 unit bangunan rumah kompos.
- Terlaksananya penilaian kota sehat di 19 titik lokasi dalam upaya meraih tropy adipura. Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Buleleng meraih Tropy Adipura (Adipura Buana) kategori kota kecil.
- Tersedianya data pemantauan dan pengukuran kualitas air 15 titik lokasi yaitu 2 danau, 3 sungai, 5 lokasi laut dan 5 lokasi sumur.
- Tersedianya data pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien di 12 titik lokasi udara.
- Tersedianya data hasil pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang wajib Amdal, dan UKL-UPL dengan target 33 usaha/kegiatan.

- Tersedianya laporan hasil pembinaan pengelolaan limbah B3 dengan target sasaran 60 usaha/kegiatan namun terealisasi 20 usaha/kegiatan. Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan terhadap 150 usaha / kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup, terealisasi 182 usaha/kegiatan.
- Tersedianya data hasil penilaian peringkat kinerja perusahaan(proper) terhadap 3 usaha/kegiatan
- Terlaksananya pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan perusahaan (PKPLP) terhadap 15 usaha/kegiatan.
- Terjaganya kebersihan tukad/sungai di sepanjang tukad buleleng dengan memasang jaring sampah dan mempekerjakan 1 tenaga kebersihan tukad/sungai
- Tersedianya 2 jenis dokumen / buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Buleleng. Buku SLHD menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan tata praja lingkungan di daerah dan sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- Terlaksananya program Adiwiyata kepada 27 sekolah (SD,SLTP,SLTA) Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan yang berkelanjutan.
- Komponen Adiwiyata meliputi Kebijakan berwawasan lingkungan, Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
- Tersusunnya profil kalpataru dengan mengajukan 3 calon. Tahun 2016 berhasil meraih tropi kalpataru jalur perseorangan.
- Terlaksananya lomba menggambar bagi anak TK dan SD yang dilaksanakan di danau buyan.
- Terbangunnya 7 unit sumur resapan.
- Terbangunnya 8 unit bangunan rumah jamban keluarga (jamban sehat) yang di berikan kepada 8 kepala keluarga yang betul-betul tidak memiliki jamban keluarga di 2 desa pakraman : desa pakraman tukad sumaga 4 KK dan desa pakraman tigawada 4 KK.

- Terbangunnya 51 unit lubang biopori sebagai daerah resapan air diperuntukan kepada calon peserta program adiwiyata.
- Tersedianya 4 jenis bahan kimia
- Tersedianya 1 jenis alat – alat laboratorium kimia
- Terlaksananya kalibrasi alat – alat laboratorium lingkungan selama 1 tahun.
- Terlaksananya pembersihan tumbuhan liar atau enceng gondok di danau buyan dengan mempekerjakan 20(dua puluh) orang tenaga kontrak dan menggunakan 4 (empat) unit perahu fiber atau katamaran
- Terlaksananya pengawasan terhadap keanekaragaman hayati flora dan fauna yang melalui kegiatan Memelihara hewan/burung yang ada di taman kehati berupa penyediaan bahan makanan dan Memelihara dan menjaga kebersihan areal Hutan Kota.
- Pengadaan 21 jenis bibit tananam.
- Tersedianya data usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan di 2 kecamatan.
- Terlaksananya kegiatan PNLG (Pemsea Network Of Goverment) yang di tahun 2016 di selenggarakan di Negara Korea. Kegiatan ini rutin dilakukan mengingat Pemerintah Kabupaten Buleleng masuk sebagai anggota PEMSEA (kegiatan di bidang kemaritiman) dan membayar uang kontribusi.
- Tersedianya data kelompok masyarakat pelestari terumbu karang di 2 kecamatan.
- Tersedianya data inventarisasi dan verifikasi atas tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup, Di tahun 2016 aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang masuk sejumlah 5 aduan masyarakat dari target 25 aduan masyarakat atau 20 %, dan 100 % sudah di tindak lanjuti.
- Terlaksananya sosialisasi PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan. Sosialisasi ini dimaksudkan supaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk memenuhi syarat ijin lingkungan yang laksanakan di 9 kecamatan.
- Terlaksananya kegiatan pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL) di 9 (sembilan) Desa Pakraman. Pembinaan DSL ini dimaksudkan supaya meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya desa pakraman terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan Tri Hita Karana.

- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang lingkungan hidup.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar Penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Lingkungan hidup: *cukup*. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 6.469.702.557,64, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 6.366.327.357,64 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 103.375.200.

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2016 antara lain ;

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup guna menghindari terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan menggunakan metode 3 R (Reduce , Reuse , Reycle) dimana dengan metode ini memungkinkan masyarakat untuk menambah pendapatan / penghasilan dengan mengelola sampah.
3. Secara administratif masih kurangnya kesadaran usaha/kegiatan untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan dokumen lingkungan serta masih kurangnya kesadaran usaha untuk mengelola limbah usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait permasalahan yang ada maka usaha – usaha yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya adalah ;

1. Mengadakan kegiatan lomba-lomba yang berkaitan dengan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Menghimbau dan mengikutsertakan masyarakat agar berperan serta aktif dalam melestarikan dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti : mengadakan penghijauan, mengadakan gerakan kebersihan di lingkungan masing-masing desa/kelurahan/ kota berupa gerakan green n clean, gerakan germaphi
3. Menambah daerah-daerah resapan air guna mengurangi genangan air pada musim penghujan berupa : pembuatan sumur resapan dan pembuatan lubang biopori.
4. Memberikan bantuan berupa hibah barang kepada masyarakat sebagai stimulan dalam upaya pengelolaan persampahan berupa : bangunan rumah atap pengolah sampah organik, tong sampah, gerobak sampah, komposter, kendaraan bermotor beroda tiga ,mesin pencacah sampah plastik.
5. Meningkatkan program Adiwiyata yaitu mengajak sektor sekolah untuk peduli terhadap lingkungan melalui pembinaan adiwiyata baik tingkat SD,SMP dan SLTA.
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang ada di kabupaten buleleng baik dari segi kelengkapan dokumen ijin lingkungan maupun pembinaan pengelolaan limbah usaha.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Diklat Pengelolaan Lingkungan Hidup.

TABEL 27

Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Hasil Capaian (%)			
		Indikator	Nilai		2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	2013	3.70	46.67	86.67	86.67
2	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	2013	100	100	100	100
3	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	2013	-			
4	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013	100	100	100	100

Sumber data : BLP Kabupaten Buleleng, 2016

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BULELENG.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 10 program dan 42 kegiatan, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah/Dalam Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur.
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT.
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik daerah.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

6) Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

- Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan
- Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah.
- Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan.
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kebersihan.
- Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Persampahan.
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Persampahan.

8) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

- Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura.
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

9) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH.

10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sanitasi/Air Limbah.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2016 oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng yaitu :

1) *Penanganan persampahan.*

Tahun 2016 volume sampah yang ditangani di wilayah kota Singaraja mencapai 290,88 M3 yang berasal dari timbunan sampah rumah tangga yang mencapai 242,40 M3/hari dan timbunan sampah yang berasal dari fasilitas umum yang volumenya mencapai 48,48 M3/hari. Dari total timbunan sampah di wilayah Kota Singaraja tersebut jumlah yang terangkut mencapai 252,50 M3/hari sehingga masih ada sisa sampah per hari yang tidak terlayani sejumlah 38,38 M3/hari.

Sedangkan di wilayah perdesaan volume sampah yang diproduksi per harinya mencapai 1.923,87 M3/hari, yang berasal dari jumlah volume sampah rumah tangga sejumlah 1.603,23 M3/hari dan volume sampah yang berasal dari fasilitas umum sejumlah 320,65 M3/hari. Dari total volume sampah di wilayah perdesaan pada Tahun 2016, telah terangkut oleh pelayanan pengangkutan sampah sejumlah 363,65 M3/hari, di daur ulang sejumlah 59,26 M3/hari, di composting 161,21 M3/hari sehingga sisa timbunan yang belum tertangani mencapai 1.339,76 M3/hari.

Sehingga dari data tersebut dapat dijelaskan total produksi sampah per hari yang harus ditangani mencapai 2.116,27 M3, sedangkan yang sudah dikelola melalui jasa pengangkutan oleh truk persampahan, daur ulang dan diolah menjadi komposting baru mencapai 836,61 m³/hari.

2) *Kebersihan.*

Jumlah seluruh pasar tradisional di kabupaten adalah 12 pasar yang terdiri dari : Pasar Anyar 1, Pasar Banyuasri, Pasar Buleleng, Pasar Kampung Tinggi, Pasar Seririt, Pasar Banjar, Pasar Wisata Pancasari, Pasar Sangsit, Pasar Kampung Bugis, Pasar Mumbul, Pasar Kalisari, Pasar Desa/Tenten. Pasar tradisional yang tergolong baik dengan kriteria ada bangunan yang tertata dengan baik dan terkelompoknya jenis dagangan, memiliki sanitasi, memiliki tempat parkir, adanya sarana pembuangan limbah/sampah, adalah Pasar Banyuasri dan Pasar Buleleng.

3) *Jumlah daya tampung TPS.*

Tahun 2016 jumlah TPS terpasang dalam rangka penanganan persampahan di Kabupaten Buleleng berjumlah 58 TPS dengan kapasitas

masing – masing TPS ;1 m3. Lokasi, jumlah TPS dan kapasitas TPS secara rinci tersaji pada tabel berikut :

Tabel 28
Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah

No	Uraian	Lokasi	Kecamatan	Jumlah	Kapasitas (M3)
1	TPS Terpasang	Jalan Mayor Metra	Buleleng	10	10
2	TPS Terpasang	Jalan Jelantik Gingsir	Buleleng	8	8
3	TPS Terpasang	Terminal Sangket	Sukasada	1	1
4	TPS Terpasang	Jalan Gajah Mada	Buleleng	3	3
5	TPS Terpasang	Jalan Gempol	Buleleng	4	4
6	TPS Terpasang	Jalan Yudistira	Buleleng	1	1
7	TPS Terpasang	Kantor DPRD	Buleleng	1	1
8	TPS Terpasang	Ex. Pelabuhan Buleleng	Buleleng	4	4
9	TPS Terpasang	Terminal Penarukan	Buleleng	1	1
10	TPS Terpasang	Rumah Jabatan Bupati	Buleleng	1	1
11	TPS Terpasang	Jalan Gunung Rinjani	Buleleng	1	1
12	TPS Terpasang	Jalan Seririt-Singaraja (Sebelah Mapindo, Anturan)	Buleleng	1	1
13	TPS Terpasang	SMKN 1 Singaraja	Buleleng	1	1
14	TPS Terpasang	Sebelah Timur Kantor DPRD	Buleleng	1	1
15	TPS Terpasang	Dinas Perhubungan	Buleleng	1	1
16	TPS Terpasang	Kantor Bupati	Buleleng	2	2
17	TPS Terpasang	Pasar Buleleng	Buleleng	4	4
18	TPS Terpasang	Desa Giri Mas	Buleleng	2	2
19	TPS Terpasang	Desa Wanagiri	Buleleng	2	2
20	TPS Terpasang	SD N 1 Baktiseraga	Buleleng	1	1
21	TPS Terpasang	Desa Selat	Buleleng	4	4
22	TPS Terpasang	Desa Anturan	Buleleng	3	3
23	TPS Terpasang	Krisna PP	Buleleng	1	1
Total				58	58 M3

Sumber data : DKP Kabupaten Buleleng, 2016.

Disamping pembangunan TPS maka Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka penanganan sampah juga telah menyediakan sarana dan prasana penunjang lainnya yang meliputi ; Loud Hald Container (LHC) sebanyak 33 unit yang terpasang di 30 lokasi, kereta dorong sebanyak 13 unit di 6 kelurahan, Truck Armroll sebanyak 13 unit, Dum truck 7 unit, pick up 27 unit, motor roda tiga 4 unit, TPST di 25 desa, transfer dipo di 14 lokasi, sanimas di 8 lokasi, TPA di 3 lokasi yang berada di Desa Bengkala dan Desa Pangkungparuk. 1 IPLT di Desa Bengkala. Kemudian bank – bank sampah yang tersebar di 5 kecamatan.

4) Luas RTH yang telah tertata.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 29) mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen luas wilayah kota dengan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Hasil inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Singaraja adalah Ruang Terbuka Hijau Kota Singaraja seluas 1.175,75 ha (42,14%) dari luas kota Singaraja 2.790,00 ha yang terdiri dari 156,66 ha (5,62%) Ruang Terbuka Hijau Publik dan 1.019,09 ha (36,53%) Ruang Terbuka Hijau Privat, sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 29
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Buleleng

NO	JENIS	LUAS		% DARI LUAS KOTA
		PUBLIK	PRIVAT	
1.	Taman Kota	1,07	-	0,06
2.	Taman Rekreasi	4,05	-	0,16
3.	Taman Lingkungan Perumahan dan	-	3,65	0,13
4.	pemukiman.	41,44	-	1,48
5.	Taman Lingkungan Kantor & Gedung	15,18	-	0,54
6.	Komersial.	2,49	-	0,08
7.	Pemukiman Umum	0,64	-	0,02
8.	Lapangan Olahraga	-	1.015,44	36,39
9.	Parkir Terbuka	88,89	-	3,18
10.	Lahan Pertanian Perkotaan	1,67	-	0,05
11.	Sempadan Sungai, pantai, Bangunan situ dan rawa Jalur Pengaman Jln, median jln, Rel Kereta Api, Pipa Gas & Pendestrian Hutan Kota	10,69	-	0,38
Jumlah :		156,66	1.019,09	1.175,75
Prosentase (%)		5,62	36,53	42,14

Sumber data : DKP Kabupaten Buleleng, 2016.

5) IPAL Komunal.

IPAL komunal di Kabupaten Buleleng terdapat di 8 lokasi dengan jumlah KK pemanfaatannya adalah : 1.600 KK, sedangkan Jumlah RT Miskin di Kabupaten Buleleng adalah 8.422 KK.

Penganugerahan Adipura 2016 menjadi penghargaan tertinggi bagi kota-kota di Indonesia dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup. Kota dan ibukota kabupaten peraih Adipura dinilai sebagai kota yang bersih, hijau, sehat, dan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Tahun 2016 ini, penghargaan Adipura diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, pada Jumat 22 Juli 2016 di Siak, Riau. Selain waktu dan tempat pengumumannya yang berbeda, Adipura tahun 2016 ini pun menggunakan kategori yang berbeda. Jika sebelumnya kota penerima Adipura diumumkan pada tanggal 5 Juni (kecuali penganugerahan di tahun 2015 yang diumumkan pada tanggal 23 November 2015), pengumuman dan penyerahan penghargaan Adipura tahun 2016 diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2016. Tempat penganugerahannya pun bukan lagi di Istana Negara Jakarta namun di Siak, Riau. Perbedaan selanjutnya adalah kategori yang digunakan dalam Adipura 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya Adipura dikelompokkan dalam empat kategori kota yakni Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil. Namun pada tahun 2016 ini penghargaan Adipura diberikan dalam tiga kategori yakni Adipura Buana, Adipura Kirana, dan Adipura Paripurna. Adipura Buana adalah penghargaan adipura yang diberikan kepada kota / ibukota kabupaten yang layak huni (*livable city*). Pada Tahun ini Kabupaten Buleleng berhasil meraih Penghargaan Adipura Buana, penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Buleleng.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng, selaku Perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan lingkungan Hidup berlokasi di Jalan Srimadya Banyuning Singaraja Telp/Fax (0362) 3302024 SINGARAJA, **Website** : <http://dkp.Buleleng.go.id> **email** : dkp@buleleng.go.id. Dengan struktur Organisasi yang terdiri atas : Kepala Dinas (Eselon II/b), Sekretaris Dinas (Eselon III/a), Kepala Bidang Kebersihan, Kepala Bidang Pertamanan dan RTH, Kepala Bidang Angkutan dan Peralatan dan Kepala Bidang Penyuluhan (Eselon III/b), Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan, Kepala Seksi Pengelolaan Sanitasi, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Sampah, Kepala Seksi Pembangunan dan Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau, Kepala Seksi Pemeliharaan taman RTH, Kepala

Seksi Pengawasan Taman dan RTH, Kepala Seksi Angkutan, Kepala Seksi Peralatan, Kepala Seksi Pemeliharaan Saran Prasarana Angkutan, Kepala Seksi Penyuluhan dan Informasi, Kepala Seksi Sarana Prasarana Penyuluhan, Kepala Seksi Pelaporan, Kesubbag Perencanaan, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan (Eselon IV/a).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng berjumlah 92 orang. **Dengan pangkat dan golongan terdiri atas** : Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 1 orang, Pembina (IV/a) ; 6 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 11 orang, Penata (III/c) ; 2 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 8 orang, Penata Muda (III/a) ; 5 orang, Pengatur Tk.I (II/d) ; 2 orang, Pengatur (II/c) ; 16 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 10 orang, Pengatur Muda ; 11 orang, Juru Tk.I (I/d) ; 3 orang, Juru (I/c) ; 4 orang, Juru Muda Tk.I (I/b) ; 1 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan meliputi** : Strata 2 (S2) ; 3 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 17 orang, Diploma 3 (D3) ; 3 orang, Diploma 2 (D2); 2 orang, SMA/SMK/Mts ; 41 orang, SMP/MI ; 13 orang, SD ; 8 orang. **Jumlah Pejabat Struktural** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 15 pejabat. Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.

Untuk penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 35.603.995.000 dan terealisasi sebesar Rp.31.568.084.151 atau 88,66 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.5.995.939.000 dan terealisasi Rp. 5.917.319.327 atau 98,69 persen dan belanja langsung sebesar Rp.29.608.056.000 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 25.650.764.824 atau mencapai 86,63 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.1.156.368.000 dan terealisasi Rp.1.151.469.000, atau 99,58 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.14.814.173.000 dan terealisasi Rp.12.340.320.324 atau mencapai 83,30 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.13.637.515.000 dan terealisasi Rp.12.158.975.500 atau 89,16 persen. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan serta hasil kegiatan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan di dalam menunjang

pencapaian sasaran kinerja. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp.1.453.060.000 Dan terealisasi Rp 1.279.995.024 atau 88,09 persen, dengan realisasi tiap kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alokasi Anggaran Rp. 27.413.000, dan Realisasi sebesar Rp. 27.158.900, atau 99,07 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu tersedianya biaya jasa surat menyurat selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Alokasi Anggaran Rp. 229.487.000, dan Realisasi sebesar Rp. 123.667.566, atau 53,89 persen dengan realisasi fisik 90 persen. Hasil kegiatan yaitu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 2 rekening.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 185.000.000, dan Realisasi sebesar Rp. 175.657.000, atau 94,95 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu tersedianya 6 jenis sarana mobilitas.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran Rp. 103.700.000, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 79.985.100 atau 77,13 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya terpeliharanya 3 jenis kendaraan dinas/operasional dan perizinannya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi Anggaran Rp. 306.349.000, dan Realisasinya Rp. 301.138.870 atau 98,30 persen, dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya tertib administrasi laporan keuangan SKPD selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 59.278.000, dengan Realisasi mencapai Rp. 58.889.140, atau mencapai 99,35 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya yaitu terwujudnya 17 jenis bahan-bahan kebersihan kantor.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 25.018.000, dengan Realisasi sebesar Rp. 24.942.500 atau 99,70 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 26 jenis alat tulis kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.063.000, dengan realisasi Rp. 9.550.560, atau 94,91 persen dan realisasi fisik mencapai 100

persen. Hasilnya terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 4 jenis.

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 24.864.000,00 dan Realisasinya mencapai Rp. 24.309.000, atau 97,77 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya penerangan lingkungan kantor sebanyak 5 jenis.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Alokasi Anggaran Rp. 203.500.000, dengan Realisasi Rp. 200.073.500 atau 98,32 persen. Hasilnya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 11 jenis.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Alokasi Anggaran Rp. 9.804.000, Realisasi Rp. 9.798.400 atau 99,94 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah peningkatan wawasan/pengetahuan pegawai selama 1 Tahun.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 108.936.000, terealisasi Rp. 108.530.000, atau 99,63 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya terpenuhinya kesejahteraan tenaga kebersihan sebanyak 534 paket.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Alokasi Anggaran Rp. 10.340.000, Realisasi sebesar Rp. 7.622.440 atau 72,73 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terlaksananya rapat dan penerimaan tamu dinas melalui penyediaan makan/minum sebanyak 530 kotak/galon.
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 149.308.000, Realisasi Anggaran Rp. 128.672.048 atau 86,18 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan selama 1 Tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 1.753.715.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 323.213.130 atau 18,43 persen. Realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, dialokasikan dengan anggaran Rp. 1.514.665.000 dan realisasinya Rp. 89.784.000, atau 5,93 persen dan realisasi fisik mencapai 15 persen. Hasilnya adalah tersedianya penataan lingkungan gedung kantor yang

terrealisasi 0,15 paket dan tersedianya perencanaan teknis/DED sebanyak 1 dokumen.

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 20.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 19.514.000 atau 97,57 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terpenuhinya 1 unit instalasi listrik di TPA bengkala.
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur, Alokasi Anggaran Rp. 89.800.000, dengan Realisasi Anggaran Rp. 86.097.000 atau 95,88 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya mebeleur kantor sebanyak 3 jenis.
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara, alokasi anggaran Rp. 77.950.000, dengan realisasi anggaran Rp. 77.702.130, atau 99,68 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan selama 1 Tahun.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 9.600.000, dan terealisasi Rp. 9.570.000, atau 99,69 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya perlengkapan kantor yang memadai selama 1 Tahun.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT, Alokasi Anggaran Rp. 15.000.000, dan terealisasi Rp.13.860.000, atau 92,40 persen. Hasilnya adalah tersedianya 3 jenis peralatan kantor yang memadai.
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik daerah, Alokasi Anggaran Rp. 26.700.000, dan realisasi anggaran Rp. 26.686.000, atau 99,95 persen. Hasilnya adalah tersedianya 1 jenis dokumen administrasi aset barang milik daerah.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 486.065.000, dan realisasi anggaran Rp. 479.180.750, atau 98,58 persen. Realisasi untuk masing – masing kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, alokasi anggaran Rp. 392.490.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 386.338.000,00 atau 98,43 persen. Hasilnya tersedianya 2 jenis seragam pakaian kerja petugas kebersihan.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Alokasi Anggaran Rp. 78.575.000, dan realisasi anggaran Rp. 78.102.750, atau 99,40 persen. Hasilnya tersedianya 2 jenis pakaian endek dan pakaian olahraga.
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur, Alokasi Anggaran Rp. 15.000.000, dan realisasinya anggaran Rp. 14.740.000, atau 98,27 persen. Hasilnya terpenuhinya sarana mobilitas untuk upacara sebanyak 1 unit.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.000.000, namun kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tidak dilaksanakan sehingga tidak ada realisasi anggaran untuk kegiatan ini.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Alokasi Anggaran Rp. 22.000.000, dan realisasi anggaran Rp. 21.307.155 atau 96,85 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 9 jenis data / informasi kinerja program/kegiatan.

6. Program Perencanaan Anggaran SKPD, alokasi anggaran Rp. 57.400.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 55.918.570 atau 97,42 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 9 dokumen anggaran SKPD.

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program ini dibiayai melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 14.738.935.000, dan terealisasi sebesar Rp. 13.883.938.180, atau 94,20 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan yang meliputi :

- Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Alokasi Anggaran Rp. 5.397.100.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 5.390.771.187 atau 99,88 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 7 jenis sarana dan prasarana pengangkut sampah.
- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan, Alokasi Anggaran Rp. 133.000.000, dan Realisasi

Anggaran Rp. 121.077.335 atau 91,04 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya terpungutnya sampah plastik di Kabupaten Buleleng sebanyak 70 ton.

- Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 756.581.000, dan Realisasi Anggaran: Rp. 686.536.855, atau 90,74 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya terlaksananya operasional 28 unit sarana dan prasarana persampahan.
- Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah, Alokasi Anggaran Rp. 367.237.000, dan terealisasi Rp. 356.600.270 atau 97,10 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah Tersedianya 50 ton pupuk kompos bagi kegiatan penghijauan lingkungan.
- Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan, Alokasi Anggaran Rp. 27.737.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 21.637.490, atau 78,01 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya kemampuan KSM pengelola TPS 3R selama 1 tahun.
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kebersihan, Alokasi Anggaran Rp. 2.607.490.000, dan realisasi anggaran Rp. 2.578.926.553, atau 98,90 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya kebersihan lingkungan di 6 kecamatan.
- Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Persampahan, Alokasi Anggaran Rp. 4.885.800.000, dan realisasi anggaran Rp. 4.185.427.810 atau 85,67 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah terlaksananya pengangkutan sampah secara rutin dan berkesinambungan selama 1 tahun.
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Persampahan, Alokasi Anggaran Rp. 563.990.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 542.960.680, atau 96,27 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah terlaksananya 2 paket pelayanan persampahan.

8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran Rp. 390.367.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 376.606.120 atau 96,47 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Alokasi Anggaran Rp. 195.050.150, dan Realisasi Anggaran Rp. 195.048.250 atau 99,99 persen dan realisasi fisik 100 persen.

Hasilnya adalah terwujudnya kebersihan dan tertatanya taman di 9 kecamatan.

- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Alokasi Anggaran Rp. 167.652.850, dan Realisasi Anggaran Rp. 154.951.720 atau 92,42 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keteduhan di 20 desa/kelurahan.
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Alokasi Anggaran Rp. 27.664.000, dan realisasi anggaran Rp. 26.606.150 atau 96,18 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 10 buku data informasi dan laporan hasil pembangunan di bidang lingkungan hidup.

9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Alokasi Anggaran Rp. 9.487.625.000, dan terealisasi 9.064.960.405 atau 95,55 persen. Realisasi untuk masing – masing kegiatan meliputi:

- Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Alokasi Anggaran Rp. 6.117.182.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 6.116.649.750, atau 99,99 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya taman ruang terbuka hijau (RTH) yang nyaman dan asri di Kelurahan Sukasada dan Kelurahan Kampong Baru.
- Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Alokasi Anggaran Rp. 2.998.699.000, dan terealisasi Realisasi Anggaran Rp. 2.584.734.425 atau 86,20 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terpeliharanya 80 persen ruang terbuka hijau (RTH) dan tersedinya taman jalan dan telajakan yang asri.
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH, Alokasi Anggaran: Rp. 371.744.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 363.576.230, atau 97,80 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 2 unit mesin chain saw.

10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Alokasi Anggaran Rp. 1.206.889.000, dan terealisasi Rp. 165.645.490, atau 13,72 dan fisik kegiatan tidak bisa terealisasi karena kegiatan yang sumber dananya dari dana DAK ini terdapat kontradiktif dalam regulasi sehingga untuk Tahun 2016 kegiatan fisik tidak dilaksanakan.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada DKP Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Lingkungan hidup ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 53.556.009.053,55. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 52.625.440.052,45 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 930.569.000,00.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2016 yaitu ;

- 1) Belum tertatanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan strategis dan kawasan bersejarah.
- 2) Sarana sanitasi lingkungan permukiman dan persampahan belum memadai.
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup guna menghindari dari pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari

Upaya penanganan terhadap permasalahan yang ada adalah :

- 1) Meningkatkan pengelolaan kebersihan, keasrian, dan kenyamanan.
- 2) Mengembangkan kemitraan dalam pengelolaan persampahan.
- 3) Mengadakan kegiatan lomba-lomba yang berkaitan dengan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Menghimbau dan mengikutsertakan masyarakat agar berperan serta aktif dalam melestarikan dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti mengadakan penghijauan, mengadakan gerakan kebersihan di lingkungan masing-masing desa / keluarahan, kota.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 15 program dan 43 kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.
- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur.
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD.

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

- Kegiatan Penggantian Jembatan.

7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.
- Kegiatan Peningkatan Jalan.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.

8. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.

- Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan.

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat.

10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya.

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun.
- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi.

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah.

12. Program Pengendalian Banjir.

- Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - badan Sungai.
- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Saluran Drainase.

13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

- Kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur.

14. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

- Kegiatan Peningkatan Cakupan sistem penyediaan air minum.

15. Program Pembangunan Fasilitas Umum.

- Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 8 (delapan) Jenis pelayanan dasar dengan 23 (dua puluh tiga) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tersaji pada tabel....

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng selaku Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pekerjaan Umum didukung oleh personil sejumlah 251 orang sebagaimana terinci pada tabel berikut ;

Tabel 30
Kondisi Pegawai Urusan Pekerjaan Umum. 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	172 Orang
	Pegawai Harian /Kontrak	79 Orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	1 Orang
	Pembina (IV/a)	3 Orang
	Penata Tk. I (III/d)	4 Orang
	Penata (III/c)	4 Orang
	Penata Muda Tk.I (III/b)	12 Orang
	Penata Muda (III/a)	5 Orang
	Pengatur Tk.I (II/d)	2 Orang
	Pengatur (II/c)	44 Orang
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	41 Orang
	Pengatur Muda (II/a)	13 Orang
	Juru Tk.I	13 Orang
	Juru	11 Orang
	Juru Muda Tk. I	17 Orang
	Juru Muda	2 Orang
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	1 Orang
	SI/D4	30 Orang
	D3	6 orang
	SMA/SMK/MTs	120 Orang
	SMP/MI	19 Orang
	SD	23 Orang
4.	Jumlah Pejabat	
	Eselon IIb	1 Orang
	Eselon IIIa	Orang

	Eselon IIIb	3 Orang
	Eselon Iva	9 Orang

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng, 2016

Dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum, Dinas PU Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 1.082.480.000,00 dan terealisasi Rp. 968.945.000,00, atau 89,51 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 9.160.493.303,24 dan terealisasi Rp. 6.684.428.743,00 atau mencapai 72,97 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 146.545.658.852,73 dan terealisasi Rp. 113.089.929.202,00 atau 77,17 persen. Hasil – hasil pelaksanaan kegiatan pokok yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 meliputi ;

- Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten.
- Terpeliharanya Jalan Kabupaten di 9 Kecamatan (1 Paket).
- Terinventarisasinya Data Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Buleleng (1 Laporan).
- Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat (32 Unit).
- Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi (62,5 m' / 1 bh / 1 Paket).
- Tersedianya jaringan Irigasi yang Memadai di 31 DI (daerah irigasi).
- Terlaksananya Pelayanan dan Penanganan Kawasan Daerah Genangan Banjir (3 Paket).
- Terwujudnya Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (35 m').
- Tercapainya tingkat pelayanan dan penanganan kawasan daerah banjir di Kabupaten Buleleng selama 12 Bulan.
- Tersedianya Data Kerusakan Sungai/Daerah Tangkapan Air Tersebar di 3 Kecamatan (2 Paket).
- Tercapainya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
- Terlaksananya Fasilitas / Pembinaan Pembangunan Fasilitas Umum (9 Kecamatan).
- Terwujudnya Perumahan Layak Huni di 9 Kecamatan.
- Terlaksananya Pengendalian Tata Ruang di 9 Kecamatan.
- Terwujudnya Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
- Terlaksananya Penerangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas PU Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan PU ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 530.304.675.505,88 dan tidak ada asset yang tidak digunakan.

Dalam proses penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas tidak ada permasalahan prinsip yang sampai menghambat pelaksanaan urusan pekerjaan umum.

TABEL 31
SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
				Indikator		Nilai							
I	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat		1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2016	151,67116	151,67116	151,67116	151,67	124,72	124,72
				2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2016	63,72	65	65	62	62	62
II	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100
			Mobilitas	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	2016	91	91	91	91	91	91
			Keselamatan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2016	74,34	74,34	74,34	76,26	76,26	76,26

			Kecepatan	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Air minum	Cluster Pelayanan		8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari			71,406274	71,406274	71,263617	77,08754	78,34575	78,34575
		Sangat buruk				40%	2016						
		Buruk				50%							
		Sedang				70%							
		Baik				80%							
		Sangat Baik				100%							
IV	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	Air Limbah Permukiman		9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	2016			50	50	50	50
				10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	2016	0,13	0,25	0,25	0,33	0,33	0,33
		Pengelolaan Sampah		11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	2016	75	75	75	74,80	74,80	74,80
				12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	2016	27	27	27	27	27	27

		Drainase	13.1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	2016	1042,0919	1041,9034	1041,7149	1023	34,73	34,73
			13.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2016	0	0	36,50	37,88	81,97	81,97
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	2016	0	0	0	0	15,83%	15,83
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan	15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2016	100	100	100	100	100	100%
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100%	2016	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VII	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2016	0	0	62,903226	78,65169	78,65169	78,65169
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2016	0	0	0	0	0	0

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 32

Indikator Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

KEADAAN TAHUN 2016														
Luas Daerah Irigasi						Rata – Rata Kebutuhan air Per ha (Ltr/Dtk)	Total Kebutuhan air Rumus : (∑ 1 * 2)	Rencana luas tanam yang ditetapkan (ha)yang ditetapkan (ha)k=1000 ltr/dtk rumus : 1000/ σ (3) x 1000	Luas areal realisasi tanam di kabupaten/kota(ha)					
NAMA DI	LUAS (HA)	MT I	MT II	MT III	Jumlah		(LITER/DETI K)		NAMA DI	LUAS (HA)	MT I	MT II	MT III	Jumlah
1						2	3	4	5					
Ambengan Banjar	228,00	98,50	98,50	98,50	295,50	1,20	354,60	295,50	Ambengan Banjar	228,00	98,50	-	98,50	197,00
Ambengan Sukasada	372,50	252,00	252,00	252,00	756,00	1,20	907,20	756,00	Ambengan Sukasada	372,50	252,00	252,00	-	504,00
Anyar Tejakula	110,00	-	-	-	-	1,20	-	-	Anyar Tejakula	110,00	-	-	-	-
Asah Pedawa	81,50	12,00	12,00	12,00	36,00	1,20	43,20	36,00	Asah Pedawa	81,50	12,00	12,00	-	24,00
Babakan Sambangan	113,00	65,00	65,00	65,00	195,00	1,20	234,00	195,00	Babakan Sambangan	113,00	65,00	65,00	-	130,00
Banyumala	112,00	66,00	66,00	66,00	198,00	1,20	237,60	198,00	Banyumala	112,00	66,00	66,00	-	132,00
Banyuning	65,00	43,00	43,00	43,00	129,00	1,20	154,80	129,00	Banyuning	65,00	43,00	-	43,00	86,00
Banyupoh	141,00	90,00	90,00	90,00	270,00	1,20	324,00	270,00	Banyupoh	141,00	90,00	-	-	90,00
Banyuriris	83,00	29,00	29,00	29,00	87,00	1,20	104,40	87,00	Banyuriris	83,00	29,00	29,00	-	58,00

Benta	60,00	25,00	25,00	25,00	75,00	1,20	90,00	75,00	Benta	60,00	25,00	25,00	-	50,00
Bulian	400,00	387,00	387,00	387,00	1.161,00	1,20	1.393,20	1.161,00	Bulian	400,00	-	387,00	387,00	774,00
Bungkulan	184,00	181,00	181,00	181,00	543,00	1,20	651,60	543,00	Bungkulan	184,00	-	181,00	181,00	362,00
Cempaga	44,00	14,00	14,00	14,00	42,00	1,20	50,40	42,00	Cempaga	44,00	-	14,00	14,00	28,00
Dangin Jalan	56,00	29,00	29,00	29,00	87,00	1,20	104,40	87,00	Dangin Jalan	56,00	29,00	29,00	-	58,00
Galungan	306,00	235,00	235,00	235,00	705,00	1,20	846,00	705,00	Galungan	306,00	235,00	235,00	-	470,00
Gambuh	13,50	13,50	13,50	13,50	40,50	1,20	48,60	40,50	Gambuh	13,50	13,50	13,50	-	27,00
Gerokgak	530,00	253,00	253,00	253,00	759,00	1,20	910,80	759,00	Gerokgak	530,00	253,00	-	-	253,00
Gitgit	266,00	167,00	167,00	167,00	501,00	1,20	601,20	501,00	Gitgit	266,00	-	167,00	167,00	334,00
Guliang I & II	16,00	16,00	16,00	16,00	48,00	1,20	57,60	48,00	Guliang I & II	16,00	-	16,00	16,00	32,00
Jagaraga	427,00	304,00	304,00	304,00	912,00	1,20	1.094,40	912,00	Jagaraga	427,00	304,00	304,00	-	608,00
Babakan Jati	64,00	35,00	35,00	35,00	105,00	1,20	126,00	105,00	Babakan Jati	64,00	35,00	-	35,00	70,00
Jembong	52,00	46,00	46,00	46,00	138,00	1,20	165,60	138,00	Jembong	52,00	46,00	46,00	-	92,00
Jero	72,00	62,00	62,00	62,00	186,00	1,20	223,20	186,00	Jero	72,00	62,00	-	62,00	124,00
Kaliasem	111,00	66,00	66,00	66,00	198,00	1,20	237,60	198,00	Kaliasem	111,00	66,00	66,00	-	132,00
Kayu Putih (Banjar)	111,00	73,00	73,00	73,00	219,00	1,20	262,80	219,00	Kayu Putih (Banjar)	111,00	-	73,00	73,00	146,00
Kayu Putih I	59,00	16,08	16,08	16,08	48,24	1,20	57,89	48,24	Kayu Putih I	59,00	-	16,08	16,08	32,16
Kayupas	56,00	34,00	34,00	34,00	102,00	1,20	122,40	102,00	Kayupas	56,00	34,00	34,00	-	68,00
Kepel	30,00	28,00	28,00	28,00	84,00	1,20	100,80	84,00	Kepel	30,00	-	28,00	28,00	56,00

Kusia	68,00	53,00	53,00	53,00	159,00	1,20	190,80	159,00	Kusia	68,00	53,00	53,00	-	106,00
Lanyahan Pegadungan	97,00	39,00	39,00	39,00	117,00	1,20	140,40	117,00	Lanyahan Pegadungan	97,00	-	39,00	39,00	78,00
Lebah Mantung (seririt)	48,00	43,00	43,00	43,00	129,00	1,20	154,80	129,00	Lebah Mantung (seririt)	48,00	43,00	-	-	43,00
Lebah Siung	79,00	78,92	78,92	78,92	236,76	1,20	284,11	236,76	Lebah Siung	79,00	78,92	-	-	78,92
Mayong	56,00	43,00	43,00	43,00	129,00	1,20	154,80	129,00	Mayong	56,00	-	43,00	43,00	86,00
Munduk	141,00	50,00	50,00	50,00	150,00	1,20	180,00	150,00	Munduk	141,00	-	50,00	50,00	100,00
Ohot	279,00	129,00	129,00	129,00	387,00	1,20	464,40	387,00	Ohot	279,00	129,00	129,00	-	258,00
Padang Keling	79,00	58,00	58,00	58,00	174,00	1,20	208,80	174,00	Padang Keling	79,00	58,00	58,00	-	116,00
Pakistan	152,00	133,00	133,00	133,00	399,00	1,20	478,80	399,00	Pakistan	152,00	133,00	133,00	133,00	399,00
Pegayaman	160,00	111,00	111,00	111,00	333,00	1,20	399,60	333,00	Pegayaman	160,00	-	111,00	111,00	222,00
Penarukan I	728,00	624,00	624,00	624,00	1.872,00	1,20	2.246,40	1.872,00	Penarukan I	728,00	-	624,00	624,00	1.248,00
Penarukan II	461,00	421,00	421,00	421,00	1.263,00	1,20	1.515,60	1.263,00	Penarukan II	461,00	-	421,00	421,00	842,00
Penarukan III	144,00	128,00	128,00	128,00	384,00	1,20	460,80	384,00	Penarukan III	144,00	128,00	128,00	-	256,00
Pendem	79,00	78,00	78,00	78,00	234,00	1,20	280,80	234,00	Pendem	79,00	78,00	78,00	-	156,00
Pengaringan	132,00	68,00	68,00	68,00	204,00	1,20	244,80	204,00	Pengaringan	132,00	68,00	-	68,00	136,00
Poh asem	150,00	60,00	60,00	60,00	180,00	1,20	216,00	180,00	Poh asem	150,00	-	60,00	60,00	120,00
Raja Plawa	58,00	42,00	42,00	42,00	126,00	1,20	151,20	126,00	Raja Plawa	58,00	42,00	42,00	-	84,00
Ringdikit	250,00	158,00	158,00	158,00	474,00	1,20	568,80	474,00	Ringdikit	250,00	-	158,00	158,00	316,00

Sanda (Sukasada)	17,00	16,00	16,00	16,00	48,00	1,20	57,60	48,00	Sanda (Sukasada)	17,00	-	16,00	16,00	32,00
Sangsit	171,00	168,00	168,00	168,00	504,00	1,20	604,80	504,00	Sangsit	171,00	168,00	168,00	-	336,00
Sekumpul	180,00	122,00	122,00	122,00	366,00	1,20	439,20	366,00	Sekumpul	180,00	-	122,00	122,00	244,00
Sepang	42,00	36,00	36,00	36,00	108,00	1,20	129,60	108,00	Sepang	42,00	36,00	36,00	36,00	108,00
Sidayu	126,00	109,00	109,00	109,00	327,00	1,20	392,40	327,00	Sidayu	126,00	109,00	-	109,00	218,00
Silangjana I	776,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00	1,20	1.620,00	1.350,00	Silangjana I	776,00	-	450,00	450,00	900,00
Silangjana II	303,00	239,00	239,00	239,00	717,00	1,20	860,40	717,00	Silangjana II	303,00	239,00	-	239,00	478,00
Tabang	102,00	108,00	108,00	108,00	324,00	1,20	388,80	324,00	Tabang	102,00	108,00	-	108,00	216,00
Tegal	120,00	64,00	64,00	64,00	192,00	1,20	230,40	192,00	Tegal	120,00	64,00	64,00	-	128,00
Lemukih	111,00	102,00	102,00	102,00	306,00	1,20	367,20	306,00	Lemukih	111,00	102,00	102,00	102,00	306,00
Temukus	98,00	41,00	41,00	41,00	123,00	1,20	147,60	123,00	Temukus	98,00	41,00	41,00	-	82,00
Timbul	48,00	45,00	45,00	45,00	135,00	1,20	162,00	135,00	Timbul	48,00	45,00	45,00	-	90,00
Tinggar sari	96,00	95,00	95,00	95,00	285,00	1,20	342,00	285,00	Tinggar sari	96,00	-	95,00	95,00	190,00
Tirtasari	64,00	38,00	38,00	38,00	114,00	1,20	136,80	114,00	Tirtasari	64,00	-	38,00	38,00	76,00
Ume Jero	90,00	73,00	73,00	73,00	219,00	1,20	262,80	219,00	Ume Jero	90,00	-	73,00	73,00	146,00
Anyar Padang Keling	80,00	52,00	52,00	52,00	156,00	1,20	187,20	156,00	Anyar Padang Keling	80,00	52,00	52,00	-	104,00
Abe	27,00	16,00	16,00	16,00	48,00	1,20	57,60	48,00	Abe	27,00	16,00	16,00	-	32,00
Anturan	37,00	27,00	27,00	27,00	81,00	1,20	97,20	81,00	Anturan	37,00	27,00	27,00	-	54,00
Anyar Tegallinggah	28,00	28,00	28,00	28,00	84,00	1,20	100,80	84,00	Anyar Tegallinggah	28,00	28,00	28,00	-	56,00

Babakan Bulian	21,00	3,00	3,00	3,00	9,00	1,20	10,80	9,00	Babakan Bulian	21,00	3,00	3,00	-	6,00
Babakan Katiasa	27,00	23,00	23,00	23,00	69,00	1,20	82,80	69,00	Babakan Katiasa	27,00	23,00	-	23,00	46,00
Babakan Pegadungan	33,00	29,00	29,00	29,00	87,00	1,20	104,40	87,00	Babakan Pegadungan	33,00	-	29,00	29,00	58,00
Bale Bandung	30,00	20,00	20,00	20,00	60,00	1,20	72,00	60,00	Bale Bandung	30,00	20,00	-	20,00	40,00
Banjar Tengah	26,50	23,00	23,00	23,00	69,00	1,20	82,80	69,00	Banjar Tengah	26,50	-	23,00	23,00	46,00
Banyualit	39,00	34,00	34,00	34,00	102,00	1,20	122,40	102,00	Banyualit	39,00	34,00	34,00	-	68,00
Batu	28,00	26,00	26,00	26,00	78,00	1,20	93,60	78,00	Batu	28,00	26,00	-	26,00	52,00
Bestala	12,00	12,00	12,00	12,00	36,00	1,20	43,20	36,00	Bestala	12,00	12,00	12,00	12,00	36,00
Babakan Pakisan dan Bingin	72,00	62,00	62,00	62,00	186,00	1,20	223,20	186,00	Babakan Pakisan dan Bingin	72,00	-	62,00	62,00	124,00
Bingin Banjar	27,00	20,00	20,00	20,00	60,00	1,20	72,00	60,00	Bingin Banjar	27,00	-	20,00	20,00	40,00
Celokah	26,00	25,00	25,00	25,00	75,00	1,20	90,00	75,00	Celokah	26,00	25,00	25,00	-	50,00
Celuk Buluh	16,00	16,00	16,00	16,00	48,00	1,20	57,60	48,00	Celuk Buluh	16,00	16,00	16,00	-	32,00
Celuk Tenggulun	25,00	21,00	21,00	21,00	63,00	1,20	75,60	63,00	Celuk Tenggulun	25,00	21,00	21,00	-	42,00
Dangin Tukad (Gerokgak)	16,00	16,00	16,00	16,00	48,00	1,20	57,60	48,00	Dangin Tukad (Gerokgak)	16,00	16,00	-	-	16,00
Dauh geger	41,00	22,00	22,00	22,00	66,00	1,20	79,20	66,00	Dauh geger	41,00	22,00	-	-	22,00
Gadung Rupek	25,00	4,62	4,62	4,62	13,86	1,20	16,63	13,86	Gadung Rupek	25,00	4,62	-	-	4,62
Gesing	27,00	8,00	8,00	8,00	24,00	1,20	28,80	24,00	Gesing	27,00	-	8,00	8,00	16,00
Kawanan (Sukasada)	34,00	19,38	19,38	19,38	58,14	1,20	69,77	58,14	Kawanan (Sukasada)	34,00	-	19,38	19,38	38,76

Kayu putih II	30,00	30,00	30,00	30,00	90,00	1,20	108,00	90,00	Kayu putih II	30,00	30,00	30,00	30,00	90,00
Kubu Gembong	20,00	16,00	16,00	16,00	48,00	1,20	57,60	48,00	Kubu Gembong	20,00	16,00	-	16,00	32,00
Lanyahan Petandakan	37,00	35,00	35,00	35,00	105,00	1,20	126,00	105,00	Lanyahan Petandakan	37,00	35,00	-	35,00	70,00
Lebah Mantung (buleleng)	72,00	25,00	25,00	25,00	75,00	1,20	90,00	75,00	Lebah Mantung (buleleng)	72,00	25,00	25,00	-	50,00
Lebah Selat	39,50	7,00	7,00	7,00	21,00	1,20	25,20	21,00	Lebah Selat	39,50	7,00	7,00	-	14,00
Lebah Semawa	28,00	24,00	24,00	24,00	72,00	1,20	86,40	72,00	Lebah Semawa	28,00	24,00	-	-	24,00
Labak	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	1,20	36,00	30,00	Labak	10,00	10,00	10,00	-	20,00
Lebah	32,00	31,00	31,00	31,00	93,00	1,20	111,60	93,00	Lebah	32,00	-	31,00	31,00	62,00
Limo	39,00	7,00	7,00	7,00	21,00	1,20	25,20	21,00	Limo	39,00	7,00	-	7,00	14,00
Manuksesa	44,00	42,00	42,00	42,00	126,00	1,20	151,20	126,00	Manuksesa	44,00	42,00	-	42,00	84,00
Munduk Bestala/Benyah	23,50	20,00	20,00	20,00	60,00	1,20	72,00	60,00	Munduk Bestala/Benyah	23,50	-	20,00	20,00	40,00
Munduk Kendang	19,00	14,00	14,00	14,00	42,00	1,20	50,40	42,00	Munduk Kendang	19,00	14,00	-	14,00	28,00
Munduk Kunci	22,00	-	-	-	-	1,20	-	-	Munduk Kunci	22,00	-	-	-	-
Musi	28,00	27,00	27,00	27,00	81,00	1,20	97,20	81,00	Musi	28,00	27,00	-	-	27,00
Babakan Nagasepaha	13,00	13,00	13,00	13,00	39,00	1,20	46,80	39,00	Babakan Nagasepaha	13,00	13,00	13,00	-	26,00
Pangkung Paruk	41,00	32,00	32,00	32,00	96,00	1,20	115,20	96,00	Pangkung Paruk	41,00	32,00	-	-	32,00
Pasut Katiasa	26,50	24,00	24,00	24,00	72,00	1,20	86,40	72,00	Pasut Katiasa	26,50	-	24,00	24,00	48,00

Pengulon	27,50	24,00	24,00	24,00	72,00	1,20	86,40	72,00	Pengulon	27,50	24,00	-	-	24,00
Penyabangan	12,00	6,00	6,00	6,00	18,00	1,20	21,60	18,00	Penyabangan	12,00	6,00	-	-	6,00
Bukit Pulu	9,00	8,00	8,00	8,00	24,00	1,20	28,80	24,00	Bukit Pulu	9,00	8,00	-	-	8,00
Rawa	23,00	11,00	11,00	11,00	33,00	1,20	39,60	33,00	Rawa	23,00	11,00	-	-	11,00
Sampat Seha	26,00	-	-	-	-	1,20	-	-	Sampat Seha	26,00	-	-	-	-
Sanda (Banjar)	77,00	29,00	29,00	29,00	87,00	1,20	104,40	87,00	Sanda (Banjar)	77,00	29,00	29,00	-	58,00
Selat	20,00	7,00	7,00	7,00	21,00	1,20	25,20	21,00	Selat	20,00	7,00	7,00	-	14,00
Sema	43,50	13,00	13,00	13,00	39,00	1,20	46,80	39,00	Sema	43,50	13,00	13,00	-	26,00
Sinalud	42,00	17,00	17,00	17,00	51,00	1,20	61,20	51,00	Sinalud	42,00	17,00	17,00	-	34,00
Sudamiyu	60,00	43,00	43,00	43,00	129,00	1,20	154,80	129,00	Sudamiyu	60,00	-	43,00	43,00	86,00
Sumber Kima	50,00	37,00	37,00	37,00	111,00	1,20	133,20	111,00	Sumber Kima	50,00	37,00	-	-	37,00
Tambir	20,00	12,00	12,00	12,00	36,00	1,20	43,20	36,00	Tambir	20,00	-	12,00	12,00	24,00
Tebu Merta	48,00	42,00	42,00	42,00	126,00	1,20	151,20	126,00	Tebu Merta	48,00	42,00	-	42,00	84,00
Tegehe	26,00	26,00	26,00	26,00	78,00	1,20	93,60	78,00	Tegehe	26,00	26,00	26,00	26,00	78,00

Telaga	35,00	19,00	19,00	19,00	57,00	1,20	68,40	57,00	Telaga	35,00	19,00	19,00	19,00	57,00
Tinga-tinga	42,00	38,00	38,00	38,00	114,00	1,20	136,80	114,00	Tinga-tinga	42,00	38,00	-	-	38,00
Tukad Pule	32,00	25,00	25,00	25,00	75,00	1,20	90,00	75,00	Tukad Pule	32,00	25,00	-	-	25,00
Ubeh	47,00	40,00	40,00	40,00	120,00	1,20	144,00	120,00	Ubeh	47,00	40,00	40,00	-	80,00
Umedesa Les	30,00	-	-	-	-	1,20	-	-	Umedesa Les	30,00	-	-	-	-
Unggahan	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	1,20	36,00	30,00	Unggahan	10,00	10,00	-	-	10,00
Yeh Panas	24,50	5,00	5,00	5,00	15,00	1,20	18,00	15,00	Yeh Panas	24,50	5,00	5,00	-	10,00
Yeh Salak	17,00	11,00	11,00	11,00	33,00	1,20	39,60	33,00	Yeh Salak	17,00	11,00	11,00	-	22,00
Asah Anyar	5,50	-	-	-	-	1,20	-	-	Asah Anyar	5,50	-	-	-	-
Babakan Sanda	30,00	30,00	30,00	30,00	90,00	1,20	108,00	90,00	Babakan Sanda	30,00	30,00	30,00	-	60,00
Tampekan Beten Dulang	109,50	44,00	44,00	44,00	132,00	1,20	158,40	132,00	Tampekan Beten Dulang	109,50	44,00	-	44,00	88,00
Lebah Pupuan	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	1,20	18,00	15,00	Lebah Pupuan	5,00	-	5,00	5,00	10,00
Lanyahan Nagasepaha	15,00	14,00	14,00	14,00	42,00	1,20	50,40	42,00	Lanyahan Nagasepaha	15,00	-	14,00	14,00	28,00

Pengodaran	8,00	4,00	4,00	4,00	12,00	1,20	14,40	12,00	Pengodaran	8,00	4,00	-	-	4,00
Pasut Silangjana	22,00	20,00	20,00	20,00	60,00	1,20	72,00	60,00	Pasut Silangjana	22,00	-	20,00	20,00	40,00
Tangis	131,00	70,00	70,00	70,00	210,00	1,20	252,00	210,00	Tangis	131,00	70,00	70,00	-	140,00
Tukad Sumaga	77,00	59,00	59,00	59,00	177,00	1,20	212,40	177,00	Tukad Sumaga	77,00	59,00	59,00	59,00	177,00
Sepang Kelod	21,00	20,00	20,00	20,00	60,00	1,20	72,00	60,00	Sepang Kelod	21,00	20,00	20,00	20,00	60,00
Total Luas DI	-	-	-	-	-	1.2	-	0	TOTAL LUAS REALISASI TANAM	-	-	-	-	-

Sumber data ; Dinas PU Kabupaten Buldeng

TABEL 33
Indikator Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Per Individu Melakukan Perjalanan

TAHUN	KONDISI TAHUN 2010 s/d 2016							PENCAPAIAN SPM
	total luas wilayah kabupaten/kota	panjang ruas jalan yg menghubungkan seluruh pusat kegiatan (pk) di kab/kota	total jumlah penduduk kab/kota tahun terakhir	prediksi jumlah penduduk kab/kota akhir tahun pencapaian spm	tingkat kepadatan penduduk kab/kota rumus: $\sigma (3) / \sigma (1)$	angka mobilitas yang ditentukan (lihat tabel.1 berdasarkan kepadatan penduduk)	angka mobilitas pada akhir tahun pencapaian spm kab/kota rumus: $\sigma (1) / \sigma (4) \times 10.000$ jiwa	rumus : $(\sigma (7) / \sigma (6) \times 100 \%)$
	(KM ²)	(KM)	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA/KM ²)	(KM/JIWA)	(KM/JIWA)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
2010	136,588	417	654,247	719,672	4.79	0.21	0.19	91
2011	136,588	417	662,920	729,212	4.85	0.21	0.19	91
2012	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91
2013	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91
2014	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91
2015	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91
2016	136,588	417	675,511	743,062	4.95	0.20	0.18	91

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 34

Indikator Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat

TAHUN	KONDISI SPM				PENCAPAIAN SPM KESELAMATAN
	TOTAL LUAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA	KOMULATIF PANJANG RUAS JALAN YG MENGHUBUNGKAN SELURUH PUSAT KEGIATAN (PK) DI KAB/KOTA	PANJANG RUAS JALAN YANG MEMILIKI PERSYARATAN ADM.TEKNIS DAN LAIK FUNGSI (PERMEN PU 11/M/PRT/2010)	RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SAMPAI AKHIR TAHUN PENCAPAIAN SPM	RUMUS : (Σ (3)/ Σ (4) X 100 %)
	(KM ²)	(KM)	(KM)	(KM)	
2010	136,588	417	878,192	395,168	45%
2011	136,588	417	878,192	439,096	50%
2012	136,588	417	878,192	483,006	55%
2013	136,588	417	878,192	526,915	60%
2014	136,588	417	878,192	658,644	75%
2015	136,588	417	878,192	658,644	75%
2016	136,588	417	878,192	658,644	75%

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buldeng

TABEL 35
Indikator Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

tahun	KONDISI SPM								pencapaian spm keselamatan
	total luas wilayah kabupaten/kota	panjang ruas jalan yg menghubungkan seluruh pusat kegiatan (pk) di kab/kota	penilaian kondisi jalan pada setiap ruas menggunakan alat pengukur kerataan jalan (roughometer)	kondisi kerataan permukaan jalan		nilai data lintas harian rata2 tahunan (lhrt) tiap ruas untuk tahun akhir pencapaian spm	panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan	panjang jalan yang menghubungkan semua pk pada akhir tahun pencapain spm	rumus : (σ (7)/ σ (8) x 100 %)
				international roughness index (iri) jalan kab/kota maksimum	road condition index (rci) jalan kab/kota				
	(KM²)	(KM)	(KM)	M/KM	BAIK/SEDANG		KM	KM	
2010	136,588	417			310		310	417	74.34
2011	136,588	417			310		310	417	74.34
2012	136,588	417			310		310	417	74.34
2013	136,588	417			310		310	417	74.34
2014	136,588	417			310		310	417	74.34
2015	136,588	417			310		310	417	74.34
2016	136,588	417			310		310	417	74.34

Sumber data ; Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 36

Indikator Tersedianya Jalan yang Menjamin Perjalanan Dapat dilakukan Sesuai dengan KECEPATAN Rencana

Tahun	KONDISI SPM						pencapaian spm keselamatan
	total luas wilayah kabupaten/kota	panjang ruas jalan yg menghubungkan seluruh pusat kegiatan (pk) di kab/kota	hasil pengukuran dibandingkan kecepatan rencana (lihat tabel.2)	nilai data lintas harian rata2 tahunan (lhrt) tiap ruas untuk tahun akhir pencapaian spm	panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan	rencana pembangunan jalan pada akhir tahun pencapain spm	
			international roughness index (iri) jalan kab/kota maksimum				
	(KM²)	(KM)	M/KM		KM	KM	
2010	136,588	417			310	0.00	0.00
2011	136,588	417			310		0.00
2012	136,588	417			310		0.00
2013	136,588	417			310		0.00
2014	136,588	417			310		0,00
2015	136,588	417			310		0,00
2016	136,588	417			310		0,00

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 37

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

TAHUN	Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa dll, yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kota/Kabupaten	Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa yang telah direncanakan untuk dibangun didalam Rencana Induk Sistem Drainase	Nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2)/ \Sigma (3) \times 100 \%$	Sumber data dan Rujukan
	(M)	(M)	(%)	
2010	57.586	5.525	1.042	Dari Total Saluran Drainase Existing 78.345 M2
2011	57.586	5.526	1.042	Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan Bappeko/Bappekab atau Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten;
2012	57.586	5.527	1.042	Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten.
2013	57.586	5.528	1.042	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58
2014	57.586	5.628	1.023	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota
2015	20.000	57.586	34,73	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota
2016	20.000	57.586	34,73	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota

Sumber data ; Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 38

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

TAHUN	Luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan (terendam < 30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun	Luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun).	Nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2)/ \Sigma(3) \times 100 \%$	Sumber data dan Rujukan
	(M2)	(M2)	(%)	
2011				Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan Bappeko/Bappekab atau Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten;
2012				Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota/Kabupaten.
2013	0,5 Ha	13,7 Ha	36,50	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58
2014	0,5 Ha	13,2 Ha	37,88	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota
2015	1 Ha	12,2 Ha	81,97	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota
2016	1 Ha	12,2 Ha	81,97	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota

Sumber data ; Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 39

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

TAHUN	Luasan pengurangan permukiman kumuh sejak diterbitkannya Peraturan Menteri PU pada Akhir pencapaian SPM	Total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2) / \Sigma (3) \times 100 \%$	Sumber data dan Rujukan
	(Ha)	(Ha)	(%)	
2011				Rencana pengembangan wilayah dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota
2012				Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota
2012				Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota
2013				Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota
2014				Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
				Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2015	15 Ha	94,75 Ha	16%	SK Bupati Buleleng Nomor 050/309/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng
2016	15 Ha	164,39 Ha	9%	SK Bupati Buleleng Nomor 050/74/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 40

Indikator Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

TAHUN	Jumlah Masyarakat yang memiliki Akses Air Minum Yang Aman	Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten/Kota pada akhir tahun pencapaian SPM	PENCAPAIAN SPM Air Minum RUMUS (Σ (2)/ Σ (3) X 100 %)
	(Jiwa)	(Jiwa)	(%)
1	2	3	4
2010	467,102	654,147	71.40627412
2011	467,102	654,147	71.40627412
2012	467,102	654,147	71.40627412
2013	467,102	654,147	71.40627412
2014	494,236	641,136	77,09
2015	500,088	638,309	78,34
2016	500,088	638,309	78,34

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

TABEL 41
Indikator Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kab/kota

TAHUN	Biaya maksimum per m2 pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara	Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten/Kota sehingga diharapkan di tahun 2015 seluruh kabupaten/kota telah memiliki HSBGN.	Nilai SPM 2016
		Ada/Tidak	ada =100 % Tidak ada= 0%
1	2	3	4
2010		Ada	100%
2011	3,411,000	Ada	100%
2012	3,984,000	Ada	100%
2013	4,263,000	Ada	100%
2014	4.446.000	Ada	100%
2015	5.256.000	Ada	100%
2016	5.256.000	Ada	100%

Sumber data : Dinas PU Kabupaten Buleleng

5. URUSAN PENATAAN RUANG.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 1 program dan 1 kegiatan, yaitu Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 62.581.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.058.950,00 atau 94,37 persen dengan capaian fisik 100 persen dan hasilnya adalah terlaksananya Pengendalian Tata Ruang di 9 Kecamatan.

Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 ditunjukkan melalui pencapaian beberapa indikator berupa Izin Pemanfaatan Ruang yaitu terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya telah tercapai 100 persen . Jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM dibagi Jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota yang seharusnya sampai akhir tahun pencapaian SPM juga telah tercapai 100 persen dengan telah ditetapkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor . 9 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah Kabupaten Buleleng tahun 2013 – 2033. Selanjutnya Jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat ditangani di tingkat Kab/Kota/Kecamatan pada Tahun 2016 berjumlah 35 pengaduan berbanding jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diterima laporannya dan seharusnya ditangani di tingkat Kab/Kota/ Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM yang jumlahnya sebanyak 35 pengaduan, jadi tingkat capaiannya 100 persen.

Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Buleleng di tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum yang didukung oleh personil sejumlah 12 orang dimana 9 diantaranya adalah PNS dengan pangkat golongan ; Pembina Tk.I (IV/b) ; 1 orang, Pembina (IV/a) ; 1 orang, Penata (III/c) ; 1 orang, Penata Muda ; 1 orang, Pengatur ; 1 orang, Pengatur Muda ; 3 orang dan Pengatur Muda Tk.I ; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan Sarjana 4 orang dan 5 orang lulusan SMA/SMK. Terdapat 3 pejabat structural yang menangani urusan ini yakni pejabat eselon IIb ; 1 pejabat, eselon IIIb ; 1 pejabat dan eselon Iva ; 1 pejabat.

Dalam pelaksanaan Urusan Penataan Ruang, Dinas PU Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 15.300.000,00 dan terealisasi Rp. 13.800.000,00, atau 90,19 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 47.281.700,00 dan terealisasi Rp. 45.258.950,00 atau mencapai 95,72 persen.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas PU Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan penataan ruang ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD untuk pelaksanaan Urusan Penataan Ruang berjumlah Rp. 530.304.675.505,88 dan tidak ada asset yang tidak dipergunakan. Dalam Proses penyelenggaraan urusan penataan ruang yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak ada permasalahan prinsip yang sampai menghambat pelaksanaan urusan penataan ruang.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

Bappeda sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Buleleng, secara implisit kedudukan Bappeda untuk penyelenggaraan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dinyatakan dalam RPJMD. Kedudukan Bappeda sebagai pelaksana program pembangunan daerah terbagi kedalam tiga kategori yaitu pelaksana utama, pelaksana penunjang dan pelaksana pendukung.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Bappeda perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian dikristalkan menjadi

visi Bappeda dalam Rencana strategis Bappeda. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Bappeda yang dirumuskan dapat efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana strategis Bappeda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang;
- b. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal;
- d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekda;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan tata usaha Badan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 15 (limabelas) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Pengadaan Mebeleur.
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT.
- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran..
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- f. Program Perencanaan Anggaran SKPD**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan Anggaran SKPD.
- g. Program Informasi Pembangunan Daerah**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan.
- h. Program Pengembangan Data/Informasi**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.
 - Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.
 - Penyusunan Profile Daerah.
 - Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Iptek.
- i. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- j. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
- k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan rancangan RKPD.
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
 - Penetapan RKPD.
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 - Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- l. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.
 - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha.
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dalam arti luas.

m. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan mental dan pemerintahan.
- Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah.

n. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

- Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah sumber daya alam dan lingkungan hidup.

o. Program Perencanaan Tata Ruang.

- Penyusunan detail tata ruang kawasan.

Kinerja perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyusunan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng baik jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan. Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Buleleng telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng 2012 -2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng 2012 – 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2015.

RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 memuat 88 Program, sedangkan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 memuat 436 Program yang secara rinci tertuang dalam tabel berikut ini ;

TABEL 42
Jumlah Program di RPJMD 2012 – 2017

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	5
2	Dinas Kesehatan	12
3	Dinas Pekerjaan Umum	6
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4
7	Dinas Perhubungan	1
8	Badan Lingkungan Hidup	3
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1
10	Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3
12	Urusan Sosial	4
13	Ketenagakerjaan	3
14	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1
15	Otonomi Daerah dan Pemerintah Umum	11
16	Ketahanan Pangan	1
17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2
18	Kerasipan	1
19	Perpustakaan	1
20	Komunikasi dan Informasi	1
21	Pemuda dan Olahraga	1
22	Pertanian	5
23	Kehutanan	1
24	Perkebunan	3
25	Pariwisata	2
26	Perdagangan	3
27	Perindustrian	3
28	Perikanan dan Kelautan	6
	JUMLAH	88

Sumber data Bappeda Kab. Buleleng

TABEL 43
Jumlah Program di RKPD 2016

NO	SKPD	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	13
2	Kecamatan Tejakula	11
3	Kecamatan Kubutambahan	9
4	Kecamatan Sawan	10
5	Kecamatan Banjar	12
6	Kecamatan Seririt	12
7	Kecamatan Busungbiu	11
8	Kecamatan Gerokgak	11
9	Kecamatan Sukasada	10
10	Kecamatan Buleleng	11
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16
12	Dinas Sosial	12
13	Badan Lingkungan Hidup	14
14	Dinas Komunikasi dan Informasi	9
15	Dinas Pendidikan	15
16	Dinas Kesehatan	20
17	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	16
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	9
19	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian	18
20	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	8
22	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	14
23	Dinas Perikanan dan Kelautan	14
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12
25	Satuan polisi Pamong Praja	8
26	Sekretariat DPRD	10
27	Badan Kepegawaian Daerah	9
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9
29	Rumah Sakit Umum Daerah	3
30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6
31	Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi	8
32	Dinas Pertanian dan Peternakan	14
33	Dinas PU	19
34	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	10

35	Dinas Perhubungan	9
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9
37	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah	10
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11
39	Dinas Pendapatan	7
40	Inspektorat	7
	JUMLAH	436

Sumber data : Bappeda Kab. Buleleng

Dalam pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan, Bappeda Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian ; Anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.4.018.869.597 dan terealisasi Rp. 3.959.165.569 atau 98,51 persen dan belanja langsung sebesar Rp.11.313.034.113,75 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 10.934.105.258 atau mencapai 96,65 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.2.528.315.000 dan terealisasi Rp.2.445.630.000, atau 96,73 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.8.586.659.113,75 dan terealisasi Rp.8.294.735.258 atau mencapai 95,60 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.198.060.000 dan terealisasi Rp.193.740.000 atau 97,82 persen. Hasil – hasil pelaksanaan kegiatan pokok yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 meliputi ;

- Terwujudnya Buku Profil Daerah Kabupaten Buleleng.
- Terwujudnya inovasi-inovasi baru penelitian dan pengembangan Iptek dan Pengembangan Iptek di Kabupaten Buleleng.
- Terbitnya Majalah Dimensi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten.
- Tersedianya dokumen RPIJM bidang Cipta Karya Tahun 2017-2021.
- Tersedianya dokumen identifikasi kebutuhan infrastruktur Kabupaten Buleleng.
- Tersedianya dokumen sinkronisasi perencanaan penanganan sanitasi.
- Tersedianya dokumen SS.
- Terselenggaranya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

- Tersedianya dokumen perencanaan Bappeda yang terdiri dari Pedoman forum SKPD 2016, Pedoman Musrenbang Kabupaten 2016, Pedoman Musrenbang Desa 2016, Pedoman Musrenbang Kecamatan 2016.
- Rancangan Awal RKPD.
- Terwujudnya hasil-hasil musrenbang RKPD.
- Terwujudnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015.
- Laporan Rekap PKK BL (125 Buku).
- Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (25 Buku).
- Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) akhir tahun 2015 (20 buku).
- Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan 2015 (30 buku).
- Kualitas dan Kuantitas Dokumen KUA dan PPAS yang Baik.
- Tersedianya Pedoman Perlindungan dan Pengembangan Petani di Kabupaten Buleleng, terwujudnya koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.
- Terarahnya pengembangan kawasan ekonomi khusus di kabupaten buleleng, terwujudnya koordinasi bidang penanaman modal.
- Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan koperasi, perdagangan, perindustrian dan pengembangan dunia usaha.
- Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan kabupaten buleleng.
- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Kesos pada 9 bidang urusan / 7 SKPD.
- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan mental dan pemerintah pada 7 urusan pemerintahan / 7 SKPD.
- Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada 9 bidang urusan / 21 SKPD.
- Tersedianya laporan hasil koordinasi bidang prasarana wilayah sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Tersedianya dokumen kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- Tersedianya dokumen studi awal kelayakan sistem pengelolaan limbah skala kawasan.
- Tersedianya review dokumen rencana penanganan pemukiman kumuh perkotaan.
- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Singaraja.
- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Seririt.
- Tersedianya persetujuan substansi materi teknis RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Banjar.

- Terkoordinasikannya pelaksanaan penataan ruang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng selaku pelaksana Urusan Perencanaan Pembangunan didukung oleh personil sejumlah 112 orang dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut ;

Tabel 44
Kondisi Kepegawaian Bappeda Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	48 orang
	Pegawai Kontrak	64 orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	5
	Penata Tk. I (III/d)	4
	Penata (III/c)	6
	Penata Muda Tk.I (III/b)	13
	Penata Muda (III/a)	2
	Pengatur Tk.I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	6
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	7
	Pengatur Muda (II/a)	2
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	8
	SI/D4	20
	D3	1
	SMA/SMK/MTs	18
	SMP/MI	1
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon Iva	11
	Pejabat Fungsional	
	1. Nama Jabatan Fungsional : P2BJ dan Umum	31

Sumber : Bappeda Kabupaten Buleleng.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Musrenbang kecamatan yang dilanjutkan melalui Forum SKPD. Usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar Penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama Eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Perencanaan : *cukup*. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 7.282.337.500,33, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 7.162.805.000,33 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 119.532.500,00

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat beberapa permasalahan – permasalahan yang meliputi ;

1. Belum Optimalnya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Belum Optimalnya Pengendalian dan Penyelarasan antara Perencanaan dengan Penganggaran.
3. Belum Optimalnya Pengendalian dan Penyelarasan Penjabaran RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD.
4. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten - Provinsi masih perlu ditingkatka.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi :

1. Membangun Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah/E-planing.
2. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi antara Perencanaan dengan Penganggaran.
3. Melakukan Evaluasi dan Review kembali terhadap Dokumen RPJPD, RPJMD dan Renstra.
4. Melakukan koordinasi dengan lebih intensif serta melakukan sinkronisasi perencanaan kabupaten - provinsi sebagai bahan Evaluasi dan Review perencanaan kabupaten sehingga selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten - provinsi.

7. URUSAN PERUMAHAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang penataan ruang pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 1 program dan 1 kegiatan, yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 99.439.261 dan terealisasi sebesar 89.510.000 atau 90,01 persen. Hasilnya adalah terlaksananya Fasilitas dan Stimulasi Pengembangan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

Bidang Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) Jenis pelayanan dasar dengan 3 (tiga) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22?PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
I.	Rumah Layak Huni dan terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	83.97	90.97	90.97
		2. Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau	70.00	70.00	70.00
II.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perkotaan	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	75.00	85.00	85.00

Sumber data Dinas PU Kab. Buleleng.

Indikator kinerja bidang perumahan ditunjukkan melalui Pelayanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau melalui Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang tercapai 100 persen. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau sampai Tahun 2016 tercapai 70 persen. Layanan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), melalui cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) telah tercapai 85 persen.

Pada Tahun 2016 jumlah rumah yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng 171.218 rumah yang terinci sebagai berikut ; **di Kecamatan Banjar** terdapat 2.512 unit rumah mewah, 14.484 unit rumah sederhana, dan 4025 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 745 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 160 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Buleleng** terdapat 27.073 unit rumah yang terdiri atas 6.207 unit rumah mewah, 25.652 unit rumah sederhana, dan 3.101 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 32 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 1.070 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Busungbiu** terdapat 11.505 unit rumah yang terdiri atas 1.232 unit rumah mewah, 8.846 unit rumah sederhana, dan 1.427 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 1 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 113 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Gerokgak** terdapat 22.601 unit rumah yang terdiri atas 3.198 unit rumah mewah, 13.668 unit rumah sederhana, dan 5.735 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 9 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 1.506 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Kubutambahan** terdapat 13.525 unit rumah yang terdiri atas 485 unit rumah mewah, 8.561 unit rumah sederhana, dan 4.479 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 8 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 648 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Tejakula** terdapat 15.229 unit rumah yang terdiri atas 743 unit rumah mewah, 11.334 unit rumah sederhana, dan 2.730 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 28 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 452 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Seririt** terdapat 20.395 unit rumah yang terdiri atas 3.093 unit rumah mewah, 14.787 unit rumah sederhana, dan 2.515 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 58 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 449 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan Sukasada** terdapat 22.668 unit rumah yang terdiri

atas 2.306 unit rumah mewah, 13.570 unit rumah sederhana, dan 2.003 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 132 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 408 unit merupakan rumah rawan bencana. Di **Kecamatan sawan** terdapat 17.500 unit rumah yang terdiri atas 2.306 unit rumah mewah, 13.570 unit rumah sederhana, dan 1.712 unit rumah tidak layak huni. Dari total rumah yang ada 28 unit diantaranya merupakan rumah tradisional dan 452 unit merupakan rumah rawan bencana.

Luas lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh yang ada di masing – masing kecamatan di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 meliputi wilayah seluas, 114,70 Ha di Kecamatan Gerokgak, 89,58 Ha di Kecamatan Kubutambahan, 34,24 ha di Kecamatan Sawan, 47,40 Ha di Kecamatan Tejakula, 50,30 Ha di Kecamatan seririt, 40,06 Ha di Kecamatan Sukasada, 28,54 Ha di Kecamatan Busungbiu, 62,02 ha di Kecamatan Buleleng dan 80,50 Ha berada di Kecamatan Banjar. Lokasi kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Buleleng terbagi atas kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Untuk kawasan perkotaan meliputi ; **kawasan Seririt – Pengastulan** seluas 54,77 Ha, **Kawasan Kota Singaraja** ; Kelurahan kampung Baru, Kelurahan kampung Bugis, Kelurahan kampung Anyar, Kelurahan Kampung kajanan, Kelurahan Kampung Singaraja dan Kelurahan Banyuning, dengan total seluas 44,74 Ha. **Kawasan Penarukan** seluas 15,60 Ha, **Kawasan sawan** seluas 15,50 Ha, **kawasan Gerokgak – Sanggalangit** seluas 16,18 Ha. Sedangkan kawasan kumuh di Perdesaan meliputi ; kawasan Penglitan seluas 1 Ha, kawasan banjar Tegeha ; 2,6 Ha, kawasan Tigawasa ; 4,8 Ha, Kawasan Pejarakan ; 4,6 Ha dan kawasan Sumberkima seluas ; 4,8 Ha.

Pembangunan di bidang perumahan dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Buleleng dan didukung oleh personil yang berjumlah 11 orang yang terdiri atas 6 Orang PNS dan 5 orang Pegawai Kontrak. PNS yang ada dengan pangkat dan golongan berikut ; Pembina Tk.I (IV/b); 1 orang, Pembina (IV/a) ; 1 orang, Penata Tk. I (III/d) ; 1 orang, Penata Muda (III/a) ; 1 orang, Pengatur (II/c) ; 1 orang dan Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 1 orang. Dengan tingkat pendidikan ; S2 ; 1 orang, S1 ; 3 orang dan SMA/SMK ; 2 orang. Terdapat 2 Pejabat structural yang terdiri atas pejabat eselon IIIb ; 1 orang dan pejabat eselon Iva ; 1 orang.

Dalam pelaksanaan Urusan Perumahan, Dinas PU Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian Belanja Pegawai dengan anggaran

Rp. 6.000.000 dan terealisasi Rp. 4.485.000, atau 74,75 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 93.439.261 dan terealisasi Rp. 85.025.000 atau mencapai 90,99 persen,

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas PU Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan penataan ruang ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 530.304.675.505,88 dan tidak ada asset yang tidak dipergunakan. Dalam proses penyelenggaraan urusan perumahan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak ada permasalahan prinsip yang sampai menghambat pelaksanaan urusan pengembangan perumahan.

8. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA.

Urusan pemuda dan olahraga terdiri dari 4 program yaitu Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga, dan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga ditunjukkan melalui keberhasilan pencapaian prestasi bidang olah raga pada Tahun 2016 yang meliputi :

- 1) Porsenijar Provinsi Bali Tahun 2016, dengan perolehan medali ; 46 emas, 52 perak dan 70 perunggu,
- 2) OOSN Provinsi Bali Tk. SD dengan perolehan medali ; 5 emas, 3 perunggu.
- 3) OOSN Provinsi Bali Tk. SMP dengan perolehan medali ; 3 emas, 2 perak, 5 perunggu.

- 4) OOSN Provinsi Bali Tk. SMA dengan perolehan medali ; 2 emas, 2 perak, 7 perunggu.
- 5) Medali Emas dalam kejuaraan catur internasional kategori Rapid Chess Team atas nama Putra Luhur Apngal Kusuma.
- 6) Medali Emas Kejuaraan Karate Internasional kategori Kata Masc U-11 dan kategori Komite Male U-12 – 30, atas nama Komang Sastrawan.

Urusan Pemuda dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi kepegawaian pada Tahun 2016 meliputi ; Jumlah pegawai 16 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 6 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 10 orang. PNS yang ada dengan pangkat / Golongan ; Pembina (IV/a) ; 1 orang, Penata (III/c) ; 2 orang, Penata Muda Tk. I ; 2 orang dan Pengatur Muda Tk. I ; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan : S1/D4 ; 4 orang dan SMA/SMK ; 2 orang. Pejabat Struktural : eselon III/b ; 1 pejabat, eselon IV/a ; 2 pejabat.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olah Raga pada Tahun 2016 meliputi Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 214.225.000, dan terealisasi sebesar Rp. 201.025.000, atau 93,83 persen. Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.243.142.525, terealisasi sebesar Rp. 4.684.898.109 atau 89,35 persen, dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 200.425.400, terealisasi sebesar Rp. 31.523.800 atau 15,72 persen. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan meliputi :

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

Tujuan pelaksanaan program adalah untuk mewujudkan kualitas SDM dan kepelaporan serta kemandirian pemuda pelajar. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 2 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 192.412.100 dan realisasi sejumlah Rp.176.498.420 atau 91,73 %, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi anggaran untuk kegiatan yaitu :

- Peningkatan keimanan dan ketakwaan Kepemudaan yakni mencakup rangkaian kegiatan peringatan Hardiknas, Sumpah Pemuda yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 74.553.800 dan terealisasi Rp. 72.922.620 atau 97,81 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pemahaman 1.200 pemuda / siswa akan nilai-nilai pendidikan dan sejarah perjuangan bangsa.
- Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan yaitu mencakup pengiriman Pemuda Pelajar Antar Propinsi (PPAP), dibiayai

dengan anggaran sebesar Rp. 117.858.300 dan terealisasi Rp. 103.575.800 atau 87,88 persen dan capaian fisik 100 persen. Hasilnya adalah pencapaian sikap kepeloporan dan kemandirian pada 20 orang pemuda.

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemimpinan dan organisasi sehingga menumbuhkan jiwa patriotisme dan kepemimpinan. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 3 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 1.053.320.400 dan realisasi sejumlah Rp 1.004.158.960 atau 95,33 % dengan realisasi fisik mencapai 100 %. Realisasi kegiatan yaitu :

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan yaitu Pelaksanaan Napak Tilas Panji Sakti dalam rangka HUT Kota Singaraja, Gerak Jalan 17 Km dan 45 Km, dengan anggaran sebesar Rp. 158.287.300 dan terealisasi Rp. 154.425.160 atau 97,56% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Hasilnya adalah peningkatan pemahaman nilai-nilai perjuangan dilingkungan pemuda yang diikuti oleh 50 orang pemuda.
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan yaitu kegiatan PASKIBRA dan Kepramukaan, dengan anggaran Rp. 756.923.200 dan terealisasi Rp. 730.236.150 atau 96,47% dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah peningkatan jiwa kepemimpinan dan sikap disiplin pada 50 pemuda pelajar.
- Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan pemuda, dengan anggaran Rp. 138.109.900 dan terealisasi Rp. 119.497.650 atau 86,52% dengan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah terlaksananya lomba janger, lomba tari kreasi yang diikuti oleh 250 peserta.

3) Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga meliputi 7 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 2.866.833.225 dan realisasi sejumlah Rp 2.603.393.396 atau 90,81 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga dengan anggaran Rp. 212.466.325 dan terealisasi Rp. 19.119.325 atau 89,99% dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah terbinanya prestasi 120 atlet olympiade olah raga siswa nasional di Tk. Daerah.
- Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat dengan anggaran Rp. 1.730.385.200 dan terealisasi Rp. 1.614.522.975 atau 93,30%

dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah terbinanya prestasi 300 atlit dan artis pelajar kabupaten sampai ke tk. Provinsi.

- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan anggaran Rp. 46.000.000 dan terealisasi Rp. -
- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran Rp. 161.324.100 dan terealisasi Rp. 153.397.450 atau 95,09% dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah terbinanya prestasi 23 atlet LPI Kabupaten Sampai ke Tk. Provinsi.
- Permasalahan Olahraga bagi Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat dengan anggaran Rp. 169.069.500 dan terealisasi Rp. 133.124.400 atau 78,74% dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah Meningkatnya prestasi olahraga di Tk. Kabupaten bagi 640 orang.
- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi dengan anggaran Rp. 476.188.100 dan terealisasi Rp. 447.165.700 atau 93,91% dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah 315 Atlet dan pelatih daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi.
- Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat dengan anggaran Rp. 71.400.000 dan terealisasi Rp. 63.991.546 atau 89,62% dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah terbinanya prestasi 35 atlet penyandang cacat sampai ke Tk. Nasional.

4) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga meliputi 2 kegiatan dengan anggaran sejumlah Rp 1.549.227.200 dan realisasi sejumlah Rp 1.137.396.133 atau 73,42% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Pembangunan Sarana dengan anggaran Rp. 545.744.200 dan terealisasi Rp. 245.404.733 atau 44,97% dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah Peningkatan prestasi atlet daerah pada 21 sekolah dan Kegiatan Prasarana Olahraga dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran Rp. 1.003.483.000 dan terealisasi Rp. 891.991.400 atau 73,42% dan capaian fisik 100%. Hasilnya adalah tersedianya pemeliharaan kolam renang, stadion mayor metra, lapangan Bhuana sebanyak 5 unit.

Perencanaan pembangunan untuk Tahun 2016 meliputi Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Musrenbang kecamatan yang dilanjutkan melalui Forum SKPD. Usulan

program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar Penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama Eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Sarana prasarana untuk Urusan Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng cukup untuk mendukung pelaksanaan urusan.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga antara lain :

- 1) Kurangnya pembinaan generasi muda utamanya pemuda pelajar dalam peningkatan nilai nilai kepahlawanan;
- 2) Disiplin pemuda pelajar masih rendah;
- 3) Belum meratanya penyediaan sarana prasarana olah raga di setiap kecamatan;
- 4) Belum meratanya usaha pembinaan atlit terutama pelajar di setiap kecamatan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

- 1) Dilaksanakan kegiatan napak tilas, Gerak jalan 45 km, 8 km dan 2 km;
- 2) Dilakukan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- 3) Bantuan sarana dan prasarana menurut skala prestasi dan potensi atlet sebagai embrio atlit berprestasi;
- 4) Melakukan koordinasi dengan KONI sebagai lembaga yang membantu Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan Pengcab dengan mencari atlet berbobot di setiap kecamatan untuk dilakukan pembinaan.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 7 program dan 31 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 - Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana upacara
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- e. **Program Perencanaan Anggaran SKPD**
- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD
- f. **Program Informasi Pembangunan Daerah**
- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan
- g. **Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu**

- Kegiatan Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Pereijinan Masyarakat
- Kegiatan Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan
- Kegiatan Pengendalian dan Penerbitan Perijinan
- Kegiatan Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan
- Kegiatan Pengembangan sistem Informasi Pelayanan Perijinan
- Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpaadu
- Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan
- Kegiatan Penataan Informasi dan berkas Perijinan
- Kegiatan Pelayanan Perijinan Retribusi dan Pengelolaan Register

Bidang Penanaman Modal memiliki 7 (tujuh) Jenis pelayanan dasar dengan 10 (sepuluh) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu kabupaten Buleleng. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

No	Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan	Indikator SPM		Hasil Capaian (%)		
				2014	2015	2016
I.	Kebijakan penanaman modal	1	Tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang unggulan	100	100	100
II.	Kerjasama penanaman modal		Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dlm rangka kerjasama kemintraan			
		2	Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing	100	100	100

		3	Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kotadengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	100	100	100
III.	Promosi penanaman modal	4	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal propinsi	100	100	100
		5	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	100	100	100
IV.	Pelayanan penanaman modal		Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal			
		6	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 kabupaten/Kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi	181	104	104
		7	Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga	60	25	25

			Kerja Asing (IMTKA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pemaerintah kabupaten/kota			
V.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	8	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	100	100	100
VI.	Pengeloaan data dan sistem informasi penanaman modal	9	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	25	10	10
VII.	Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal	10	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	100	100	100

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

Indikator kinerja BPPT Kabupaten Buleleng Tahun 2016 diukur melalui pencapaian pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 908.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 938.106.450,00 atau 103,29 persen. Sedangkan retribusi daerah tercapai 114,87 persen, dari target sebesar Rp. 4.855.600.000,00, terealisasi Rp. 5.578.024.050,00. Jika mengacu kepada pencapaian pada Tahun 2015 maka terjadi penurunan realisasi PAD yang berasal dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah sekitar 32 persen. Walaupun disatu sisi terjadi peningkatan terhadap pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebesar 26 persen yang berasal dari realisasi pajak reklame sebesar Rp. 938.106.450 pada Tahun 2016.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PNDM) pada Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 1.028.190.243.000, terjadi pnurunan dibandingkan realisasi pada Tahun 2015 yang mencapai Rp. 10.042.866.236.716. Sedangkan persetujuan ijininvestasi pada Tahun 2016 mencapai 155 ijin. Capaian ini juga menurun dibandingkan capaian pada Tahun 2015 yang berjumlah Rp. 157 ijin.

Dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal, BPPT Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD

Kabupaten Buleleng dengan rincian ; Anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.2.528.467.050 dan terealisasi Rp. 2.430.688.005 atau 96,09 persen dan belanja langsung sebesar Rp.1.983.057.124 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.965.683.792 atau mencapai 99,12 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.314.315.000 dan terealisasi Rp.313.529.000, atau 99,75 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.1.644.742.124 dan terealisasi Rp.1.628.455.292 atau mencapai 99,01 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.24.000.000 dan terealisasi Rp.23.699.500 atau 98,75 persen.

Hasil – hasil kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Tahun 2016 meliputi :

- Tersedianya Data Valid sebagai bahan Penetapan/ penerbitan ijin.
- Terevaluasinya Kinerja Layanan Perijinan.
- Terlaksannya Pengendalian Penerbitan ijin.
- Tersusunnya Data dan Pelaporan Perijinan.
- Terselenggaranya Pelayanan Perijinan Berbasis IT.
- Meningkatnya Pengetahuan Perundang-undangan Perijinan bagi Calon Pemohon.
- Teridentifikasinya Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Tersedianya data historis perijinan.
- Terlaksanya Penataan Register Perijinan dan Penerimaan.

Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng selaku Perangkat Daerah pelaksana Urusan Penanaman Modal, didukung oleh 98 Pegawai, yang terdiri atas 70 PNS dan 28 Pegawai Kontrak.

Tabel 47
Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Penanaman Modal

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	70
	PNS	28
	Pegawai Harian /Kontrak	2/40
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	1
	Penata Tk. I (III/d)	4

	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tk.I (III/b)	6
	Penata Muda (III/a)	2
	Pengatur Tk.I (II/d)	4
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	4
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	2
	SI/D4	13/1 /8 (PNS/harian/kontrak)
	D3	3/2(PNS/Kontrak)
	D2 / D1	1 (kontrak)
	SMA/SMK/MTs	10/1/27 (PNS/Harian/kontrak)
	SMP/MI	2 (Kontrak)
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon Iva	3

Sumber data : BPPT Kabupaten Buleleng.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada BPPT Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; Baik. Total Aset yang

dikuasai SKPD Rp. 4.021.472.165,00, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 3.928.475.074. Aset yang tidak dapat digunakan Rp. 92.997.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan adalah :

- Jumlah dan kemampuan pegawai yang kurang memadai
- Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai.
- Belum tersedianya system informasi yang mantap dalam mendukung proses pelayanan perijinan.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu :

- Mengoptimalkan jumlah dan kemampuan pegawai yang ada.
- Melengkapi sarana dan prasarana ruang kerja secara bertahap.
- Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan.

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Koperasi dan UKM pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 10 (sepuluh) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/ Dalam Daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- d. Program Perencanaan Anggaran SKPD**
 - Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD
- e. Program Informasi Pembangunan Daerah**
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan
- f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**
 - Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
 - Kegiatan Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Perkoperasian
 - Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- j. Program Pengembangan Usaha Koperasi.**
 - Kegiatan Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi.

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM dapat diukur dari jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 yang mencapai 388 dengan keanggotaan yang mencapai 66.518 anggota dengan simpanan anggota mencapai Rp. 61.377.586.501, yang terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 13 dengan anggota sebanyak 27.166 dan simpanan anggota mencapai Rp. 4.712.386.098. Kemudian Koperasi Pegawai Negeri ; 43 unit, dengan anggota 8.873 anggota dengan simpanan 29.547.325.845. Berikutnya KOPKAR sejumlah 22 dengan anggota 2.130 anggota, simpanan Rp. 2.754.342.935. KSU ; 170 unit dengan anggota 11.509 orang serta simpanan anggota yang mencapai Rp. 5.223.145.756. Kemudian Koperasi ABRI ; 1 unit dengan anggota 203 dan simpanan anggotanya mencapai Rp. 5.583.427.445. KOPTAN ; 21 unit dengan anggota 1.848 orang serta simpanannya mencapai Rp. 230.653.714. Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 74 unit, 3.540 anggota dan jumlah simpanan anggota yang mencapai Rp. 3.234.725.843. Koperasi angkutan terdata sebanyak 2 unit dengan anggota 62 orang. Koperasi Wanita sebanyak 9 unit dengan anggota 732 dan simpanannya sejumlah Rp. 329.163.250. Serta Koperasi Lainnya sejumlah 33 Unit dengan anggota mencapai 10.455 orang dan simpanan anggotanya sebesar Rp. 9.722.412.615.

Sedangkan jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Buleleng sampai Tahun 2016 mencapai 12.303 UKM, yang terdiri atas UKM Perdagangan yang mencapai 7.785 unit, UKM Industri Pertanian mencapai 2.050 unit, UKM Industri Non Pertanian sejumlah 1.595 unit serta UKM Aneka Jasa sebanyak 873 unit. Dibandingkan dengan Tahun 2015 keberadaan UKM pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 9,08 persen. Jumlah UKM pada Tahun 2015 tercatat sejumlah 11.279 unit.

Dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng berupa belanja langsung yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 255.195.000 dan terealisasi Rp. 206.935.000, atau 81,08 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp. 2.080.138.376 dan terealisasi Rp. 1.551.224.095 atau mencapai 74,57 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 127.040.000 dan terealisasi Rp.0 atau 0 persen.

Hasil – hasil kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Tahun 2016 meliputi :

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi.
- Terlaksananya Pelatihan Ke- wirausahaan.

- Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KSP/ USP Koperasi.
- Terlaksananya rangkaian kegiatan HORKOP Ke-67 Tahun 2016.
- Terlaksananya Penyuluhan per koperasian,
- Terlaksananya Diklat Perkoperasian,
- Terlaksananya Penerbitan dan Pembubaran Koperasi.
- Terlaksananya Pembinaan Kepada Koperasi.
- Terlaksananya Temu Mitra Usaha Bagi Pengelola Koperasi.
- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi.
- Terlaksananya pembinaan manajemen usaha koperasi.

Pembangunan Bidang pengembangan dan pembinaan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang didukung personil berjumlah 118 orang, secara rinci tersaji pada tabel berikut :

Tabel 48
Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Koperasi dan UKM

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	59 orang
	PNS	44 orang
	Pegawai Harian /Kontrak	15 orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	3 orang
	Pembina	2 orang
	Penata Tk. I	10 orang
	Penata	3 orang
	Penata Muda Tk.I	6 orang
	Penata Muda	2 orang
	Pengatur Tk.I	2 orang
	Pengatur	2 orang
	Pengatur Muda Tk.I	11 orang
	Pengatur Muda	3 orang
	Juru Muda Tk. I	1 orang
3.	Tingkat Pendidikan PNS	
	S2	2 Orang
	SI/D4	20 orang
	D3	2 orang
	SMA/SMK/MTs	19 orang
	SD	1 orang

4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1 orang
	Eselon IIIa	1 orang
	Eselon IIIb	2 orang
	Eselon Iva	9 orang
	Pejabat Fungsional	
	1. Penyuluh Perindag	1 orang

Sumber data : Diskopdagin Kab. Buleleng.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Diskopdagperin Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Koperasi dan UKM ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 4.583.258.864,93, Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 4.528.499.726,41 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 54.759.138,52.

Dalam pelaksanaan urusan Koperasi dan UKM tidak ada permasalahan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan.

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dan capil pada Tahun Anggaran 2016 meliputi program dan kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara
- Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – alat Kantor / RT
- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan kegiatan Penyusunan anggaran SKPD.

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara terpadu
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
- Koordinasi Pelaksana Kebijakan Kependudukan
- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
- Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

- Pengembangan Data Base Kependudukan
- Penyusunan Kebijakan Kependudukan
- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Analisa Kependudukan
- Data dan Dokumentasi
- Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Rumah Tangga Miskin.

Capaian kinerja dalam rangka penataan dan pengendalian kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2016 ditunjukkan melalui indikator Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan indikator kinerja yaitu jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan pada Tahun 2016 sebanyak 214.494 dari seluruh rumah tangga yang ada pada Tahun 2016 sejumlah 233.929. Artinya cakupan penerbitan Kartu Keluarga pada Tahun 2016 mencapai 91,70 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada Tahun 2015 yang hanya mencapai 89,16 persen. Sementara itu cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk pada Tahun 2016 mencapai 73,26 persen, dari 593.142 penduduk yang wajib KTP, 434.538 orang diantaranya telah diterbitkan KTP Eletrokniknya. Capaian Tahun 2016 menurun sedikit dibandingkan pada Tahun 2015 yang mencapai 73,78 persen. Sedangkan jumlah akta kelahiran yang diterbitkan pada Tahun 2016 mencapai 38.531 dan akta kematian yang terbit Tahun 2016 mencapai 4.318. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2016 807.884 jiwa, terjadi peningkatan dibandingkan Tahun 2015 dimana jumlah penduduk mencapai 807.598 jiwa.

Pembangunan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Berlokasi di Jalan Gajah Mada Singaraja Telp/Fax (0362) 25887 SINGARAJA, **Website** : <http://disdukcapail.Buleleng.go.id> **email** : disdukcapil@buleleng.go.id.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berjumlah 38 orang. **Dengan pangkat dan golongan terdiri atas** : Pembina Tk.I (IV/b) ; 3 orang, Pembina (IV/a) ; 6 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 8 orang, Penata (III/c) ; 4 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 6 orang, Penata Muda (III/a) ; 2 orang, Pengatur Tk.I (II/d) ; 1 orang, Pengatur (II/c) ; 5 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 1 orang, Pengatur Muda ; 2 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan meliputi** : Strata 2 (S2) ; 2 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 17 orang, Diploma 3 (D3) ; 5 orang, SMA/SMK/Mts ; 11 orang, SD ; 3 orang. **Jumlah Pejabat**

Struktural : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 15 pejabat. Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.

Untuk penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 7.317.070.100 dan terealisasi sebesar Rp. 7.248.646.622 atau 99,06 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.3.082.421.000 dan terealisasi Rp.3.054.730.642 atau 99,10 persen dan belanja langsung sebesar Rp.4.234.649.100 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.4.193.915.979 atau mencapai 99,04 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.485.680.000 dan terealisasi Rp.485.221.000, atau 99,91 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.3.560.329.100 dan terealisasi Rp.3.523.864.479 atau mencapai 98,98 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.188.640.000 dan terealisasi Rp.184.830.500 atau 97,98 persen. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan serta hasil kegiatan meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan di dalam menunjang pencapaian sasaran kinerja. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 1.248.960.100 Dan terealisasi Rp 1.200.960.747 atau 96,16 persen, dengan realisasi tiap kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alokasi Anggaran Rp. 38.730.000, dan Realisasi sebesar Rp. 38.067.336, atau 98,29 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu tercapainya koordinasi melalui surat sebanyak 1.500 lembar.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Alokasi Anggaran Rp. 137.800.000, dan Realisasi sebesar Rp. 127.443.331, atau 92,48 persen dengan realisasi fisik 90 persen. Hasil kegiatan yaitu lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kantor dengan terbayarnya 108 rekening telpon, listrik dan air.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 110.920.000, dan Realisasi sebesar Rp. 107.820.372, atau 97,21 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan sewa kendaraan sebanyak 1 unit.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran Rp. 6.000.000, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.306.000 atau 55,10 persen

dengan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional yang tersamsat sebanyak 30 unit kendaraan roda 2 dan roda 4.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi Anggaran Rp. 381.080.000, dan Realisasinya Rp. 380.590.562 atau 99,87 persen, dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 8 dokumen data bahan kajian keuangan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 38.370.000, dengan Realisasi mencapai Rp. 38.370.000, atau mencapai 100 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya yaitu meningkatnya kebersihan lingkungan kantor melalui pembelian 375 alat kebersihan.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 30.200.000, dengan Realisasi sebesar Rp. 30.162.723 atau 99,88 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 1250 item alat tulis kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.000.000, dengan realisasi Rp 8.442.738, atau 84,43 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya tersedianya barang cetakan & penggandaan sebanyak 139 item.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 6.000.000 dan Realisasinya mencapai Rp. 5.999.085, atau 99,98 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya komponen listrik sebanyak 177 item.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Alokasi Anggaran Rp. 162.640.000, dengan Realisasi Rp. 159.140.000 atau 97,85 persen. Hasilnya adalah meningkatnya kinerja pegawai sebanyak 12 unit.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Alokasi Anggaran Rp. 5.040.000, Realisasi Rp. 5.040.000 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya bahan bacaan/surat kabar sebanyak 72 eksemplar.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 108.936.000, terealisasi Rp. 108.530.000, atau 99,63 persen dan

realisasi fisik 100 persen. Hasilnya terpenuhinya kesejahteraan tenaga kebersihan sebanyak 534 paket.

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Alokasi Anggaran Rp. 20.400.000, Realisasi sebesar Rp. 18.160.000 atau 89,02 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya makanan dan minuman rapat sebanyak 840 kotak.
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 245.230.100, Realisasi Anggaran Rp. 222.448.600 atau 90,71 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya tersedianya data sebagai bahan pengambilan kebijakan sebanyak 20 OH.
- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian, Alokasi Anggaran Rp. 56.550.000, Realisasi Anggaran Rp. 55.970.000 atau 98,97 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya tercapainya tertib administrasi kepegawaian sebanyak 112 orang.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 270.586.600, dan Realisasi Anggaran Rp. 256.142.387 atau 94,66 persen. Realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi :

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Upacara, dialokasikan dengan anggaran Rp. 110.086.600 dan realisasinya Rp. 109.899.640, atau 99,83 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya sarana/prasarana upacara sebanyak 54 item.
- Kegiatan Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional, Alokasi Anggaran Rp. 10.000.000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 10.000.000 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terlaksananya tirta yatra sebanyak 4 item.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran Rp. 59.500.000, dengan Realisasi Anggaran Rp. 52.895.000 atau 88,90 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah jumlah jenis kendaraan dinas/operasional yg layak pakai sebanyak 11 unit.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor, alokasi anggaran Rp. 10.000.000, dan terealisasi Rp. 10.000.000, atau 100 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya pemeliharaan taman sebanyak 1 paket.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kantor/RT, Alokasi Anggaran Rp. 40.000.000, dan terealisasi Rp. 33.232.830, atau 83,08 persen. Hasilnya adalah meningkatnya operasional peralatan kerja sebanyak 31 unit.
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 41.000.000, dan terealisasi Rp. 40.114.917, atau 97,84 persen. Hasilnya adalah meningkatnya validasi pendataan dan inventaris aset barang milik daerah.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000, dan realisasi anggaran Rp. 18.650.000, atau 98,16 persen. Realisasi untuk masing – masing kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Alokasi Anggaran Rp. 14.000.000, dan realisasi anggaran Rp. 13.650.000, atau 97,50 persen. Hasilnya terwujudnya disiplin pegawai melalui pengadaan 55 stel pakaian.
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur, Alokasi Anggaran Rp. 5.000.000, dan realisasinya anggaran Rp. 5.000.000, atau 100 persen. Hasilnya terlaksananya tirta yatra sebanyak 1 kali.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Alokasi Anggaran Rp. 63.990.400, dan realisasi anggaran Rp. 63.925.579 atau 99,90 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 3 laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

5) Program Perencanaan Anggaran SKPD, alokasi anggaran Rp. 70.207.200, dan Realisasi Anggaran Rp. 70.067.692 atau 99,80 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya tersedianya acuan pelaksanaan anggaran SKPD sebanyak 4 dokumen.

6) Program Penataan administrasi Kependudukan. Program ini dibiayai melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 2.561.904.800, dan terealisasi sebesar Rp. 2.557.479.780, atau 99,83 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan yang meliputi :

- Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu, Alokasi Anggaran Rp. 195.978.000, dan Realisasi Anggaran Rp.

195.189.707 atau 99,60 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan dgn SIAK sebanyak 6.667 permohonan.

- Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan pemeliharaan, Alokasi Anggaran Rp. 472.596.500, dan Realisasi Anggaran Rp. 471.662.728 atau 99,80 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya tertibnya administrasi kependudukan sebanyak 106.034 set dan keping.
- Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 166.825.000, dan Realisasi Anggaran: Rp. 166.491.446, atau 90,80 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya laporan hasil penerbitan penduduk pendatang sebanyak 20 laporan.
- Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan, Alokasi Anggaran Rp. 60.049.900, dan terealisasi Rp. 59.996.712 atau 99,91 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya buku laporan pelaksanaan pencacatan sipil sebanyak 2.500 dokumen akta.
- Kegiatan Penyediaan Informasi yg dapat diakses Masyarakat, Alokasi Anggaran Rp. 48.473.400, dan Realisasi Anggaran Rp. 48.337.295, atau 99,72 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses administrasi sebanyak 30 buah.
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, Alokasi Anggaran Rp. 525.529.084, dan realisasi anggaran Rp. 525.446.412, atau 99,98 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya 58.658 akta-akta capil bagi masyarakat.
- Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan, Alokasi Anggaran Rp. 170.195.900, dan realisasi anggaran Rp. 169.027.774 atau 99,31 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah data kependudukan sebanyak 2 dokumen.
- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan, Alokasi Anggaran Rp. 120.770.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 120.676.287, atau 99,92 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya buku standar operasional (SOP) pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta rancangan

peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan penduduk dalam 170 buku dan 1 Ranperda.

- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Alokasi Anggaran Rp. 189.390.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 188.856.981, atau 99,72 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya pemahaman dan tertib kependudukan / pencacatan sipil bagi 873 orang.
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Alokasi Anggaran Rp. 93.950.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 93.914.649, atau 99,96 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya 12 laporan hasil monitoring dan pelaporan.
- Kegiatan Analisa Kependudukan, Alokasi Anggaran Rp. 68.700.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 68.511.611, atau 99,73 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya buku profil perkembangan kependudukan untuk mendukung pengambilan kebijaksanaan bidang kependudukan sebanyak 40 eksemplar.
- Kegiatan Data dan Dokumentasi, Alokasi Anggaran Rp. 21.176.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 21.165.856, atau 99,95 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya data dan dokumentasi kependudukan dan pencatatan sipil yg dapat diterima masyarakat sebanyak 6 buku dan 1500 lembar.
- Kegiatan Pelayanan Dokumen Kepemilikan Kependudukan bagi Rumah Tangga Miskin, Alokasi Anggaran Rp. 428.271.016, dan Realisasi Anggaran Rp. 428.202.322, atau 99,98 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya akta-akta capil bagi rumah tangga miskin sebanyak 2.100 akta.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan kependudukan disusun melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Dilanjutkan melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum SKPD dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD

dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 8.609.018.462. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 8.541.679.582 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 67.338.880.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2016 adalah :

- Kurangnya sarana penunjang, seperti komputer, printer untuk pencetakan KTP Elektronik dan kendaraan /mobil pelayanan keliling sebagai penunjang peningkatan kinerja aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- Tingkat kesadaran masyarakat relatif rendah terhadap peraturan yang ada, terutama yang menyangkut kepemilikan surat-surat identitas diri, seperti KTP / KK, dan akta-akta Catatan Sipil (mencari pada saat memerlukan).
- Masih banyak penduduk yang keluar masuk Kabupaten Buleleng yang tidak dilengkapi dengan identitas diri.
- Belum terlaksananya tertib administrasi kependudukan secara merata di desa-desa / kelurahan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada
- Pengadaan sarana komputer dan kendaraan operasional secara bertahap
- Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan kependudukan dan catatan sipil, secara langsung maupun melalui media massa.
- Mengadakan razia penduduk keluar masuk Kabupaten Buleleng
- Sosialisasi dan penyuluhan tentang sistem SIAK untuk penyeragaman administrasi ke desa-desa.
- Mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan pelayanan KTP, Akta Massal dan Akta Miskin dengan sistim jemput bola.

12. URUSAN TENAGA KERJA.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 9 program dan 39 kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan / Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah / Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat – Alat Kantor / RT.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Penyusunan Anggaran SKPD

6. Program Informasi Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
- Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.

9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Bidang Ketenagakerjaan memiliki 5 (lima) Jenis pelayanan dasar dengan 8 (delapan) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
A.	Pelayanan Pelatihan kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	300.00	111.00	111.00
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	300.00	77.00	77.00
		3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	76.00	62.00	62.00
B.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	4. Besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	80.00	80.00	80.00
C.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100.00	100.00	100.00
D.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	6. Besaran Pekerja Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	100.00	100.00	100.00
S u m	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100.00	100.00	100.00
		8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	6.00	21.00	21.00

ber data : Disnakertrans Kab. Buleleng.

Dalam pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng dengan rincian ; Anggaran belanja

daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.5.361.752.000 dan terealisasi Rp.5.273.480.866 atau 98,55 persen dan belanja langsung sebesar Rp.2.832.925.935 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.2.665.174.358 atau mencapai 94,08 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.502.230.000 dan terealisasi Rp.491.575.000, atau 97,88 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.2.226.695.935 dan terealisasi Rp. 2.082.954.358 atau mencapai 93,54 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.104.000.000 dan terealisasi Rp.90.645.000 atau 87,16 persen.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2016 tersaji sebagaimana table berikut :

TABEL 50
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

PROGRAM/KEGIATAN		DANA (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
3		4	5	6	7
Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.462.000	65.418.700	98,43	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	127.829.874	80.147.214	62,70	100,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.181.453	172.270.781	92,03	100,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.100.000	1.421.000	17,54	55,00
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	243.823.000	240.472.700	98,63	100,00
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47.802.000	46.434.700	97,14	100,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.538.000	14.946.100	80,62	95,96
8	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	4.446.100	74,10	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.000.000	84.705.000	86,43	100,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	4.080.000	4.080.000	100,00	100,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000	5.580.000	93,00	100,00
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah/Luar Daerah	119.020.924	117.667.113	98,86	100,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pengadaan mebeleur	6.000.000	5.940.000	99,00	100,00

2	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	75.850.000	65.418.000	86,25	100,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.000.000	6.917.000	98,81	100,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000	12.374.998	61,87	100,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	11.100.000	10.995.000	99,05	100,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT	9.400.000	4.165.000	44,31	46,15
Peningkatan Disiplin Aparatur					
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	24.150.000	23.215.000	96,13	97,10
2	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	25.300.000	25.300.000	100,00	100,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	93.600.000	90.431.208	96,61	100,00
Perencanaan Anggaran SKPD					
1	Penyusunan Anggaran SKPD	155.000.000	153.462.620	99,01	100,00
Informasi Pembangunan Daerah					
1	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	35.000.000	24.609.900	70,31	100,00
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas					
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	325.259.384	302.174.050	92,90	100,00
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	45.000.000	42.753.624	95,01	100,00
Peningkatan Kesempatan Kerja					
1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	39.000.000	37.993.940	97,42	100,00
2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	82.813.800	76.527.150	92,41	100,00
3	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000	148.078.350	98,72	100,00
4	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	55.000.000	50.620.800	92,04	100,00
5	Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan	105.596.100	97.621.540	92,45	100,00
6	Pemberian Fasilitas & Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	184.714.400	171.974.500	93,10	100,00
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	26.000.000	25.309.149	97,34	100,00
8	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	108.980.000	103.593.271	95,06	100,00
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan					
1	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	58.000.000	57.142.300	98,52	100,00
2	Fasilitas Penyelesaian Prosedur				

	Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	164.625.000	163.776.700	99,48	100,00
3	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	72.700.000	72.466.850	99,68	100,00
4	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	55.000.000	54.724.000	99,50	100,00

Sumber data : Disuakertrans Kab. Buleleng.

Hasil pelaksanaan kegiatan Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2016 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng meliputi :

- Tercapainya koordinasi melalui surat sebanyak 1200 surat
- Lancarnya pelaksanaan tugas – tugas kantor sebanyak 84 rekening
- Meningkatnya operasional SKPD sebanyak 2 unit / 12 bulan
- Jumlah jenis kendaraan yang disamsat sebanyak 40 unit
- Tersedianya data sebagai bahan kajian keuangan sebanyak 3 jenis buku laporan
- Meningkatnya kebersihan kantor sebanyak 2 unit
- Meningkatnya kinerja kantor sebanyak 12 bulan
- Terpeliharanya penerangan lingkungan kantor : 15 jenis/12 bulan
- Meningkatnya Operasional perlengkapan gedung kantor 4 jenis
- Meningkatnya wawasan pegawai : 4 jenis/12 bulan
- Meningkatnya kinerja pegawai : 200 kotak
- Tersedianya data sebagai kajian keputusan rapat : 10 orang
- Meningkatnya operasional mebeleur : 1 unit
- Meningkatnya keimanan pegawai : 120 kali/15 jenis
- Meningkatnya kenyamanan kerja pada gedung kantor : 1 unit
- Meningkatnya operasional kendaraan : 7 unit
- Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor : 19 unit
- Meningkatnya operasional alat – alat kantor / RT : 1 unit
- Meningkatnya iman PNS : 90 orang
- Meningkatnya disiplin pegawai : 20 orang
- Tersedianya data sebagai bahan kajian dalam penyusunan kebijakan kinerja SKPD : 80 Buku
- Tersedianya dokumen sebagai acuan pelaksana anggaran : 100 buku
- Tersebar nya informasi hasil pembangunan : 1 paket
- Meningkatnya kualitas tenaga kerja mandiri : 32orang

- Meningkatnya peran dan fungsi LPKS dalam menciptakan tenaga kerja terampil : 40 LKPS
- Tersedianya data pemetaan angkatan kerja dan kesempatan kerja : 55 buku
- Meningkatnya penempatan pencari kerja melalui pameran bursa kerja : 3 media
- Meningkatnya pemahaman peserta bahasa Jepang : 50 orang
- Meningkatnya SDM tenaga kerja melalui pelatihan/bimbingan teknis (Bimtek) : 12 orang
- Meningkatnya peran lembaga dan SDM peserta : 12 orang
- Betonisasi jalan : 4 lokasi di 4 desa
- Sebagai bahan kajian program peningkatan kesempatan kerja : 20 buku laporan
- Meningkatnya keterampilan bagi pencari kerja : 32 orang
- terselesaikannya masalah PHK : 10 kasus
- Meningkatnya perlindungan hukum dan jamsostek : 50 perusahaan
- Meningkatnya pemahaman peserta tentang peraturan ketenagakerjaan : 250 orang
- Meningkatnya pelaksanaan K3 : 30 perusahaan.

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Kondisi kepegawaian tersaji pada tabel berikut ;

Tabel 51
Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Tenaga Kerja

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	106
	PNS	68
	Pegawai Harian /Kontrak	38
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	5
	Pembina	9
	Penata Tk. I	12
	Penata	12
	Penata Muda Tk.I	12
	Penata Muda	2

	Pengatur Tk.I	6
	Pengatur	2
	Pengatur Muda Tk.I	3
	Pengatur Muda	3
	Juru	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	2
	SI/D4	34
	D3	10
	SMA/SMK/MTs	49
	SMP/MI	1
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon Iva	15
	Pejabat Fungsional	
	1. Fungsional Instruktur Umum	1
	2. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	1
	3. Fungsional Instruktur Ahli	2
	4. Fungsional Instruktur Bangunan	1
	5. Fungsional Instruktur Otomotif	2
	6. Fungsional Instruktur Mekanikal	2
	7. Fungsional Instruktur Pertanian	1
	8. Fungsional Instruktur Menjahit	1
	9. Fungsional Instruktur Komputer	1
	10. Fungsional Instruktur Listrik	2

Sumber data : Disnakertrans Kab. Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2015. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya

mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun DPA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Tenaga kerja ; kurang. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 5.054.324.965, Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 4.953.349.965 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 100.975.000.

Program maupun kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara keseluruhan sampai akhir tahun anggaran 2016 sudah berjalan dengan baik dan lancar walaupun serapan realisasi keuangan mencapai 88,80 persen namun realisasi fisik sudah mencapai 90 persen. Untuk tahun anggaran berikutnya dalam merencanakan anggaran baik program maupun kegiatan akan lebih teliti dalam memberikan pagu, serta memprioritaskan hasil Musrenbang yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 1 program dan 6 kegiatan, yaitu : **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)**, yang dituangkan ke dalam kegiatan :

- Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan.
- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija.
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa.
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Bidang Ketahanan Pangan terdapat 4 (empat) Jenis pelayanan dasar dengan 7 (tujuh) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggung jawab yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 90% tahun 2015	41.77	70.00	70.00
		2 Penguatan Cadangan Pangan 60% tahun 2015	45.97	56.78	56.78
2.	Distribusi dan Akses Pangan	3 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 90% tahun 2015	281.20	181.20	181.20
		4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 90% tahun 2015	100.00	100.00	100.00
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% tahun 2015	100.00	100.00	100.00
		6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 80% tahun 2015	25.87	55.98	55.98
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	7 Penanganan Daerah Rawan Pangan 60% tahun 2015	30.76	44.76	44.76

Sumber data Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

Produksi tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya (ton) sebesar 137 ton/ tahun dan Luas areal tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya (ha) adalah seluas 22.666 Ha.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2016 meliputi **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)**, program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 1.303.295.346 dan terealisasi Rp 1.247.469.965,(95,72%), dengan realisasi anggaran masing – masing kegiatan :

- Kegiatan penyusunan data base potensi produksi pangan, dengan anggaran sebesar Rp 51.600.000 dan terealisasi Rp 51.552.940,- (99,91 %), dengan hasil kegiatan adalah tersedianya informasi tentang data base potensi produksi pangan sebanyak 3 dokumen.
- Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp 48.170.000 dan terealisasi Rp Rp 47.997.700,- (99,64 %), dengan hasil kegiatan adalah meningkatnya produksi dan kualitas produk olahan sebanyak 2 kelompok
- Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, dengan anggaran sebesar Rp 123.325.345,57 dan terealisasi Rp 122.782.110 (99,56%) dengan hasil kegiatan adalah Optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan serta meningkatnya pengetahuan dalam pengelolaan pertanian sebanyak 9 kecamatan
- Kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, dengan anggaran sebesar Rp 256.000.000 dan terealisasi Rp 249.564.145,- (97,49%), dengan hasil Berkembangnya benih padi (5 Ha), Terwujudnya penumbuhan pengembangan padi dan kedelai pada lahan kering (10 Ha) serta meningkatnya pengetahuan/ keterampilan petani di 8 kecamatan.
- Kegiatan pengembangan lumbung pangan desa, dengan anggaran sebesar Rp 678.500.000 dan terealisasi Rp 632.439.400,- (93,21%), dengan hasil Meningkatnya olahan gabah yang dikelola oleh subah/ kelompok.
- Kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, Alokasi Anggaran Rp 145.700.000 Realisasi Anggaran Rp 143.133.670,- (98,24%) hasilnya adalah tercapainya pelaksanaan peningkatan mutu dan keamanan pangan padi (2.000 Ha), jagung (1.000 Ha) dan kedelai (250 Ha)

Pembangunan di bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, dengan Kondisi pegawai yang menangani Urusan Ketahanan Pangan berjumlah 44 orang. Secara lengkap terkait kondisi kepegawaian pelaksana Urusan Ketahanan Pangan tersaji pada tabel berikut :

TABEL 53
Kondisi Pegawai Urusan Ketahanan Pangan.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
a.	PNS	35 orang
b.	- Pegawai Harian	1 orang
	- Kontrak Daerah	8 orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
	Pembina Tk.I (IV/b)	2 orang
	Pembina	2 orang
	Penata Tk. I	8 orang
	Penata	5 orang
	Penata Muda Tk.I	9 orang
	Penata Muda	4 orang
	Pengatur Tk.I	2 orang
	Pengatur	2 orang
	Pengatur Muda Tk.I	2 orang
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	4 orang
	SI/D4	13 orang
	SMA/SMK/MTs	18 orang
4.	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1 orang
	Eselon IIIb	2 orang
	Eselon Iva	5 orang
	Pejabat Fungsional	
	1. Fungsional Umum	8 orang
	2. Fungsional Pengawas Bibit Tanaman	1 orang
	3. Fungsional PPL	2 orang

Sumber data : Distanak Kab. Buleleng.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2015. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Program Ketahanan Pangan/ Perkebunan adalah cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 32.792.077.524,43. Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 32.582.730.510,00 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 209.347.014,43 .

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Masih adanya gangguan penyakit baik pada tanaman pangan.
Pengalaman menunjukkan bahwa tahun-tahun terakhir ini kondisi iklim sulit diprediksi. Anomali iklim sulit diramalkan dengan tepat (baik kapan terjadi maupun intensitasnya). Gangguan anomali iklim erat kaitannya dengan perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan secara tuntas.
2. Skala usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi.
Luas pemilikan lahan rata-rata relatif kecil (lebih kurang 0,30 Ha), akan mengakibatkan pengelolaan usaha tani tidak efisien dan akan berdampak pada produksi/produktivitas. Disamping itu dengan sifat produksi pertanian yang bersifat musiman akan mempengaruhi fluktuasi harga.
3. Penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal.
Teknologi yang ada belum diaplikasikan secara optimal oleh petani, yang berdampak belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada. Beberapa faktor yang diperkirakan menghambat penerapan teknologi oleh petani adalah karena keterbatasan petani seperti permodalan, aksesibilitas terhadap sumber informasi keterampilan petani dan insentif harga yang diterima.
4. Degradasi sumber daya air.
Sumber daya air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Debit air untuk irigasi juga berkurang.

5. Terbatasnya sarana / prasarana.

Dalam upaya penyediaan sarana produksi terutama benih dan bibit bermutu belum handal dan belum memiliki prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat, dan harga. Demikian pula halnya dengan Alsin (alat dan mesin) pertanian relatif masih terbatas.

6. Pangsa pasar ekspor produksi pertanian masih kecil, sementara produksi yang dimiliki cukup besar.

7. Pondasi pasar agribisnis belum tersentuh dengan kokoh sehingga sistem dan usaha agribisnisnya belum berkembang seperti yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan langkah alternatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

1. Mengadakan penyikapan, pengamatan, pengawasan, pencegahan, pengendalian dan pengobatan serta pemberantasan penyakit pada.
2. Optimalisasi dan intensifikasi pengelolaan lahan serta menggunakan bibit unggul
3. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen, pengolahan hasil dan mengembangkan produksi sesuai potensi pasar.
4. Berkoordinasi dengan sumber-sumber inovasi teknologi.
5. Meningkatkan penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani.
6. Mengembangkan pilot proyek dan percontohan penerapan teknologi usaha tani.
7. Mengembangkan sistem pelayanan bagi petani (kelompok tani dan usaha agribisnis Off Farm seperti pelayanan penyediaan modal usaha (kredit).
8. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kemandirian petani dalam usaha pertanian.
9. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan usaha pada bidang pemasaran hasil pertanian.
10. Pengembangan bantuan sarana dan prasarana pertanian (alsintan, cubang, embung, perbaikan jaringan irigási ditingkat petani).
11. Meningkatkan pelayanan informasi pasar dan promosi hasil-hasil pertanian.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 4 program dan 8 kegiatan, yaitu :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- Kegiatan Fasilitasi Operasional Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG.
- Kegiatan Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG.
- Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan Revitalisasi GSI-B.

4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif.

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terdapat 5 (lima) Jenis pelayanan dasar dengan 8 (delapan) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

TABEL 54
SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Indikator SPM	Capaian		
	2014	2015	2016
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100. 00	100.00	100.00
Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	100.00	100.00	100.00
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100.00	100.00	100.00
2a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)	10.00	100.00	100.00
Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100.00	100.00	100.00
Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	100.00	100.00	100.00
Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus	100.00	100.00	100.00

Indikator SPM	Capaian		
	2014	2015	2016
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit			
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75.00	75.00	75.00
Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	75.00	75.00	75.00
Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75.00	75.00	75.00
Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	75.00	75.00	75.00
Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	70.00	80.00	80.00
Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	100.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta	100.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan sarana dan	80.00	80.00	80.00

Indikator SPM	Capaian		
	2014	2015	2016
prasarana di UPPA			
Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	100.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50.00	80.00	80.00
Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	100.00	80.00	80.00
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100.00	50.00	50.00
Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	67.00	50.00	50.00
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50.00	50.00	50.00
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100.00	100.00	100.00
Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi social	100.00	100.00	100.00

Sumber data : BKBPP Kab. Buleleng.

Pembiayaan untuk pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan melalui Belanja langsung dengan realisasi sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan alokasi dana Rp. 26.425.000 dan terealisasi Rp. 25.800.000,- (97,63%), yang dibagi ke dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking, hasilnya adalah beroperasinya Jaringan Kerja Gugus Tugas Trafficking sebanyak 9 Kecamatan.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan alokasi dana Rp. 346.060.900,- dan terealisasi Rp. 297.290.040,- (85,90%), yang dibagi ke dalam kegiatan :
 - Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan anggaran Rp. 26.580.300,- dan terealisasi Rp. 23.752.520,- (89,36%), hasilnya adalah Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan terbentuknya Focal point di seluruh SKPD (41 SKPD).
 - Kegiatan Fasilitasi Operasional Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan anggaran Rp. 187.479.400,- dan terealisasi Rp. 161.370.600,- (86,07%), hasilnya adalah Tertanganinya kasus-kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 2 Lembaga.
 - Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan PPRG, dengan anggaran Rp. 32.909.400,- dan terealisasi Rp. 29.779.210,- (90,48%), hasilnya adalah Meningkatnya Jumlah SDM yang kompeten dalam Analisis PPRG sebanyak 45 Orang
 - Kegiatan Pengembangan Jejaring Kerjasama Penguatan Kelembagaan PUG, dengan anggaran Rp. 94.930.300- dan terealisasi Rp. 78.226.210,- (82,40%) hasilnya adalah Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan adanya Kelembagaan Jejaring PUG sebanyak 1.500. Orang.
 - Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, dengan anggaran Rp. 4.161.500,- dan terealisasi Rp. 4.161.500,- (100%) hasilnya adalah Tersedianya data profil untuk menuju Kabupaten Layak Anak sebanyak 1 Dokumen.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan alokasi dana Rp. 45.338.485,- dan terealisasi Rp. 42.538.485,- (93,82%) yang dibagi ke dalam kegiatan Kegiatan Revitalisasi GSI-B,

hasilnya adalah meningkatnya Revitalisasi GSI-B pada 21 Desa di 9 Kecamatan.

- 4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dengan alokasi dana Rp. 103.495.000,- dan terealisasi Rp. 100.524.718.- (97,13%) yang dituangkan ke dalam Kegiatan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif, hasilnya adalah meningkatnya keterampilan dan pemahaman kelompok wanita sebanyak 19 kelompok.

Pembangunan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan KBPP Kabupaten Buleleng. Kondisi pegawai yang menangani Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pangan tersaji pada tabel berikut :

TABEL 55
Kondisi Pegawai Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	10 Orang
	PNS	5 Orang
	Pegawai Harian /Kontrak	5 Orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
	Penata Tk. I	3 Orang
	Penata Muda Tk.I	1 Orang
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	1 Orang
	SI/D4	3 Orang
	SMA/SMK/MTs	1 Orang
4.	Jumlah Pejabat	4 Orang
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1 Orang
	Eselon IIIb	1 Orang
	Eselon Iva	2 Orang

Sumber data : KBPP Kab. Buleleng.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas

melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan KBPP Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 107.194.800,00. Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 107.194.800,00 jadi tidak ada aset yang tidak digunakan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga indikator yang telah ditetapkan dalam kegiatan tersebut tidak memenuhi target. Rincian kegiatan yang tidak terlaksana dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Pengarusutamaan Gender.
- 2) Sering terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
- 3) Kurangnya data terpilah hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap dinas/instansi.
- 4) Kendalanya dilaporkan GSI yaitu laporan bulanan dan triwulan baik dari desa maupun di Kecamatan.

Pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Mengadakan sosialisasi program Pengarusutamaan Gender secara berjenjang, bertingkat dan berlanjut.
- 2) Mengadakan pelatihan kelompok perempuan baik menyangkut keterampilan maupun manajemen kewirausahaan.
- 3) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 5) Meningkatkan koordinasi lintas sektor tentang data hasil kegiatan.

Prestasi dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diraih melalui Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng dengan Duta Anak di bidang jaringan perwakilan Provinsi Bali ke Tingkat Forum Anak Nasional atas nama Desak Putu Salsabhila Ardiantari Putri dari SMAN 1 Singaraja.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 12 program dan 33 kegiatan, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5) Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

6) Program Informasi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan

7) Program Keluarga Berencana, dengan Kegiatan Pelayanan KIE

8) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, melalui Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

9) Program Pelayanan Kontrasepsi, Kegiatan Pelayanan Konseling KB.

10) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dengan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

11) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dengan Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

12) Program Pengembangan Data dan Informasi

- Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target
- Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Informasi
- Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdapat 3 (tiga) Jenis pelayanan dasar dengan 9 (sembilan) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 65/HK-010/BS/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun

kondisi Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencanasampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
A	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	100.00	95.00	95.00
		2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	100.00	86.50	86.50
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	100.00	25.51	25.51
		4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)	100.00	86.81	86.81
		5. Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	100.00	89.70	89.70
		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100.00	25.12	25.12
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100.00	100.00	100.00
B	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100.00	25.00	25.00

C	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100.00	100.00	100.00
---	---------------------------------	--	--------	--------	--------

Sumber data BKBPP Kab. Buleleng.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%) 3.46%, Jumlah PUS yg istrinya berusia <20 th : 3.179, Jumlah PUS yg istrinya berusia 15 - 49 th : 91.763
- b) Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 68.41%, Jumlah peserta KB aktif : 62.770, Jumlah PUS : 191.760.
- c) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 20.88%, Jumlah PUS tak ber KB : 19.161, Jumlah PUS 15 - 49 tahun : 91.763.
- d) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 84,79%, Jumlah Anggota BKB ber KB : 25.539, Jumlah PUS anggota BKB : 30.121.
- e) Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 82,84%, Jumlah Anggota UPPKS ber KB : 1.768, Jumlah seluruh anggota UPPKS yang PUS : 2.134.
- f) Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan 93.24%, Jumlah Desa / Kelurahan : 148, PLKB / PKB : 138.
- g) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan 100%, Jumlah Desa /Kelurahan : 148, Jumlah PPKBD Keterangan : 148.
- i. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun, Kebutuhan alat dan obat : 13.261, Penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) : 3.000, Pelayanan Swasta : 7.846.
- h) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap Tahun, Rekap data mikro keluarga Desa / Kelurahan : 148 Desa / Kelurahan, Jumlah Desa / Kelurahan : 148 Desa / Kelurahan.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersaji pada tabel berikut :

TABEL 57
SPM Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

KEGIATAN	DANA	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
Pelayanan Administrasi Perkantoran				
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.414.000	17.410.100	99,98	100
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	48.444.660	43.547.376	89,89	100
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.984.764	218.727.626	98,98	100
d) Penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.600.000	19.918.400	84,40	99,36
e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	259.078.125	258.556.075	99,80	100
f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.900.000	45.900.000	100	100
g) Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.087.500	19.087.500	100	100
h) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	8.790.000	8.445.424	96,08	99,99
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.140.100	13.140.100	100	100
j) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.411.000	198.936.237	96,85	100
k) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.375.000	3.375.000	100	100
l) Penyediaan Makanan dan Minuman	21.000.000	21.000.000	100	100
m) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	100.000.000	98.907.655	98,91	99,26
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	537.879.155	290.370.000	53,98	100
b) Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara	170.300.000	166.680.000	97,87	100
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	160.518.000	88.422.886	55,09	100
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	41.768.988	41.541.699	99,46	100
e) Pemeliharaan rutin/Berkala Alat-alat kantor/RT	15.000.000	15.000.000	100	100
Peningkatan Disiplin Aparatur				
a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	25.740.000	25.740.000	100	100
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.350.000	15.184.602	98,92	100
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	17.355.000	17.350.000	99,97	100
Program Perencanaan Anggaran SKPD				
a) Penyusunan anggaran SKPD	92.374.000	91.691.155	99,26	100
Program Informasi Pembangunan Daerah				
a) Penyelenggaraan Pameran /Pawai Pembangunan	23.000.000	22.999.000	100	100
Program Keluarga Berencana				
a) Pelayanan KIE	1.424.707.850	1.422.678.850	99,86	100
Program Kesehatan Reproduksi Remaja				
a) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	343.931.100	321.072.076	93,35	166,36
Program Pelayanan Kontrasepsi				
a) Pelayanan Konseling KB	202.439.800	196.130.838	96,88	100
Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang mandiri				
a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	458.249.000	441.945.000	96,44	100
Program Penyiapan Tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga				
a) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	248.531.000	245.397.200	98,74	100
Program Pengembangan data dan Informasi				
a) Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target	611.970.000	409.050.700	66,84	97,22
b) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Informasi	29.330.000	29.149.646	99,39	100
c) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan	6.812.000	6.806.000	99,91	100
d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	43.500.000	43.500.000	100	100

Sumber data : KBPP Kab. Buleleng.

Pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Bahagia dilaksanakan oleh Badan KBPP Kabupaten Buleleng.

Kondisi pegawai pada Badan KBPP Kabupaten Buleleng yang menyelenggarakan Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersaji pada tabel berikut :

TABEL 58
*Kondisi Pegawai pada Urusan keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera*

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	185 Orang
	PNS	49 Orang
	Pegawai Harian /Kontrak	150 Orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
	Pembina	11 Orang
	Penata Tk. I	18 Orang
	Penata	5 Orang
	Penata Muda Tk.I	1 Orang
	Pengatur Tk.I	1 Orang
	Pengatur	1 Orang
	Pengatur Muda Tk.I	9 Orang
	Pengatur Muda	2 Orang
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	3 Orang
	SI/D4	17 Orang
	D3	2 Orang
	SMA/SMK/MTs	27 Orang
4.	Jumlah Pejabat	14 Orang
	Pejabat Struktural :	14 Orang
	Eselon IIb	1 Orang
	Eselon IIIa	1 Orang
	Eselon IIIb	3 Orang
	Eselon Iva	9 Orang
	Pejabat Fungsional	26 Orang
	1) Petugas Penyuluh KB	26 Orang

Sumber data : BKBPB Kab. Buleleng.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama

eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan KBPP Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 7.587.798.100,00, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 7.587.798.100,00 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 23.794.117,65.

Permasalahan / Kendala dalam penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

- Kegiatan pemberdayaan keluarga terkait dengan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, BLK dan PIK-KRR baik dari segi kualitas dan kuantitas masih relatif rendah.
- Masih kurangnya Tenaga Teknis khususnya Tingkat Kabupaten.
- Sebagai Lembaga baru sarana dan prasarana relatif belum memadai seperti kendaraan roda empat dan roda dua untuk tim teknis di Kabupaten .
- Belum terbentuknya UPTB bidang Keluarga Berencana untuk perpanjangan tangan Badan KB-PP di tingkat Kecamatan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan adalah :

- Mengadakan sosialisasi Program Keluarga Berencana.
- Mengadakan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang program KB.

Beberapa prestasi dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2016 adalah :

1. Tanda Penghargaan 'Manggala Karya Kencana' kepada Bpk. Putu Agus Suradnyana sebagai Bupati Buleleng, Bali.
2. Juara I Putri Tingkat Provinsi Bali Lomba Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe atas nama Made Darmaprathiwi Adiningsih.
3. Juara III Tingkat Provinsi Bali Lomba KB Perusahaan.
4. Juara III Tingkat Provinsi Bali Lomba Keluarga Harmonis.

16. URUSAN PERHUBUNGAN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng setingkat Eselon II yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Perhubungan dan fungsi merumuskan kebijakan teknis, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi, penyelenggaraan perijinan dan pelaksanaan ketata usahaan dan rumah tangga kantor serta urusan strategis yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memperlancar pertumbuhan ekonomi bangsa. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan serta meningkatkan perekonomian masyarakat disegala bidang.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan Perhubungan adalah terwujudnya sistem sarana dan prasarana pelayanan jasa perhubungan yang terpadu, handal dan bedaya saing. Atas dasar kondisi tersebut, tujuan penyelenggaraan urusan perhubungan adalah :

- 1) Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa Perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.
- 2) Meningkatkan kemampuan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan penegakkan hukum.
- 4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme aparatur Pemerintah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai untuk mendorong pengembangan potensi daerah.
- 2) Meningkatnya pemanfaatan sumber potensi daerah dengan indikator sasaran peningkatan pendapatan asli daerah.
- 3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum dibidang Perhubungan.
- 4) Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan di bidang perhubungan pada Tahun 2016 meliputi :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan antara lain :

- Penyediaan Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan antara lain :

- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara
- Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kend.Dinas / Operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

4) Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan :

- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perparkiran.

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan ehabilitasi / Pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan :

- Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
- Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
- Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
- Penciptaan Kemananan penumpang di lingkungan Terminal.
- Fasilitas Perijinan di bidang Perhubungan.
- Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan.
- Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir / juru mudi / Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT).

8) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan

- Pengadaan Rambu – rambu lalu lintas.
- Pengadaan Marka Jalan.
- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan.

Bidang Perhubungan terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar dengan 26 (dua puluh enam) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM.81/2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM.2/2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dari 26 jenis indikator, untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang dapat terisi hanya 11 indikator mengingat ini erat hubungannya dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, sedangkan indikator 12 – 26 kewenangan pengisian ada pada Dinas Perhubungan Tingkat I karena program dan kegiatan yang kewenangannya ada pada Provinsi. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Perhubungan di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Perhubungan. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Capaian kinerja bidang perhubungan yang telah dicapai sepanjang

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
				2014	2015	2016
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	27.00	80.00	80.00
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	50.00	80.00	80.00
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	10.00	15.00	15.00
			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	5.00	100.00	100.00
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	78.67	95.00	95.00
			a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota.	77.87	95.00	95.00
			b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	65.77	100.00	100.00

		4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	70.67	95.00	95.00
		5	Sumber Daya Manusia (SDM)	7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	46.00	90.00	90.00
				8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	80.77	100.00	100.00
				9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	175.00	65.00	65.00
				10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	45.00	60.00	60.00
		6	Keselamatan	11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	78.00	100.00	100.00

2	Angkutan Sungai dan Danau.	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	12 Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	0.00	0.00	0.00
			13 Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	0.00	0.00	0.00
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	14 Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	0.00	0.00	0.00
		3 Keselamatan	15 Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	0.00	0.00	0.00
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	16 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	0.00	0.00	0.00

3	Angkutan Penyeberang-an	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberang-an	17	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	0.00	0.00	0.00
				18	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	0.00	0.00	0.00
		2	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberang-an	19	Tersedianya pelabuhan penyebe-rangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayanan.	0.00	0.00	0.00

Sumber data : Dinas Perhubungan Kab. Buleleng,

Tahun 2016 dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng mempertahankan Tropy Wahana Tata Nugraha, bentuk penghargaan dari pemerintah untuk daerah yang berhasil menata tertib berlalu lintas di daerahnya. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 merupakan penghargaan ke 10 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2016.

Sebagai usaha untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan

umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga sebagai pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 2011 serta untuk mencapai salah satu kunci sukses Pilar 1 yaitu Manajemen Keselamatan LLAJ (Safer Management) dengan Penyelarasan koordinasi melalui forum LLAJ. Maka Pemerintah Kabupaten Buleleng membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Buleleng tahun 2013 dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 550/222/HK/2013 Tanggal 7 Maret 2013. Panitia Pelaksana kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Buleleng beranggotakan dari unsur Dinas Perhubungan, Kepolisian Resort Buleleng, Asisten Bidang Ekbang Setda Buleleng, Jasa Raharja Cabang Singaraja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Humas dan Protokol Setda Buleleng, Bagian Hukum Setda Buleleng dan Organda.

- Kegiatan yang telah dilaksanakan Forum LLAJ Kabupaten Buleleng meliputi Rapat –rapat rutin untuk membahas permasalahan – permasalahan Lalu Lintas sesuai dengan tupoksi masing-masing anggota forum dan mencari solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut.
- Melaksanakan Sosialisasi, tentang pentingnya berlalu lintas yang benar, melalui Media masa, Slogan-slogan, penyuluhan-penyuluhan kepada para sopir Angkutan Umumg melalui kegiatan AKUT, Penyuluhan-penyuluhan kesekolah – sekolah guna mencegah dan meminimalisir angka kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng.
- Mendata Daerah Rawan Kecelakaan yang ada di Kabupaten Buleleng guna mencari Solusi penyebab kecelakaan tersebut.
- Menyempurnakan Sarana dan Prasaran Jalan seperti; Marka Jalan, Rambu lalu lintas, Traffic Light, Warning Light dan lainnya guna terciptanya Lalu Lintas yang Aman, Tertib, Lancar dan Nyaman.
- Melaksanakan Penertiban Parkir di Jalan Diponogoro Singaraja, Jalan Ngurah Rai Singaraja (Depan Hardys), Penertiban Pemasangan Baliho/Reklame di Jalan-Jalan Nasional, Provinsi maupun di Jalan Kabupaten yang dapat mengganggu ketertiban lalu Lintas.

Perangkat Daerah pelaksana Urusan Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman

Nomor 62, Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Telepon (0362) 21684.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berjumlah 116 orang. **Dengan golongan ruang terdiri atas** : Golongan IV ; 6 orang, Golongan III ; 30 orang, Golongan II : 75 orang, Golongan I : 3 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan meliputi** : Strata 2 (S2) ; 3 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 15 orang, Diploma 3 (D3) ; 1 orang, Diploma 2 (D2) ; 1 orang, SMA/SMK/Mts ; 84 orang, SMP ; 5 orang SD ; 3 orang. **Jumlah Pejabat Struktural** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 15 pejabat. **Pejabat Fungsional** ; Terdapat 6 jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. **Diklat Pim** ; 6 pejabat sudah mengikuti Diklat Pim III dan 14 pejabat sudah mengikuti Diklat Pim IV.

Untuk penyelenggaraan Urusan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.14.306.198.504 dan terealisasi sebesar Rp.14.213.198.365 atau 99,35 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.8.101.631.749 dan terealisasi Rp.8.023.466.112 atau 99,04 persen dan belanja langsung sebesar Rp.6.204.566.755 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.6.189.732.253 atau mencapai 99,76 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.768.325.000 dan terealisasi Rp.767.760.000, atau 99,93 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.3.503.751.028 dan terealisasi Rp.3.491.420.803 atau mencapai, 99,65 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.1.932.490.727 dan terealisasi Rp.1.930.551.450 atau 99,90 persen. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan serta hasil kegiatan meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan di dalam menunjang pencapaian sasaran kinerja. Program ini dilaksanakan dijabarkan melalui 12 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 960.070.249,- dan realisasi sebesar Rp. 946.460.330,- (98,58%) dengan realisasi tiap kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Alokasi Anggaran Rp. 76.980.000, dan Realisasi sebesar Rp. 74.738.727, atau 99,09 persen dengan realisasi fisik 100 persen.

Hasil kegiatan yaitu terbayarnya jasa rekening air, listrik dan telepon selama 12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 182.665.918, dan Realisasi sebesar Rp. 182.065.918, atau 99,67 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran Rp. 12.000.000, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 11.921.500 atau 99,35 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya terbayarnya pajak 40 unit kendaraan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi Anggaran Rp. 334.230.870, dan Realisasinya Rp. 333.685.065 atau 99,84 persen, dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah terlaksananya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 131.992.250, dengan Realisasi mencapai Rp. 131.816.650, atau mencapai 99,87 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya yaitu terpeliharanya kebersihan 5 unit kantor.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 12.210.100, dengan Realisasi sebesar Rp. 11.706.100 atau 95,87 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.750.000, dengan realisasi Rp 16.750.000, atau 100 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya tersedianya 4 jenis barang cetakan dan penggandaan.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 20.850.000 dan Realisasinya mencapai Rp. 20.850.000, atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor sebanyak 4 jenis.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Alokasi Anggaran Rp. 26.500.000, dengan Realisasi Rp. 25.665.000 atau 96,85 persen. Hasilnya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 5 unit.

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Alokasi Anggaran Rp. 4.800.000, Realisasi Rp. 4.800.000 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Alokasi Anggaran Rp. 23.516.000, Realisasi sebesar Rp. 23.516.000 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya makanan dan minuman tamu sebanyak 12 jenis.
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 117.575.111, Realisasi Anggaran Rp. 108.945.920 atau 92,66 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 12 bulan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 334.574.900,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 334.005.975,- atau 99.83 persen. Realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi :

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara dialokasikan dengan anggaran Rp. 85.450.000 dan realisasinya Rp. 84.920.000, atau 99,00 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya sarana dan prasarana upacara yang memadai selama 12 bulan.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 214.575.000, dengan Realisasi Anggaran Rp. 214.575.000 atau 99,90 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya gedung kantor yang memadai sebanyak 3 paket.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, alokasi anggaran Rp. 19.255.000, dan terealisasi Rp. 19.247.050, atau 99,96 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak pakai selama 12 bulan.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 4.800.000, dan terealisasi Rp. 4.770.000, atau 99,38 persen. Hasilnya adalah tersedianya perlengkapan kantor yang memadai selama 1 tahun.

- Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 4.200.000, dan terealisasi Rp. 4.200.000, atau 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya peralatan kantor yang memadai sebanyak 7 unit.
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 6.294.900, dan terealisasi Rp. 6.293.925, atau 99,98 persen. Hasilnya adalah tersedianya data dan inventarisasi aset milik daerah selama 12 bulan.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Alokasi Anggaran Rp. 37.797.850,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 37.780.440,- atau 99,95 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya laporan kinerja (Buku data, LAKIP, LPPD, LKPJ) sebanyak 4 dokumen.

4) Program Perencanaan Anggaran SKPD, alokasi anggaran Rp. 162.627.100,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 162.597.100,- atau 99,98 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya tersedianya dokumen RKA, DPA, RKPA dan DPPA sebanyak 4 dokumen.

5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program ini dibiayai melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 2.856.603.340,- realisasi sebesar Rp. 2.847.178.650,- atau 99,67 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan yang meliputi :

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan, Alokasi Anggaran Rp. 49.742.340, dan Realisasi Anggaran Rp. 49.735.300 atau 99,99 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersusunnya laporan ketersediaan fasilitas lalu lintas.
- Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, Alokasi Anggaran Rp. 1.882.784.750, dan Realisasi Anggaran Rp.1.873.404.100 atau 99,50 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya terlaksananya pengelolaan 6 terminal angkutan darat.
- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 41.365.400, dan Realisasi Anggaran: Rp. 41.359.000, atau 99,98 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya tersedianya data base pelabuhan 1 dokumen.

- Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Perparkiran, Alokasi Anggaran Rp. 882.710.850, dan terealisasi Rp. 882.680.250 atau 100 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah terlaksanya pengawasan, pembangunan dan penertiban parkir di 174 lokasi.

6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,

Program ini dibiayai melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 99.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.774.000,- atau 99,99 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan hasil terlaksananya perawatan, pemeliharaan alat uji mekanis dan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor selama 12 bulan.

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. sebesar Rp. 1.275.740.489,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.274.947.248,- atau 99,94, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang dialokasikan dengan anggaran Rp. 17.000.000 dan realisasinya Rp. 16.835.370, atau 99,03 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah terlaksananya pembinaan terhadap awak kendaraan penumpang umum, barang dan khusus di terminal se-Kabupatenbuleleng untuk meningkatkan keselamatan penumpang sebanyak 50 orang.
- Kegiatan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang, Alokasi Anggaran Rp. 342.800.450, dengan Realisasi Anggaran Rp. 342.623.623 atau 99,95 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya bahan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pelayanan terhadap kend. bermotor wajib uji selama 12 bulan.
- Kegiatan Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, alokasi anggaran Rp. 58.728.960, dan terealisasi Rp. 58.728.960, atau 100 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah terlaksananya pemantauan mobilitas angkutan jalan raya selama 12 bulan.
- Kegiatan Penciptaan Keamanan penumpang di lingkungan Terminal, Alokasi Anggaran Rp. 20.448.480, dan terealisasi Rp. 20.448.480, atau 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya

pengamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal bagi 500 penumpang.

- Kegiatan Fasilitas Perijinan di bidang Perhubungan Sosialisasi / Penyuluhan, Alokasi Anggaran Rp. 9.710.900, dan terealisasi Rp. 9.421.265, atau 97,02 persen. Hasilnya adalah terwujudnya fasilitas perijinan di bidang perhubungan selama 12 bulan.
- Kegiatan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan, Alokasi Anggaran Rp. 806.122.224, dan terealisasi Rp. 805.960.075, atau 99,98 persen. Hasilnya adalah terlaksananya sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan selama 12 bulan.
- Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir / juru mudi / Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Alokasi Anggaran Rp. 20.929.475, dan terealisasi Rp. 20.929.475, atau 100 persen. Hasilnya adalah terwakilinya awak kendaraan umum teladan Tingkat Propinsi oleh 1 orang

8) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas, dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 477.327.827,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 476.802.650,- atau 99,88 persen. Dengan realisasi kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengadaan Rambu – rambu lalu lintas dialokasikan dengan anggaran Rp. 256.374.127 dan realisasinya Rp. 255.738.400, atau 99,75 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya perlengkapan / rambu - rambu jalan yang memadai.
- Kegiatan Pengadaan Marka Jalan, Alokasi Anggaran Rp. 125.889.800, dengan Realisasi Anggaran Rp. 125.889.800 atau 100 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya sarana dan prasarana lalu lintas (marka jalan).
- Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, alokasi anggaran Rp. 95.108.900, dan terealisasi Rp. 95.174.450, atau 100 persen dan realisasi fisiknya 99,96 persen. Hasilnya adalah tersedianya pagar pengaman pejalan.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan kependudukan disusun melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Dilanjutkan melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum SKPD dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan

KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Perhubungan; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 56.139.268.094 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 18.367.100.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan Perhubungan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas antara lain adalah :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang belum memiliki kwalifikasi pendidikan / diklat teknis perhubungan.
- 2) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas
- 3) Pemanfaatan lahan / ruas parkir oleh para pedagang sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- 4) Kondisi gedung kantor dan ruang kerja yang kurang seimbang dengan jumlah pegawai, mengakibatkan kinerja pegawai belum optimal.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

- 1) Peningkatan sumber daya manusia melalui pemberian bimbingan tugas yang sesuai dengan bidang tugasnya ataupun diklat² yang diselenggarakan baik oleh Daerah maupun Pusat.
- 2) Melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas dan pelanggaran operasional dan perijinan angkutan
- 3) Melakukan pembinaan para sopir melalui persatuan / organisasi sopir pada masing-masing trayek dan pembinaan terhadap pengusaha jasa angkutan dan pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat / pengguna jasa angkutan.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Program dan Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Komunikasi dan informatika pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 4 program dan 16 kegiatan, yaitu :

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.
- Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan System Informasi.
- Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Piranti Lunak.
- Fasilitasi Penyebarluasan Informasi.

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.

- Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
- Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data.

3) Program Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

- Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.
- Kegiatan Bimbingan Teknis dalam Bidang Komunikasi dan Informasi.
- Kegiatan Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

4) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.
- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Peliputan dan Dokumentasi.
- Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial Masyarakat.
- Penyebarluasan Informasi dalam Rangka Tatap Muka dan Dialog Interaktif.

Bidang Komunikasi dan Informasi terdapat 2 (dua) Jenis pelayanan dasar dengan 2 (dua) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERIM.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan

Penerapan SPM Bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Buleleng terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasisampai dengantahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 60
Kondisi Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2014	2015	2016
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:			
		a. Media massa:	444.44	80.56	80.56
		- Majalah	50.00	50.00	16.67
		- Radio	1.283,33	225.00	225.00
		- Televisi	39.77	93.87	93.87
		b. Media website (media online)	100.00	100.00	100.00
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	108.33	108,33	108,33
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	100.00	100.00	100.00
		e. Media luar ruang:	0.00	300.00	0.00
		- Buletin	0.00	0.00	0.00
		- Leaflet	0.00	0.00	0.00
		- Booklet	0.00	0.00	0.00
		- Brosur	0.00	0.00	0.00
		- Spanduk	0.00	0.00	0.00
		- Baliho	0.00	300.00	0.00
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	77.78	77.78	77.78

Sumber data ; Diskominfo Kab. Buleleng.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi ini sangatlah cepat. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang dalam berkomunikasi, arus informasi menjadi tidak terbelenggu dan mengalir sangat cepat. Paradigma kehidupan masyarakat bergeser. Adanya tuntutan kesetaraan dalam akses informasi, akses pelayanan dan kecepatan akses transaksi. Beberapa Negara maju saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi digital yang melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan baru, yang diistilahkan sebagai Electronic Government (e-government). E-government pada dasarnya memiliki sebuah keinginan mentransformasi pelayanan dan bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terkesan terlampaui birokratis menjadi lebih bersahabat dan mudah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng melangkah menuju pengembangan e-government dan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan publiknya. Usaha Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng untuk pengembangan e-government sudah banyak dilakukan. Selain sudah membangun jaringan intranet, juga membuat portal www.bulelengkabupatengo.id.

Data teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 mencakup 18 Desa yang ada di 9 Kecamatan yang meliputi :

- Data TIK Desa Anturan Kecamatan Buleleng.
- Data TIK Desa Penglatan Kecamatan Buleleng.
- Data TIK Desa Pedawa Kecamatan Banjar.
- Data TIK Desa Gesing Kecamatan Banjar.
- Data TIK Desa Julah Kecamatan Tejakula.
- Data TIK Desa Bondalem Kecamatan Tejakula.
- Data TIK Desa Les Kecamatan Tejakula.
- Data TIK Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula.
- Data TIK Desa Patas Kecamatan Gerokgak.
- Data TIK Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak.
- Data TIK Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak.
- Data TIK Desa Subuk Kecamatan Busungbiu.
- Data TIK Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu.
- Data TIK Desa Munduk Bestala Kecamatan Seririt .
- Data TIK Desa Umeanyar Kecamatan Seririt .
- Data TIK Desa Sudaji Kecamatan Sawan.
- Data TIK Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan.
- Data TIK Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada.

Sedangkan kantor Desa dan Kelurahan yang telah terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Buleleng sampai Tahun 2016 telah mencapai 56 dari 148 Desa / Kelurahan di Kabupaten Buleleng. Jaringan internet ini memudahkan Aparatur Desa/Kelurahan untuk mengakses informasi terkait perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kantor Desa /Kelurahan yang telah terhubung jaringan internet yaitu Kantor Desa Banyupoh, Kantor Desa Gerokgak, Kantor Desa Sanggalangit, Kantor Desa Kalianget, Kantor Desa Lokapaksa, Kantor Desa Patemon, Kantor Desa Pengastulan, Kantor Kelurahan Seririt, Kantor Desa Umeanyar, Kantor Desa Banjar, Kantor Desa Dencarik, Kantor Desa Kaliasem, Kantor Desa Temukus, Kantor Desa Pancasari, Kantor Desa Sambangan, Kantor Kelurahan Sukasada, Kantor Kelurahan Kampung Anyar, Kantor Kelurahan Kaliuntu, Kantor Desa Anturan, Kantor Kelurahan Beratan, Kantor Desa Kalibukbuk, Kantor Kelurahan Liligundi, Kantor Kelurahan Penarukan, Kantor Desa Tukad Mungga, Kantor Desa Bungkulan, Kantor Desa Kerobokan, Kantor Desa Sangsit, Kantor Desa Sinabun, Kantor Desa Bukti, Kantor Desa Kubutambahan, Kantor Desa Bondalem, Kantor Desa Tejakula, Kantor Desa Les, Kantor Desa Penuktukan, Kantor Desa Sambirenteng, Kantor Desa Celukan bawang, Kantor Desa Rangdu, Kantor Desa Busungbiu, Kantor Kelurahan Kampung singaraja, Kantor Kelurahan Astina, Kantor Desa Baktiseraga, Kantor Kelurahan Kendran, Kantor Kelurahan Banjar Bali, Kantor Kelurahan Banjar Jawa, Kantor Kelurahan Kampung Baru, Kantor Kelurahan Kampung Kajanan, Kantor Kelurahan Kampung Bugis, Kantor Kelurahan Banguasri, Kantor Kelurahan Paket Agung, Kantor Kelurahan Banyuning, Kantor Kelurahan Pamaron, Kantor Desa Giri Mas, Kantor Desa Ringdikit, Kantor Desa Madenan, Kantor Desa Wanagiri dan Kantor Desa Sudaji. Sedangkan untuk Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng hampir semua telah terlayani dengan jaringan internet.

Sementara itu dalam rangka mengelola informasi dan komunikasi antar warga masyarakat di Kabupaten Buleleng. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng mempunyai binaan kelompok – kelompok informasi masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Secara praktis, KIM itu seperti lembaga media lokal yang meliput dan menyebarluaskan informasi seputar kegiatan lembaga masyarakat dan warga sekaligus media komunikasi antar warga. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010, Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Sampai Tahun 2016 terdapat 15 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di 8 Kecamatan yakni ; KIM WAHANA GATRA, DESA UNGGAHAN, KECAMATAN SERIRIT, Alamat blog: kimwahanagatra.blogspot.com ; 2. KIM BALI SARI WANGI, DESA SEPANG, KECAMATAN BUSUNGBIU, Alamat blog: kimbalisariwangi.blogspot.com ; KIM SEKAR BHUANA, DESA MUNDUK, KECAMATAN BANJAR, Alamat blog: kimdesamunduk.blogspot.com ; KIM DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, Alamat blog: kimdesatajun.blogspot.com ; KIM DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, Alamat blog: kimdesabulian.blogspot.com ; KIM DESA SEKUMPUL, KECAMATAN SAWAN, Alamat blog: sekarbang.blogspot.com ; KIM DESA SANGGALANGIT, KECAMATAN GEROKGAK, Alamat blog: kimsaribhuana.blogspot.com ; KIM DESA WANAGIRI, KECAMATAN SUKASADA, Alamat blog: kim-desa-wanagiri.blogspot.com ; KIM DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, Alamat blog: kimsaribhuana.blogspot.com ; KIM DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, Alamat blog: kimtambalang.blogspot.com ; KIM SATYA DHARMA, DESA KALIANGET, KECAMATAN SERIRIT, Alamat blog: desakalianget2.blogspot.com ; KIM DESA PANCASARI, KECAMATAN SUKASADA, Alamat blog: kimpancasari12.blogspot.com ; KIM EKA CIPTA DHARMA PRAWERTI, DESA SELAT, KECAMATAN SUKASADA, Alamat blog: kimdesaselat.blogspot.com ; KIM ASTA GINA, DESA MENYALI, KECAMATAN SAWAN, KIM DESA SUDAJI, KEC. SAWAN, Alamat blog: kimdesasudaji.blogspot.com.

Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng yang beralokasi di JL. Pahlawan, No. 1, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81119, IndonesiaTelp: 62 362 21146, Dengan struktur organisasi terdiri atas : Kepala Dinas (Eselon II/b), Sekretaris Dinas (Eselon III/a), Kepala Bidang Pelayanan, Informasi, Kepala Bidang Komunikasi Media, Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen, Kepala Bidang Telematika (Eselon III/b), Kepala Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial, Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi, Kepala Seksi Perencanaan Sistem Informasi, Kepala Seksi Piranti Lunak dan Piranti Keras, Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Kelembagaan, Kepala Seksi Media Tradisional, Media Modern dan

Teknik Informatika, Kepala Seksi Jaringan Komunikasi, Kepala Seksi Telematika, Kepala Seksi Ceramah dan Dialog, Kepala Seksi Promosi, Penerbitan dan Pameran, Kepala Seksi Peneapan Sistem Informasi, Kepala Seksi Pengolahan dan Pengumpulan Data, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan (Eselon IV/a).

Data pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Tahun 2016 adalah sebagai berikut :Jumlah Pegawai Negeri Sipil: 40 orang ; Pegawai Honor Daerah/Pegawai kontrak : 44 orang; Tingkat Pendidikan: S3: 1 orang; S2: 3 orang; S1: 19; Diploma: 5; SMA/SMK: 16 orang; Golongan IV: 5 orang; Golongan III: 27 orang; Golongan II: 8 orang; Eselon II : 1 Orang; Eselon III : 5 orang; Eselon IV : 13 orang; Pejabat Struktural : 19 orang.

Untuk penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 7.196.692.000 dan terealisasi sebesar Rp.7.093.365.483 atau 98,56 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.3.446.052.000 dan terealisasi Rp.3.391.406.792 atau 98,41 persen dan belanja langsung sebesar Rp.3.760.640.000 dan realisasi sebesar Rp.3.704.958.691 atau mencapai 98,70 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 482.960.000 dan terealisasi Rp.478.790.000, atau 99,14 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.2.968.608.000 dan terealisasi Rp. 2.924.921.691 atau mencapai, 98,53 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.299.072.000 dan terealisasi Rp.298.247.000 atau 99,72 persen.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan kependudukan disusun melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Dilanjutkan melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum SKPD dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika; cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan urusan.

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2016 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Kominfo saat ini masih sangat kurang , terutama yang memiliki keahlian di bidang Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) dan di bidang Komunikasi Media atau Jurnalistik. Untuk mengatasi permasalahan diatas diharapkan adanya penambahan tenaga PNS yang memiliki keahlian di bidang Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) dan di bidang Komunikasi Media atau Jurnalistik agar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kominfo dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

18. URUSAN PERTANAHAN.

Kewenangan bidang pertanahan adalah kewenangan untuk menentukan, mengatur dan menyelenggarakan hal-hal mengenai tanah. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan landasan politik dari hukum Agraria di Indonesia, kewenangan bidang pertanahan pada dasarnya merupakan urusan Pemerintah Pusat, yang pelaksanaannya di daerah menggunakan asas medebewind. Setelah keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kini telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Setelah keluarnya UU tersebut, telah terjadi penafsiran yang berbeda tentang kewenangan bidang pertanahan. Pasal 10 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 mendefinisikan tentang kewenangan bidang pertanahan, adalah sebagai urusan-urusan lain dimana kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai urusan yang bersifat wajib.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pertanahan yaitu : Izin Lokasi; Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; Penetapan Tanah Ulayat; Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong; Izin Membuka Tanah, atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 melaksanakan urusan pertanahan yang dituangkan melalui Program

Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan dengan kegiatan penanganan urusan pertanahan kewenangan pemerintah kabupaten. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam bidang pertanahan dengan dasar hukum :

- 1) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- 3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 dijabarkan melalui pelaksanaan kegiatan penanganan urusan pertanahan kewenangan pemerintah kabupaten. Pembiayaan kegiatan dialokasikan dengan anggaran belanja langsung yang berjumlah Rp. 270.115.700,00 dengan realisasi anggaran untuk Tahun 2016 berjumlah Rp. 247.937.245,00 atau mencapai 91,79 persen dari total anggaran yang direncanakan. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Tahun 2016 meliputi :

- 1) Terlaksananya penyuluhan dan upaya penyelesaian penanganan masalah pertanahan yang diikuti oleh 120 orang.
- 2) Terlaksananya penyelenggaraan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan.

Penanganan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang didukung oleh personil yang berjumlah 8 pegawai yang terdiri atas 3 PNS dan 5 Pegawai Kontrak. PNS yang ada dengan pangkat dan golongan ; Penata Tk.1 ; 1 orang, Penata Muda Tk.1 ; 1 orang dan Pengatur Muda Tk.1 ; 1 orang. Dengan Kualifikasi pendidikan ; S1 ; 2 orang dan SMA/SMK ; 1 orang. Pejabat structural yang ada sebanyak 1 pejabat yakni Kepala Sub Bagian Pertanahan.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan kependudukan disusun melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Dilanjutkan melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum SKPD dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten

menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan pertanahan; cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan urusan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016, permasalahan yang dihadapi yaitu berkembangnya konflik-konflik dalam bidang pertanahan dalam kaitannya mendukung akselerasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan semakin berkembangnya permohonan pemanfaatan tanah Negara. Terhadap beberapa hal yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas maka dilaksanakan langkah – langkah sebagai upaya untuk meminimalisasikan setiap kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan pertanahan kepada stakeholder terkait dan peningkatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 9 program dan 30 kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas /Operasional.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD.

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal.

- Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik dalam teknik pencegahan kejahatan.
- Kegiatan Forum kewaspadaan dini Masyarakat.
- Kegiatan Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

7. Program Pengembangan wawasan kebangsaan.

- Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat.

8. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

- Kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

- Kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik.
- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Kegiatan Fasilitas Bantuan Keuangan Parpol.
- Kegiatan Fasilitas Ormas.

Dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri pada Tahun 2016 ditandai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan implementasi amanat ketentuan Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota secara demokratis. Tingginya dinamika penyelenggaraan Pilkada khususnya penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, menjadikan Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan Pilkada beberapa kali mengalami revisi, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng merupakan bagian pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Tahun 2017, merupakan satu – satunya Kabupaten di Provinsi Bali dan merupakan salah satu diantara 130 Kabupaten / Kota dan Provinsi di Indonesia yang melaksanakan perhelatan pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 – 2022. Hal – hal prioritas dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Buleleng Tahun 2017 meliputi :

- 1) Landasan hukum pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Buleleng.
 - Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.
 - Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana

Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Walikota.

- Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
- Permendagri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) Panitia Penyelenggara dan Pengawas Pilkada.

Pembentukan panitia penyelenggara dan pengawas pilkada kabupaten Buleleng Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 19 Juli 2016, selanjutnya Panwas Kecamatan dibentuk pada tanggal 22 Juli 2016 dan Panwas Kabupaten Buleleng tanggal 24 Juli 2016. Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk pada tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan 14 Januari 2017.

3) Dukungan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dukungan Pemerintah Daerah berupa anggaran / Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 meliputi:

- Dukungan Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten Buleleng berupa Anggaran sebesar Rp. 40.266.000.000,00 dan personel sebanyak 6 orang.
- Dukungan Pemerintah Daerah kepada Panwas Kabupaten Buleleng berupa Anggaran Rp. 10.210.212.500,00 dan personel 3 orang.
- Dukungan Anggaran kepada Kepolisian Resor Buleleng sebesar Rp. 14.824.127.500,00.
- Dukungan Anggaran kepada Dandim 1609/Buleleng sebesar Rp. 2.666.984.000,00

4) Data pemilih.

1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak :

- Penetapan DPS berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data Pemilih.
- KPU Kabupaten Buleleng belum menetapkan data DPS, sementara rekapitulasi Data Pemilih yang telah terupload pertanggal 20 Oktober 2016 sebanyak 643.512 orang pemilih.

- 2) Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - Penetapan DPT berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data Pemilih.
 - Masih dalam proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Buleleng menjadi DPS kemudian akan dimutakhirkan sebelum menjadi DPT.
- 5) Pasangan Calon.
 - a. Nama-Nama Pasangan Calon:
Bakal Calon Bupati yakni Putu Agus Suradnyana,ST.
Bakal Calon Wakil Bupati : dr. I Nyoman Sutjindra, Sp.OG.
Partai Pengusungnya dalah PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng dan Partai Nasional Demokrat Kabupaten Buleleng.
 - b. Nama-Nama Pasangan Calon Perseorangan :
Bakal Calon Bupati Perseorangan : Dewa Nyoman Sukrawan.
Bakal Calon Wakil Bupati Perseorangan I Gede Dharma Wijaya,SE,MM,M.Kes.
- 6) Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.
 - a. Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017, KPU Buleleng mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor 26 / KPTS / KPU – Kab -016.433727 / 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 dan mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir adalah Keputusan KPU Nomor 130/ KPTS / KPU – Kab – 016. 433727 / 2016 tentang perubahan kelima atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 26 / KPTS / KPU – Kab -016.433727 / 2016.
 - b. KPU Kabupaten Buleleng menyusun jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 :
 - Persiapan, dari Tanggal 30 April 2016 s/d 15 Pebruari 2017.
 - Penyelenggaraan, dari Tanggal 22 Mei 2016 s/d 31Oktober 2016.
 - Sengketa TUN pemilihan.
 - Kampanye dari Tanggal 4 Nopember 2016 s/d 11 Pebruari 2017.
 - Laporan dan audit dana kampanye dari Tanggal 3 Nopember 2016 s/d 3 Maret 2017.

- Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari Tanggal 3 Nopember 2016 s/d 24 Pebruari 2017.
- Pemungutan dan penghitungan, dari Tanggal 6 Pebruari 2017 s/d 21 Pebruari 2017.
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara, dari Tanggal 15 Pebruari 2017 s/d 24 Pebruari 2017.
- Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dari Tanggal 8 Maret 2017 s/d 10 Maret 2017.
- Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), mengikuti jadwal dalam peraturan Mahkamah Konsitusi.
- Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konsitusi. Paling lama 3 hari setelah Penetapan Putusan Dismissal atau putusan Mahkamah Konsitusi dibacakan.
- Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, dari Tanggal 9 Maret 2017 s/d 11 Maret 2017.
- Evaluasi dan pelaporan tahapan.
- Dari Tanggal 12 Maret 2017 s/d 12 Juni 2017.

7) Gambaran umum pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

- Pelantikan PPK dan PPS dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2016 di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja.
- Pelantikan Panwaslih Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Mei 2016 di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja.
- Pendaftaran Paket Surya (Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Darma Wijaya) Pada Hari Senin, Tanggal 8 Agustus 2016.
- Syarat dukungan 40.200 KTP (KTP yang diajukan 45.397 yang memenuhi syarat 18.685, kekurangan KTP 21.598 KTP. Syarat Minimal 40.283 sehingga harus mengajukan perbaikan $21.598 \times 2 = 43.196$ KTP sampai batas akhir 23 s/d 24 Oktober 2016.
- Pelaksanaan Penelitian faktual tingkat Desa / Kelurahan terhadap calon perorangan karena adanya indikasi dan temuan di tingkat desa terkait Penolakan dan klarifikasi dari warga terhadap pengumpulan KTP sebagai tanda dukungan karena dalam pengumpulannya tidak transparan sehingga banyak menganggap tidak sesuai peruntukan. Keabsahan terhadap tanda tangan dari para pendukung calon perorangan karena terindikasi banyak yang dipalsukan.

- Pendaftaran Pasangan Calon PAS (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. Nyoman Sutjidra) pada tanggal 21 September 2016 didampingi Tim Sukses dan Partai Pengusung (PDI – P, P. HANURA, P. GERINDRA, P. NASDEM, PPP, PKB, PAN) serta diikuti oleh massa pendukung + 6000 orang.
- Rapat Pleno KPU Kabupaten Buleleng.
 - 1) Pada Hari Senin, 24 Oktober 2016 KPU Kabupaten Buleleng melaksanakan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti PILKADA Buleleng Tahun 2017 jam 10.00 wita , bertempat di Ruang Rapat KPU Buleleng dihadiri oleh Paket Paslon PAS didampingi oleh TIM sukses dan Paket Paslon Surya yang dihadiri oleh Tim Advokasi paket Surya, berdasarkan Surat Keputusan KPU Buleleng Nomor 125 / KPTS / KPU – Kab-016.433727 / 2016, bahwa Paslon perseorangan paket Surya (Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Darma Wijaya) tidak lolos karena syarat dukungan KTP kurang dari sejumlah 235 KTP.
 - 2) Yang lolos atau yang bisa mengikuti PILKADA Buleleng Tahun 2017 sesuai Keputusan KPU Buleleng Nomor 124 / KPTS / KPU – Kab -016. 433727 / 2016 adalah Paket Paslon PAS (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. Nyoman Sutjidra, SP.oG), dalam rapat Pleno ada penolakan Keputusan KPU oleh Tim Advokasi Surya dan akan menggugat Keputusan KPU Buleleng tentang Penetapan yang tidak mengikuti dalam PILKADA Buleleng Tahun 2017.
 - 3) Dalam Penetapan KPU Kabupaten Buleleng bahwa kandidat Paslon yang bisa mengikuti PILKADA Kabupaten Buleleng Tahun 2017 hanya 1 (satu) yaitu Paslon PAS (Putu Agus Suradnyana, ST dan dr. Nyoman Sutjidra), maka KPU Buleleng melaksanakan perubahan tahapan dan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Buleleng Nomor 127 / KPTS / KPU – Kab -016.433727 / 2016. Sehingga hal tersebut KPU Buleleng melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran Paslon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 yang diusung / boleh mencalonkan dari Partai Politik : Partai Golkar, P. Gerindra, P. Demokrat, P P P , P. Hanura, dari Tanggal 28 s/d 30 Oktober 2016.

- 4) Berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Buleleng ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 129 / kpts / KPU – Kab -016.433727/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

Guna terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi dan perkembangan politik di daerah. Dalam pedoman fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilukada tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan asas – asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta guna mendukung kelancaran, keamanan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya fasilitasi dan membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 sebagai bahan kajian dan pemetaan permasalahan serta sebagai bahan evaluasi guna mewujudkan dan terselenggaranya Pemilukada yang aman ,lancar dan damai. Beberapa permasalahan yang sempat mewarnai tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Buleleng Tahun 2017, mayoritas terkait persyaratan dukungan terhadap calon perorangan, yaitu :

1. KTP dan KK tidak cocok peruntukannya karena ada unsur penolakan dari beberapa warga bahwa KTPnya diperuntukkan untuk mendapatkan bantuan dari PLTU Celukan Bawang dan ada unsur intimidasi yang di laporkan oleh Made Widiassa warga dusun Tegalenga, Desa Kalisada Kecamatan Seririt dan terlapor adalah Perbekel Celukanbawang (M. Azhari).
2. Di Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan beberapa warga menolak KTP dan KKnya dipakai syarat dukungan ke pasangan calon Paket SURYA, sehingga dari 520 KTP terdapat dukungan yang tidak sah sebanyak 87 dan 433 KTP sah, Perbekel Bontihing mengakui kesalahan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi dan warga

yang keberatan akan melanjutkan ke penegak Hukum karena dianggap ada unsur pemalsuan tanda tangan.

3. Kepala Desa Jagaraga Kecamatan Sawan tidak mau menandatangani formulir yang di berikan oleh KPU Kabupaten Buleleng karena data warga yang mendukung dianggap tanda tangannya tidak sesuai.
4. Penolakan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Buleleng tentang surat Keputusan KPU Kabupaten Buleleng No. 125/Kpts/KPU –Kab-016.433727/TAHUN 2016 bahwa paslon perseorangan paket SURYA (Dewa Sukrawan dan Gede DarmaWijaya) tidak lolos dikarenakan kurang syarat dukungan KTP sejumlah 235. Penolakan dari tim advokasi pasangan calon SURYA dan akan menggugat surat keputusan KPU Kabupaten Buleleng tentang penetapan pasangan calon yang tidak bisa mengikuti Pilkada Kabupaten Buleleng Tahun 2017.
5. Paket Paslon Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Darmawijaya (Paket Surya) menggugat KPU Kabupaten Buleleng dan melaporkan ke Panwaslih Kabupaten Buleleng tentang penolakan SK KPU Kabupaten Buleleng yang tidak meloloskan Paket Surya di karenakan kurang bukti KTP.dukungan.
6. Tenaga Kontrak di kantor Sedahan Kecamatan Gerokgak (I Gusti Bagus Adi Suartana alias Gusti Gatot) melaporkan Anggota DPRD Buleleng dari Fraksi PDI – P (Ketut Ngurah Arya alias Arya Bodo) ke Panwaslih Buleleng atas dugaan intimidasi saat verifikasi factual (verfak) ulang.

Terhadap permasalahan – permasalahan yang terjadi, KPU Kabupaten Buleleng dan Panwas kabupaten Buleleng telah mengambil langkah – langkah guna mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan. Terlepas dari beberapa permasalahan yang terjadi KPU Kabupaten Buleleng tetap melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Buleleng dengan mendeklarasikan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng yang berintegritas dan damai di Taman Kota Singaraja, tanggal 4 Nopember 2016. Deklarasi ini sekaligus sebagai pembukaan terhadap proses atau tahapan kampanye bagi pasangan calon yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta Pilkada Buleleng, yakni Pasangan Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra. Nantinya, jadwal resmi kampanye hanya diisi oleh pasangan ini karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Secara resmi, Deklarasi Pilkada Kabupaten Buleleng yang berintegritas dan damai ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi, ST.

Dalam deklarasi ini, pasangan Petahana, Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjindra membacakan tiga poin deklarasi Pilbup berintegritas dan damai. Tiga poin deklarasi itu isinya, pertama Siap menciptakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 yang berintegritas dan damai. Kedua, Mewujudkan kemajuan daerah dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ketiga, Tunduk dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, KPU juga menyerahkan alat peraga kampanye (APK) kepada pasangan calon petahana untuk dipasang di sejumlah zona yang telah ditentukan. Walaupun belum ada teknis kampanye bagi pasangan calon tunggal, KPU Buleleng mempersilahkan paslon untuk menyosialisasikan visi dan misi serta programnya kepada masyarakat. Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana menyatakan agar pasangan calon menggunakan kampanye sebagai wahana pendidikan politik yang bertujuan mencerdaskan pemilih, menentukan pemilih berdasarkan visi dan misi serta program kerja dari pasangan calon.

Karena itu, sosialisasi harus dilakukan oleh pasangan calon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadwal kampanye telah ditentukan mulai 4 Nopember 2016 -11 Pebruari 2017, dan alat peraga akan dipasang secara bertahap. Dalam Deklarasi Pilkada Kabupaten Buleleng yang berintegritas dan damai ini juga ditarikan tarian kolosal I Wong, yang melibatkan sekitar 200 penari dan beberapa penari wayang wong dari Desa Tejakula.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng akhirnya melaksanakan perintah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya, yang menangkan pasangan Independen Dewa Nyoman Sukrawan – I Gede Dharma Wijaya (Paket Surya). KPU menetapkan Paket Surya sebagai salah satu kontestan di Pilkada Buleleng 2017, pada tanggal 12 Desember 2016. Nantinya Paket Surya akan berhadapan dengan pasangan Incumbent Putu Agus Suradnyana – Nyoman Sutjindra (PAS–Sutji) yang diusung PDIP, NasDem, Hanura, Gerindra, PPP, dan PKB, dan sudah ditetapkan lebih dulu oleh KPU. Sikap KPU melaksanakan putusan PT TUN Surabaya diambil dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh komisioner KPU Buleleng, pada tanggal 10 Desember 2016 di Kantor KPU Buleleng, Jalan A Yani Singaraja. Keputusan itu sekaligus mengubah tahapan Pilkada Buleleng Tahun 2017 dimana masa kampanye akan dimulai pada 16 Desember 2016. Sebelum masa kampanye akan diawali dengan pengundian nomor urut

pasangan calon pada tanggal 13 Desember 2016 setelah penetapan Paket Surya sebagai pasangan calon.

KPU Kabupaten Buleleng melaksanakan putusan PT TUN, berdasarkan beberapa kajian dan pertimbangan hukum, di antaranya pertimbangan hukum PT TUN, keputusan majelis PT TUN, dan Undang-Undang No 10 Tahun 2016, pasal 154 ayat (11) yang menyatakan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam kajian dan pertimbangan yang dibuat KPU Kabupaten Buleleng terungkap, dasar pertimbangan Majelis Hakim PT TUN Surabaya mengabulkan gugatan Paket Surya di antaranya, Kepala Desa (Perbekel) Mengening, Kecamatan Kubutambahan tidak mau tandatangani B1-KWK (surat pernyataan pendukung terhadap Paket Surya), yang menunjukkan ketidaknetralan yang bersangkutan sebagai aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemilihan. Kemudian masih terdapat intimidasi yang dilakukan oknum anggota DPRD Buleleng dari Fraksi PDIP dan tim pemenangan PDIP dan Kepala Desa/Kecamatan Gerogak, sehingga mengakibatkan pendukung penggugat di Desa Gerogak dan di Kalibaru, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng tidak datang secara bebas menggunakan hak konstitusionalnya ke tempat verifikasi faktual tahap III, untuk diverifikasi. Kemudian terungkap juga jika Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan dianggap mengetahui adanya intimidasi tersebut, sehingga Panwas semestinya melakukan tugas lebih intensif dan profesional, sehingga verifikasi faktual ke III tidak terulang. Berdasar kajian tersebut, Majelis Hakim PT TUN berpendapat SK 125/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2017, dinyatakan cacat yuridis baik dari segi formal prosedur maupun substansinya, karena akibat tindakan intimidasi pihak lain dalam proses verifikasi faktual, ketidaknetralan aparatur pemerintah, dan belum profesionalnya Panwas dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.

Pengundian nomor urut pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Buleleng dilaksanakan di Gedung Wanita Laksmi Graha pada tanggal 13 Desember 2016. Pengundian pasangan calon tersebut itu mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI, Polri, hingga Pemadam Kebakaran. Saat menuju ke Laksmi Graha, pendukung PASS berjalan dari Taman Kota Singaraja. Mereka berjalan dengan diiringi ratusan pendukung

dari partai pengusung, yakni PDI Perjuangan dan Nasional Demokrat. Selain itu Partai Persatuan Pembangunan, Gerindra, dan Hanura sebagai pendukung juga turut mewarnai prosesi jalan kaki menuju Gedung Laksmi Graha. Dari hasil pengundian pasangan Independen Dewa Nyoman Sukrawan – I Gede Dharma Wijaya (Paket Surya) mendapat nomor urut 1 dan pasangan Incumbent Putu Agus Suradnyana – Nyoman Sutjidra (PAS–Sutji) mendapat nomor urut 2. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan Pembukaan Kampanye Damai pada tanggal 16 Desember 2016 yang dilaksanakan di Taman Kota Singaraja.

Pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Buleleng yang beralokasi di jalan Jendral Sudirman Singaraja. Yang didukung oleh personil sejumlah 69 orang yang terdiri atas 29 PNS, 3 Pegawai harian dan 37 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS yang ada terdiri atas ; Pembina (IV/a) ; 3 orang, Penata Tk. I (III/d) ; 7 orang, Penata Muda Tk.I(III/b) ; 6 orang, Penata Muda(III/a) ; 3 orang, Pengatur (II/c) ; 3 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 4 orang. Dengan tingkat pendidikan pegawai yang ada terdiri atas ; S2 ; 2 orang. S1 ; 18 orang, SMA/SMK ; 47 orang, SMP ; 2 orang. Pejabat structural yang ada ; pejabat eselon IIb ; 1 pejabat, eselon IIIb ; 4 orang, eselon Iva ; 8 orang.

Untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.4.990.732.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.879.177.744,- atau 97,76 persen yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.2.600.244.000,- dan terealisasi Rp.2.541.638.398,- atau 97,75 persen dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.390.488.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.337.539.346,- atau 97,79 persen.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 disusun melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Dilanjutkan melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum SKPD dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian

menetapkannya menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan urusan. Total aset yang dikuasai sebesar Rp. Rp. 2.167.796.650 dan tidak ada aset yang tidak digunakan. Tidak ada permasalahan yang prinsip yang menjadim kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Perangkat Daerah yang juga melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 10 program dan 38 kegiatan, disamping program – program dimaksud perlu adanya Program Prioritas Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ,yaitu :

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

- Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pengamanan/Pengawalan Pejabat Pemerintah Daerah

2. Program Pemeliharaan Kantrantribmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah

3. Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintah

- Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja.

Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Buleleng, pada Tahun 2016 tercapai 89,02 persen, sedangkan Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tercapai 10 persen. Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yg diselesaikan Tahun 2016 120 pelanggaran. Jumlah pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yg dilaporkan dan/atau dipantau 139 pelanggaran dan banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 kali patroli dalam sehari sebanyak 90 kelompok.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Buleleng diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang yaitu Kabid Perlindungan Masyarakat, Kabid Ketertiban Umum, Kabid Sumber Daya Aparatur, Kabid Peraturan daerah, dan 3 Kepala Sub. Bagian yaitu Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum, 8 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Dan Penyuluhan, Kasi Penyeledikan Dan Penyidikan, Kasi Operasional Dan Pengendalian, Kasi Kerjasama, Kasi Pelatihan Dasar, Kasi Teknis Fungsional, Kasi Pengarahan Dan Pengendalian dan Kasi Bina Potensi Masyarakatserta di bantu 153 orang staf /anggota yang terdiri dari 58 orang staf administrasi dan 95 orang anggota Sat Pol PP. Dari 169 orang Pegawai pada Sat Pol PP 74 Orang PNS, 6 orang tenaga harian dan 89 orang Tenaga Kontrak. Tingkat pendidikan pegawai pada Sat Pol PP S2 berjumlah 6 orang, S1 berjumlah 30 orang, Diploma III berjumlah 4 orang, Diploma II berjumlah 1 orang, SMA berjumlah 119 orang, SMP berjumlah 2 orang dan SD berjumlah 1 orang. Pangkat Dan Golongan pegawai pada Sat Pol PP Gol. IV/c berjumlah 1 orang, Gol. IV/b berjumlah 1 orang, Gol. IV/a berjumlah 6 orang, Gol. III/d berjumlah 5 orang, Gol. III/c berjumlah 3 orang, Gol. III/b berjumlah 4 orang, Gol III/a berjumlah 1 orang Gol. II/d berjumlah 3 orang, Gol. II/c berjumlah 24 orang, Gol. II/b berjumlah 19 orang, Gol. II/a berjumlah 4 orang, dan Gol. I/d berjumlah 2 orang, Gol. I/a berjumlah 1 orang. Bahwa untuk kelancaran dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu menetapkan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dibiayai dengan alokasi Belanja sebesar Rp. 9.227.000.670 dan terealisasi sebesar Rp. 9.134.915.214 atau 99,00 persen. Yang terdiri atas Belanja Tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 5.078.522.000 dan terealisasi Rp. 5.071.161.029 atau 99,86 persen dan Belanja langsung yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 4.148.478.670 dan terealisasi Rp. 4.063.754.185 atau 97,96 persen. Belanja Langsung yang tersedia terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 638.675.000 dan terealisasi Rp. 628.675.000 atau 98,43 persen, Belanja Barang Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 3.033.123.870 dan terealisasi Rp. 2.960.194.265 atau 97,60 persen dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 476.679.800 dan terealisasi Rp. 474.884.920 atau 99,62 persen. Hasil kegiatan Tahun 2016 meliputi ; Tekendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Dalam Rangka Hari-hari Nasional Lainnya, Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Tercapainya Keamanan Pejabat Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tercapainya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Buleleng, Tercapainya Kepastian Hukum Di Wilayah Kabupaten Buleleng dan Tercapainya Ketertiban Umum.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Penanaman modal ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 3.878.444.740. Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 3.751.150.740 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 127.294.000.

Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang.
- Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
- Sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong sangat masih kurang.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

- Secara bertahap untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan pelatihan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- Untuk penambahan kuantitas staf dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan mutasi PNS dan atau membuka formasi CPNS untuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- Untuk melengkapi sarana dan prasarana diusulkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.

1) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ditujukan untuk memfasilitasi kebijakan – kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Tahun 2016 Sekretariat Kabupaten Buleleng melaksanakan 17 program dan 74 kegiatan yang diselenggarakan oleh 7 Bagian dibawah koordinasi 3 Asisten di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Program dan Kegiatan tersebut secara rinci tersaji pada tabel.....

Tabel 61
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI				
				KEUANGAN		Fisik (Keluaran)	TOT KI KEG	
				Rp.	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bagian Pemerintahan								
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Penyelenggaraan Upacara / hari-hari besar nasional	3,859,748,700	3,741,392,398	96.93	100.00	98.98	
2	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	2 Evaluasi Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah	313,693,020	307,113,225	97.90	160.00	119.30	
3	Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	3 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LP2D)	80,000,000	75,487,080	94.36	100.00	98.12	
		4 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan	69,400,000	64,512,890	92.96	100.00	98.59	
		5 Penanganan Urusan Pertanahan Kewenangan-	270,115,700	247,937,245	91.79	93.33	93.11	
		6 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan daerah	932,425,100	862,122,349	92.46	100.00	97.49	
		7 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	148,105,000	132,702,870	89.60	100.00	96.53	
		8 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan	778,000,000	762,210,490	97.97	100.00	99.32	
		Pembinaan Kemasyarakatan						
		9 Pendataan Penegasan Batas Wilayah desa/Kelurahan	237,950,000	215,863,270	90.72	100.00	97.68	
		Jumlah	6,689,437,520	6,409,341,817	95.81	105.93	99.90	
Bagian Ekbang								

4	Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	10	Koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perekonomian dan pembangunan	263,725,824	260,317,173	98.71	100.00	99.74
		11	Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perijinan Penanaman Modal	371,837,593	368,901,291	99.21	153.00	135.07
		12	Pelaksanaan Penarikan Investor/Penanaman Modal	319,548,025	318,270,325	99.60	100.00	99.87
		13	Pembinaan Pelaksanaan LPD	225,831,771	222,484,489	98.52	100.00	99.51
		14	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	340,000,000	333,490,185	98.09	100.00	99.36
		15	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	439,576,038	428,072,734	97.38	100.00	99.48
		16	Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi	16,792,000	14,976,550	89.19	100.00	96.40
			Jumlah	1,977,311,251	1,946,512,747	98.44	107.57	91.2
Bagian Hukum								
5	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	17	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	23,613,201	23,380,249	99.01	100.00	99.67
		18	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa	22,606,400	22,449,335	99.31	100.00	99.77
6	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	19	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Perundang-Undangan	734,202,500	683,681,891	93.12	100.00	97.71
		20	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	424,553,400	411,934,308	97.03	116.67	110.12
		21	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62,279,500	58,495,706	93.92	100.00	98.09
		22	Publikasi Perundang-Undangan	313,078,700	285,376,878	91.15	100.00	97.05
		23	Pembinaan dan Penuntunan Penyuratan Awig-awig Desa Pakraman	63,522,500	63,021,950	99.21	100.00	99.74
		24	Pembinaan dan Penyulihan Hukum			99.56	100.00	99.85

				115,262,600	114,757,212			
		25	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	11,641,000	10,703,641	91.95	100.00	97.32
			Jumlah	1,770,759,801	1,673,801,170	94.52	101.85	99.92
Bagian Humas dan Protokol								
7	Program Optimalisasi Pememfaatan Teknologi Informasi							
		26	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	977,723,000	974,342,475	99.65	90.00	90.51
8	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan	27	Peliputan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan dan	654,086,000	650,611,876	99.47	100.00	99.82
9	Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan		Kemasyarakatan					
		28	Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	1,594,671,000	1,573,910,200	98.70	117.26	111.07
		29	Peliputan dan pemberitaan dengan wartawan	332,500,000	332,148,275	99.89	94.89	96.56
		30	Pelaksanaan jumpa Pers	61,559,000	57,017,750	92.62	93.33	93.10
		31	Pelaksanaan pelayanan keprotokolan	3,726,637,000	3,643,440,086	97.77	108.40	104.86
			Jumlah	7,347,176,000	7,231,470,662	98.43	100.65	99.32
Bagian Kesra								
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana dan prasarana upacara	2,730,000,000	1,485,883,623	54.43	93.33	80.36
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Sosial	33	Pembinaan masalah kesejahteraan social	1,326,638,000	903,203,321	68.08	86.67	80.47
		34	Pembinaan adat dan kebudayaan	2,948,940,000	1,255,079,860	42.56	100.00	80.85
		35	Pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	450,000,000	262,453,427	58.32	100.00	86.11
		36	Penanggulan dan pencegahan HIV dan AIDS	959,000,000	460,910,298	48.06	80.00	69.35
			Jumlah	8,414,578,000	4,367,530,529	51.90	92.00	79.43
Bagian Organisasi								
12	Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur	37	Penyusunan Kinerja Pemerintah	226,553,000	221,833,725	97.92	100.00	99.31

		38	Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik	147,623,630	147,256,513	99.75	100.00	99.95
		39	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	56,459,910	56,440,400	99.97	100.00	94.98
		40	Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	160,900,100	157,246,426	97.73	100.00	97.55
		41	Penataan dan Evaluasi Kepegawaian	100,000,000	95,121,693	95.12	100.00	98.37
		42	Pembinaan dan pengembangan Kepegawaian (Kompetensi)	105,000,000	104,451,159	99.48	100.00	99.83
		43	Penataan dan Evaluasi Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja	37,167,510	36,336,100	97.76	100.00	99.25
		44	Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	32,929,175	32,007,730	97.20	100.00	99.07
		45	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	59,451,285	51,323,500	86.33	100.00	95.44
		46	Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	33,693,215	32,980,260	97.88	100.00	99.29
		47	Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng	45,075,175	44,674,500	99.11	100.00	99.70
13	Peningkatan Disiplin Aparatur	48	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	370,047,000	366,201,400	98.96	100.00	99.65
		49	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	157,000,000	156,782,200	99.86	100.00	99.95
			Jumlah	1,531,900,000	1,502,655,606	98.09	100.00	98.64
Bagian Umum								
14	Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,000,000	23,711,177	87.82	99.43	95.56
		51	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	1,487,000,000	1,311,289,285	88.18	100.00	96.06
		52	Penyediaan Jasa Jaminan peralatan dan Perlengkapan Kantor	923,927,000	685,081,150	74.15	77.78	76.57
		53	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah			100.00	100.00	100.00

				51,914,000	51,913,333			
		54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	262,600,000	215,567,500	82.09	76.52	78.37
		55	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,513,020,000	1,496,260,474	98.89	99.40	99.23
		56	Penyediaan Alat Tulis Kantor	143,429,800	140,878,825	98.22	100.00	99.41
		57	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	128,493,700	123,659,052	96.24	100.00	98.75
		58	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80,117,600	77,996,600	97.35	95.83	90.25
		59	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	176,040,000	166,441,800	94.55	100.00	98.18
		60	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam daerah	1,675,696,200	1,378,836,203	82.28	93.75	89.93
		61	Penyediaan Makanan dan Minuman	2,118,472,000	1,890,891,500	89.26	94.77	92.35
		62	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	1,853,774,700	1,658,635,000	89.47	100.00	98.25
15	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	63	- Pembangunan Gedung Kantor	752,798,996	661,348,000	87.85	100.00	47.98
		64	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,609,449,000	1,569,449,000	97.51	66.67	76.95
		65	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2,297,604,003	1,954,286,125	85.06	100.00	95.02
		66	- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	417,794,920	364,749,620	87.30	100.00	95.77
		67	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	861,075,000	826,467,200	95.98	100.00	98.66
		68	-Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil jabatan			62.68	100.00	87.56

				466,600,000	292,475,427			
		69	- Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,124,000,000	841,981,546	74.91	100.00	91.64
		70	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1,078,500,000	882,485,515	81.83	100.00	93.94
		71	- Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	155,100,000	151,650,135	97.78	100.00	99.26
		72	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	160,500,000	139,040,440	86.63	100.00	95.54
16	Program Informasi Pembangunan Daerah	73	- Penyediaan Jasa hiburan	189,600,000	188,540,000	99.44	100.00	99.81
17	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	74	- Pemanfaatan Teknologi dan Telekomunikasi	333,300,000	321,822,804	96.56	100.00	98.85
			Jumlah	19,887,806,919	17,415,457,711	87.57	92.47	88.23

Sumber data : Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. 2016

Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dalam bidang kesejahteraan masyarakat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan dan mengendalikan serta memantau dan mengadakan evaluasi pelaksanaan dan peningkatan kegiatan dibidang pendidikan, kebudayaan, adapt istiadat, keagamaan kepemudaan, olah raga, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, kesehatan serta kegiatan kesejahteraan social lainnya. Yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pemahaman Nilai – nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Partisipasi Lembaga – lembaga Sosial, Keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan Generasi Muda dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial serta Meningkatkan Pelestarian Adat dan Budaya Bali. Sasaran atau Targetnya adalah Pura, Lembaga, Sekolah dan Perorangan. Sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Bagian Kesejahteraan sosial pada Tahun 2016 meliputi ; lancarnya Operasional Lembaga – lembaga Semi Pemerintah (KPA, LVRI dan UKS se Kabupaten Buleleng), dengan target lokasi di 9 Kecamatan se Kabupaten Buleleng, terpenuhinya Pembinaan Adat dan Kebudayaan dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan se Kabupaten Buleleng, terpenuhinya Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olah Raga dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan dan terpenuhinya Penanggulangan HIV dan AIDS dengan target lokasi tersebar di 9 Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik maka setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki perencanaan, skala prioritas serta sasaran yang tepat. Disamping itu kebutuhan pembangunan yang besar dari masyarakat dan terbatasnya kemampuan untuk memenuhi menyebabkan perlu adanya arah pembangunan yang jelas dan program/kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh karena itu semua pembangunan baik di bidang politik, hukum, ekonomi maupun pendidikan memerlukan Rencana Pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Tugas dan Fungsi selanjutnya adalah dalam rangka pembangunan bidang hukum di Kabupaten Buleleng terkait dengan pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu disebutkan bahwa kebijakan Bidang Hukum dan Kamtibmas diupayakan

agar terwujud: peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan sebagai landasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah; meningkatkan pembinaan hukum dan ketertiban guna menciptakan dan mendorong terwujudnya ketaatan, dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum/supremasi hukum serta menghargai hak azasi manusia. Lebih jauh diharapkan pula terwujud kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu adanya koordinasi dengan penegak hukum lainnya/instansi vertikal seperti Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan serta adanya kegiatan/program kerja yang mantap dan berkesinambungan.

Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentulah harus berpedoman pada kebijakan pemerintah di bidang hukum, ada beberapa kebijakan yang telah diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan budaya dan kesadaran hukum dikalangan aparat dan masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hukum.
2. Menciptakan dan mengembangkan kondisi social budaya yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan dan penyuratan awig-awig desa pakraman;
4. Meningkatkan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah;
5. Menerbitkan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya yang sesuai dengan Potensi, kondisi dan kemampuan daerah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan pembangunan bidang hukum adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terwujudnya aparatur yang bertanggungjawab, mempunyai integritas moral yang tinggi dan profesional di bidang hukum dan perundang-undangan.
2. Tersusunnya Produk Hukum (Perda) sesuai tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya penyuratan awig-awig desa pakraman.

3. Terwujudnya Dokumentasi dan Publikasi Hukum serta Peraturan Perundang-undangan.
4. Terwujudnya supremasi hukum.

Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang hukum pada Tahun 2016 adalah :

1. Tersusunnya 129 Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2016.
2. Terbinanya Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa sehingga tercipta kepastian dan tertib administrasi hukum pemerintahan desa.
3. terselesaikannya 5 dokumen penyelesaian kasus/permasalahan peraturan perundang-undangan,
4. Terselesaikannya 6 (enam) rancangan Peraturan Daerah,
5. Terwujudnya pemahaman 270 (dua ratus tujuh puluh) orang masyarakat mengenai 3 (tiga) peraturan daerah melalui sosialisasi peraturan daerah pada 9 (sembilan) kecamatan,
6. Terwujudnya 2 Media yaitu 1 Media Jaringan dan 1 Media buku yaitu 110 (seratus sepuluh) buku yang terdiri dari Lembaran Daerah, Himpunan Keputusan Bupati dan Himpunan Peraturan Bupati,
7. Tersuratnya 6 (enam) awig desa pakraman serta terbinanya 6 (enam) desa pakraman,
8. Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan hukum di 9 (Sembilan) desa di masing masing kecamatan
9. Terlaksananya pembinaan / pendidikan Hak Asasi Manusia berupa 2 laporan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu pada daerah Kabupaten dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi

kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, dan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah Kabupaten Buleleng telah berhasil menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2016, yang disusun melalui proses :

1. Pengenalan dan sosialisasi penggunaan aplikasi melalui workshop yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2015, menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 871/4003/ OTDA, tanggal 8 Oktober 2015, sifat sangat penting, perihal Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
2. Tanggal 4 Nopember 2015 pengumpulan Data Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD terkait kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilanjutkan dengan Inventarisasi dan verifikasi data dari SKPD.
3. Menetapkan petugas Operator Sistem Informasi Penataan dan Penentuan Urusan Pemerintahan dengan Surat Penunjukan Bupati Buleleng tanggal 12 Nov 2015.
4. Menghimpun Data ke dalam sistem Informasi Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Penentuan Beban Kerja Perangkat Daerah melalui fasilitasi.otda.kemendagri.go.id. berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.5874/ 2015 tanggal 12 Nopember 2015.
5. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ, tanggal 16 Januari 2016 dan Surat PLT Sekretaris Daerah Nomor 005/243/ Org, dilaksanakan simulasi Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selama 10 hari yaitu dari tanggal 21 Januari 2016 s/d 3 Pebruari 2016 dan pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan

6. Tanggal 26 Pebruari 2016 dilaksanakan Pembentukan Tim Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 160/ 143/HK/2016, tanggal 26 Pebruari 2016.
7. Persiapan finalisasi data intensitas Urusan Pemerintahan yang disampaikan oleh SKPD dengan menyiapkan data dukung yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD, diverifikasi oleh Inspektorat dan selanjutnya ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2030/SJ, tanggal 1 Juni 2016, sifat sangat penting, perihal Penataan Perangkat Daerah dan Percepatan Pengalihan P3D pada tanggal 2 Juni 2016.
8. Menyampaikan Surat kepada SKPD dan Camat untuk hadir dan membawa data dukung di Ruang Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
9. Rapat di Biro Organisasi Provinsi Bali dalam rangka persiapan Verifikasi Penataan Perangkat oleh Tim Kementerian Dalam Negeri.
10. Dilaksanakan finalisasi, validasi data hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penandatanganan Berita Acara antara Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Dalam Negeri, dan dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Validasi kepada masing-masing SKPD, terhadap hasil pemetaan dengan sistem des oleh kementerian masing-masing.
11. Dilaksanakan Input data hasil validasi kedalam sistem, dengan menghasilkan typologi Perangkat Daerah : Type A : 12 ; Type B : 20 ; Setingkat Bidang : 1 dan Setingkat Sub Bidang : 1.
12. Yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Biro Organisasi Privinsi Bali, dengan disertai data dukung.
13. Dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan SKPD untuk dilaksanakan finalisasi dan penyempurnaan data dukung Urusan Pemerintahan dalam rangka penentuan besaran dan typologi Perangkat Daerah.
14. Rapat Tim Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dalam perrsiapan Penyusunan dan Expose rencana pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng

15. Rapat Tim Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah membahas Rencana Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
16. Rapat dengan Pansus I DPRD Kabupaten Buleleng membahas Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
17. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Daerah membahas Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng 9 Oktober 2016.
19. Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
20. Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buleleng terkait Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
21. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus I DPRD Kabupaten Buleleng dan Pendapat akhir Bupati atas Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
22. Penetapan Keputusan Persetujuan DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Keputusan DPRD Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng menjadi Peraturan Daerah
23. Penyampaian Surat mohon Persetujuan kepada Gubernur Bali terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan dilampiri SK Persetujuan DPRD.
24. Dilaksanakan Verifikasi terhadap Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ditujukan dalam rangka mengkoordinasikan Pelaksanaan dan

Pengendalian Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian perijinan penanaman modal, terlaksananya Penarikan Investor/penanaman modal, Pembinaan Pelaksanaan LPD, terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembinaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Penyedia Jasa Konstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan ini pada Tahun 2016 mencapai hasil meliputi ; terkoordinasinya Pendistribusian Beras Miskin sebanyak 7.635.780 kg, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian perijinan penanaman modal sebanyak 100 Investor, Penarikan Investor/penanaman modal sebanyak 100 Investor, terlaksananya Pengendalian dan Pembinaan LPD sebanyak 50 LPD, terlaksananya pelatihan pengurus dan Badan Pengawas LPD sebanyak 50 orang, terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan di 37 SKPD, terlaksananya Kunjungan Kerja Bupati Buleleng di 9 Kecamatan, terlaksananya pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan perencanaan dan terlaksananya Pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi selama 1 hari sebanyak 150 penyedia jasa Konstruksi.

Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategi nasional untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Kerja

Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan ini beberapa hasil yang dicapai adalah :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan penyelenggaraan upacara / hari besar nasional, hasil yang dicapai adalah terfasilitasinya perayaan HUT Kota Singaraja, HUT Provinsi Bali, HUT RI, Harkitnas, Hari Otda, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Korpri, Perayaan Tahun Baru.
2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan kegiatan evaluasi bentuk-bentuk kerjasama pemerintah daerah, hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan pelaksanaan kerjasama daerah dalam 50 buku. Dan sebagai catatan untuk kegiatan ini capaian realisasi fisiknya melebihi target yang direncanakan. Dari 20 kesepakatan/perjanjian yang direncanakan terealisasi sebanyak 32 kesepakatan/perjanjian.
3. Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan.
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, hasilnya adalah tersedianya dokumen LPPD tahun 2015 dan Informasi LPPD Tahun 2015 sebanyak 25 buku.
 - Kegiatan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, hasilnya yaitu terwujudnya standar pelayanan terpadu unit Pemerintah Kecamatan di 9 kecamatan dan serta terwujudnya peningkatan wawasan 9 Camat dalam penyelenggaraan tugas tugas.
 - Kegiatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah, hasilnya adalah tersusunnya rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 65 buku.
 - Kegiatan Inventarisasi pembakuan nama rupa bumi, hasilnya adalah tersusunnya data nama rupa bumi dalam 20 buku.
 - Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, hasilnya adalah tersusunnya Berita Acara Rapat Koordinasi sebanyak 20 buku.
 - Kegiatan pendataan penegasan batas wilayah desa/kelurahan, hasilnya adalah tersusunnya data batas desa/kelurahan dalam 10 buku dan 10 shet peta.

Dalam bidang kehumasan dan pelayanan protokol untuk memfasilitasi agenda kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Bagian Humas dan Protokol pada Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik, Kegiatan Peliputan dan Pemberitaan, pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan, Kegiatan Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan melalui Media Massa, Kegiatan Peliputan dan Pemberitaan dengan Wartawan, Kegiatan Pelaksanaan Jumpa Pers dan Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan. Dengan hasil kegiatan meliputi :

- Tersedianya jaringan internet sebagai sarana penunjang kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi selama 12 bulan
- Tersedianya media informasi dalam rangka sosialisasi program dan kebijakan serta informasi pembangunan, melalui media informasi berupa : 12 edisi Tabloid Kabar Buleleng masing-masing 1.100 eksemplar, 151 media publikasi luar ruang (baliho), 1464 buku kliping, 150 Buku Sambutan Bupati Buleleng, dan 1 video documenter Selayang Pandang Kabupaten Buleleng
- Termonitor dan teranalisisnya informasi dan opini mengenai Kabupaten Buleleng di media massa selama 12 bulan
- Terlaksananya 4 kali Rakor PPID Kabupaten Buleleng
- Terliputnya kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sebanyak 500 liputan
- Tersebaranya informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa sebanyak 564 publikasi
- Terinformasikannya liputan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan melalui 1670 rilis berita
- Terlaksananya jumpa pers sebanyak 14 kali.
- Terlaksananya Pelayanan keprotokolan sebanyak 542 acara dan terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur sebanyak 38 orang.

Dan untuk optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran pada Sekretariat Daerah kabupaten Buleleng, Bagian Umum melaksanakan kegiatan – kegiatan rutin terkait penyediaan sarana prasarana khususnya pelayanan administrasi perkantoran, keuangan dan rumah tangga Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2016 meliputi ;

- Terwujudnya pelayanan surat menyurat masuk dan keluar 1 tahun sebanyak 29.830 Eksemplar.
- Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan TV berlangganan 1 tahun.
- Terlaksananya jasa 9 Jenis pelayanan yang optimal.
- Tersedianya 9 Jenis jaminan barang milik daerah.
- Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional sebanyak 132 Unit.
- Tersedianya pengelolaan administrasi Keuangan SETDA sejumlah 497 SPM.
- Terwujudnya penyediaan ATK sebanyak 34 jenis.
- Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 25 Jenis.
- Berfungsinya penerangan kantor dengan maksimal sejumlah 24 Jenis.
- Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu Bupati.
- Terwujudnya koordinasi maupun konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Terwujudnya jasa pelayanan/administrasi KDH/WKDH di 2 lokasi.
- Tersedianya gedung / lingkungan kantor yang representatif sebanyak 2 paket.
- Tersedianya 4 unit kendaraan dinas / operasional.
- Tersedianya 43 jenis perlengkapan gedung kantor.
- Tersedianya 2 jenis peralatan Rumah Jabatan / Dinas.
- Termanfaatnya gedung kantor sejumlah 3 paket.
- Termanfaatnya mobil jabatan sebanyak 4 unit.
- Termanfaatnya Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 22 unit.
- Termanfaatnya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas di 3 areal.
- Termanfaatnya Perlengkapan Gedung Kantor (Fasilitas Umum) sejumlah 3 areal.
- Termanfaatnya Peralatan Gedung Kantor/Lingkungan Kantor sebanyak 5 unit.
- Terdukungnya Kegiatan-Kegiatan Penerimaan Tamu-tamu Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 1 Tahun.
- Tercapainya manfaat teknologi dan Telekomunikasi Lingkup Setda Kabupaten Buleleng sebanyak 5 unit.
- Tercapainya pelayanan sandi dan telekomunikasi sebanyak 9 unit.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dibiayai dengan alokasi Belanja sebesar Rp. 59.792.999.114,54 dan terealisasi sebesar Rp. 56.341.922.304,70 atau

94,23 persen. Yang terdiri atas Belanja Tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 12.168.782.000 dan terealisasi Rp. 12.101.873.595 atau 99,45 persen dan Belanja langsung yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 47.624.217.114,54 dan terealisasi Rp. 44.240.048.709,70 atau 92,89 persen. Belanja Langsung yang tersedia terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 4.119.475.000 dan terealisasi Rp. 4.025.255.000 atau 97,71 persen, Belanja Barang Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 38.541.695.194,96 dan terealisasi Rp. 35.687.489.384,70 atau 92,59 persen dan Belanja Modal dengan anggaran Rp. 4.963.046.919,96 dan terealisasi Rp. 4.527.304.325 atau 91,22 persen.

Keberhasilan capaian kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng didukung dengan kekuatan personil sebanyak 138 orang PNS, Pangkat dan Golongan PNS ; Pembina Utama madya (IVd) ; 1 orang, Pembina Utama Muda (Ivc) ; 6 orang, Pembina Tk.I / IVb ; 5 orang, pembina / Iva ; 5 orang, Penata Tk.I/IIId ; 9 orang, Penata /IIId ; 14 orang, Penata Muda Tk.I / IIId; 19 orang, Penata Muda/IIId; 14 orang, Pengatur Tk.I/Iid; 5 orang, Pengatur/Iic; 37 orang, Pengatur Muda Tk.i/Iib; 18 orang, Pengatur Muda/Iia; 5 orang, Pejabat Struktural ; eselon Iia ; 1 pejabat, eselon Iib ; 8 pejabat, eselon IIIa ; 7 pejabat dan eselon Iva ; 21 pejabat.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Pemerintahan Umum ; cukup. Sedangkan permasalahan yang dihadapi Tahun 2016 ;

1. Keterbatasan kemampuan Desa/kelurahan dalam menyediakan dana untuk pembayaran Raskin mengingat system pembayaran yang digunakan adalah system cash and carry.

2. Sering terjadinya benturan kepentingan antara Investor untuk ber Investasi di suatu wilayah dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan peruntukan RTRW.
3. Kurangnya promosi investasi produk-produk unggulan Kabupaten Buleleng
4. Kurangnya sarana prasarana, modal penunjang kegiatan operasional LPD dan Sumber Daya Manusia dalam mengurus/mengelola LPD.
5. Keterbatasan SDM pengelola LPD.
6. Kurangnya saran prasarana yang memadai dalam melaksanakan pengendalian seperti : Kendaraan operasional.
7. Pemahaman masyarakat akan hak dan Kewajiban serta aturan Hukum yang berlaku masih rendah;
8. Perubahan produk hukum pusat yang begitu cepat sehingga mempengaruhi lancarnya arus informasi hukum dan kurang mencerminkan kepastian hukum.
9. Masih adanya SKPD yang lamban dan kurang memahami terhadap kewajibannya untuk mengirim laporan tepat waktu. Bagi Aparatur Pemerintah diperlukannya kesadaran peningkatan kinerja dari tahu ketahun agar lebih baik karena akan sangat menentukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
10. Bahwa didalam penataan organisasi kelembagaan dan peningkatam status dari beberapa SKPD belum dapat dilaksanakan menunggu revisi terhadap PP 41 tahun 2007 dan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota.
11. Banyak instansi yang melaksanakan kerjasama tanpa melibatkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TTKSD) Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga banyak kerjasama yang belum dapat kami himpun.
12. Dalam rangka pembakuan nama rupabumi, cakupan luas wilayah kabupaten Buleleng yang begitu besar, sinkronisasi data awal dari pemerintah berbeda dengan data riil di lapangan, masih banyaknya unsur rupabumi yang belum bernama dan tidak diketahui sejarahnya, penentuan titik koordinat yang hanya bisa dilakukan dengan foto udara dengan biaya yang tinggi, merupakan beberapa hal yang menjadi catatan sehingga dalam perencanaan kegiatan

pada tahun anggaran berikutnya semua catatan diatas bisa dijadikan refrensi dan tolak ukur.

13. Belum optimalnya peran dan fungsi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar tercapai hasil dan sasaran yang hendak dicapai, penanganan dimaksud antara lain :

1. Berupaya menata ruang yang ada dengan RT/RW sehingga masing-masing kawasan jelas peruntukannya. Dan secara bertahap menyempurnakan infrastuktur yang memadai untuk menunjang Investasi
2. Melalui program promosi Pemkab bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan promosi investasi dengan mengikuti pameran diluar daerah.
3. Pemberian Dana Talangan bagi desa/Kelurahan yang tidak mampu membayar dengan system cash and carry.
4. Pelaksanaan Pelatihan pengurus dan Badan Pengawas LPD se-Kabupaten Buleleng
5. Sesegera mungkin mengadakan operasional kendaraan sehingga pelaksanaan kegiatan Pengendalian bisa tercapai dengan baik.
6. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menerus melaksanakan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan daerah ke desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng;
7. Mengadakan pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah dengan peraturan yang lebih tinggi guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan
8. Perlunya diberikan bimbingan teknis serta pelatihan-pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan kepada para aparatur pemerintah terhadap petugas administrasi dan petugas yang menangani laporan-laporan, agar dapat menjawab permasalahan tentang laporan.serta melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah melalui pembinaan secara terus menerus bagi aparatur pemerintah agar didapat hasil yang diharapkan dalam memberikan pelayanan.;
9. Menyiapkan sarana pendukung terhadap rencana perubahan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa pembentukan perangkat daerah berdasarkan kemampuan daerah yang dilakukan pada kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat

yang mampu dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota secara menyeluruh.

10. Melakukan sosialisasi terkait PP No.50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah kepada SKPD yang akan melaksanakan kerjasama.
11. Melakukan sosialisasi langsung ke tingkat Desa untuk segera mendapatkan data rupabumi serta adanya komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah kecamatan sebagai fasilitasi kegiatan pemerintah desa.
12. Koordinasi lebih lanjut dengan TPAD dan Tim Teknis PATEN untuk pemenuhan sarana prasarana dan personel sebagai syarat teknis penyelenggaraan PATEN.

2) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG.

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan urusan pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dimana tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. Dimana tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyelenggarakan fungsi Memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD; Menyiapkan bahan dan memfasilitasi rapat anggota DPRD; Pelaksanaan rumah tangga DPRD; serta Pengelolaan tata usaha DPRD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sehingga prioritas urusan yang dilaksanakan dapat tercapai.

Pencapaian sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2015 dijabarkan dalam 1 (satu) program prioritas dan 7 (tujuh) program rutin kesekretariatan sebagai penunjang penyelenggaraan program prioritas. Adapun program – program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,

Sebagaimana dijabarkan dalam visi dan misi sekretariat DPRD maka program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi yang prima dengan aparatur yang profesional bagi peningkatan kinerja Anggota DPRD dalam perannya sebagai pengemban aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan perwujudannya. Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,
- Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama,
- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan,
- Rapat-rapat Paripurna,
- Kegiatan Reses,
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah,
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selain program pokok diatas juga dilaksanakan program rutin administrasi perkantoran yang meliputi :

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat –Menyurat,
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- Penyediaan Alat Tulis Kantor,
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,

- Penyediaan Makanan dan Minuman,
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam daerah,

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Pembangunan Gedung Kantor,
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Mebeleur,
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara,
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor,
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional,
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor,

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya,
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal,
- Sosialisasi Peraturan Prundang-undangan,
- Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan,
- Penilaian dan Pengembangan Pegawai,

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

7. Program Perencanaan Anggaran SKPD dengan kegiatan Penyusunan anggaran SKPD,

8. Program Peningkatan layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan

- Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan media Massa,
- Pelaksanaan Jumpa Pers,
- Pelaksanaan pelayanan keprotokolan,

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ditandai dengan kemitraan dalam rangka pembahasan dan penetapan 12 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenaga Kerjaan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.9 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.10 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penertiban Penerbangan pohon bamboo di luar kawasan hutan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.13 Tahun 2016 APBD Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang diajukan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Buleleng sebanyak 7 Ranperda yang meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan Anak.
2. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan atas Perda no 1 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
4. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pencabutan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu dikawasan Hutan.
5. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
6. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng didalam memfasilitasi fungsi kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buleleng didukung oleh personil sebanyak 150 orang yang terdiri atas ; 59 PNS, 1 Honor Daerah dan 95 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS ; Pembina Tk.I / IVb ; 3 orang, pembina / Iva ; 1 orang, Penata Tk.I/IIId ; 5 orang, Penata /IIIc ; 7 orang, Penata Muda Tk.I / IIId; 9 orang, Penata Muda/IIIa; 1 orang, Pengatur Tk.I/Iid; 2 orang, Pengatur/Iic; 8 orang, Pengatur Muda Tk.i/Iib; 15 orang, Pengatur Muda/Iia; 3 orang, Juru Tk.I/Id; 2 orang, Juru/Ic; 1 orang, Juru Muda TkI/Ib; 1 orang dan Juru Muda /Ia; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan ; S2 ;3 orang, S1 ;21 orang , D3 ;2 orang , SMA ;28 orang , SMP ;2 orang , SD ; 3 orang. Pejabat Struktural ; eselon Iib ; 1 pejabat, eselon IIIa ; 4 pejabat dan eselon Iva ; 12 pejabat.

Untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 43.696.048.000 dan terealisasi sebesar Rp.42.617.363.319 atau 97,53 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.4.971.518.000 dan terealisasi Rp.4.948.606.769 atau 99,54 persen dan belanja langsung sebesar Rp.38.724.531.000 dan realisasi sebesar Rp.37.668.756.550 atau mencapai 97,27 persen.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Secara umum kondisi sarana prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sudah cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi yang prima bagi peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ; kurangnya sumber daya aparatur, terbatasnya anggaran dan bercampurnya kepentingan politik dan kepentingan teknis. Solusi untuk permasalahan yang dihadapi yaitu mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien, Bersikap profesional dan netral dalam melayani pimpinan dan anggota DPRD.

3) KEPEGAWAIAN DAERAH.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dewasa ini dituntut semakin berkualitas sejalan dengan dinamika kehidupan dan paradigma yang berkembang dimasyarakat. Pemerintah beserta aparturnya dituntut mereformasi struktur dan tata pemerintahan guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Government*). Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipasi efisien dan efektif menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan adanya

aparatur Pemerintah yang profesional. Pemerintah Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme aparturnya melalui pembinaan pelaksanaan Diklat Fungsional, Diklat Penjurangan maupun melalui peningkatan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Kebijakan pembangunan kepegawaian ditujukan untuk :

- Meningkatkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas dan profesional.
- Mewujudkan sistem pengembangan karir PNS yang komprehensif mulai dari seleksi, pengembangan jabatan hingga pensiun.
- Mewujudkan pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang benar dan akurat.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan kepegawaian yaitu :

- Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian aparatur Pemerintah.
- Terlaksananya proses rekrutmen CPNS yang terbuka, adil, transparansi dan kompetitif.
- Terlaksananya tertib administrasi proses mutasi dan pensiun.
- Terlaksananya pengembangan karir PNS melalui jabatan struktural maupun fungsional.
- Tersedianya data kepegawaian melalui pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian yang up to date.
- Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS sesuai dengan prestasi kerja.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembangunan urusan kepegawaian untuk Tahun 2016 meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program ini rutin yang dilaksanakan mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang – Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman dan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Program ini didukung dengan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeleur, Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur, Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Program ini dijabarkan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

4) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas,

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam pengajuan usulan Batas Usia Pensiun (BUP), Pensiun Muda, Pensiun Janda/Duda dan Kartu Taspen, yang dijabarkan dalam kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Bimtek – Bimtek/Workshop, Diklat – Diklat, Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Program ini dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan.
- Pembinaan Pegawai Daerah.
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD.
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.
- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah.

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program ini dijabarkan dalam kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

7) Program Perencanaan Anggaran SKPD.

Program ini dijabarkan dalam kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD.

8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan guna menata penempatan PNS sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, pelantikan sumpah jabatan, menyusun kebutuhan formasi CPNS, Penyusunan DUK, menyelesaikan dan membina PNS yang Indisiplin, mengurus usulan mutasi Kenaikan Pangkat, Karis/Karsu, Karpeg dan Satya Lencana Karya Satya. Untuk mencapai sasaran program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS;
- Seleksi Penerimaan CPNS;
- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi;
- Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
- Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berjumlah 9.912 orang, yang terdiri atas PNS laki – laki sebanyak 5.707 dan PNS Perempuan berjumlah 4.205 orang. Jika dikelompokkan berdasarkan golongan ruang maka PNS di Kabupaten Buleleng terbagi atas Golongan IV ; 3.966 orang, Golongan III ; 4.032 orang , Golongan II ; 1.761 orang dan Golongan I ; 153 orang. Berdasarkan jabatan yang ada dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Buleleng, maka pada Tahun 2016 terdapat 896 Jabatan struktural yang terbagi atas Jabatan Eselon II/a ; 1 jabatan, Eselon II/b ; 34 jabatan, Eselon III/a ; 53 jabatan, Eselon III/b ; 111 jabatan, Eselon IV/a ; 485 jabatan, Eselon IV/b ; 162 jabatan dan Eselon V/a ; 50 jabatan. Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2016 terdiri atas ; ADUM (Diklat Pim IV) sebanyak 25 orang, SPAMA (Diklat Pim III) ; 25 orang, SPAMEN (Diklat Pim II) ; 2 orang. Tahun 2016 juga telah diselenggarakan diklat teknis fungsional yang diikuti oleh 136 pejabat fungsional serta diklat prajabatan bagi 142 CPNS Kabupaten Buleleng. Selanjutnya dalam kaitan dengan perkembangan karier PNS pada Tahun 2016 terdapat 1.200 PNS Kabupaten Buleleng yang naik pangkat, sedangkan PNS yang purna tugas (pensiun) sebanyak 290 orang.

Pola rekrutmen yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengisi jabatan struktural dengan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang baru agar terwujud *The Right Man On The Right Place*, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng selaku unit kerja teknis yang menangani proses pengisian jabatan tersebut melakukan pemetaan jabatan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Tim yang berwenang yaitu Baperjakat dengan melibatkan Tim Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Buleleng. Jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dibahas oleh Baperjakat sehingga dalam penempatannya akan lebih optimal, sedangkan khusus untuk pengisian JPT Pratama tetap melibatkan Panitia Seleksi (Pansel). Untuk menjaga tetap berjalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan mengacu kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait jabatan pimpinan tinggi di Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai konsekuensi pelaksanaan peraturan di atas maka dilakukan beberapa metode berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3116/M.PAN/09/2016 tanggal 20 September 2016 Perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi yang dikukuhkan.

- JPT yang memiliki nomenklatur, tugas dan fungsi yang sama atau yang nomenklturnya berubah, namun tugas dan fungsinya tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka pejabat tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam jabatan tersebut.
- JPT yang mengalami perubahan karena dipecah ke dalam beberapa JPT lain, maka pejabat pimpinan tinggi sebelumnya yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu jabatan yang sesuai.
- Untuk JPT yang digabung, maka salah satu pejabat pimpinan tinggi yang menduduki JPT yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu JPT baru dari hasil penggabungan.
- Proses pengisian yang disampaikan di atas harus melalui mekanisme pertimbangan dari baperjakat dan hasilnya

dilaporkan kepada Pejabat Yang Berwenang (PPK) untuk dilakukan penetapan dan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

2) Pejabat Pimpinan Tinggi melalui uji kesesuaian (Job Fit).

Bagi pejabat pimpinan tinggi yang tidak mendapatkan jabatan sebagai akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan atau yang urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintah yang lebih tinggi, pejabat tersebut akan mengikuti job fit untuk mengisi JPT yang masih kosong. Evaluasi akan dilakukan oleh Baperjakat dan Pansel serta dikoordinasikan dengan KASN.

3) Pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka.

- Apabila setelah dilaksanakannya proses pada poin (a) dan poin (b) diatas masih terdapat JPT yang lowong maka pengisiannya dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif.
- Apabila masih terdapat pejabat pimpinan tinggi pratama yang tidak mendapatkan jabatan yang setara dengan jabatan sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat diangkat ke jabatan yang lebih rendah atau ke jabatan fungsional.

Dari 4 kali kegiatan yakni 2 kali Seleksi Terbuka dan 2 kali Pelantikan Pejabat Struktural, semua kegiatan sudah terealisasi. Pelantikan Pejabat Struktural Tahunn 2016 meliputi Pejabat Eselon II/b : 13 orang, Eselon III/a : 2 orang, Eselon III/b: 16 orang dan Eselon IV/a : 68 orang serta Eselon IV/b : 18 orang.

Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak dan kewajiban serta pelaksanaan penyelesaian masalah PNS sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku, telah dilaksanakan beberapa kebijakan kepegawaian melalui Keputusan pemberian izin untuk melakukan perceraian 9 orang, 2 SK penjatuhan hukuman disiplin PNS tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun dan penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun dan 1 SK pemberian izin beristri lebih dari seorang. Kemudian fasilitasi permohonan Satya lencana karya satya meliputi pendataan permohonan, entry data dan pengiriman permohonan secara kolektif ke Mendagri dan verifikasi ulang terhadap permohonan yang disetujui, pemilahan dan pengiriman piagam ke masing – masing SKPD. Meningkatnya proses kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun tepat waktu serta proses mutasi/penataan PNS. Proses pensiun meliputi tahap

verifikasi permohonan dari masing-masing SKPD, entry data sesuai dengan jumlah permohonan, pengiriman berkas usulan ke Kanreg X BKN Denpasar untuk Gol. IV/b ke bawah dan pengiriman berkas usulan Gol. IV/c keatas dikirim ke BKN Pusat Jakarta dan SK Pensiun diterbitkan oleh Setneg RI. Sedangkan proses mutasi/Penataan Pengembangan Karier PNS dilaksanakan melalui pengembangan Karier PNS untuk menduduki Jabatan Struktural maupun fungsional melalui proses kajian dan dibahas oleh Tim Baperjakat Kabupaten Buleleng maupun Propinsi Bali untuk lanjut ditetapkan oleh Bupati Buleleng selaku Pembina Kepegawaian. Untuk proses kenaikan pangkat dilaksanakan melalui tahapan verifikasi berkas usulan, entry data, pengajuan berkas usulan sesuai ketentuan yang berlaku, penerbitan Nota Pertimbangan oleh Pejabat berwenang dan penerbitan SK Kenaikan Pangkat oleh Pejabat berwenang. Dari data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng terdapat peningkatan kelengkapan kepemilikan dokumen kepegawaian dimana pada Tahun 2016 telah diterbitkan 97 Kartu Kepegawaian, 330 kartu istri (KARIS) dan 400 Kartu suami (KARSU).

Terkait tahapan pelaksanaan kampanye dalam Pilkada Kabupaten Buleleng Tahun 2017 hal lain yang selama ini seringkali menjadi sorotan adalah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara. PNS atau yang sekarang dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017. Apalagi keterlibatan ASN dalam perhelatan Pilkada telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010. Dalam rangka menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berlangsung Jumat 11 Nopember 2016 di Gedung Mr I Gusti Ketut Pudja Eka Pelabuhan Buleleng. Kegiatan sosialisasi itu di buka Plt Bupati Buleleng Made Gunaja, yang diikuti Seluruh Pimpinan SKPD serta Ratusan ASN di Lingkup Pemkab Buleleng.

Dalam sosialisasi tersebut disebutkan bahwa netralitas ASN dalam perhelatan Pemilu khususnya di Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan pilkada Buleleng, telah diatur, salah satunya dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Seperti yang diatur dalam Pasal 4 butir ke 15 yang disebutkan, PNS di larang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan

fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Plt Bupati Buleleng menghimbau seluruh ASN atau PNS di Lingkup Pemkab Buleleng, untuk selalu memegang teguh dan taat Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode perilaku yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku.

Himbauan tersebut sekaligus menegaskan kembali surat edaran Plt. Bupati Buleleng Nomor 800/2782/BKD tertanggal 7 Nopember 2016 tentang netralitas dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pada intinya memberikan penegasan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan baik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selalu memperhatikan dan taat kepada ketentuan peraturan perundang – undangan utamanya yang berkaitan dengan netralitas ASN dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dan mewajibkan seluruh pimpinan unit kerja untuk selalu menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan mobilisasi pegawai di unit kerjanya. Selanjutnya pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan secara melekat dan berjenjang sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Panwas Kabupaten Buleleng. Serta kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korp dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng.

Pembangunan urusan Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng yang beralokasi di Jalan. Laksamana Desa Baktiseraga Singaraja.

Data pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 terdiri atas **Pegawai Negeri Sipil** : 67 orang (termasuk PNS yang diperbantukan di KPUD : 8 orang, di Panwaslu : 1

orang dan di Puskesmas Gerokgak 1 : 1 orang). **Tingkat Pendidikan** : S2 : 7 orang; S1 : 33 orang; Diploma : 7 orang; SMA : 20 orang. **Berdasarkan Golongan ruang** ; Golongan IV : 7 orang; Golongan III : 40 orang; Golongan II : 20 orang; **Pejabat Struktural** : Eselon II : 1 orang; Eselon III : 5 orang; Eselon IV : 11 orang; Pejabat Fungsional : - orang;

Untuk penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Tahun 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.11.181.704.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.333.165.388,- atau 83,46% yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.4.659.894.000,- dan terealisasi Rp.4.206.670.361,- atau 90,27% dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 6.521.810.000,- dan realisasi sebesar Rp.5.126.495.027,- atau 78,61%.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng, terinci melalui realisasi anggaran untuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.1.139.782.800,- dan terealisasi sebesar Rp.851.205.680,- atau 67,52% dan realisasi fisik tercapai 93,76%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan hasil lancarnya pelayanan administrasi melalui pengiriman 5.200 surat, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.62.700.000,- realisasi anggaran Rp.41.994.000,- atau 66,98% dan realisasi fisik 96,23%.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan hasilnya terbayarnya rekening air, rekening listrik dan rekening telepon sebanyak 36 rekening, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.116.000.000,- realisasi anggaran Rp.80.635.808,- atau 69,51% dan realisasi fisik 91,67%.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas untuk Kepala Badan dan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng selama 12 bulan, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.182.280.000,- realisasi anggaran Rp.146.810.880,- atau 80,54% dan realisasi fisik 95,83%.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan hasil pelaksanaan kegiatan terbitnya surat tanda nomor kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 sebanyak 25 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.6.875.000,- realisasi anggaran Rp.3.351.300 atau 48,74% dan realisasi fisik 92%.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan hasilnya terwujudnya dokumen administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng selama 12 bulan, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.332.066.700,- realisasi anggaran Rp.259.762.400,- atau 78,23% dan realisasi fisik 85,71%.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan hasilnya terwujudnya kebersihan kantor di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.95.400.000,- realisasi anggaran Rp.71.528.476,- atau 74,98% dan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan hasilnya tersedianya peralatan kerja yang dapat berfungsi dengan optimal sebanyak 32 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.17.930.000,- realisasi anggaran Rp.6.125.000,- atau 34,16% dan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan hasilnya tersedianya alat – alat tulis kantor sebanyak 29 jenis, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.33.868.000,- realisasi anggaran Rp.25.266.600,- atau 74,60% dan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetak sebanyak 9 jenis, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.16.877.150,- realisasi anggaran Rp.6.257.850,- atau 37,08% dan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan hasilnya terwujudnya penerangan lingkungan kantor/tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 307 buah, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.7.541.000,- realisasi anggaran Rp.5.788.500,- atau 76,76% dan realisasi fisik 88,60%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan hasil kegiatan tersedianya komputer/PC, printer dan scanner sebanyak

16 unit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.57.925.000,- atau 72,41% dan realisasi fisik 75%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, dengan hasil kegiatan berupa terpenuhinya kebutuhan lembaga akan bahan bacaan sebanyak 1.456 eksemplar surat kabar, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.6.916.000,- realisasi anggaran Rp.5.187.000,- atau 75% dan realisasi fisik 91,67%.
- Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan hasilnya terpenuhinya kebutuhan harian pegawai dalam rapat sebanyak 12 jenis, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.99.033.500,- realisasi anggaran Rp.70.704.000,- atau 71,39% dan realisasi fisik 100%.
- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah, dengan hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen hasil rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebanyak 48 dokumen, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.82.294.850,- realisasi anggaran Rp.69.868.966,- atau 84,90% dan realisasi fisik 95,83%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.473.301.000,- dan terealisasi sebesar Rp.194.693.997,- atau 41,37% dan realisasi fisik tercapai 75,90%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan hasil kegiatan adalah tersedianya 1 unit kendaraan dinas/operasional, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.16.000.000,- realisasi anggaran Rp.16.000.000,- atau 100% dan realisasi fisik 100%.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebanyak 200 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.36.600.000,- realisasi anggaran Rp.22.000.000,- atau 60,11% dan realisasi fisik 55%.
- Pengadaan Mebeleur, dengan hasil kegiatan adalah tersedianya almari kayu, kursi komputer & meja pimpinan sebanyak 18 unit, dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.218.000,- realisasi anggaran Rp.6.000.000,- atau 18,62%, dan realisasi fisik 22,22%
- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara, dengan hasil kegiatan adalah tersedianya peralatan dan

perlengkapan upacara agama sebanyak 12 jenis, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.210.701.000,- realisasi anggaran Rp.47.265.000,- atau 22,43% dan realisasi fisik 100%.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan hasil kegiatan adalah terpeliharanya 1 unit gedung kantor, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi anggaran Rp.0,- atau 0% dan realisasi fisik 100%.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan hasil kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 13 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.104.385.000,- realisasi anggaran Rp.63.528.097,- atau 60,86% dan realisasi fisik 100%.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur, dengan hasil kegiatan adalah terpenuhinya meja dan kursi yang layak pakai sebanyak 260 unit, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.10.500.000,- realisasi anggaran Rp.0,- atau 0% dan realisasi fisik 50%.
- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah, hasil kegiatan adalah tersedianya data dan inventaris aset barang milik daerah di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng sebanyak 5 dokumen, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.57.897.000,- realisasi anggaran Rp.39.900.900,- atau 68,92% dan realisasi fisik 80%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng, dimana program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dengan hasil kegiatan tersedianya kain khexi sebanyak 59 stel dengan anggaran sebesar Rp.26.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dan fisik 100%.

4) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS,

Program ini melalui 1 kegiatan pemulangan pegawai yang pensiun yang pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan hasil kegiatan tersedianya surat keputusan pensiun sebanyak 500 SK dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.53.739.435,- atau 80,45% dan realisasi fisik mencapai 92% dengan rincian SK pensiun guru 156 orang, SK pensiun pegawai 86 orang, SK pensiun muda/dini 11 orang dan pensiun janda/duda/yatim 37 orang atau total 290 SK pensiun.

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.3.401.275.900,- dan terealisasi sebesar Rp.2.925.647.165,- atau 90,68% dan realisasi fisik 102,13%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas SDM Aparatur melalui bimtek dan pelaksanaan ujian dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.233.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.149.341.050,- atau 89,84% dan realisasi fisik 104% dengan rincian bimtek peningkatan/pemantapan kapasitas aparatur sebanyak 3 orang dan pelaksanaan Ujian Dinas sebanyak 50 orang.
- Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan, dengan hasil yang dicapai adalah tercapainya PNS yang memahami peraturan kepegawaian sebanyak 300 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.090.000,- realisasi anggaran Rp52.090.000,- atau 100% dan realisasi fisik 100%.
- Pembinaan Pegawai Daerah, dengan hasil yang dicapai adalah tersedianya PNS yang lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dengan jumlah peserta 25 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.50.373.400,- realisasi anggaran Rp.50.373.400,- atau 100% dan realisasi fisik 100%.
- Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD, dengan hasil kegiatan tersedianya CPNS yang lulus diklat prajabatan sebanyak 142 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.904.193.500,- dengan realisasi anggaran Rp.806.490.701,- atau 89,19% dan realisasi fisik 100% dengan rincian Golongan II sebanyak 30 orang dan Golongan III sebanyak 112 orang.
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah, dengan hasil kegiatan adalah Tersedianya PNS yang lulus Diklatpim Tk. II, III dan IV sebanyak 52 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp1.897.232.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.600.109.345,- atau 84,34% dan realisasi fisik 100% dengan rincian Diklatpim Tk. II sebanyak 2 orang, Diklatpim Tk. III sebanyak 25 orang dan Diklatpim Tk. IV sebanyak 25 orang.

- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah, dengan hasil kegiatan meningkatnya kualitas SDM aparatur melalui diklat fungsional sebanyak 125 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.331.153.600,- realisasi anggaran Rp.267.269.669,- atau 80,71% dan realisasi fisik 108,80% dengan rincian Bimtek PPK 50 orang, Bimtek ULP 25 orang, Bimtek SPIP 50 orang, Diklat Fungsional 9 orang dan Diklat Pol PP 2 orang.

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini meliputi 1 kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan hasil kegiatan tersusunnya buku/laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sejumlah 25 dokumen yang pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.32.032.900,- dan terealisasi sebesar Rp.18.882.900,- atau 58,95% dan realisasi fisik mencapai 92%.

7) Program Perencanaan Anggaran SKPD.

Program ini meliputi 1 kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan hasil kegiatan terlaksananya penyusunan anggaran SKPD sejumlah 5 dokumen yang pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.77.159.700,- dan terealisasi sebesar Rp.52.023.800,- atau 67,42% dan realisasi fisik 100%.

8) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur.

Program ini pembiayaannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.1.304.908.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.030.275.050,- atau 78,04% dan realisasi fisik tercapai 91,24%.

Realisasi dan hasil kegiatan meliputi :

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS, dengan hasil yang dicapai adalah terlaksananya mutasi/pelantikan pejabat struktural dan pelaksanaan assesment test, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.345.000.000,- realisasi anggaran Rp.310.795.642,- atau 90,09% dan realisasi fisik 100% dengan rincian terlaksananya mutasi/pelantikan pejabat struktural sebanyak 2 kali terdiri dari Eselon II.B 12 orang, Eselon III.A 2 orang Eselon III.B 16 orang, Eselon IV.A 68 orang, Eselon IV.B 18 orang dan

terlaksananya assesment test untuk Pejabat Eselon II sebanyak 2 kali.

- Seleksi Penerimaan CPNS, dengan hasil yang dicapai adalah terlaksananya penyerahan SK PNS dan penyempurnaan PNS sebanyak 423 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.207.685.000,- dengan realisasi anggaran Rp.116.642.560,- atau 56,16% dan realisasi fisik 68,32% dengan rincian SK PNS Tenaga Honorer K II 281 orang dan SK Dokter PTT 8 orang.
- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dengan hasil yang dicapai adalah tersedianya informasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 3.000 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.228.710.000,- dengan realisasi anggaran Rp.191.055.370,- atau 83,54% dan realisasi fisik 93,33%.
- Pemberian Penghargaan bagi PNS Yang Berprestasi, dengan hasil kegiatan adalah terwujudnya pemberian satya lencana karya satya, proses mutasi kenaikan pangkat PNS, karis, karsu, karpeg dan proses penelitian PAK dan Penetapan PAK bagi PNS Kabupaten Buleleng sebanyak 3.000 orang, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.228.790.000,- realisasi anggaran Rp.193.660.976,- atau 84,65% dan realisasi fisik 98,33% dengan rincian SK kenaikan pangkat 1.200 orang, Karis 330 orang, Karsu 400 orang, Karpeg 97, Kenaikan Gaji Berkala 6 orang, PAK 20 orang dan Satya Lencana Karya Satya 897 orang.
- Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin, dengan hasil yang dikegiatan terselesaikannya kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 14 SK, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp.183.914.500,- dengan realisasi anggaran Rp.131.395.442,- atau 71,44% dan realisasi fisik 85,71% dengan rincian SK hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran sebanyak 2 SK, izin cerai PNS 9 SK dan izin beristri lebih dari seorang sebanyak 1 SK.
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, hasil yang dicapai adalah terlaksananya PNS yang menerima bantuan tugas belajar sebanyak 2 orang, dialokasikan dengan anggaran sebanyak Rp.49.948.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.948.800,- atau 100% dan realisasi fisik 100%.

- Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional, dengan hasil kegiatan adalah terbitnya surat keputusan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buleleng sebanyak 300 SK, dengan anggaran sebesar Rp.60.860.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.36.776.260,- atau 60,43% dan realisasi fisik 93% dengan rincian pembebasan dari struktural 1 SK, Penyuluh Perikanan 8 SK, Jabfung Kesehatan 152 SK, Jabfung Kependidikan 97 SK, Auditor 1 SK, Penyuluh PKB 2 SK, Penyuluh Pertanian 6 SK, Penyuluh Perindustrian 1 SK, Penyuluh Perdagangan 1 SK, P2UPD 1 SK, PLKB 1 SK, Instruktur 2 SK, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 3 SK, Pustakawan 1 SK dan Pengawas Ketenaga Kerjaan 1 SK.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan pembangunan pada urusan kepegawaian.

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kepegawaian diantaranya adalah :

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian.
- Kuantitas Sumber Daya Manusia terbatas.
- Kompetensi Sumber Daya Manusia masih rendah.

Solusi yang diambil untuk mengantisipasi permasalahan adalah :

- Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- Mengusulkan tambahan formasi CPNS/PNS sesuai dengan kebutuhan Organisasi/Pemerintah Daerah.

- Melaksanakan Diklat – Diklat teknis bagi aparatur BKD Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkelanjutan.

4) PENGAWASAN (INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang pengawasan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 2 (dua) program pokok dan 6 (enam) kegiatan, yaitu :

a. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan kegiatan Review Laporan Keuangan.

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan Khusus.Kasus)
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Kegiatan Penanganan Evaluasi LP2P
- Kegiatan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Capaian kinerja bidang pengawasan ditunjukkan melalui indikator – indikator berikut :

- Jumlah temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sejumlah 446 temuan dengan 1.222 rekomendasi.
- Jumlah rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2016 adalah 994 rekomendasi. (Posisi PTL per Desember 2016)

Fungsi pengawasan perangkat daerah Kabupaten Buleleng dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng dengan struktur organisasi yang terdiri atas ; Ispektur Kabupaten (Eselon IIb), Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV (eselon IIIa), KSB. Umum, KSB. Keuangan dan KSB. Perencanaan. Jabatan Fungsional yang ada ; Auditor, P2UPD, Arsiparis.

Inspektorat Kabupaten Buleleng di dalam menjalankan fungsi pengawasan didukung oleh personil sejumlah 54 orang yang terdiri atas 44 PNS dan 10 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS meliputi ; Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b); 2, Pembina (IV/a) ; 6, Penata Tk. I (III/d); 4, Penata (III/c) ; 8, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 6, Penata Muda (III/a) ; 4, Pengatur Tk.I (II/d) ; 2, Pengatur (II/c) ; 4, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 1, Pengatur Muda (II/a); 2, Juru Tk.I (I/d) ; 1, Juru Muda Tk.I (I/b); 2, Juru Muda (I/a); 1. Dengan Kualifikasi pendidikan meliputi ; S2 ; 4, SI/D4; 24, D3 ; 2, SMA/SMK/MTs ; 9 , SMP/MI ; 1, SD ; 4. Pejabat structural Eselon IIB ; 1, Eselon IIIa ; 5, Eselon Iva ; 3. Jabatan Fungsional ; JF Auditor ; 10, JF P2UPD ; 3, JF Arsiparis ; 1.

Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.547.000.000 dan terealisasi Rp. 3.526.922.062 atau 99,43 persen. Secara rinci realisasi program dan kegiatan tersaji pada tabel ...

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Inspektorat Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan pengawasan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp 6.455.519.900,00, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 6.395.618.400,00 dan Total Aset yang tidak dipergunakan/kondisi rusak Rp. 59.901.500,00.

Kendala – kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah :

- 1) Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil temuan pada waktu yang telah ditentukan.

- 2) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang – kadang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.
- 3) Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain :

- 1) Koordinasi dengan obrik agar temuan – temuan yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
- 2) Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
- 3) Pemutahiran data hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
- 4) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD bahwa Inpektorat fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
- 5) Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal.

TABEL 62
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Buleleng Tahun 2016

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI			
			Keuangan		Fisik (KELUARAN)	Total Kinerja
			RP.	%	%	%
1	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	a. Penyediaan Jasa Surat menyurat	37,200,000	37,200,000	100.00	100.00	100.00
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	58,724,250	51,618,943	87.90	97.50	94.30
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115,141,635	113,450,505	98.53	100.00	99.71
	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	4,200,000	2,806,100	66.81	72.50	71.36
	e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	495,736,000	495,713,525	100.00	100.00	100.00
	f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8,033,100	8,032,964	100.00	100.00	100.00
	g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	70,000,000	69,938,000	99.91	100.00	99.97
	h. Penyediaan Alat Tulis Kantor	66,788,800	66,787,283	100.00	100.00	100.00
	i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,566,000	6,556,023	99.85	100.00	99.98
	j. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,936,700	3,936,682	100.00	100.00	100.00
	k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	123,707,700	123,132,700	99.54	100.00	99.95

m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,860,000	7,860,000	100.00	100.00	100.00
n. Penyediaan Makanan dan Minuman	22,960,000	22,934,339	99.89	99.96	99.95
o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah	195,376,906	194,960,519	99.79	99.80	99.80
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	366,000,000	366,000,000	100.00	100.00	100.00
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	74,520,000	74,520,000	100.00	100.00	100.00
c. Pengadaan Meubelair	182,505,300	182,504,300	100.00	100.00	100.00
d. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	119,400,000	119,104,000	99.75	100.00	99.95
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00	100.00
f. Pemeliharaan rutin/berkal kendaraan dinas/operasional	111,030,019	104,055,943	93.72	100.00	98.74
g. Pembangunan Sarana Persembahyangan	179,945,000	179,945,000	100.00	100.00	100.00
Peningkatan Disiplin Aparatur					
a. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	8,360,000	8,342,418	99.79	100.00	99.93
Program Perencanaan Anggaran SKPD					
a. Penyusunan Anggaran SKPD	48,075,000	48,062,300	99.97	100.00	100.00
Program Pembinaan dan Fasilitas					
b. Review Laporan Keuangan	28,494,500	28,485,605	99.97	100.00	100.00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan					

	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	653,250,000	653,070,075	99.97	99.99	99.99
	b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00	100.00
	c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	462,763,050	461,485,584	99.72	100.00	99.97
	d. Penanganan/ Evaluasi LP2P	22,375,000	22,368,214	99.97	100.00	99.99
	e. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	26,122,940	26,122,940	100.00	100.00	100.00
	Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
	a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	7,928,100	7,928,100	100.00	100.00	100.00
	30	3,547,000,000	3,526,922,062	99.43	99.91	98.79

Sumber data : Inspektorat Kab. Buleleng.

5) PENDAPATAN DAERAH (DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BULELENG).

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 7 program dan 37 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.
- Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah.
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi kepegawaian.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana upacara
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

f. Program Perencanaan Anggaran SKPD.

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Kegiatan Intensifikasi Pemungutan dan Penerimaan PBB & BPHTB
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan PBB & BPHTB
- Kegiatan Pemeliharaan & Verifikasi data PBB & BPHTB
- Kegiatan Penataan Administrasi dan Evaluasi Penerimaan Daerah
- Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Verifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
- Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistim On Line
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-lain
- Kegiatan Koordinasi dan Penataan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Realisasi pendapatan asli daerah sebagai komponen pendukung sumber pendapatan dalam struktur APBD Kabupaten Buleleng terealisasi sebagai berikut ; pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 134.189.665.292,96, terealisasi sebesar Rp. 92.314.597.186,99, atau mencapai 68,79 persen, retribusi Daerah yang ditargetkan pencapaiannya di Tahun 2016 sebesar Rp. 19.292.474.700,00, terealisasi sebesar Rp. 13.544.667.507,00 atau 70,12 persen. Dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 96,20 persen, dari target sebesar Rp. 15.029.631.799,22, terealisasi Rp. 14.458.434.307,73. Serta lain – lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp. 147.015.011.557,52, terealisasi Rp. 128.897.688.117,62. Sehingga total dari pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp. 315.526.783.349,70, terealisasi sebesar Rp. 249.215.387.119,34 atau 78,98 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada Tahun 2015, terjadi penurunan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dari Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika pada Tahun 2015 dari sektor pajak daerah berhasil terealisasi pendapatan sebesar Rp. 110.724.589.618,49, menurun menjadi Rp. 92.314.597.186,99 pada Tahun 2016. Begitu juga dengan sektor retribusi daerah dimana pada Tahun 2015 tercapai sebesar Rp. 19.881.367.925,00 namun menurun di Tahun 2016 menjadi Rp. 13.544.667.507,00 di Tahun 2016. Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 149.833.592.046,02, hanya tercapai sebesar Rp. 128.897.688.117,62 di Tahun 2016. Hanya pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi peningkatan pendapatan, yang semula di Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 12.657.529.373,69, pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 14.458.434.307,73.

Sementara untuk realisasi pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan hanya terealisasi sebesar 37,11 persen, dari target sebesar Rp. 44.601.137.619,17 terealisasi sebesar Rp. 16.555.059.398,00. Jika mengacu pada perkembangan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, terjadi tren perkembangan yang terus meningkat. Pada Tahun 2012 realisasi dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan tercapai sebesar Rp. 7.656.531.623, kemudian di Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 8.161.885.078, meningkat lagi di Tahun 2014 menjadi Rp. 12.926.065.309, Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.

13.362.909.679,00 dan pada Tahun 2016 terealisasi menjadi Rp. 16.555.059.398,00.

Realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2016 pada umumnya dapat tercapai secara optimal, dari sektor pajak hotel realisasinya mencapai 114,17 persen, dari target sebesar Rp. 20.260.491.894,79, terealisasi Rp. 23.132.209.956,97. Sektor pajak restoran pada Tahun 2016 terealisasi 111,21 persen dari target yang direncanakan. Dengan target sebesar Rp. 9.449.500.000,00 terealisasi Rp. 10.509.397.526,77. Selanjutnya pajak hiburan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.360.355.000,00, terealisasi Rp. 1.438.510.551,39 atau mencapai 105,74 persen. Pajak penerangan jalan juga terealisasi melebihi target yang telah direncanakan. Dari target sebesar Rp. 28.200.000.000,00 berhasil terealisasi Rp. 28.928.112.105,00 atau 102,58. Pajak parkir dengan target sebesar Rp. 150.500.000,00 terealisasi Rp. 168.356.860,00 atau 111,86 persen. Pajak Mineral bukan logam dan batuan, dengan target Rp. 55.000.000,00, terealisasi Rp. 56.595.000,00 atau 102,90 persen. Dan pajak sarang burung walet terealisasi sesuai target yakni dari target awal sebesar Rp. 500.000,00, terealisasi Rp. 500.000,00. Beberapa sektor pajak yang realisasinya masih dibawah target meliputi ; pajak air tanah dengan target Rp. 1.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 897.061.033,00 atau 89,71 persen. Pajak Perolehan Bea Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), dengan target sebesar Rp. 28.204.030.779,00, terealisasi sebesar Rp. 19.496.134.458,00 atau 69,12 persen.

Perangkat Daerah yang menangani optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng. Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng didukung oleh personil sejumlah 187 orang yang terdiri atas 107 PNS dan 80 Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS meliputi ; Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b); 4, Pembina (IV/a) ; 9, Penata Tk. I (III/d); 9, Penata (III/c) ; 21, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 4, Penata Muda (III/a) ; 3, Pengatur Tk.I (II/d) ; 24, Pengatur (II/c) ; 22, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 3, Juru Tk.I (I/d) ; 1, Juru Muda Tk.I (I/b); 3, Juru Muda (I/a); 1. Dengan Kualifikasi pendidikan meliputi ; S2 ; 4, SI/D4; 31, D3 ; 6, SMA/SMK/MTs ; 61 , SMP/MI ; 3, SD ; 2. Pejabat structural Eselon IIb ; 1, Eselon IIIa ; 1, Eselon IIIb ; 3, Eselon Iva ; 15.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.24.309.838.366,46 dan terealisasi sebesar

Rp.19.929.444.311,00 atau 81,98% yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.15.329.838.366,46 dan terealisasi Rp.12.325.681.865 atau 80,40% dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 8.980.000.000 dan realisasi sebesar Rp.7.603.762.446 atau 84,67%.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dispenda Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 14.345.462.372,35, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 14.345.462.372,35.

TABEL 63

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Tahun 2016

No.	PROGRAM	KEGIATAN		REALISASI			
			DANA	KEU.		FISIK	TOT KI
			(Rp.)			(Keluaran)	KEG
				Rp.	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265,000,000.00	193,310,269.00	72.95	100.00	90.98
		2 Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	206,000,000.00	189,581,083.00	92.03	100.00	98.01
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	19,350,000.00	11,149,900.00	57.62	100.00	85.87
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	441,650,000.00	432,459,318.00	97.92	100.00	99.31
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	116,011,500.00	110,533,035.00	95.28	100.00	98.82
		6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,006,600.00	13,991,600.00	99.89	100.00	99.96
		7 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,198,600.00	33,191,160.00	91.69	100.00	97.23
		8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280,986,000.00	268,240,500.00	95.46	100.00	98.87
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,560,000.00	7,560,000.00	100.00	100.00	100.00
		10 Penyediaan Makan dan Minuman	30,150,000.00	23,010,000.00	76.32	100.00	92.11
		11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	215,000,000.00	185,194,969.00	86.14	100.00	95.38
		12 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian				100.00	

				190,073,100.00	188,478,985.00	99.16		99.72
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Mebeleur	216,000,000.00	215,682,500.00	99.85	100.00	99.95
		2	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	84,840,000.00	81,494,800.00	96.06	100.00	99.01
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	217,700,000.00	216,778,000.00	99.58	100.00	99.86
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	206,300,000.00	164,183,861.00	79.59	100.00	93.20
		5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	22,500,000.00	21,978,000.00	97.68	100.00	99.23
		6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000.00	10,121,500.00	67.48	100.00	89.16
		7	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	63,560,000.00	63,000,000.00	99.12	100.00	99.71
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	95,800,000.00	91,064,600.00	95.06	100.00	98.35
		2	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	50,000,000.00	44,000,000.00	88.00	100.00	96.00
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88,074,000.00	65,835,952.00	74.75	100.00	91.58
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	36,118,800.00	35,986,926.00	99.63	100.00	99.88
6	Perencanaan Anggaran SKPD	1	Penyusunan Anggaran SKPD	83,071,400.00	82,686,388.00	99.54	100.00	99.85
7	Peningkatan Pengembangan Pngelolaan Keuangan Daerah	1	Intensifikasi Pemungutan dan Penerimaan PBB dan BPHTB	3,119,264,000.00	2,261,269,964.00	72.49	53.13	57.00
		2	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendataan Obyek dan Subyek PBB & BPHTB	761,524,500.00	720,993,504.00	94.68	96.25	96.79
		3	Pemeliharaan dan Verifikasi Data PBB dan BPHTB	189,565,500.00	160,275,591.00	84.55	96.25	93.91
		4	Penataan Administrasi dan Evaluasi Penerimaan Daerah				89.11	

				317,800,000.00	313,560,475.00	98.67		92.30
		5	Koordinasi, Monitoring dan Verifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	77,000,000.00	75,593,936.00	98.17	100.00	99.39
		6	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah	225,000,000.00	207,366,990.00	92.16	100.00	97.39
		7	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	231,650,000.00	182,501,043.00	78.78	107.90	98.19
		8	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	261,100,000.00	260,867,796.00	99.91	100.00	99.97
		9	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	120,000,000.00	118,745,471.00	98.95	100.00	99.65
		10	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dgn. Sistem On Line	457,905,000.00	343,466,600.00	75.01	103.95	97.70
		11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	123,241,000.00	121,846,249.00	98.87	100.00	99.62
		12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-lain	45,000,000.00	44,008,489.00	97.80	100.00	99.27
		13	Koordinasi dan Pendataan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	50,000,000.00	43,752,992.00	87.51	100.00	95.84
	TOTAL KINERJA KEGIATAN DINAS		37	8,980,000,000.00	7,603,762,446.00	84.67	98.56	95.92

Sumber data : Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng, 2016.

6) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD KABUPATEN BULELENG).

Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 untuk pembiayaan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan berjumlah sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 dan terealisasi sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 atau mencapai 92,66 persen. Belanja Daerah Kabupaten Buleleng terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.369.560.719.162,71 yang terealisasi sebesar Rp. 1.274.346.715.665,05 atau 93,05 persen, meliputi Belanja Pegawai dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.052.739.186.901,40 dan terealisasi Rp. 961.075.607.179,00 atau 91,29, kemudian Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp. 82.499.834.000,00 dan terealisasi Rp. 81.808.234.000,00 atau 99,16 persen, Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan anggaran Rp. 15.347.391.380,00 yang realisasinya mencapai 100 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan partai Politik, yang dialokasikan sebesar Rp. 215.838.828.057,15 dan terealisasi Rp. 214.928.828.057,18 atau 99,58 persen serta Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 2.985.478.824,16 dan terealisasi Rp. 1.186.655.048,90 atau 35,79 persen.

Untuk Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2016 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.005.026.304.268,52 terealisasi Rp. 926.008.941.682,38 atau tercapai 92,14 persen. Yang terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 49.544.098.198,90 dan terealisasi Rp. 56.935.214.561,07 atau 114,92 persen. Selanjutnya Belanja Barang dan jasa yang direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 547.829.973.574,92 dan terealisasi Rp. 523.004.439.475,35 atau 96,47 persen serta Belanja Modal dengan anggaran Rp. 407.652.232.494,70 dan terealisasi Rp. 346.068.287.645,96 atau 84,89 persen.

Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.449.970.563.193,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.606.678.444,00 atau 90,04 persen, yang terdiri dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

yaitu sebesar Rp. 982.698.080.000,00 atau 47,56 persen dari total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dan realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp. 293.888.358.759,00. Sumber pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp. 315.526.783.349,70 terealisasi sebesar Rp. 282.111.205.871,44 atau 89,41 persen. Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah dikarenakan di beberapa pos pendapatan realisasinya kurang maksimal, yakni pada pos hasil pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar 76,19 persen dan retribusi daerah terealisasi 78,41 persen. Sedangkan untuk lain – lain pendapatan daerah yang sah dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 450.660.832.929,19 dan terealisasi Rp. 478.336.225.426,94 atau 106,14 persen.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 11 program dan 55 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Mebeleur
 - Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor/RT.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, adapun kegiatan yang dilaksanakan:
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Program Perencanaan Anggaran SKPD**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan Anggaran SKPD
- f. Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi Serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Daerah
 - Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD
 - Pembinaan dan Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
 - Penyusunan Pergeseran APBD
 - Pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD
- h. Program Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah**, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
- Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbendaharaan

- Pembinaan Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Menyiapkan Anggaran Kas dan Menetapkan SPD
- Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Permintaan Pendapatan Dana Transfer dan Penyimpanan/Penempatan Uang Daerah
- Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan APBD, Mengusahakan dan Mengatur Dana Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan APBD
- Pelaksanaan Pembayaran Berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran Atas Beban Rekening Kas UMum Daerah dengan Menerbitkan SP2D
- Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUD, Penyimpanan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah

i. Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan /atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk
- Penyiapan Pelaksanaan dan Pemberian Pinjaman, Melakukan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Inventasi Daerah
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

j. Program Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan Kebijakan Analisa Kebutuhan Aset/Barang Milik Daerah
- Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset/Barang Milik Daerah
- Penyusunan dan Penghimpunan Informasi Perkembangan Harga Serta Penilaian Standarisasi Aset/Barang Milik Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Untuk Pengamanan Barang

k. Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset, adapun kegiatan yang di laksanakan meliputi :

- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pelaksanaan Penatausahaan/Inventarisasi Barang/Aset Daerah
- Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sesuai amanat Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, APBD induk Kabupaten Buleleng TA. 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dan Penjabarannya melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016. Dengan rancangan pendapatan sebesar Rp.2.082.621.121.269,88, Belanja sebesar Rp.2.156.911.480.269,88 dengan komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 1.281.299.177.261,07 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.875.612.303.008,81 serta Pembiayaan sebesar Rp.74.290.359.000,00. Dalam perjalanan dan setelah ada audit dari BPK, terjadi pergeseran-pergeseran dan Perubahan APBD Tahun 2016 ditetapkan pada bulan September 2016 dengan rincian pendapatan terjadi peningkatan sebesar Rp. 154.680.959.246,47 menjadi Rp.2.237.302.080.516,35 yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.383.201.874.385,53 dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.012.529.050.090,16 Total Pendapatan pada Perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp. 2.237.302.080.516,35. Perubahan terbesar terjadi pada sumber dana DAK sebesar Rp.83.724.206.320,00 yang diperuntukkan untuk infrastruktur dan Kesehatan khusus pembangunan rumah sakit Pratama di Giri Emas.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 menyesuaikan dengan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru berdasarkan PP. No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dikerjakan secara paralel dan maraton dengan penyusunan KUA dan PPAS. Penyusunan APBD TA. 2017 yang mengacu

dengan permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. APBD Induk Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 yang tetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. Tahun 2017 merupakan tahun yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tahun trasisional masa kepemimpinan kepala daerah, sehingga Tahun 2017 menjadi momentum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Adanya beberapa issue strategis ternyata berpengaruh pada penyusunan APBD TA. 2017, yang menuntut adanya pembagian yang proporsional terhadap anggaran untuk memenuhi prioritas setiap urusan pemerintahan.

Secara umum struktur APBD Kabupaten Buleleng TA. 2017 dirancang pendapatan daerah sebesar Rp. 2.145.863.931.423,83 dan belanja daerah sebesar Rp. 2.134.263.931.423,83, sehingga terjadi surplus sebesar Rp. 11.600.000.000,00. Sumber pendapatan daerah dalam APBD TA. 2017 bersumber dari Pendapatan Asli daerah yang dirancang sebesar Rp. 340.279.998.927 dimana terjadi peningkatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar 7,85 persen. Dana Perimbangan dirancang sebesar Rp. 1.338.584.967,00 dimana terjadi penurunan sebesar 7,64 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Kemudian lain – lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun anggaran 2017 dirancang sebesar Rp. 466.998.965.496,54, juga terjadi penurunan sebesar 1,14 persen dibandingkan dengan TA. 2016. Sedangkan belanja daerah yang dirancang sebesar Rp. 2.134.263.931.423,83, terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.187.853.944.754,83 dan belanja langsung yang dirancang sebesar Rp. 946.409.986.669,00.

Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang menangani pengelolaan administrasi keuangan daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng yang didukung dengan personil sebagaimana tersaji pada tabel 64.

Untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.26.557.376.464 dan terealisasi sebesar Rp.24.615.099.406 atau 92,69 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.5.416.747.000 dan terealisasi Rp.5.413.096.126 atau 99,93 persen dan belanja langsung sebesar Rp.21.140.629.464

dan realisasi anggaran sebesar Rp.19.202.003.280 atau mencapai 90,83 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.7.536.260.000 dan terealisasi Rp.7.128.135.000, atau 94,58 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.11.998.952.127 dan terealisasi Rp.10.566.912.878 atau mencapai 88,07 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.1.605.417.337 dan terealisasi Rp.1.505.955.402 atau 93,57 persen. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan tersaji pada tabel 65.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar Penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama Eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Lingkungan hidup: cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 274.096.682.783,14, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 273.882.333.565,76 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 214.349.217,38.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Kemudian tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas, maka untuk itu kebijakan umum belanja daerah diupayakan

untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan infrastruktur serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) masih dihadapkan pada kendala-kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi dan akuntansi, dimana regulasi sudah berbasis akrual. Selanjutnya tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal serta kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintah daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara maksimal.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu mempertahankan perdikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan diraihnya Anugerah Dana Raksa di Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan RI. Kemudian melakukan percepatan penerpan/implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), melalui optimalisasi pemanfaatan infrasturktur jaringan online SIPKD, melakukan pembinaan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terutama dengan penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Go- Akrual dan mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi Rilis R6.3 sebagai wujud penyesuaian regulasi dan aturan pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

Tabel 64

Kondisi Kepegawaian Pada BPKAD Kabupaten Buleleng Tahun 2016

NO	NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN		Pddk	DIKLAT PENJENJANGAN	ESELON
				GOL/ RUANG	TMT	NAMA (JFT,JFU, STRUKTURAL)	TMT			
1	B I M A N T A R A,SE	13 Maret 1959	19590313 198503 1 016	IV/a	01 April 2013	Kepala BPKAD	07 Januari 2015	S1	SPADA, ADUMLA, PIM III	II/b
2	Desak Putu Rupadi,SE	31 Desember 1961	19611231 200312 2 007	IV/a	1 Okt 2009	Sekretaris BPKAD	07 Januari 2015	S1	DIKLAT ADUM DAN PIM III	III/a
3	Putu Parwata,SE	25 Juni 1961	19610625 199303 1 006	IV/a	01 April 2013	Kabid Analisa Kebutuhan Aset	07 Januari 2015	S1	BELUM	III/b
4	Ir. Wayan Pasek Swastika, M.Si	03 Maret 1960	19600303 198503 1 016	IV/b	01 April 2006	Kabid Anggaran	01 April 2016	S2	ADUM DAN SPAMA	III/b
5	I Nyoman Mawan,SE	10 September 1969	19690910 20003 1 007	III/d	01 April 2012	Kabid Perbendaharaan	07 Januari 2015	S1	DIKLAT PIM III	III/b
6	I Gede Sasnita Ariawan, SH	09 April 1967	19670409 1988 09 1 001	III/d	01 April 2016	Kabid Inventarisasi & Pemanfaatan Aset	01 April 2016	S1	DIKLAT PIM III	III/b
7	Ni Made Susi Adnyani,SE,Ak	18 Mei 1984	19840518 200501 2 003	III/c	01 April 2013	Kasubid Pelaporan	07 Januari 2015	S1	DIKLAT PIM IV	IV/a
8	I Dewa Putu Banjar,SE.	27 April 1976	19760427 200003 1 001	III/c	01 April 2015	Ksbid Penyusunan Anggaran	07 Januari 2015	S1	DIKLAT PIM IV	IV/a
9	Nyoman Sujana	12 April 1965	19650412 199703 1 008	III/c	01 April 2015	Ksbid Belanja Daerah	07 Januari 2015	D3	BELUM	IV/a
10	Luh Sri Mendriadi, S,Sos.	28 Mei 1973	19730528 200801 2 013	III/c	01 April 2012	Ksbid Manajemen Kas	07 Januari 2015	S1	BELUM	IV/a
11	Nyoman Merta,S,Sos	31 Desember 1967	19671231 198903 1 118	III/c	1 Oktober 2012	Ksb Umum	07 Januari 2015	S1	DIKLAT PIM IV	IV/a

12	Ketut Mariningsih,SH	24 Februari 1973	19730224 200901 2 001	III/c	01 April 2013	Ksb Keuangan	07 Januari 2015	S1	BELUM	IV/a
13	Made Kunayanti.SE.	22 September 1980	19800922 199903 2 001	III/c	1 Okt 2013	Ksbid Akutansi	07 Januari 2015	S1	BELUM	IV/a
14	Yulin Vidyasari,S.H	19 April 1981	19810419 200902 2 001	III/c	01 April 2013	Ksbid Analisa Kebijakan Keuangan	07 Januari 2015	S1	BELUM	IV/a
15	Putu Suarsini,SE.	24 Maret 1980	19800324 199903 2 004	III/c	01 April 2013	Ksbid Inventarisasi & Mutasi Aset	07 Januari 2015	S1	BELUM	IV/a
16	Putu Artawan.SE . MAP	18 Agustus 1978	19780818 200312 1 009	III/c	01 April 2013	Ksbid Penilaian Aset & Standarisasi Aset	07 Januari 2015	S2	BELUM	IV/a
17	I Gede Artana,SH	10 Februari 1967	19671218 201001 1001	III/c	01 April 2014	Ksbid Pelaporan	07 Januari 2015	S1	BELUM	IV/a
18	Made Pasda Gunawan,S.Sos	18 Desember 1987	19870210 201001 1 016	III/b	01 April 2014	Ksbid Pengamanan Aset	07 Januari 2015	S1	BELUM	IV/a
19	I Gede Suartama,SE.	31 Desember 1964	19641231 199001 1 019	III/b	1 Okt 2015	Ksb Perencanaan	07 Januari 2015	S1	BELUM	IV/a
20	Suprihatin,SKM	09 September 1975	19750909 199903 2005	IV/a	1 Okt 2013	Fungsional P2BJ	04 Januari 2016	S1	BELUM	
21	Putu Sandra Paramita Dewi,ST	06 April 1985	19850406 200902 2 001	III/b	01 April 2013	Fungsional P2BJ	03 Maret 2015	S1	BELUM	
22	Ni Nyoman Sulastri, SE	29 September 1979	19790929 200003 2 001	III/a	01 Oktober 2014	Fungsional P2BJ	20 Mei 2015	S1	BELUM	
23	Ida Bagus Kade Wibawa	12 Desember 1962	19621212 198503 1 029	III/b	1 Okt 2009	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
24	I Gusti Ayu Wijayanti	24 Juli 1969	19690724 199202 2 001	III/b	01 April 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
25	I Gede Supartana	12 Agustus 1971	19710812 199303 1 008	III/b	01 April 2013	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
26	NI Nyoman Sukreni	01 Juni 1965	19650601 199303 2 012	III/b	01 April 2013	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
27	I Nyoman Sudibia.SE	09 September 1980	19800909 200003 1 003	III/b	1 Okt 2014	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
28	I Made Gede Librantara, SE	18 Oktober 1982	19821018 201101 1 003	III/b	01 April 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	

29	Made Prisma Dewi Sumantri, SE	20 Oktober 1982	19821020 201101 2 088	III/b	01 April 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
30	Ketut Mahendra,SE	09 September 1975	19750903 200312 1 008	III/b	01 April 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
31	Putu Ari Wiryantini, SH	14 Mei 1985	19850514 201001 2 032	III/b	01 April 2014	Fungsional Umum		S1	BELUM	
32	Made Cahayani,SE.	10 Januari 1975	19750110 200003 2 002	III/b	1 Okt 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
33	Wayan Arif Sapta Riyadi,SH	11 September 1982	19820911 200501 1 006	III/b	1 Okt 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
34	Made Nami Darmika	21 Nopember 1975	19751121 199703 2 002	III/a	01 April 2013	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
35	I Gusti Ayu Suharyati,SE	25 Februari 1980	19800225 200902 2 001	III/a	01 April 2014	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
36	I Nyoman Artawan,SE	21 Juli 1986	19860721 200501 1 001	III/a	1 Okt 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
37	Ni Made Indry Widiyanti, SE	19 September 1985	19850919 201001 2 017	III/a	1 Okt 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
38	Gede Darmawan	16 Desember 1976	19761216 200501 1 013	III/a	01 April 2013	Fungsional Umum	15 April 2015	S1	BELUM	
39	Pande Made Yuliantari,A.Md	08 April 1986	19861019 200902 2 002	II/d	01 April 2013	Fungsional Umum	15 April 2015	D3	BELUM	
40	I Komang Parmita Ari Putra,A.Md	19 Oktober 1982	19820408 200902 1 001	II/d	01 April 2013	Fungsional Umum	15 April 2015	D3	BELUM	
41	Nyoman Muliawan,A.Md	27 Maret 1978	19780327 200501 1 007	II/d	1 Okt 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	D3	BELUM	
42	Ketut Suarjaya, A.Md	14 Februari 1986	19860214 201101 1 006	II/d	01 April 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	D3	BELUM	
43	Nyoman Arta Mahendra	30 Mei 1978	19780530 200501 1 008	II/c	1 Okt 2013	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
44	Nyoman Sukaarta Putra	24 Oktober 1966	19661024 200604 1 007	II/c	01 April 2014	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
45	Ida Ayu Padmawati	18 April 1977	19770418 200701 2 014	II/c	01 April 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	

46	I Made Gargita	17 Juli 1982	19820717 200501 1 003	II/c	1 Okt 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
47	I Nengah Sukenasa	06 Maret 1970	19700306 200801 1 019	II/c	01 April 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
48	I Putu Bob Cahyadi Suara	27 Mei 1976	19760527 200801 1 009	II/c	01 April 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
49	Nyoman Prihantini	06 Februari 1976	19760206 200801 2 009	II/c	01 April 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
50	Nyoman Suartini	06 Juli 1967	19670706 200801 2 024	II/c	01 April 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
51	Ketut Suartana	16 Juli 1975	19750716 200801 1 015	II/c	01 April 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
52	Putu Eddy Supartha	02 Nopember 1969	19691102 201001 1 002	II/b	01 April 2014	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
53	Made Suarna	25 Januari 1985	19850125 201001 1 017	II/b	01 April 2014	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
54	Nyoman Darmita	24 Agustus 1980	19800824 201001 1 014	II/b	01 April 2014	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
55	Dewa Made Putra Subawa	07 Januari 1981	19810107 201001 1 010	II/b	01 April 2014	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
56	Gede Verdian	17 Nopember 1990	19901117 201001 1 002	II/b	01 April 2014	Fungsional Umum	15 April 2015	SMK	BELUM	
57	Gede Darma Diasa	29 September 1980	19800929 201101 1 006	II/b	01 April 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
58	Sang Putu Arinata	26 Desember 1986	19861226 201101 1 008	II/b	01 April 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
59	Putu Satiasa	16 Juli 1977	19770716 201001 1 010	II/b	01 April 2015	Fungsional Umum	15 April 2015	SMA	BELUM	
60	Made Mudara	31 Desember 1965	19651231 200701 1 193	I/d	1 Okt2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SD	BELUM	
61	Gede Sumenata	09 Desember 1976	19761209 200701 1 008	I/d	1 Okt 2012	Fungsional Umum	15 April 2015	SD	BELUM	
62	Made Suta Suarjana	25 Nopember 1966	19661125 200901 1 002	I/b	01 April 2013	Fungsional Umum	15 April 2015	SD	BELUM	

Tabel 65

realisasi anggaran program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Buleleng Tahun 2016

PROGRAM / KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI			
		KEU.		FISIK	TOT KI KEG
		Rp.	%	%	%
3	4	5	6	7	8
Pelayanan Administrasi Perkantoran					
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,500,000	23,064,912	83.87	100.00	94.62
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	15,000,000	9,638,958	64.26	100.00	88.09
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,000,000	184,249,420	93.06	100.00	97.69
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	10,000,000	6,276,300	62.76	100.00	87.59
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,187,267,000	1,172,678,965	98.77	98.77	98.77
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	135,880,950	120,365,080	88.58	88.59	88.58
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27,114,900	27,029,750	99.69	99.71	99.70
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	58,500,000	53,877,164	92.10	100.00	97.37

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	769,000,000	723,931,722	94.14	93.10	93.45
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	8,500,000	8,370,000	98.47	100.00	99.49
- Penyediaan makanan dan minuman	206,995,500	166,744,360	80.55	80.56	80.56
- Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/dalam daerah	273,296,000	224,034,260	81.97	83.33	82.88
- Penyediaan jasa Administrasi Kepegawaian	247,674,000	241,214,100	97.39	100.00	99.13
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
- Pembangunan Gedung Kantor	187,000,000	183,100,000	97.91	100.00	99.30
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	232,000,000	219,397,000	94.57	100.00	98.19
- Pengadaan mebeluer	27,500,000	18,766,000	68.24	68.00	68.08
- Penyelenggaraan dan pengadaan sarana /prasarana upacara	134,600,000	39,829,570	29.59	80.00	63.20
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	348,090,052	324,771,786	93.30	100.00	97.77
- Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	136,285,467	117,097,100	85.92	100.00	95.31
- Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor / RT	83,499,633	77,772,800	93.14	100.00	97.71
Peningkatan Disiplin Aparatur					

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27,300,000	25,902,250	94.88	100.00	98.29
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,173,300	23,492,410	89.76	100.00	96.59
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	12,695,500	12,223,074	96.28	100.00	98.76
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	12,695,500	12,160,834	95.79	100.00	98.60
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	19,214,000	19,031,600	99.05	100.00	99.68
Program Perencanaan Anggaran SKPD					
- Penyusunan Anggaran SKPD	105,575,000	51,585,114	48.86	48.70	48.75
Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan					
- Penyelenggaraan dan Pengembangan Aplikasi serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1,311,970,700	1,301,824,140	99.23	100.00	99.74
Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah					
- Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Daerah	166,493,854	166,275,454	99.87	100.00	99.96
- Penyusunan Kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD	445,209,690	439,753,930	98.77	100.00	99.59
- Pembinaan dan Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	328,790,456		97.67	100.00	99.22

		321,113,662			
- Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	3,514,658,600	3,179,471,410	90.46	100.00	96.82
- Penyusunan Pergeseran APBD	531,349,900	469,963,745	88.45	88.33	88.37
- Pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	367,744,700	267,025,875	72.61	75.00	74.20
Program Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah					
- Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbendaharaan	122,569,800	121,537,500	99.16	100.00	99.72
- Pembinaan Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Menyiapkan Anggaran kas dan Menetapkan SPD	123,957,545	110,802,762	89.39	89.29	89.33
- Pelaksanaan Pengelolaan Gaji, Pemungutan Pajak Daerah, Permintaan Pendapatan Dana transfer dan Penyimpanan/ Penetapan Uang Daerah	1,277,319,427	1,217,770,592	95.34	95.33	95.33
- Pelaksanaan pengendalian Pelaksanaan APBD, Mengusahakan dan mengatur Dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD	141,600,000	134,808,558	95.20	95.28	95.25
- Pelaksanaan Pembayaran Berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran Atas Beban Rekening Kas Umum Daerah Dengan Menerbitkan SP2D	1,192,442,275	1,162,608,940	97.50	96.89	97.09
- Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUD, Penyimpanan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah	377,232,600	366,686,500	97.20	100.00	99.07
Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					

- Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah	291,000,000	262,357,294	90.16	100.00	96.72
- Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	524,754,000	464,037,686	88.43	100.00	96.14
- Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank/Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk	98,940,000	87,811,528	88.75	100.00	96.25
- Penyiapan Pelaksanaan dan Pemberian Pinjaman, Melakukan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan/Menatausahakan Investasi Daerah	-	-	-	-	-
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,081,205,000	941,049,278	87.04	100.00	95.68
- Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	168,592,840	151,938,730	90.12	100.00	96.71
Program Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset					
- Penyusunan Kebijakan Analisa Kebutuhan Aset/barang Milik Daerah	32,367,550	32,337,400	99.91	100.00	99.97
- Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset/Barang Milik Daerah	242,958,050	219,938,400	90.53	91.67	91.29
- Penyusunan dan Penghimpunan Informasi perkembangan Harga serta Penilaian Standarisasi Aset/Barang Milik Daerah	445,754,400	350,814,350	78.70	100.00	92.90
- Pelaksanaan koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	1,583,823,000	1,459,854,200	92.17	93.33	92.95
- Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Untuk Pengamanan	718,234,200	633,991,430	88.27	88.00	88.09

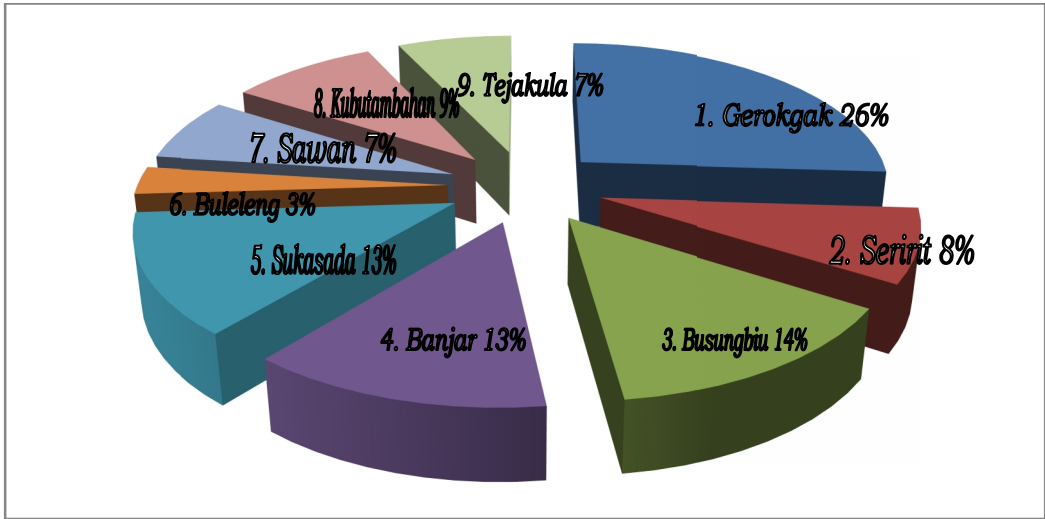
Barang					
Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset					
- Penyusunan Laporan Milik Daerah	196,686,300	171,854,514	87.37	100.00	95.79
- Pelaksanaan Penatausahaan/Inventarisasi Barang/Aset Daerah	302,604,200	287,215,216	94.91	100.00	73.73
- Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	339,673,945	241,455,380	71.08	76.92	74.98
- Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	396,894,155	321,064,126	80.89	80.00	80.30
- Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	289,945,475	198,545,020	68.48	100.00	89.49
54	21,132,129,464	19,170,512,149	90.72	94.64	91.90

Sumber data : BPKAD Kab. Buleleng.

7) KECAMATAN.

Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 kecamatan yakni : Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula.

Gambar 10
Persentase luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten
Tahun 2016



Sumber : Tinjauan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buleleng, 2016

Dari tabel diatas apabila dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Kec. Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yakni 26,11% dari luas kabupaten, diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, Kecamatan Sukasada & Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%, kemudian Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng, yaitu hanya 3,44%.

Sampai tahun 2016 Kabupaten Buleleng terbagi dalam 9 kecamatan dengan 129 desa definitif, 19 kelurahan. Pembagian wilayah tersebut diatas adalah Kecamatan Gerokgak (14 desa), Kecamatan Seririt (20 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Busungbiu (15 desa), Kecamatan Banjar (17 desa), Kecamatan Sukasada (14 desa & 1 kelurahan), Kecamatan Buleleng (12 desa dan 17 kelurahan), Kecamatan Sawan (14 desa), Kecamatan Kubutambahan (13 desa), dan Kecamatan Tejakula (10 desa).

Pelaksanaan pemenuhan dan penyelenggaraan pelayanan publik cakupan layanannya masih dirasakan terbatas dan belum optimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih banyaknya

kewenangan yang ditangani, jumlah penduduk yang besar, cakupan luas wilayah, topografi wilayah serta keterbatasan kapasitas pelayanan yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah. Guna mengikis keterbatasan pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat maka melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pemerintah mencoba menjembatani dan mengikis alur pelayanan yang dirasakan terlalu panjang dibuat menjadi sederhana melalui pemusatan cakupan pelayanan melalui tataran pemerintahan kecamatan. Implementasinya adalah adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersempit rentang kendali Bupati kepada Perbekel/ Lurah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Sistem Administrasi Terpadu Kecamatan adalah sebagai implementasi upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta lebih mengembangkan potensi wilayah sehingga dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Secara lebih jelas hal ini diatur pada Pasal 25 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan ; Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat dan Pasal 226 ayat (1) yang menyatakan ; selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Upaya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Buleleng telah dimulai sejak Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 telah ditetapkan 3 kecamatan yakni: Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Tejakula sebagai penyelenggara PATEN di Kabupaten Buleleng karena berdasarkan pertimbangan telah memenuhi 3 syarat penerapan PATEN yakni : syarat substantif, administratif dan teknis. Sebagai tindak lanjut dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Buleleng, pada

tanggal 6 Desember 2016 telah dilaksanakan penetapan 6 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai kecamatan penyelenggara PATEN yang ditandai dengan penyerahan SK Bupati Buleleng Nomor 130/817/HK/2016 tertanggal 2 Desember 2016 oleh Plt. Bupati Buleleng kepada Para Camat.

Dalam Tahun Anggaran 2016, 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan melaksanakan 95 Program dan 396 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 26,665,305,567.70 dan terealisasi sebesar Rp. 25,737,947,397.00 atau 96,52 persen dan capaian fisik rata – rata 100 persen. Secara rinci realisasi dan alokasi anggaran untuk masing – masing kecamatan di Kabupaten Buleleng terangkum dalam tabel 66.

Pencapaian kinerja 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng didukung oleh personil sejumlah 502 PNS dengan pangkat dan golongan meliputi ; Pembina Tk.I (IV/b); 4, Pembina (IV/a) ; 16, Penata Tk. I (III/d); 71, Penata (III/c) ; 85, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 49, Penata Muda (III/a) ; 14, Pengatur Tk.I (II/d) ; 14, Pengatur (II/c) ; 129, Pengatur Muda Tk.I (II/b) ; 86, Pengatur Muda (IIa); 28, Juru Tk.I (I/d) ; 2, Juru (Ic) ; 3, Juru Muda Tk.I (I/b); 1. Pejabat structural Eselon IIIa ; 9, Eselon IIIb ; 9, Eselon Iva ; 64, Eselon IVb ; 122.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Sarana prasarana yang terdapat di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 pada umumnya lebih dikarenakan karena keterbatasan anggaran dan kualitas dan jumlah SDM Kecamatan yang belum memadai sehingga dalam Tahun anggaran berikutnya akan diusulkan penambahan baik untuk anggaran maupun personil.

Tabel 66
alokasi dan realisasi anggaran kecamatan se- Kabupaten Buleleng Tahun 2016

NO.	PROGRAM	URAIAN NAMA KEGIATAN	DANA (Rp.)	REALISASI			
				KEUANGAN		FISIK	TOT KI
				Rp.	%	(Keluaran)	KEG
						%	%
1	2	3	4	5	6	7	8
KECAMATAN GEROKGAK							
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa surat-menyurat	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
		2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	101,500,000.00	86,169,980.00	84.90	96.98
		3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	116,400,000.00	114,795,152.00	98.62	99.54
		4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/	2,020,000.00	1,606,600.00	79.53	93.18
			Operasional				
		5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	206,670,000.00	205,654,000.00	99.51	99.84
		6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	71,062,800.00	71,062,800.00	100.00	100.00
		7	Penyediaan alat tulis kantor	23,032,800.00	22,972,800.00	99.74	99.91
		8	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	22,998,500.00	22,249,800.00	96.74	99.35
		9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4,860,300.00	4,860,300.00	100.00	100.00
		10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14,780,000.00	14,780,000.00	100.00	100.00
		11	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12,060,000.00	12,060,000.00	100.00	100.00

		12	Penyediaan makanan dan minuman	25,830,000.00	24,385,000.00	94.41	100.00	98.14
		13	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar / dalam daerah	62,159,100.00	61,983,698.00	99.72	100.00	99.91
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		14	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	559,123,000.00	551,425,000.00	98.62	100.00	99.54
		15	Penyelenggaraan dan pengadaan saranaprasarana upacara	89,172,000.00	88,897,000.00	99.69	100.00	99.90
		16	Penyelenggaraan upacara /hari besar nasional	96,487,500.00	96,117,500.00	99.62	100.00	99.87
		17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,679,600.00	15,677,000.00	99.98	100.00	99.97
		18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48,399,100.00	43,069,376.00	88.99	100.00	96.33
		19	Pemeliharaan rutin berklaa/ perlengkapan gedung kamtor	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00	100.00
		20	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT	5,400,000.00	3,655,000.00	67.69	91.67	83.67
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	22,050,000.00	22,050,000.00	100.00	100.00	100.00
		22	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00	100.00	100.00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem	23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	7,474,000.00	6,995,500.00	93.60	100.00	97.87
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	450,000.00	350,000.00	77.78	100.00	92.59
		25	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2,900,000.00	1,700,000.00	58.62	100.00	86.21

5	Program Perencanaan Anggaran SKPD	26	Penyusunan anggaran SKPD	5,710,000.00	5,420,000.00	94.92	100.00	98.98
6	Program koordinasi penyelenggaraan	27	Pembinaan Tugas-tugas kepala Desa/perbekel/Lurah	75,300,000.00	75,300,000.00	100.00	100.00	100.00
	pemerintah Desa/Kelurahan	28	Bimbingan teknis penyusunan peraturan Desa	5,775,000.00	5,760,000.00	99.74	100.00	99.91
		29	Bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala	4,050,000.00	3,916,000.00	96.69	100.00	98.90
			desa/perbekel					
		30	Bimbingan teknis pelaksanaan administrasi pemerintah desa/kelurahan	4,225,000.00	4,223,500.00	99.96	100.00	99.99
7	Program koordinasi penyelenggaraan							
	peningkatan pembangunan Desa/kelurahan	31	Pembinaan lomba Desa/kelurahan Terpadu	46,350,000.00	43,950,000.00	94.82	100.00	98.27
		32	Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa/kelurahan dan kecamatan	26,008,000.00	26,008,000.00	100.00	100.00	100.00
		33	Pendataan dan Evaluasi swadaya murni masy dan proyek msk ds / kel	3,085,000.00	2,985,000.00	96.76	100.00	98.92
		34	Penyusunan profil Desa/Kelurahan dan kecamatan	6,055,000.00	5,255,000.00	86.79	100.00	95.60
		35	Pembinaan Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan	3,825,000.00	3,565,000.00	93.20	100.00	97.73
8	Program koordinasi penyelenggaraan	36	Pengamanan dan pengawasan peraturan Daerah	88,615,000.00	88,010,000.00	99.32	100.00	99.86
	Penigkatan Linmas Trantib	37	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	20,250,000.00	19,750,000.00	97.53	100.00	99.18
		38	Pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	31,580,000.00	31,355,000.00	99.29	100.00	99.76
		39	Koordinasi penanggulangan bencana alam	5,110,000.00	5,010,000.00	98.04	100.00	99.35

9	Program koordinasi penyelenggaraan	40	Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan Budaya	307,679,000.00	307,554,000.00	99.96	100.00	99.99
	peningkatan kesejahteraan sosial	41	Pembinaan pemuda dan olah raga dan lembaga sosial kemasyarakatan	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00	100.00
		42	Koordinasi pelaksanaan lomba kesejahteraan sosial	40,650,300.00	39,740,300.00	97.76	100.00	99.25
10	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	43	Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	54,052,000.00	54,002,000.00	99.91	100.00	99.98
	Pelayanan Umum	44	Pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan	27,800,000.00	27,800,000.00	100.00	100.00	100.00
		45	Pembinaan inventarisasi kekayaan pemerintah desa	4,900,000.00	4,850,000.00	98.98	100.00	99.66
		45		2,340,528,000.00	2,295,970,306.00	98.10	99.63	98.40
KECAMATAN BUSUNGBIU								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75,750,000.00	75,750,000.00	100.00	100.00	100.00
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,000,000.00	36,740,260.00	99.30	100.00	99.77
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,000,000.00	69,586,100.00	98.01	100.00	99.34
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	190,038,000.00	189,913,000.00	99.93	100.00	99.98
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	62,430,000.00	62,430,000.00	100.00	100.00	100.00
		6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6,000,000.00	5,890,000.00	98.17	100.00	99.39
		7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21,433,000.00	21,433,000.00	100.00	100.00	100.00

		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,382,000.00	7,170,000.00	97.13	100.00	99.04
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	5,890,000.00	5,890,000.00	100.00	100.00	100.00
		10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	41,000,000.00	41,000,000.00	100.00	100.00	100.00
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	100.00	10.00
		12	Penyediaan Makanan dan Minuman	29,100,000.00	29,100,000.00	100.00	100.00	100.00
		13	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah/ Dalam Daerah	55,150,000.00	55,128,900.00	99.96	100.00	99.99
2	Program peningkatan sarana dan	1	Pengadaan Mebeleur	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	100.00	100.00
	Prasarana Aparatur	2	Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana/ Prasarana Upacara	101,570,000.00	94,512,000.00	93.05	100.00	97.68
		3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	133,800,000.00	133,792,000.00	99.99	100.00	100.00
		4	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	108,000,000.00	99,619,491.00	92.24	100.00	97.41
		5	Pendataan dan inventarisasi barang milik Daerah	12,800,000.00	12,750,000.00	99.61	100.00	99.87
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	12,250,000.00	12,250,000.00	100.00	100.00	100.00
		2	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	100.00	100.00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	5,310,000.00	5,235,000.00	98.59	100.00	99.53
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							

5	Program Perencanaan Anggaran SKPD	1	Penyusunan anggaran SKPD	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00	100.00	100.00
6	Program Informasi Pembangunan Daerah	1	Penyelenggaraan pameran /pawai pembangunan	86,050,000.00	86,000,000.00	99.94	100.00	99.98
7	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/ Perbekel/Lurah	4,850,000.00	4,800,000.00	98.97	100.00	99.66
	Pemerintah Desa/Kelurahan	2	Bimbingan teknis Penyusunan Peraturan Desa	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00	100.00	100.00
		3	Bimbingan teknis penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	5,654,000.00	5,629,000.00	99.56	100.00	99.85
		4	Bimbingan teknis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	7,407,000.00	7,357,000.00	99.32	100.00	99.77
8	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan Lomba Desa/ Kelurahan Terpadu	44,625,000.00	44,475,000.00	99.66	100.00	99.89
	Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan & Kecamatan	25,710,000.00	25,710,000.00	100.00	100.00	100.00
		3	Pendataan & Evaluasi Swadaya Murni & Proyek Masuk Desa/ Kelurahan	3,567,000.00	3,567,000.00	100.00	100.00	100.00
		4	Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	4,408,000.00	4,408,000.00	100.00	100.00	100.00
		5	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00	100.00	100.00
9	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	33,900,000.00	33,875,000.00	99.93	100.00	99.98
	Peningkatan Linmas Trantib							
		2	Pembinaan Linmas Hansip Desa/Kelurahan	26,737,667.84	26,155,000.00	97.82	100.00	99.27
		3	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah			99.84	100.00	99.95

				31,800,000.00	31,750,000.00			
		4	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	5,850,000.00	5,825,000.00	99.57	100.00	99.86
10	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	761,776,000.00	759,455,950.00	99.70	100.00	99.90
	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	2	Pembinaan Pemuda dan olah raga dan lembaga sosial kemasyarakatan	4,150,000.00	4,050,000.00	97.59	100.00	99.20
		3	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	5,975,000.00	5,950,000.00	99.58	100.00	99.86
		4	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Nasional	76,800,000.00	76,800,000.00	100.00	100.00	100.00
11	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	10,750,000.00	10,450,000.00	97.21	100.00	99.07
	Peningkatan Pelayanan Umum	2	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	98,800,000.00	98,750,000.00	99.95	100.00	99.98
		3	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintahan Desa	5,025,000.00	4,900,000.00	97.51	100.00	99.17
	Total Nilai Kinerja Dinas	43		2,318,037,667.84	2,296,396,701.00	99.07	100.00	97.61
KECAMATAN SERIRIT								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	2,890,500.00	96.35	100.00	98.78
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dsan Listrik	52,700,000.00	46,670,298.00	88.56	100.00	96.19
		3	penyediaan jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor	69,360,000.00	66,528,250.00	95.92	100.00	98.64
		4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	2,500,000.00	1,702,000.00	68.08	100.00	89.36
		5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	651,815,000.00	651,778,000.00	99.99	100.00	100.00

		6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,404,700.00	7,403,654.00	99.99	92.31	94.87
		7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45,000,000.00	44,989,747.00	99.98	100.00	99.99
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,250,000.00	17,016,107.00	98.64	100.00	99.55
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	7,048,000.00	7,047,387.00	99.99	100.00	100.00
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5,760,000.00	5,749,000.00	99.81	100.00	99.94
		11	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00	100.00
		12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah/dalam daerah	96,700,800.00	96,613,898.00	99.91	100.00	99.97
		13	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan seririt	208,830,000.00	204,424,440.00	97.89	100.00	99.30
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14	pengadaan perlengkapan gedung/kantor	199,000,000.00	197,500,000.00	99.25	100.00	99.60
		15	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana Prasarana Upacara	110,470,000.00	109,099,569.00	98.76	100.00	99.59
		16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	9,787,000.00	9,787,000.00	100.00	100.00	100.00
		17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Lingkungan Kantor	7,350,000.00	7,350,000.00	100.00	100.00	100.00
		18	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	53,765,750.00	53,304,300.00	99.14	100.00	99.71
		19	pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000.00	4,997,100.00	99.94	100.00	99.98
		20	pemeliharaan rutin /berkala alatalat kantor/RT	7,000,000.00	6,550,500.00	93.58	100.00	97.86
		21	rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor	87,743,100.00	86,537,000.00	98.63	100.00	99.54

		22	Penataan halaman gedung/lingkungan kantor	19,425,000.00	18,913,950.00	97.37	100.00	99.12
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	23	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	25,000,000.00	23,599,873.00	94.40	100.00	98.13
		24	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00	100.00	100.00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem	25	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,750,000.00	7,749,857.00	100.00	100.00	100.00
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	338,000.00	337,865.00	99.96	100.00	99.99
		27	Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran	549,000.00	548,570.00	99.92	100.00	99.97
		28	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	763,000.00	762,773.00	99.97	100.00	99.99
5	Program Perencanaan Anggaran SKPD	29	Penyusunan Anggaran SKPD	95,654,850.00	95,458,845.00	99.80	100.00	99.93
6	Peningkatan Informasi Pembangunan Daerah	30	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	43,550,000.00	43,540,700.00	99.98	100.00	99.99
7	Program Pembangunan Fasilitas Umum	31	Pembangunan bangunan Fasilitas Umum	2,427,863,000.00	2,427,863,000.00	100.00	100.00	100.00
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	32	Pembinaan Tugas-tugas Kades	5,974,600.00	5,967,604.00	99.88	100.00	99.96
	Desa/Kelurahan	33	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	35,095,000.00	35,045,050.00	99.86	100.00	99.95
		34	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kades	5,120,000.00	5,119,891.00	100.00	100.00	100.00

		35	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa	7,355,850.00	7,338,992.00	99.77	100.00	99.92
		36	pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan desa	5,520,450.00	5,520,065.00	99.99	100.00	100.00
9	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	37	Pembinaan lomba Desa/ Kelurahan Terpadu	24,256,000.00	24,254,330.00	99.99	100.00	100.00
	Pembangunan Desa/Kelurahan	38	Pelaksanaan Musbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	48,327,412.00	48,285,720.00	99.91	100.00	99.97
		39	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat & Proyek Masuk Desa/Kel.	11,520,000.00	11,492,000.00	99.76	100.00	99.92
		40	Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	19,455,000.00	19,424,070.00	99.84	100.00	99.95
		41	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan	6,612,600.00	4,210,714.00	63.68	100.00	87.89
10	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	42	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	8,247,500.00	8,238,155.00	99.89	100.00	99.96
	Linmas Trantib	43	Pembinaan Linmas Trantib Desa/ Kelurahan	23,675,000.00	23,662,250.00	99.95	100.00	99.98
		44	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	26,132,500.00	24,589,279.00	94.09	90.48	91.68
		45	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00	100.00	100.00
11	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	46	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	406,900,000.00	406,534,570.00	99.91	100.00	99.97
	Kesejahteraan Sosial	47	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	29,803,300.00	29,781,647.00	99.93	100.00	99.98
		48	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	38,931,000.00	38,893,489.00	99.90	100.00	99.97
		49	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Nasional	50,013,000.00	49,989,660.00	99.95	100.00	99.98

12	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	50	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	14,725,000.00	14,659,484.00	99.56	100.00	99.85
	Pelayanan Umum	51	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	9,200,000.00	9,147,600.00	99.43	100.00	99.81
		52	Pembinaan Inventaris Kekayaan Pemerintahan Desa	7,450,000.00	7,350,000.00	98.66	100.00	99.55
							-	
	Total kinerja kegiatan	52		5,183,391,412.00	5,156,918,753.00	99.49	99.67	99.01
KECAMATAN BANJAR								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55,800,000.00	54,011,320.00	96.79	107.00	101.26
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	40,000,000.00	37,514,116.00	93.79	100.00	97.93
		3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	68,000,000.00	59,750,822.00	87.87	100.00	95.96
		4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,000,000.00	2,008,400.00	66.95	100.00	88.98
		5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	131,850,000.00	127,434,368.00	96.65	100.00	98.28
		6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	41,348,500.00	41,047,600.00	99.27	100.00	99.76
		7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	100.00	100.00
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	5,786,000.00	5,746,400.00	99.32	100.00	99.77
		9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	51,740,000.00	50,905,000.00	98.39	100.00	99.46
		10	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan dan Perundang - Undangan	5,600,000.00	4,710,000.00	84.11	100.00	94.70
		11	Penyediaan Makanan dan Minuman	13,005,000.00	11,334,950.00	87.16	90.91	92.69
		12	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah			95.70	100.00	98.57

				83,500,000.00	79,906,698.00			
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan mebeleur	66,000,000.00	65,835,550.00	99.75	100.00	99.92
		2	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	83,640,000.00	81,229,200.00	97.12	100.00	99.07
		3	Penyelenggaraan upacara/hari besar nasional	117,800,000.00	115,654,980.00	98.18	100.00	99.39
		4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56,400,000.00	50,768,424.00	90.01	100.00	96.67
		5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	210,000,000.00	208,017,500.00	99.06	100.00	99.69
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24,500,000.00	24,496,780.00	99.99	100.00	100.00
		2	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	50,000,000.00	49,800,000.00	99.60	100.00	99.87
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	Pembinaan Pegawai Daerah	54,400,000.00	48,397,395.00	88.97	100.00	96.32
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	13,950,000.00	13,751,200.00	98.57	100.00	99.52
	Capaian Kinerja dan Keuangan	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	6,129,000.00	5,960,400.00	97.25	100.00	99.08
		3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7,975,000.00	7,877,265.00	98.77	100.00	99.59
6	Perencanaan Anggaran SKPD	1	Penyusunan Anggaran SKPD	74,157,500.00	72,535,560.00	97.81	100.00	99.27
7	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/	1	Pembinaan Tugas-Tugas kepala Desa/Perbekel/Lurah			99.66	100.00	99.89

				57,218,745.00	57,023,178.00			
	Perbekel/Lurah	2	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa	25,317,000.00	25,296,655.00	99.92	100.00	99.97
		3	Bimbingan Teknis Pelaksanaan administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	16,721,544.00	15,599,058.00	93.29	100.00	97.76
8	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan Lomba Desa Terpadu	43,930,000.00	35,917,030.00	81.76	100.00	93.92
	Pembangunan Desa/Kelurahan	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan	31,060,733.00	30,890,500.00	99.45	100.00	99.82
		3	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat & Proyek Masuk Desa	19,093,800.00	18,950,000.00	99.25	100.00	99.75
		4	Penyusunan profil desa/Kelurahan dan kecamatan	24,755,000.00	23,424,149.00	94.62	100.00	98.21
		5	Pembinaan Lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	2,850,000.00	2,829,878.00	99.29	100.00	99.76
9	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	13,500,000.00	13,482,160.00	99.87	100.00	99.96
	Linmas Trantib	2	Pembinaan Linmas hansip Desa/Kelurahan	26,800,000.00	26,798,870.00	100.00	100.00	100.00
		3	Pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	152,632,000.00	152,105,585.00	99.66	100.00	99.89
		4	Koordinasi penanggulangan bencana alam	4,050,000.00	3,900,000.00	96.30	100.00	98.77
10	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan Koordinasi Pelestarian Adat dan Budaya	310,550,000.00	309,637,190.00	99.71	100.00	99.90
	Kesejahteraan Sosial	2	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	55,800,000.00	55,058,691.00	98.67	100.00	99.56
		3	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari - Hari Nasional	107,225,000.00	105,021,598.00	97.95	100.00	99.32

11	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	4,050,000.00	3,974,871.00	98.14	100.00	99.38
	Pelayanan Umum	2	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	123,210,000.00	120,000,667.00	97.40	300.19	165.86
		3	Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintah Desa	19,750,000.00	19,735,989.00	99.93	100.00	92.80
	TOTAL KINERJA KEGIATAN	42		2,310,594,822.00	2,245,839,997.00	97.20	104.72	100.01
KECAMATAN BULELENG								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	372,360,000.00	372,360,000.00	100.00	131.64	121.09
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85,800,000.00	68,562,769.00	79.91	100.00	93.30
		3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	66,360,000.00	60,111,000.00	90.58	100.00	96.86
		4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	6,770,000.00	5,224,700.00	77.17	91.67	86.84
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	85,654,150.00	85,547,000.00	99.87	100.00	99.96
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	116,609,225.00	115,551,990.00	99.09	100.00	99.70
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,959,774.00	24,370,159.00	97.64	100.00	99.21
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	2,420,750.00	2,380,950.00	98.36	100.00	99.45
		9	Peyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	58,200,000.00	58,200,000.00	100.00	100.00	100.00
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan	4,740,000.00	4,740,000.00	100.00	100.00	100.00
		11	Penyediaan Makanan dan Minuman			77.84	86.78	83.80

				129,600,000.00	100,874,500.00			
		12	Penyediaan jasa administrasi keuangan	262,512,500.00	253,700,254.00	96.64	100.00	98.88
		13	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah/ dalam daerah	73,800,000.00	69,663,448.00	94.39	100.00	98.13
		14	penyediaan jasa administrasi kepegawain	55,605,000.00	55,604,870.00	100.00	100.00	100.00
		15	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Liligundi	127,124,100.00	118,770,498.00	93.43	100.00	97.81
		16	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Beratan	141,225,000.00	129,079,676.00	91.40	100.00	97.13
		17	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Singaraja	133,000,000.00	131,800,975.00	99.10	100.00	99.70
		18	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Paket Agung	150,525,000.00	142,312,414.00	94.54	100.00	98.18
		19	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuasri	144,225,000.00	117,026,865.00	81.14	100.00	93.71
		20	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjat tegal	204,312,500.00	188,011,268.00	92.02	100.00	97.34
		21	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Anyar	204,167,588.00	195,090,967.00	95.55	100.00	98.52
		22	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Bugis	152,800,000.00	150,696,232.00	98.62	100.00	99.54
		23	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Kajanan	176,200,000.00	163,668,739.00	92.89	100.00	97.63
		24	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kampung Baru	223,600,000.00	193,875,370.00	86.71	100.00	95.57
		25	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Bali	187,000,000.00	184,088,613.00	98.44	100.00	99.48
		26	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banjar Jawa	189,824,100.00	165,858,758.00	87.37	100.00	95.79
		27	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Astina	158,024,100.00	145,633,602.00	92.16	100.00	97.39

		28	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kendran	145,600,000.00	125,026,810.00	85.87	100.00	95.29
		29	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Banyuning	208,124,100.00	182,986,624.00	87.92	100.00	95.97
		30	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Penarukan	266,200,000.00	232,285,166.00	87.26	100.00	95.75
		31	Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Kaliuntu	145,600,000.00	133,482,006.00	91.68	100.00	97.23
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1	Pembangunan Gedung Kantor	40,000,000.00	39,746,000.00	99.37	100.00	99.79
		2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4,600,000.00	3,600,000.00	78.26	100.00	92.75
		3	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara	82,525,000.00	77,875,200.00	94.37	100.00	98.12
		4	Pemeliharaan rutin/berkala Lingkungan Gedung Kantor	90,000,000.00	89,346,000.00	99.27	100.00	99.76
		5	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56,698,606.00	39,071,800.00	68.91	100.00	89.64
		6	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5,060,000.00	4,994,000.00	98.70	100.00	99.57
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3,450,000.00	3,445,200.00	99.86	100.00	99.95
		8	Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat-alat kantor/RT	10,200,000.00	10,093,545.00	98.96	100.00	99.65
		9	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	62,100,000.00	61,549,355.00	99.11	100.00	99.70
3	Informasi Pembangunan daerah	1	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	63,321,000.00	63,318,100.00	100.00	100.00	100.00
4	Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	91,560,000.00	86,459,450.00	94.43	100.00	98.14

		2	pembinaan rohani dan budaya aparatur	80,800,000.00	79,800,000.00	98.76	100.00	99.59
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,645,000.00	7,644,990.00	100.00	100.00	100.00
6	Perencanaan Anggaran SKPD	1	Penyusunan Anggaran SKPD	18,686,250.00	18,686,180.00	100.00	100.00	100.00
7	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah	124,395,000.00	118,347,684.00	95.14	100.00	98.38
		2	Bimbingan teknis pelaksanaan administrasi pemerintahan	12,930,000.00	12,919,874.00	99.92	100.00	99.97
		3	pembinaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan desa/kelurahan	63,666,500.00	63,183,182.00	99.24	100.00	99.75
8	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	1	Pembinaan Lomba Desa/ Kelurahan Terpadu	88,126,450.00	87,883,069.00	99.72	100.00	99.91
		2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan & Kecamatan	26,127,695.00	25,635,833.00	98.12	100.00	99.37
		3	Pendataan & Evaluasi Swadaya Murni Masyarakat & Proyek Masuk Desa/Kel	67,965,100.00	67,862,580.00	99.85	100.00	99.95
		4	Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	11,279,950.00	11,211,419.00	99.39	100.00	99.80
		5	Pembinaan LPM	5,895,000.00	5,895,000.00	100.00	100.00	100.00
9	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	1	pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	3,795,000.00	3,175,400.00	83.67	100.00	94.56
		2	pembinaan linmas hansip desa /kelurahan	7,210,500.00	6,069,027.00	84.17	100.00	94.72
		3	pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah			99.76	100.00	99.92

				101,122,000.00	100,878,930.00			
10	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	493,725,670.00	489,132,445.00	99.07	100.00	99.69
	Kesejahteraan Sosial							
		2	Pembinaan Pemuda & Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	144,043,400.00	134,089,228.00	93.09	100.00	97.70
		3	Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	63,067,230.00	59,873,920.00	94.94	100.00	98.31
		4	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Nasional	356,524,950.00	349,173,000.00	97.94	100.00	99.31
11	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	32,038,800.00	31,554,937.00	98.49	100.00	99.50
	Pelayanan Umum							
	Pelayanan Umum	2	Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	85,490,000.00	85,385,237.00	99.88	100.00	99.96
	Total Nilai Kinerja Dinas	62		6,606,991,988.00	6,214,486,808.00	94.06	100.16	98.17
KECAMATAN SUKASADA								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00	100.00
		2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48,300,000.00	39,695,723.00	82.19	100.00	94.06
		3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69,960,000.00	64,631,361.00	92.38	100.00	97.46
		4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional	1,000,000.00	759,000.00	75.90	100.00	91.97
		5	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	150,940,000.00	148,174,000.00	98.17	100.00	99.39
		6	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	17,110,000.00	17,110,000.00	100.00	100.00	100.00

		7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39,207,690.00	39,185,145.00	99.94	100.00	99.98
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,714,000.00	7,714,000.00	100.00	100.00	100.00
		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,800,000.00	83,800,000.00	100.00	100.00	100.00
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	4,000,000.00	3,990,000.00	99.75	100.00	99.92
		11	Penyediaan Makanan dan Minuman	70,885,000.00	70,885,000.00	100.00	100.00	100.00
		12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah	51,700,000.00	51,598,798.00	99.80	100.00	99.93
		13	Penyediaan Jasa Kelurahan Sukasada	260,616,404.00	259,276,436.00	99.49	100.00	99.83
2	Program Peningkatan Sarana dan	1	Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / prasarana Upacara	138,000,000.00	137,680,000.00	99.77	100.00	99.92
	Prasarana Aparatur	2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	38,059,806.00	29,189,194.00	76.69	100.00	92.23
		3	Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor/RT	12,900,000.00	12,650,000.00	98.06	100.00	99.35
		4	Pemeliharaan/berat rumah gedung kantor	5,900,000.00	5,806,440.00	98.41	100.00	99.47
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	1	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,100,000.00	17,099,850.00	100.00	100.00	100.00
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
4	Program Perencanaan Anggaran SKPD	1	Penyusunan Anggaran SKPD	24,800,000.00	24,555,000.00	99.01	100.00	99.67
5	Program Informasi Pembangunan Daerah	1	Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00	100.00

6	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah	147,470,000.00	147,470,000.00	100.00	100.00	100.00
	Pemerintah Desa/Kelurahan							
7	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan lomba desa/kelurahan terpadu	49,210,000.00	49,147,507.00	99.87	100.00	99.96
	Pembangunan Desa/Kelurahan	2	Pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan	17,680,000.00	17,680,000.00	100.00	100.00	100.00
		3	Pendataan dan Evaluasi swdaya Murni Masyarakat & Proyek masuk Desa/Kel.	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00	100.00	100.00
		4	Penyusunan Profil Desa / Kelurahan dan Kecamatan	7,400,000.00	7,395,500.00	99.94	100.00	99.98
		5	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00	100.00	100.00
8	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00	100.00	100.00
	Linmas Trantib	2	Pemantauan keamanan dan ketertiban wilayah	94,400,000.00	94,400,000.00	100.00	100.00	100.00
		3	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	2,550,000.00	2,550,000.00	100.00	100.00	100.00
9	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adat dan budaya	492,350,000.00	487,234,900.00	98.96	100.00	99.65
	Kesejahteraan Sosial							
		2	Pembinaan pemuda dan olah raga dan lembaga sosial kemasyarakatan	159,040,100.00	155,005,100.00	97.46	100.00	99.15
		3	Koordinasi pelaksanaan lomba kesejahteraan sosial	43,375,000.00	43,250,000.00	99.71	100.00	99.90
		4	Koordinasi pelaksanaan perayaan hari-hari nasional	152,350,000.00	152,035,000.00	99.79	100.00	99.93

10	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	47,125,000.00	47,125,000.00	100.00	100.00	100.00
	Pelayanan Umum	2	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	77,800,000.00	77,700,000.00	99.87	100.00	99.96
	Total Nilai Kinerja Dinas	35		2,428,593,000.00	2,390,642,954.00	98.44	100.00	99.19
KECAMATAN SAWAN								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32,625,000.00	32,415,400.00	99.36	100.00	99.79
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	36,000,000.00	29,355,019.00	81.54	100.00	93.85
		3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	75,600,000.00	62,862,900.00	83.15	100.00	94.38
		4	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kend. Dinas/operasional	2,907,400.00	1,860,000.00	63.97	100.00	87.99
		5	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	223,920,000.00	223,381,200.00	99.76	100.00	99.92
		6	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	39,749,000.00	39,749,000.00	100.00	100.00	100.00
		7	Penyediaan perbaikan peralatan kerja	10,900,000.00	10,890,000.00	99.91	100.00	99.97
		8	Penyediaan Alat tulis kantor	31,320,500.00	31,300,500.00	99.94	100.00	99.98
		9	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	10,613,000.00	8,138,000.00	76.68	100.00	92.23
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,374,600.00	2,093,080.00	88.14	100.00	96.05
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	5,940,000.00	5,940,000.00	100.00	100.00	100.00
		12	Penyediaan makanan dan minuman	15,945,000.00	15,353,000.00	96.29	100.00	98.76
		13	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah			98.88	100.00	99.63

				32,313,000.00	31,949,698.00			
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	76,400,000.00	76,305,000.00	99.88	100.00	99.96
		2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas /Operasional	68,050,000.00	62,740,009.00	92.20	100.00	97.40
3	Program peningkatan pengembnagan sistem	1	Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00	100.00	100.00
	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
4	Program perencanaan anggaran SKPD	1	Penyusunan anggaran SKPD	16,715,000.00	15,104,800.00	90.37	100.00	96.79
5	Program Informasi Pembangunan Daerah	1	Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan	55,830,000.00	55,600,000.00	99.59	100.00	99.86
6	Program koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/Prebekel	53,700,000.00	52,762,542.00	98.25	100.00	99.42
	Pemerintah Desa/Kelurahan	2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa	9,048,621.00	8,768,000.00	96.90	100.00	98.97
		3	Pembinaan agraria	4,250,000.00	4,100,000.00	96.47	100.00	98.82
		4	Pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan desa	22,450,000.00	22,149,825.00	98.66	100.00	99.55
7	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan Lomba Desa Terpadu/Kelurahan terpadu	87,873,000.00	85,148,850.00	96.90	100.00	98.97
	Pembangunan Desa	2	Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan dan Kec.	26,408,000.00	25,803,000.00	97.71	100.00	99.24
		3	Pendataan & evaluasi swadaya murni masyarakat & proyek masuk desa	4,790,000.00	4,590,000.00	95.82	100.00	98.61

		4	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Kecamatan	34,050,000.00	33,800,000.00	99.27	100.00	99.76
		5	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	20,375,000.00	20,050,000.00	98.40	100.00	99.47
8	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas dan Trantib	1	Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	54,650,000.00	54,565,250.00	99.84	100.00	99.95
		2	Pembinaan Linmas Hansip desa / Kelurahan	17,900,000.00	17,852,000.00	99.73	100.00	99.91
		3	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	83,275,000.00	80,994,800.00	97.26	100.00	99.09
		4	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	4,125,000.00	3,990,600.00	96.74	100.00	98.91
9	Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan Koordinasi Pelestarian Adat dan Budaya	414,250,000.00	412,831,220.00	99.66	100.00	99.89
	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	2	Pembinaan Pemuda Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	44,175,000.00	38,852,500.00	87.95	100.00	95.98
		3	Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari - Hari Nasional	156,643,500.00	155,561,000.00	99.31	100.00	99.77
10	Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	7,800,000.00	7,766,000.00	99.56	100.00	99.85
	Peningkatan Pelayanan Umum	2	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan perijinan	35,300,000.00	35,244,500.00	99.84	100.00	99.95
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN								
	Total kinerja kegiatan	36		1,820,115,621.00	1,771,717,693.00	97.34	100.00	98.41
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	179,420,000.00	179,041,053.00	99.79	100.00	99.93
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,841,000.00	29,761,581.00	90.62	100.00	96.87

		3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	70,800,000.00	67,669,583.00	95.58	100.00	98.53
		4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend. Dinas/ operasional	1,870,000.00	1,836,500.00	98.21	100.00	99.40
		5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	279,600,000.00	269,375,000.00	96.34	100.00	98.78
		6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	74,450,000.00	72,729,683.00	97.69	100.00	99.23
		7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,430,000.00	25,430,000.00	100.00	100.00	100.00
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,174,000.00	7,173,600.00	70.51	80.00	76.84
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20,700,000.00	20,532,800.00	99.19	100.00	99.73
		10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	46,000,000.00	45,323,200.00	98.53	100.00	99.51
		11	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00	100.00	100.00
		12	Penyediaan Makanan dan Minuman	16,230,000.00	14,100,000.00	86.88	100.00	95.63
		13	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	31,500,000.00	31,300,000.00	99.37	100.00	99.79
2.	Program Peningkatan sarana & prasarana	1	Pengadaan sarana dan prasarana Upacara	88,300,000.00	86,900,000.00	98.41	100.00	99.47
	Aparatur	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	7,000,000.00	6,875,000.00	98.21	100.00	99.40
		3	Pemeliharaan rutin/Berkala gedung lingkungan kantor	21,400,000.00	21,252,000.00	99.31	100.00	99.77
		4	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional	23,664,000.00	17,147,380.00	72.46	100.00	90.82
		5	Pemeliharaan rutin /berkala alatalat kantor/RT	12,500,000.00	12,468,500.00	99.75	100.00	99.92

		6	Pendataan dan Inventarisasi aset Barang milik Daerah	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00	100.00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	1	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00	100.00
4	Program informasi pembangunan daerah	2	Penyelenggaraan pameran /pawai pembangunan	42,150,000.00	41,750,000.00	99.05	100.00	99.68
5	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/perbekel/Lurah	86,400,000.00	86,400,000.00	100.00	100.00	100.00
	Pemerintahan Desa/ Kelurahan	2	Bimbingan teknis penyusunan peraturan desa	2,220,000.00	2,220,000.00	100.00	100.00	100.00
6	Koordinasi penyelenggaraan peningkatan	1	Pembinaan lomba desa/kelurahan terpadu	39,906,000.00	39,562,000.00	99.14	100.00	99.71
	pembangunan desa	2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	20,040,000.00	20,040,000.00	100.00	100.00	100.00
		3	Pendataan & evaluasi swadaya murni masyarakat dan proyek masuk desa	19,495,000.00	19,348,000.00	99.25	100.00	99.75
		4	Penyusunan profil desa kelurahan dan kecamatan	9,345,000.00	7,845,000.00	83.95	100.00	94.65
		5	Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00	100.00
7	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	1. Pengaman dan pengawasn peraturan daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00	100.00
	peningkatan Linmas Trantib	2	2. Pembinaan llinmas Hansip Desa/ Kelurahan	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	100.00	100.00
		3	3. Pemantauan ketentraman dan ketertiabn wilayah	116,000,000.00	108,821,053.00	93.81	100.00	97.94
		4	4. Koordinasi penanggulangan bencana alam	11,000,000.00	10,950,000.00	99.55	100.00	99.85

8	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	1. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	176,800,000.00	128,650,000.00	72.77	100.00	90.92
	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	2	2. Pembinaan Pemuda & Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	32,500,000.00	32,120,000.00	98.83	100.00	99.61
		3	3. Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	25,100,000.00	24,800,000.00	98.80	100.00	99.60
		4	4. Koordinasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Nasional	138,735,000.00	138,605,000.00	99.91	100.00	99.97
9	Program Koordinasi Penyelenggaraan	1	1. Pembinaan Kebersihan dan lingkungan hidup	43,250,000.00	42,750,000.00	98.84	100.00	99.61
	Peningkatan Umum	2	2. Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	8,750,000.00	8,378,950.00	95.76	100.00	98.59
	Total Nilai Kinerja Dinas	38		1,792,570,000.00	1,700,155,883.00	94.84	99.47	98.25
KECAMATAN TEJAKULA								
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,816,000.00	34,516,000.00	93.75	100.00	97.92
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik	36,963,100.00	35,567,850.00	96.23	100.00	98.74
		3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	67,000,000.00	66,109,473.00	98.67	100.00	99.56
		4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional	3,100,000.00	2,524,300.00	81.43	77.78	78.99
		5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	142,500,000.00	124,553,300.00	87.41	100.00	95.80
		6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19,846,000.00	19,833,690.00	99.94	100.00	99.98
		7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,565,600.00	13,492,600.00	99.46	99.58	99.54
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			27.66	86.07	75.05

				7,675,000.00	2,123,000.00			
		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	1,720,000.00	1,238,600.00	72.01	75.00	74.00
		10	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	4,340,000.00	3,936,000.00	90.69	100.00	96.90
		11	Penyediaan Makanan dan Minuman	36,546,500.00	30,272,000.00	82.83	86.67	85.39
		12	Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam daerah	59,734,000.00	55,624,698.00	93.12	100.00	97.71
2	Prasarana Aparatur	1	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara agama	78,000,000.00	74,542,250.00	95.57	100.00	98.52
		2	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	40,621,600.00	25,743,511.00	63.37	76.47	72.11
		3	Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	4,200,000.00	4,197,600.00	99.94	100.00	99.98
		4	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor RT	7,600,000.00	5,796,600.00	76.27	82.35	80.33
		5	Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	21,459,000.00	21,306,460.00	99.29	100.00	99.34
3	Penigkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	15,500,000.00	15,498,450.00	99.99	100.00	100.00
		2	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	60,000,000.00	53,251,000.00	88.75	90.00	89.58
4	Peningkatan Pengembangan Sistem	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	15,410,000.00	14,845,050.00	96.33	100.00	98.78
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	Terwujudnya peningkatan Pengembangan Semesteran Sistem Pel. Capaian	1,310,000.00	727,080.00	55.50	100.00	85.17
			kinerja dan keuangan					
		3	Penyusunan Laporan akhir tahun	5,040,700.00	1,566,730.00	31.08	100.00	77.03

5	Program Anggaran SKPD	1	Penyusunan Anggaran SKPD	42,930,000.00	42,907,500.00	99.95	100.00	99.98
6	Program Informasi Pembangunan Daerah	1	penyelenggaraan pameran / pawai Pembangunan	67,039,600.00	51,600,000.00	76.97	100.00	92.32
7	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Pembinaan Tugas-Tugas Kades/Perbekel/lurah	76,427,500.00	56,008,000.00	73.28	100.00	91.09
	Desa/Kelurahan							
8	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan Lomba Desa/ kelurahan Terpadu	54,606,300.00	48,728,970.00	89.24	100.00	96.41
	Pembangunan Desa	2	Pelaksanaan Musy.Perencanaan Pemb.Tk.Des & Tk kec.	51,025,400.00	46,555,380.00	91.24	100.00	97.08
		3	Pend.dan evaluasi swadaya murni masy.dan proyek masuk desa	6,387,000.00	2,356,262.00	36.89	100.00	78.96
		4	Penyusunan profil Desa / Kelurahan dan profil kec.	12,010,000.00	6,559,000.00	54.61	100.00	84.87
		5	Pembinaan Lembaga pemberdayaan masy.Des	35,435,256.34	31,059,930.00	87.65	100.00	95.88
9	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pengamanan dan pengawasan peraturan Daerah	62,100,000.00	62,095,280.00	99.99	100.00	100.00
	Linmas Trantib	2	Pembinaan linmas Hansip Desa.	12,846,400.00	12,718,634.00	99.01	100.00	99.67
		3	Pementauan Ketentraman dan ketertiban Wilayah	28,350,900.00	27,759,520.00	97.91	100.00	99.30
		4	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	5,139,900.00	4,731,550.00	92.06	100.00	97.35
10	Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan budaya	402,314,600.00	388,796,600.00	96.64	100.00	98.88

	Kesejahteraan sosial	2	Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan lembaga sosial kemasyarakatan	90,568,900.00	85,688,930.00	94.61	100.00	98.20
		3	Pembinaan Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	15,402,600.00	14,696,360.00	95.41	100.00	98.47
		4	Terwujudnya pelaksanaan perayaan hari-hari nasional	158,378,000.00	113,278,774.00	71.52	100.00	90.51
11	Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	1	Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	15,685,400.00	14,226,270.00	90.70	100.00	96.90
	Pelayanan Umum	2	Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	48,887,800.00	48,785,100.00	99.79	100.00	99.93
	Total Nilai Kinerja		40	1,864,483,056.34	1,665,818,302.00	89.34	96.85	92.91

sumber data : kecamatan se- kabupaten buleleng, 2016

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 9 program dan 40 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Peneyedian Jasa Surat Menyurat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan.
- Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Kegiatan Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu.
- Kegiatan Pembinaan rohani dan budaya aparatur.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan.

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD.

e. Program Perencanaan Anggaran SKPD.

- Kegiatan Penyusunan anggaran SKPD.

f. Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

- Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
- Kegiatan Pemberdayaan kelompok posyandu.
- Kegiatan Pemberdayaan keluarga miskin dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- Kegiatan Koordinasi ketersediaan, distribusi dan konsumsi keanekaragaman pangan.
- Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG.
- Kegiatan Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan bagi masyarakat.
- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat.

g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

- Kegiatan Monitoring dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa.

h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

- Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.
- Kegiatan Pemberian stimulan pembangunan desa.
- Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong-royong.
- Kegiatan Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan.
- Kegiatan Pembinaan masyarakat desa dalam rangka lomba desa / kelurahan terpadu.

i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

- Kegiatan Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi aparatur pemerintah desa.
- Kegiatan Pengkajian pemekaran banjar dinas.
- Kegiatan Pembinaan pelaksanaan pemerintah desa dan alokasi dana desa (ADD).

- Kegiatan Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan perbekel.
- Kegiatan Fasilitasi pendataan, pengolahan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan.

Jumlah PKK aktif di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 sebanyak 148 PKK dari total PKK yang ada seluruhnya yang berjumlah 148 PKK. Sedangkan Posyandu Aktif yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng berjumlah 717 posyandu dan semua kelompok tersebut aktif didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada BPMPD Kabupaten Buleleng tersaji pada tabel berikut :

Tabel 67
Kondisi Kepegawaian pada BPMPD Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	40
	Pegawai Harian /Kontrak	50
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	2
	Pembina	1
	Penata Tk. I	12
	Penata	2
	Penata Muda Tk.I	5
	Penata Muda	2
	Pengatur Tk.I	2
	Pengatur	8
	Pengatur Muda Tk.I	6
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	6
	SI/D4	28
	D3	2
	SMA/SMK/MTs	54
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIb	4
	Eselon IVa	12

Sumber data : BPMPD Kabupaten Buleleng, 2016

Untuk penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat oleh BPMPD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 7.459.043.168,26 dan terealisasi sebesar Rp.7.372.071.886 atau 98,83 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.3.204.665.000 dan terealisasi Rp.3.182.341.664 atau 99,30 persen dan belanja langsung sebesar Rp.4.254.378.168 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.4.189.730.222 atau mencapai 98,48 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.381.050.000 dan terealisasi Rp.378.985.000, atau 99,46 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.3.839.828.168,26 dan terealisasi Rp.3.782.397.922 atau mencapai 98,50 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.33.500.000 dan terealisasi Rp.26.347.300 atau 84,62 persen. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan secara rinci tersaji pada tabel 68.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada BPMPD Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 9.382.261.152,78. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 9.382.261.152,78 jadi semua asset yang dikuasai dipergunakan / dimanfaatkan.

Permasalahan yang ada didalam pelaksanaan program kegiatan BPMPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016, antara lain :

1. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengolah pangan alternatif, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengolahan pangan alternatif serta faktor modal yang sangat minim;
2. Masih minimnya pengetahuan aparat Pemerintahan Desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pembuatan LPJ pengelolaan

keuangan desa apalagi dengan adanya peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan desa;

3. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai guna mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti kondisi balai masyarakat dan balai dusun.

Namun demikian kami telah melaksanakan upaya-upaya penanganan agar permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan program kegiatan yaitu :

- 1) Melakukan pelatihan keterampilan kepada kelompok masyarakat terutama kelompok PKK dalam mengolah hasil pertanian sebagai olahan pangan alternatif;
- 2) Dengan adanya Undang-undang terbaru yakni Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dimana didalam undang-undang tersebut semua diatur tentang pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa baik dari pengelolaan pembangunan, pemerintahan maupun keuangan desa maka pemberian pendidikan pelatihan lebih diintensifkan bagi aparatur pemerintahan desa termasuk bagi anggota BPD yang pendanaannya bersumber dari dana perimbangan / Alokasi Dana Desa (ADD) agar pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa bisa berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) Pembangunan atau rehab lebih diupayakan dianggarkan melalui swadaya melalui keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ataupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing desa, sedangkan kekurangannya diambilkan dari Dana Perimbangan dan Dana Desa yang diterima desa setiap tahun.

Tabel 68
alokasi dan realisasi anggaran BPMPD Kabupaten Buleleng

No	Program	Kegiatan	Dana	REALISASI			
				Keuangan		Fisik	TOT KI
				Rp.	%	(keluaran)	%
						%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat	30,800,000	30,161,730	97.93	100.00	99.59
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109,000,000	97,128,624	89.11	100.00	97.82
		3. Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	177,833,500	177,828,750	100.00	100.00	100.00
		4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	3,400,000	2,795,900	82.23	75.00	76.45
		5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	221,422,200	221,089,680	99.85	100.00	99.97
		6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	140,300,000	140,256,600	99.97	100.00	99.99
		7. Penyediaan alat tulis kantor	1,139,800	1,082,180	94.94	100.00	99.44
		8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2,544,000	2,542,254	99.93	100.00	99.99
		9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1,999,000	1,970,660	98.58	100.00	99.80
		10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33,500,000	28,347,300	84.62	100.00	96.92
		11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20,700,000	20,700,000	100.00	100.00	100.00

		12. Pengadaan makanan dan minuman	13,140,000	12,961,790	98.64	100.00	99.90
		13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	121,099,487.50	116,609,560	96.29	100.00	98.76
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-
	Aparatur	2. Pengadaan Meubelair	-	-	-	-	-
		3. Penyelenggaraan dan pengadaan sarana prasarana upacara	9,900,000	9,161,180	92.54	100.00	98.13
		4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung lingkungan kantor	9,800,000	9,800,000	100.00	100.00	100.00
		5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17,200,000	12,721,680	73.96	100.00	94.79
		6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,200,000	11,197,670	91.78	100.00	98.36
		7. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	9,043,500	7,684,976	84.98	100.00	94.99
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	21,607,000	21,422,500	99.15	100.00	99.72
		2. Pembinaan rohani dan budaya aparatur	45,000,000	44,400,000	98.67	100.00	99.56
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
	Aparatur						
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	45,863,600	45,777,010	99.81	100.00	99.97
	Pelaporan Pencapaian kinerja dan Keuangan						

6	Program Perencanaan Anggaran SKPD	1. Penyusunan anggaran SKPD	88,852,500	88,754,734	99.89	100.00	99.98
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1. pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan	799,593,635	795,685,086	99.51	100.00	99.90
	Perdesaan	2. Pemberdayaan Kelompok Posyandu	210,911,485	210,681,904	99.89	117.92	111.91
		3. Penyelenggaraan keluarga miskin dan fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskina	351,898,000	350,008,380	99.46	100.00	99.94
		4. Koordinasi ketersediaan,distribusi dan konsumsi keanekaragaman pangan	110,214,600	109,922,340	99.73	100.00	99.95
		5. Pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan SDA, pendayagunaanTTG	181,774,750	180,506,730	99.30	100.00	99.92
		6. Pembinaan pengawasan keamanan pangan bagi masyarakat	161,862,400	160,890,374	99.40	100.00	99.80
		7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat	46,375,671	46,297,380	99.83	100.00	99.97
8	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi	1. Monitoring dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi desa	141,625,000	141,326,940	99.79	100.00	99.97
	Perdesaan						
9	Peningkatan Program Partisipasi Masyarakat	1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	32,933,400	32,628,910	99.08	100.00	99.69
	dalam Membangun Desa	2. Pemberian stimulan pembangunan desa	114,476,400	113,293,150	98.97	100.00	99.79
		3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong-royong	94,169,260	94,054,480	99.88	100.00	99.99
		4. Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan	183,706,100	182,419,890	99.30	100.00	99.82
		5. Pembinaan masyarakat desa dalam rangka lomba desa/kelurahan terpadu	304,787,680	304,500,400	99.91	100.00	99.99

10	Program peningkatan kapasitas aparatur	1. Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi aparatur pemerintahan desa	77,155,100	77,101,408	99.93	100.00	99.98
	pemerintahan desa	2. Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas	2,176,800	1,962,920	90.17	100.00	96.72
		3. Pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa dan Alokasi dana desa (ADD)	180,838,800	163,120,930	90.20	100.00	96.73
		4. Fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Prebikel	89,280,800	88,002,112	98.57	100.00	99.52
		5. Fasilitasi pendataan, pengelolaan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan	34,253,700	32,932,110	96.14	100.00	98.71
	TOTAL KINERJA KEGIATAN	40	4,254,378,168.26	4,189,730,222	98.48	99.82	98.91

sumber data : lpmmpd kabupaten buleleng, 2016

22. URUSAN SOSIAL.

Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun 2016 meliputi ;

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan Kemampuan (capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya .
- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
- Pengadaan Sarana Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan yang dilaksanakan

- Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
- Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
- Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di Luar Panti.

3) Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah yang dijabarkan melalui kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.

4) Program pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
- Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma.

5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo dan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.

6) Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.
- Pemberdayaan eks penyandang Penyakit Sosial.

7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
- Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-peaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
- Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat.
- Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.

8) Program pelestarian nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan.
- Pemeliharaan Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti.

Bidang Sosial terdapat 4 (empat) Jenis pelayanan dasar dengan 7 (tujuh) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Buleleng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Kondisi pelayanan dasar bidang social ditunjukkan melalui indikator – indikator berikut :

- 1) Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pada Tahun 2016 tercapai 61,10 persen meningkat dibandingkan Tahun 2015 yang hanya mencapai 8,75 persen.
- 2) Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada Tahun 2016 tercapai 2,6 persen meningkat dari Tahun 2015 yang hanya mencapai 1,79 persen.
- 3) Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada Tahun 2016 tercapai 84,20 persen, terjadi penurunan dibandingkan pencapaian Tahun 2015 yang tercapai 89,47 persen.
- 4) Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan

- kesejahteraan sosial pada Tahun 2016 tercapai 1,5 persen, terindikasi ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tanpa capaian.
- 5) Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang tercapai 100 persen.
 - 6) Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Tahun 2016 juga tercapai 100 persen.
 - 7) Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yang pada Tahun 2016 tercapai 11,54 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 11,35 persen.

Pembangunan di bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Berlokasi di Jalan Veteran Nomor 7 Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117,(0362) 21248. Dengan struktur organisasi yang terdiri atas : Kepala Dinas (Eselon II/b), Sekretaris Dinas (Eselon III/a), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial (Eselon III/b), Kepala Seksi Penyuluhan dan Sumbangan sosial, Kepala Seksi Pencegahan Rehabilitasi Penyandang Cacat, Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga, Kepala Seksi Perlindungan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Karang taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Sosial, Kepala Seksi Kepahlawanan dan Monumen Perjuangan, Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak-Anak Nakal dan Korban Nafza, Kepala Seksi Kesejahteraan Lanjut Usia, Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial, Kesubbag Perencanaan, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan, Kepala UPTD Monumen Tri Yudha Sakti (Eselon IV/a) dan Kepala Tata Usaha UPTD Monumen Tri Yudha Sakti (Eselon IV/b).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berjumlah 35 orang. **Dengan pangkat dan golongan terdiri atas** : Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 1 orang, Pembina (IV/a) ; 7 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 8

orang, Penata (III/c) ; 5 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 2 orang, Penata Muda (III/a) ; 2 orang, Pengatur (II/c) ; 1 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 7 orang, Juru Tk.I (I/d) ; 1 orang. **Dengan kualifikasi pendidikan meliputi** : Strata 2 (S2) ; 4 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 13 orang, Diploma 3 (D3) ; 2 orang, SMA/SMK/Mts ; 15 orang, SMP/MI ; 1 orang. **Jumlah Pejabat Struktural** : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 16 pejabat, Eselon IV/b ; 1 pejabat. Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.

Untuk penyelenggaraan Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 22.460.781.380 dan terealisasi sebesar Rp.22.326.121.697 atau 99,40 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.070.389.000 dan terealisasi Rp.3.032.383.896 atau 98,76 persen dan belanja langsung sebesar Rp.19.390.392.380 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 19.293.737.801 atau mencapai 99,50 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.261.010.000 dan terealisasi Rp.260.565.000, atau 99,83 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.4.803.131.460 dan terealisasi Rp.4.723.531.131 atau mencapai 98,34 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.14.326.250.920 dan terealisasi Rp.14.309.641.670 atau 99,88 persen. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan serta hasil kegiatan meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, merupakan salah satu program rutin yang dilaksanakan di dalam menunjang pencapaian sasaran kinerja. Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 1.098.505.413 Dan terealisasi Rp 1.089.880.779 atau 99,12 persen, dengan realisasi tiap kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alokasi Anggaran Rp. 50.553.000, dan Realisasi sebesar Rp. 47.152.490, atau 93,27 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu meningkatnya koordinasi dengan target kinerja 100 persen dan realisasi fisik 100 persen.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Alokasi Anggaran Rp. 122.944.000, dan Realisasi sebesar Rp. 109.794.778, atau 89,30 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu Meningkatnya operasional kantor dengan target kinerja 120 rekening/12 bulan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 198.800.000, dan Realisasi sebesar Rp. 181.290.531, atau 91,18 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasil kegiatan yaitu meningkatnya operasional kedinasan dengan target kinerja 2 unit, 6 kali / 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran Rp. 6.842.500, dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.601.000 atau 38,01 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya operasional kedinasan selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan alokasi Anggaran Rp. 217.410.000, dan Realisasinya Rp. 125.417.460 atau 57,69 persen, dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya data bahan kajian keuangan selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 79.281.830, dengan Realisasi mencapai Rp. 74.022.135, atau mencapai 93,37 persen dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya yaitu terpeliharanya lingkungan kantor selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Alokasi Anggaran Rp. . 24.131.116, dengan Realisasi sebesar Rp. 23.859.045 atau 98,87 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya alat-alat tulis kantor selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.989.540, dengan realisasi Rp. 6.514.070, atau 93,20 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 27.447 lembar.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 8.592.937 dan Realisasinya mencapai Rp. 8.580.605, atau 99,86 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai selama 12 bulan.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Alokasi Anggaran Rp. 136.300.000, dengan Realisasi Rp.

- 132.160.000 atau 96,96 persen. Hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 14 unit.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Alokasi Anggaran Rp. 7.740.000, Realisasi Rp. 7.220.000 atau 93,28 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan sebanyak 6 jenis selama 1 Tahun.
 - Kegiatan Penyediaan Penyediaan Makanan Dan Minuman, Alokasi Anggaran Rp. 6.507.429, terealisasi Rp. 6.496.105, atau 99,83 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya kinerja pegawai melalui penyediaan makan dan minum sebanyak 5 jenis.
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 133.277.725, Realisasi Anggaran Rp. 125.417.460 atau 94,10 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tercapainya koordinasi selama 1 tahun.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian Alokasi Anggaran Rp. 99.135.336, Realisasi Anggaran Rp. 91.864.520 atau 92,67 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya Data Kepegawaian selama 1 tahun.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 158.659.960, dan Realisasi Anggaran Rp.157.777.250 atau 99,44 persen. Realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp. 19.000.000 dengan Realisasi Anggaran Rp. 18.999.250 atau 99,99 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya perlengkapan kantor sebanyak 4 unit.
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara, alokasi anggaran Rp. 78.800.000, dengan realisasi anggaran Rp. 71.007.850 atau 90,11 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah terselenggaranya upacara keagamaan sebanyak 444 kali.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Alokasi Anggaran Rp.17.195.000, dan terealisasi Rp. 17.183.750, atau 99,93 persen dan realisasi fisiknya 100 persen.

Hasilnya adalah meningkatnya operasional peralatan gedung kantor sebanyak 10 unit.

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Alokasi Anggaran Rp. 43.664.960, dan terealisasi Rp 36.767.300, atau 84,20 persen. Hasilnya adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak sebanyak 11 unit.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.999.920, dan realisasi anggaran Rp.24.999.920, atau 100 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi. Hasilnya tersedianya data absensi pegawai sebanyak 1 unit.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Alokasi Anggaran Rp. 51.000.000, dan realisasi anggaran Rp.50.715.633 atau 99,44 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 12 laporan.

5) Program Perencanaan Anggaran SKPD, alokasi anggaran Rp. 82.500.000, dan Realisasi Anggaran Rp.82.495.131 atau 99,99 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD dengan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya adalah tersedianya Dokumen Anggaran SKPD sebanyak 7 jenis dokumen.

6) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program ini dibiayai melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 1.564.835.165, dan terealisasi sebesar Rp.1.527.775.346, atau 97,63 persen. Program ini dijabarkan melalui kegiatan yang meliputi :

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya, Alokasi Anggaran Rp. 85.850.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 82.091.711 atau 95,62 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial sebesar 80 persen.

- Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin, Alokasi Anggaran Rp. 130.230.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 29.074.220 atau 22,33 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya keterampilan berusaha bagi 100 KK keluarga miskin dibidang usaha ternak.
- Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.348.755.165, dan Realisasi Anggaran Rp. 440.665.595, atau 32,67 persen dan realisasi fisik mencapai 100 persen. Hasilnya meningkatnya sarana / prasarana perumahan bagi 26 orang keluarga miskin (bantuan rehab rumah berupa bahan bangunan rumah) dan bantuan sembako bagi keluarga miskin sebanyak 13.846 KK.

7) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran Rp. 516.975.718, dan Realisasi Anggaran Rp.508.770.820 atau 98,41 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Pelayanan Dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan Dan Anak, Alokasi Anggaran Rp. 31.589.518, dan Realisasi Anggaran Rp. 30.566.658 atau 96,76 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya pelayanan perlindungan sosial hukum bagi perempuan dan anak bagi 180 orang.
- Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Alokasi Anggaran Rp. 3.082.700, dan Realisasi Anggaran Rp. 2.608.370 atau 84,61 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya terlaksananya penjajagan untuk daerah rawan korban narkoba.
- Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal, Alokasi Anggaran Rp. 64.936.000, dan realisasi anggaran Rp. 37.361.025 atau 57,54 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya keterampilan 10 orang anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal (bantuan perlengkapan / peralatan kerja kerajinan perak) bagi 10 orang.
- Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa, Alokasi Anggaran Rp. 137.872.500, dan realisasi anggaran Rp.

125.277.170 atau 90,86 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, masalah strategis yang ditangani buffer stock (beras dan bahan makanan lainnya) 500 KK, pemulangan orang terlantar 4 orang, evakuasi dan penguburan mayat terlantar 3 orang.

- Kegiatan Pembinaan Dan Bimbingan Motivasi Kepada Lansia Di Luar Panti Alokasi Anggaran Rp. 279.495.000, dan realisasi anggaran Rp. 220.787.151 atau 79,00 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya harapan hidup lanjut usia melalui pemberian bantuan bibit babi dan sembako bagi 790 orang.

8) Program Pembinaan Anak Terlantar, Alokasi Anggaran Rp. 169.140.000, dan terealisasi Rp.166.831.105, atau 98,63 persen dan realisasi fisik persen. Dijabarkan melalui Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, dan hasilnya adalah meningkatnya keterampilan 820 anak terlantar (bantuan bibit babi dan sembako).

9) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma. Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran Rp. 186.422.593, dan Realisasi Anggaran Rp.183.765.965 atau 98,57 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma, Alokasi Anggaran Rp. 46.831.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 43.172.870 atau 92,19 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya kemandirian penyandang cacat dan eks trauma melalui pelatihan keterampilan UEP ternak babi untuk 30 orang.
- Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma, Alokasi Anggaran Rp. 139.591.593, dan Realisasi Anggaran Rp. 135.593.095 atau 97,14 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya peran penyandang cacat dan eks trauma (bantuan kursi roda, tongkat ketiak, alat bantu dengar, dan bansos sembako) bagi 168 orang.

10) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, Alokasi Anggaran Rp. 96.051.666, dan terealisasi Rp.96.040.830, atau 99,99 persen dan realisasi fisik 100 persen. Dijabarkan melalui Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo,

dan hasilnya adalah meningkatnya operasional Panti Asuhan/Jompo (bansos sembako untuk hari raya) bagi 16 Panti Asuhan.

11) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya).

Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran Rp. 95.975.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 92.597.150 atau 96,48 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial, Alokasi Anggaran Rp. 42.000.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 16.758.550 atau 39,90 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya keterampilan 15 orang eks napi (bantuan bibit ternak babi).
- Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, Alokasi Anggaran Rp. 53.975.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 49.438.600 atau 91,60 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial (pemulangan gepeng hasil razia ke daerah asal) sebanyak 50 orang gepeng.

12) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran Rp. 313.270.070, dan Realisasi Anggaran Rp.305.827.108 atau 97,62 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha, Alokasi Anggaran Rp. 78.930.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 76.900.909 atau 97,43 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS dan meningkatnya pemahaman tentang penyelenggaraan GUB dan PUB bagi 320 orang, meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR bagi 1.000 orang.
- Kegiatan Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku - pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, Alokasi Anggaran Rp. 35.954.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 32.813.812 atau 91,27 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya keberdayaan 2 Desa Pakraman di bidang kesejahteraan sosial.
- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Alokasi Anggaran Rp. 83.330.000, dan realisasi anggaran Rp. 76.825.135 atau 92,19 persen dan realisasi fisik

100 persen. Hasilnya meningkatnya SDM KT dan IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) di bidang kesejahteraan sosial bagi 9 KT dan 9 PSM.

- Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, Alokasi Anggaran Rp. 115.056.070, dan realisasi anggaran Rp. 108.762.252 atau 94,53 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya perlindungan kesosialan, unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kabupaten Buleleng, unit pelaksanaan PKH dan ASKESOS ke Kementerian Sosial RI.

13) Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan

Sosial. Program ini didukung dengan Alokasi Anggaran Rp. 15.032.056.875, dan Realisasi Anggaran Rp.15.006.230.264 atau 99,83 persen. Realisasi kegiatan untuk penjabaran program ini meliputi :

- Kegiatan Penanaman Nilai Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial, Alokasi Anggaran Rp. 14.499.542.875, dan Realisasi Anggaran Rp. 2.999.442.504 atau 20,69 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, tatap muka keluarga veteran, peringatan HUT Bhujana Kerta, peringatan hari pahlawan 10 Nopember, hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSAN), napak tilas perjuangan I Gusti Ngurah Rai bagi 400 Orang, dan terwujudnya pembangunan Monumen Perang Jagaraga.
- Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Dan Monumen/Tugu Perjuangan, Alokasi Anggaran Rp. 198.000.000, dan Realisasi Anggaran Rp. 154.224.280 atau 77,89 persen dan realisasi fisiknya 100 persen. Hasilnya meningkatnya fungsi TMP Qurastana dan Monumen Tugu Perjuangan.
- Kegiatan Pemeliharaan Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Alokasi Anggaran Rp. 334.514.000, dan realisasi anggaran Rp. 306.852.353 atau 91,73 persen dan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya meningkatnya fungsi monument Tri Yudha Sakti.

Disamping realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2016, maka capaian kinerja pelaksanaan urusan sosial juga ditunjukkan melalui persentase jumlah PMKS di Kabupaten Buleleng yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun mencapai 61,14 persen.

Angka ini dicapai melalui perbandingan Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebanyak 14.697 orang dan Jumlah PMKS di Kabupaten Buleleng yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebanyak 24.039 orang. PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 tahun mencapai 2,60 persen. Capaian ini sebagai hasil perbandingan jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 tahun sejumlah 100 orang dengan jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 tahun sebanyak 3.850 orang. Selanjutnya persentase panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100 persen. Dari 16 panti sosial yang ada di Kabupaten Buleleng semuanya telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Korban bencana yang menerima bantuan sosial dan dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun di Kabupaten Buleleng berjumlah 500 orang. Sedangkan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun berjumlah 1.038 orang dari jumlah yang harus menerima jaminan sosial dalam 1 tahun sebanyak 9.007 orang.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Urusan Sosial ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 28.525.717.059,09. Sedangkan asset yang

dipergunakan senilai Rp. 28.426.883.225,99 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 98.833.833,10.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Sosial pada Tahun 2016 adalah Mengingat banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih tersebar di seluruh Desa/ Kelurahan yang belum dapat tertangani sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka dari tahun ke tahun sangat dibutuhkan anggaran yang cukup guna menangani permasalahan tersebut diatas secara berkelanjutan. Kemudian belum memiliki rumah singgah /shelter yang berfungsi untuk memberikan pelayanan , advokasi , recovery social dan proteksi social terhadap korban Bencana Sosial, Pembinaan bagi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) ,WTS, Orang Terlantar Luar Daerah , Korban Eksploitasi perdagangan anak dan perempuan dan Korban Kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan sosial secara psikologis. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dibidang Informasi dan Teknologi, di bidang Ekonomi dan dibidang Pendidikan Pekerja Sosial serta kurangnya sarana kendaraan roda 4 untuk operasional kegiatan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah : Mengajukan usulan penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahunan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng dan mengadakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait guna memperlancar tugas-tugas di bidang Kesejahteraan Sosial dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, BPBD, RSUD, PMI, Kepolisian, Kodim, Pemuda Panca Marga (P2M), Pramuka dan lain-lain (dalam rangka menangani masalah Tuna Sosial dan penanggulangan bencana) serta dengan BKD untuk mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan kriteria yang diharapkan serta usulan penambahan anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat).

23. URUSAN BUDAYA.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 8 program dan 40 kegiatan, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah

b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana & Prasarana Upacara
- Kegiatan Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Kegiatan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

d. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

e. Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD

f. Program Pengembangan Nilai Budaya

- Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
- Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
- Kegiatan Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
- Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
- Kegiatan Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- Kegiatan Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan
- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
- Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
- Kegiatan Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya local

Bidang Kesenian memiliki 2 (dua) Jenis pelayanan dasar dengan 7 (tujuh) jumlah indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor PM.106/Hk.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun kondisi Pelayanan Dasar Bidang Kesenian sampai dengan tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 70.

Pembangunan di bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng didukung dengan personil sejumlah 130 orang, yang terdiri atas 56 PNS dan 74 Pegawai kontrak. Pangkat dan Golongan PNS meliputi ; Pembina Utama

Muda (IV/c); 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b); 1 orang, Pembina (IV/a); 2 orang, Penata Tk. I (III/d); 5 orang, Penata (III/c); 5 orang, Penata Muda Tk.I (III/b); 4 orang, Penata Muda (III/a); 6 orang, Pengatur Tk.I (II/d); 2 orang, Pengatur (II/c); 8 orang, Pengatur Muda Tk.I (II/b); 14 orang, Pengatur Muda (II/a); 4 orang, Juru Tk.I (I/d); 1 orang, Juru (I/c); 1 orang, Juru Muda Tk. I(I/b); 2 orang. Kualifikasi pendidikan PNS ; S2; 3 orang, SI/D4; 15 orang, D3; 5 orang, D1;1 orang, SMA/SMK; 28 orang, SMP; 2 orang dan SD ; 2 orang. Pejabat structural pada struktur organisasi meliputi ; Eselon IIb 1 pejabat, Eselon IIIa; 1 pejabat, Eselon IIIb; 2 pejabat, Eselon IVa; 10 pejabat dan eselon IVb; 1 pejabat.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rinci tersaji pada tabel berikut :

Tabel 69
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan

K E G I A T A N		DANA	REALISASI		
			KEU		FISIK
			RP	%	(Keluaran)
					%
	1	2	3	4	5
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87,600,000	84,953,300	96.98	78.13
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150,000,000	107,461,787	71.64	81.67
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,000,000	180,547,610	91.19	100.00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	16,000,000	4,010,700	25.07	48.65
5	Peyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,487,917,500	1,486,248,813	99.89	100.00
6	Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor	132,212,000	130,160,800	98.45	100.00
7	Peyediaan alat tulis kantor	40,000,000	39,985,300	99.96	100.00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,530,000	12,165,000	97.09	100.00
9	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	18,000,000	17,986,500	99.93	100.00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94,000,000	87,773,400	93.38	100.00
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	4,000,000	3,998,500	99.96	100.00
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18,970,000	7,860,000	41.43	27.40
13	Penyediaan makanan dan minuman	38,000,000	36,949,500	97.24	100.00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam Daerah	158,000,000	157,898,160	99.94	100.00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				

1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	450,000,000	418,050,000	92.90	100.00
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	77,000,000	75,799,500	98.44	100.00
3	Pengadaan Meubeler	36,355,000	36,355,000	100.00	100.00
4	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara	97,000,000	94,937,700	97.87	100.00
5	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	20,000,000	16,600,000	83.00	100.00
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Lingkungan Kantor	98,000,000	96,648,250	98.62	100.00
7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	154,000,000	142,351,000	92.44	100.00
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000	9,179,000	91.79	100.00
9	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	51,938,000	49,745,000	95.78	100.00
	Peningkatan Disiplin Aparatur				
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	78,750,000	75,487,500	95.86	100.00
2	Pembinaan Rohani dan Budaya Rohani dan Budaya	20,000,000	19,998,000	99.99	100.00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	175,000,000	173,419,700	99.10	100.00
	Perencanaan Anggaran SKPD				
1	Penyusunan Anggaran SKPD	118,462,500	117,409,843	99.11	100.00
	Pengembangan Nilai Budaya				
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	983,500,000	979,155,850	99.56	100.00
2	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
	Pengelolaan Kekayaan Budaya				
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	79,400,000	79,400,000	100.00	100.00
2	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah pubakala, museum dan peninggalan bawah air	153,000,000	152,046,900	99.38	100.00
3	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	112,000,000	112,000,000	100.00	100.00
4	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya didaerah	175,000,000	164,885,040	94.22	100.00
5	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	263,000,000	243,855,000	92.72	100.00
	Pengelolaan Keragaman Budaya				
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1,710,900,000	1,697,171,767	99.20	100.00
2	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	115,000,000	111,665,950	97.10	100.00
3	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	178,000,000	175,977,600	98.86	100.00
4	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	1,906,800,000	1,888,755,650	99.05	100.00
5	Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	20,000,000	17,250,000	86.25	100.00

Sumber data : Disbudpar Kab. Buleleng.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kebudayaan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 29.814.627.543,83. Total Aset yang dipergunakan Rp. 11.974.797.298. Jadi tidak ada asset yang tidak dipergunakan.

Di dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, permasalahan-permasalahan yang dihadapi selalu ada, antara lain :

- Kurang berdayanya peran dan fungsi lembaga-lembaga tradisional.
- Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan peninggalan / warisan budaya.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian kesenian Bali.

Solusi yang telah ditempuh terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Pembinaan dan lomba secara berkala terhadap lembaga-lembaga tradisional.
- Pemberian bantuan kepada kelompok dan lembaga tradisional berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- Penyebaran luasan informasi dan pengkajian terhadap peninggalan sejarah / warisan budaya.
- Pembinaan dan peningkatan intensitas kegiatan kesenian, rekontruksi, revitalisasi dan regenerasi guna memacu kreatifitas.

TABEL 70
Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan pada Tahun 2016

Jenis Pelayanan Dasar Skala Propinsi /Kota/Kabupaten		Indikator SPM		Tahun					
1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan kajian seni (50%)		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1).	Seminar	1					
		2).	Sarasehan						
		3).	Diskusi	1	1	1	1	1	1
		4).	Bengkel Seni (Workshop)						
		5).	Penyerapan Nara Sumber	1	1	1	1	1	1
		6).	Studi Kepustakaan						
		7).	Penggalian	1	1	1	1	1	1
		8).	Eksperimentasi	1	1	1	1	1	1
		9).	Rekonstruksi	1	1	1	1		
		10).	Revitalisasi	1	1	1	1	1	1
		11).	Konservasi						
		12).	Studi Banding						
		13).	Inventarisasi	1	1	1	1	1	1
		14).	Dokumentasi	1	1	1	1	1	1
		15).	Pengemasan Bahan Kajian						
			Jumlah kajian seni yg dilakukan	9	8	8	8	7	7

			(%)	60	53	53	53	47	47
			Nilai	120	107	107	107	93	93
		2. Cakupan Fasilitas seni (30%)		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1).	Penyuluhan substantial/teknikal						
		2).	Pemberian bantuan						
		3).	Bimbingan organisasi						
		4).	Kaderisasi	1	1	1	1	1	1
		5).	Promosi	1	1	1	1	1	1
		6).	Penerbitan & Pendokumentasian						
		7).	Kritik Seni						
			Jumlah fasilitas seni yg dilakukan	2	2	2	2	2	2
			(%)	29	29	29	29	29	29
			Nilai	95	95	95	95	95	95
		3. Cakupan Gelar Seni (75%)		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1).	Pergelaran	1	1	1	1	1	1
		2).	Pameran	1					
		3).	Festival	1	1	1	1	1	1
		4).	Lomba	1	1	1	1	1	1
			Jumlah gelar seni yg dilakukan	4	3	3	3	3	3

			(%)	100	75	75	75	75	75
			Nilai	133	100	100	100	100	100
		4. Misi Kesenian (100%)		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1).	Misi kesenian antar daerah	1		1			
			(pertukaran budaya, diplomasi,						
			promosi) keluar daerah						
			Jumlah misi seni yg dilakukan	1	0	1	0	0	0
			Nilai	100	0	100	0	0	0
2	Sarana dan Prasaran	5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1).	Sarjana Seni				1	1	1
		2).	Pakar Seni	1					
		3).	Pamong Budaya						
		4).	Seniman/Budayawan	1	1	1	1	1	1
		5).	Kritikus						
		6).	Insan Media Massa						
		7).	Pengusaha						
		8).	Penyandang Dana						
			Jumlah SDM yg dimiliki	2	1	1	2	2	2
			(%)	25	13	13	25	25	25
			Nilai	100	50	50	100	100	100

		6. Cakupan Tempat (100%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1). Tempat menggelar seni pertunjukan & pameran	1	1	1	1	1	1
		2). Tempat memasarkan karya seni utk mengembangkan industri budaya						
		Jumlah tempat yg dimiliki	1	1	1	1	1	1
		Nilai	100	100	100	100	100	100
		7. Cakupan Organisasi (34%)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1). Organisasi struktural yg menangani kesenian	1	1	1			
		2). Lembaga/Dewan Kesenian	1	1	1	1	1	1
		3). Taman Budaya sebagai UPT yg menangani kesenian (khusus propinsi)						
		Jumlah organisasi yg dimiliki	2	2	2	1	1	1
		(%)	67	67	67	33	33	33
		Nilai	196	196	196	98	98	98

SUMBER DATA : Disbudpar Kabupaten Bulcleng, 2016

24. URUSAN KEARSIPAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Kearsipan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,** dengan kegiatan Pengumpulan Data.
- 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah,** dengan kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.
- 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,** kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta.

Tolak ukur kinerja pelaksanaan Urusan Kearsipan pada Tahun 2016 ditandai dengan capaian indikator – indikator berikut ini, yaitu :

1. Penerapan pengelolaan arsip secara baku, yakni jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 37 SKPD.
2. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan, yakni menunjukan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 3 kegiatan yakni :
 - Kegiatan Pengumpulan Data.
 - Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.
 - Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintahan/Swasta.

Pembiayaan penyelenggaraan Urusan Kearsipan dialokasikan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016, dengan realisasi anggaran terinci berikut ini :

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,** dengan kegiatan Pengumpulan Data, dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.482.830 dan terealisasi sebesar Rp. 47.086.830 atau 99,28 persen, capaian fisik sebesar 100 persen dengan hasil kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan petugas perpustakaan di 9 SKPD dan masyarakat di 50 desa di Kabupaten Buleleng.
- 2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah,** dengan kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah, dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.606.200 dan terealisasi sebesar Rp. 22.076.758 atau 86,22 persen, capaian fisik sebesar 100

persen dengan hasil kegiatan adalah meningkatnya pengumpulan data kearsipan di 39 SKPD Kabupaten Buleleng.

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta, dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.610.800 dan terealisasi sebesar Rp. 26.303.883 atau 99,85 persen, capaian fisik sebesar 100 persen dengan hasil kegiatan adalah meningkatnya pengumpulan data kearsipan di 9 SKPD dan di 30 desa di Kabupaten Buleleng.

Pembangunan di bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng. Yang didukung dengan personil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 71
Kondisi Kepegawaian Urusan Kearsipan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	3
	Pegawai Harian/Kontrak	3
2.	Pangkat/Golongan	
	Pembina	1
	Penata Tk. I	1
	Penata	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	1
	S1/D4	1
	SMA/SMK/MTs	4
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Struktural :	
	Eselon IVa	1 Orang

	Pejabat Fungsional	
	1. Nama Jabatan Fungsional	1 Orang

Sumber data : Kantor Pusipda Kabupaten Buleleng, 2016

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPd usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, Selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan baik hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Kearsipan ; kurang. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 113.652.500,00, Total Aset yang dipergunakan/ Kondisi baik Rp. 113.652.500,00. Jadi tidak ada aset yang tidak dipergunakan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, masih ada sedikit permasalahan utamanya menyangkut SDM tenaga teknis kearsipan kurang memadai, namun solusinya pembinaan dan motivasi aktif selalu kami lakukan dengan baik, sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

25. URUSAN PERPUSTAKAAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 4 (Empat) program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional.
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara.

3. Program Perencanaan Anggaran SKPD

- Penyusunan Anggaran SKPD

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca.
- Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat.
- Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Perpustakaan ditandai dengan pencapaian indikator – indikator berikut ini :

a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

- Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah 10.552 Judul.
- Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah 21.103 buku.

b. Pengunjung perpustakaan.

- Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 8.948 orang.
- Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 629.188 orang.

Capaian kinerja keuangan Urusan Perpustakaan secara rinci pada Tahun anggaran 2016 termuat dalam tabel berikut.

Tabel 72
Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan.

PROGRAM / KEGIATAN		DANA Rp.	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	585,051	585,000	99.99	100
2	Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan listrik	58,593,230	52,988,484	90.43	100
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	68,000,000	67,960,950	99.94	100
4	Penyedia jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	1,414,000	1,414,000	100.00	100
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	250,710,000	247,680,000	98.79	100
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50,102,210	49,102,210	98.00	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	7,612,510	7,612,510	100.00	100
8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	7,854,860	7,852,330	99.97	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3,171,355	3,171,355	100.00	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,010,200	13,005,200	99.96	100
11	Penyediaan makanan dan minuman	4,188,000	4,188,000	100.00	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/ dalam daerah	51,387,250	51,309,300	99.85	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana / prasarana upacara	27,650,000	27,538,926	99.60	100
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	3,715,000	3,704,300	99.71	100
Program Perencanaan Anggaran					
1	Penyusunan anggaran SKPD	22,395,000	20,855,000	93.12	100
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
1	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	141,554,070	141,554,060	100.00	100
2	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus sekolah dan masyarakat	62,602,250	62,560,129	99.93	100
3	Pengembangan minat budaya baca	24,308,300	224,301,850	100.00	111

Sumber data : Kantor Pusipda Kabupaten Buleleng, 2016

Pembangunan di bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng, dengan dukungan personil sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 73
Kondisi Kepegawaian Urusan Perpustakaan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	19
	Pegawai Harian/Kontrak	19
2.	Pangkat/Golongan	
	Pembina Tk.I (IV/b)	2
	Pembina	3
	Penata Tk. I	3
	Penata	3
	Penata Muda Tk. I	3
	Penata Muda	2
	Pengatur Tk. I	2
	Juru Tk. I	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	3
	S1/D4	11
	D3	2
	SMA/SMK/MTs	22
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Struktural :	
	Eselon IIIa	1 Orang
	Eselon IVa	3 Orang
	Pejabat Fungsional	
	1. Pustakawan Madya	3 Orang

Sumber data : Kantor Pusipda Kabupaten Buleleng, 2016

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPd usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, Selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan baik hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Perpustakaan ; kurang. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 3.868.426.628,00, Total Aset yang dipergunakan/ Kondisi baik Rp. 3.819.837.052,00, dan Total Aset yang tidak dipergunakan/ rusak Rp. 48.589.576,00.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, tidak ada permasalahan yang berarti, sehingga pelaksanaannya dapat terselenggara dengan baik sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN.

Tahun 2016 terdapat 8 Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Buleleng, yang meliputi Urusan Perikanan, Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Pariwisata, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Urusan Industri, Urusan Perdagangan dan Urusan Transmigrasi.

1. URUSAN PERIKANAN.

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara pulau Bali dengan luas daratan 365,88 Km², Sedangkan panjang pantai ± 157,05 Km, sehingga pada radius 4 Mil luas perairan laut Kabupaten Buleleng adalah : 1.166,75 Km². Secara Administrasi Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 7 Kecamatan memiliki wilayah pantai (pesisir) dan 2 Kecamatan tidak memiliki wilayah pantai, tetapi memiliki danau dan sawah. Jadi dilihat dari luas wilayah daratan dan lautan Kabupaten Buleleng hampir berimbang.

Dengan melihat letak geografis Kabupaten Buleleng mempunyai potensi yang sangat besar dibidang perikanan baik laut maupun darat. Adapun potensi perikanan dan kelautan meliputi :

- Luas perairan laut Kabupaten Buleleng lebih kurang 1.166,75 Km² dan panjang pantainya 157,05 km, dimana di dalamnya terkandung berbagai jenis ikan, baik ikan pelagis maupun ikan demersal maupun ikan karang yang diperkirakan patensi lestarnya sebesar 12.538,00 ton pertahun. Luas lahan potensial untuk budidaya laut diperkirakan ± 1.000 Ha.
- Potensi perikanan darat meliputi potensi perairan umum yang terdiri dari danau seluas 446 Ha dan sungai 25 Ha. Disamping itu juga luas lahan potensial untuk budidaya air payau (tambak) adalah 500 Ha yang terdiri dari lahan pasang surut 350 Ha dan lahan non pasang surut 150 Ha. Untuk budidaya air tawar terdiri dari potensi budidaya kolam adalah 130,0 Ha, Mina padi seluas 1300,0 Ha. Jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan baik nelayan laut maupun danau sebanyak 5.341 orang yang tergabung dalam 162 kelompok, untuk pembudidaya ikan sebanyak 2.865 orang yang tergabung dalam 120kelompok pembudidaya, sedangkan untuk kelompok pengolah dan pemasar sebanyak 1.216 orang yang tergabung dalam 52 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebagian besar bermukim di wilayah pesisir yang kehidupannya masih ada dibawah garis kemiskinan.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan adalah :

- Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap.
- Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya.
- Terwujudnya peningkatan konsumsi ikan masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan usaha bidang perikanan dan kelautan.
- Terwujudnya penurunan pelanggaran diperairan umum atau laut.
- Terwujudnya peningkatan SDM perikanan dan kelautan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang perikanan dan kelautan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 7 program dan 20 kegiatan, yaitu :

1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Latar belakang program banyaknya masyarakat miskin yang berusaha dalam usaha mikro. Program ini dilaksanakan karena melihat kemampuan para nelayan yang sebagian besar pendapatannya masih di bawah kemiskinan maka salah satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan mereka adalah permodalan. Adapun usaha untuk memberdayakan masyarakat pesisir adalah dengan memberikan penguatan modal yang tujuannya untuk meningkatkan usaha di bidang yang mereka kelola. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir, dimana dalam kegiatan ini kelompok nelayan yang memperoleh dana bantuan langsung masyarakat (BLM) terus dimonitoring dan dievaluasi sejauh mana dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya para nelayan/pembudidaya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.

Latar belakang program masih banyaknya terjadi pengrusakan sumberdaya perikanan dan kelautan yaitu dengan terjadinya pengeboman ikan, penggunaan bahan beracun (kimia) seperti potasium dalam penangkapan ikan dan juga penggalian terumbu karang dengan menggunakan ganco. Dengan terjadinya kegiatan seperti ini dapat menghancurkan kelestarian lingkungan laut dan pesisir. Program ini dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan,

- Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lingkungan perairan dan kelautan.

Sasaran program ini adalah untuk menurunkan tikkat pelanggaran masyarakat terhadap perusakan sumber daya perikanan dan melaksanakan pelestarian sumberdaya perikanan.

3) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat.

Program ini dilaksanakan karena masyarakat perlu dipupuk rasa kecintaan terhadap budaya kelautan sehingga mereka tahu akan manfaat dan potensi laut yang ada di Kabupaten Buleleng. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan budaya kelautan. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya wawasan atau pengetahuan masyarakat di bidang perikanan dan kelautan sehingga terpupuk rasa cinta bahari melalui lomba perahu layar, bersih pantai dan perayaan Hari Nusantara.

4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

Program ini dilaksanakan karena tersedianya potensi perikanan laut, perairan umum, dan darat yang cukup besar, namun disisi lain untuk kegiatan budidaya dengan kondisi masyarakat pembudidaya yang memprihatinkan. Untuk menunjang produktifitas pembudidaya dalam meningkatkan produksi budidayasehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

- Pengembangan bibit ikan unggul.
- Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan.
- Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya air laut dan payau.
- Pembinaan dan pengembangan budidaya air tawar.
- Pembinaan dan pengembangan pembenihan ikan.
- Penanggulangan dan Pengendalian hama dan penyakit ikan.

5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Program ini dilaksanakan karena terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki kelompok nelayan. Untuk menunjang produktifitas nelayan dalam meningkatkan produksi hasil tangkapannya maka program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap,
- Pengembangan sarana perikanan tangkap,

- Pengembangan prasarana perikanan tangkap.
- Penyelenggaraan urusan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

6) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

Latar belakang Program ini dilaksanakan karena masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan maupun teknologi bidang perikanan dan kelautan yang dimiliki dan akan diterapkan oleh aparat maupun masyarakat perikanan dan kelautan, baik dari segi kelembagaan yaitu berupa kelompok nelayan dan pembudidaya maupun dari segi wawasan yang dimiliki oleh anggota kelompoknya. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan kajian sistem penyuluhan perikanan.

7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Program ini dilaksanakan untuk mendukung usaha perikanan yang kondusif baik dalam meningkatkan investasi, akses pasar dan permodalan. Disamping itu juga untuk meningkatkan mutu hasil perikanan. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan yaitu :

- Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,
- Peningkatan prasarana dan sarana pengolahan hasil perikanan,
- Pembinaan dan pengolahan mutu hasil perikanan,
- Pemantapan pemasaran produksi perikanan,
- Pengembangan dan penatausahaan perikanan.

Kondisi capaian kinerja bidang perikanan Tahun 2016 ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan serta nilai jualnya. Produksi perikanan laut Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 mencapai 17.293,5 ton dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 283.681.506.000. Produksi perikanan laut didukung oleh hasil perikanan tangkap di laut sejumlah 16.383,7 ton dengan nilai penjualan sekitar Rp. 241.189.656.000, dan perikanan budi daya laut yang meliputi budidaya rumput laut 7,2 ton, kerapu 190,5 ton, mutiara 5,5 ton dan budidaya kakap sebanyak 652,6 ton dengan nilai keseluruhan mencapai 42.491.850.000. Sedangkan untuk produksi perikanan darat pada Tahun 2016 mencapai 1.948,1 ton dengan nilai mencapai Rp. 81.874.585.000, yang terdiri atas produksi penangkapan di perairan umum yakni penangkapan di danau yang mencapai 125,9 ton senilai Rp. 1.981.586.000 dan hasil budidaya ; budidaya di air payau (tambak) sejumlah 2.468,5 ton, budidaya kolam 68,2 ton dan budidaya KJA sejumlah 47 ton dengan nilai keseluruhan mencapai 110.592.315.000.

Untuk total produksi perikanan pada Tahun 2016 mencapai 19.949 ton dengan nilai penjualan mencapai Rp. 396.255.407.000. Jika dibandingkan dengan hasil produksi pada Tahun 2015 terdapat kenaikan produksi sebesar 2,12 persen, namun disisi lain dari hasil penjualan mengalami penurunan sekitar 9,08 persen. Hal ini dikarenakan adanya pluktuasi harga produksi perikanan baik di pasar lokal maupun nasional.

Pembangunan di bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng. Dengan struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Dinas (Eselon II/b), Sekretaris Dinas (Eselon III/a), Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil dan Kepala Sumber Daya (Eselon III/b), Kepala Seksi Sarana Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Prasarana Perikanan Tangkap, Kepala Seksi Pengembangan Produksi Penangkapan, Kepala Seksi Budidaya Air Laut dan Payau, Kepala Seksi Budidaya Air Tawar, Kepala Seksi Pembenihan dan Kesehatan Ikan, Kepala Seksi Pengolahan dan Bina Mutu, Kepala Seksi Pengembangan dan Pelayanan Usaha, Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan, Kepala Seksi pengawasan pengendalian sumber daya ikan & penegakan hukum, Kepala Seksi konservasi tata ruang laut dan pesisir, Kepala Seksi penyuluhan & pemberdayaan masyarakat pesisir, Kasubbag perencanaan, Kasubbag umum, Kasubbag Keuangan (Eselon IV/a), UPTD ; Kepala Pasar Benih Ikan, Kepala Balai Benih Ikan, Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan (Eselon IV/b).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng berjumlah 65 orang. Dengan pangkat dan golongan terdiri atas : Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina Tk.I (IV/b) ; 3 orang, Pembina (IV/a) ; 4 orang, Penata Tk.I (III/d) ; 18 orang, Penata (III/c) ; 8 orang, Penata Muda Tk.I (III/b) ; 11 orang, Penata Muda (III/a) ; 4 orang, Pengatur Tk.I ; 1 orang, Pengatur (II/c) ; 8 orang, Pengatur Muda Tk.I ; 6 orang, Juru (I/c) ; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan meliputi : Strata 2 (S2) ; 2 orang, Strata 1/ Diploma 4 (S1/D4) ; 31 orang, Diploma 3 (D3) ; 10 orang, SMA/SMK/Mts ; 21 orang, SMP/MI ; 1 orang. Jumlah Pejabat Struktural : Eselon II/b ; 1 pejabat, Eselon III/a ; 1 pejabat, Eselon III/b ; 4 pejabat, Eselon IV/a ; 17 pejabat, Eselon IV/b ; 3 pejabat. Jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng meliputi ; Penyuluh perikanan Madya ; 1 orang, Penyuluh Perikanan penyelia ; 6 orang, Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan ; 2

orang, Penyuluh Perikanan Pertama ; 6 orang, Penyuluh Perikanan Pelaksana ; 1 orang.

Untuk penyelenggaraan Urusan Perikanan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.11.379.191.816,95 dan terealisasi sebesar Rp.10.898.484.306 atau 95,78 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.5.287.731.000 dan terealisasi Rp. 5.247.792.427 atau 99,24 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 6.091.460.816,95 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp.5.650.691.879 atau mencapai 92,76 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.391.120.000 dan terealisasi Rp.389.820.000, atau 99,67 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.4.154.557.316,95 dan terealisasi Rp.3.796.771.279 atau mencapai 91,39 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.1.545.783.500 dan terealisasi Rp.1.464.100.600 atau 94,72 persen. Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :

- Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir sebanyak 7 kali.
- Terwujudnya peningkatan kemampuan 6 kelompok dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan (SDK).
- Meningkatnya 2 lokasi stock ikan di perairan umum.
- Meningkatnya pemahaman 9 kelompok masyarakat tentang konservasi dan pengelolaan pesisir.
- Meningkatnya upaya masyarakat dalam monitoring terumbu karang sebanyak 1 kali.
- Meningkatnya kecintaan masyarakat dan generasi muda terhadap lingkungan perairan dan kelautan sebanyak 1 kali.
- Meningkatnya pemahaman tentang bidang perikanan di 7 kecamatan.
- Terdistribusinya bibit ikan unggul (5 Jenis) sebanyak 1.273.070 ekor.
- Terwujudnya 2 paket sarana dan prasarana pembenihan.
- Terwujudnya 3 paket bangunan kantor yang memadai.
- Tersedianya operasional balai benih ikan selama 12 bulan.
- Terwujudnya 9 kelompok pembudidaya ikan.
- Terwujudnya pembinaan budidaya air tawar bagi 23 kelompok pembudidaya.
- Terwujudnya sarana dan prasarana pembenihan ikan sebanyak 1 paket.
- Terwujudnya peningkatan pengetahuan 10 kelompok pembenihan ikan.

- Tertanggulangnya pengendalian hama penyakit ikan pada 10 kelompok pembenihan ikan.
- Tersedianya 1 dokumen data ikan terserang hama penyakit.
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 16 kelompok nelayan.
- Semakin kuatnya status nelayan sebagai pelaku pembangunan perikanan tangkap sebanyak 400 orang.
- Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan 14 forum KUB Kabupaten Buleleng.
- Suksesnya pelaksanaan lomba dayung pedau SAR.
- Suksesnya pelaksanaan lomba foto baeah air/BBDF.
- Suksesnya pelaksanaan lomba lukis alam laut/BBDF.
- Terwujudnya operasional pamgkalan pendaratan ikan (PPI) selama 12 bulan.
- Mningkatnya wawasan masyarakat perikanan tentang kelembagaan Kelompok bagi 12 kelompok nelayan.
- Meningkatnya kualitas mutu dan pengolahan hasil perikanan bagi 15 kelompok nelayan.
- Meningkatnya pengetahuan kelompok pemasar ikan bagi 15 kelompok.
- Meningkatnya usaha di bidang perikanan dan kelautan sebanyak 50 pengusaha.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan Urusan Perikanan ; cukup. Total asset yang dikuasai senilai Rp. 27.973.723.861,52. Sedangkan asset yang dipergunakan senilai Rp. 27.636.568.906,52 dan asset yang tidak dipergunakan senilai Rp. 337.154.955,00.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perikanan pada Tahun 2016 adalah pembangunan kolam nila 1 paket untuk 1 kelompok pembudidaya ikan dan pengadaan 3 unit sarana pemasaran bergerak berupa kendaraan roda dua beserta kelengkapannya tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2016 hal ini disebabkan karena :

- Calon penerima hibah belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu wajib berbadan hukum.
- Peraturan Bupati Buleleng tentang tata kelola hibah/bansos dan terakhir SK Bupati Buleleng tentang penetapan calon penerima hibah dikeluarkan pada akhir bulan Oktober 2016.

2. URUSAN PERTANIAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pertanian pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 14 program dan 41 kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatannya sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Perencanaan Anggaran SKPD.

- Penyusunan Anggaran SKPD.

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).

- Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan.
- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
- Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija.
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa.
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.

- Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah.

8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna.

9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.

- Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.
- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan.
- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan.

10. Program Peberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan.
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh.

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

- Pendataan Masalah Peternakan.
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
- Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

- Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat.
- Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak.

13. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

- Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan.

14. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

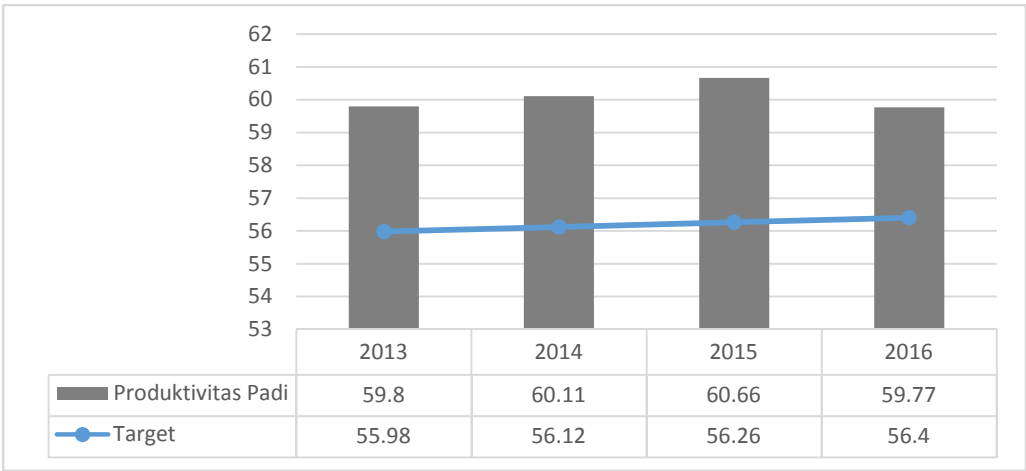
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Capaian kinerja bidang pertanian ditunjukkan melalui pencapaian indikator berikut ini.

1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai :
 - Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) sebesar 137.243 ton/tahun
 - Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) adalah seluas 22.666 Ha
2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2015 mencapai 5.827.841,27 juta rupiah, mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen dari Tahun 2014 yang mencapai 4.926.772,75 juta rupiah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produktivitas padi diperoleh dengan cara membagi jumlah produksi dengan luas panen (kw/ha). Hasil yang diperoleh untuk produktivitas padi sebesar 59,77 kw/ha atau 105,98 % dari target. Peningkatan produktivitas padi tersebut didukung dengan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat petani yaitu dengan menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1, Sistem tanam SRI (System Rice of Intensification) dan penyediaan sasaran produksi yang memadai seperti benih bersubsidi, pupuk bersubsidi dengan penerapan pemupukan berimbang yang berbasis spesifik lokasi, serta tersedianya alat dan mesin pertanian yang memadai pula.

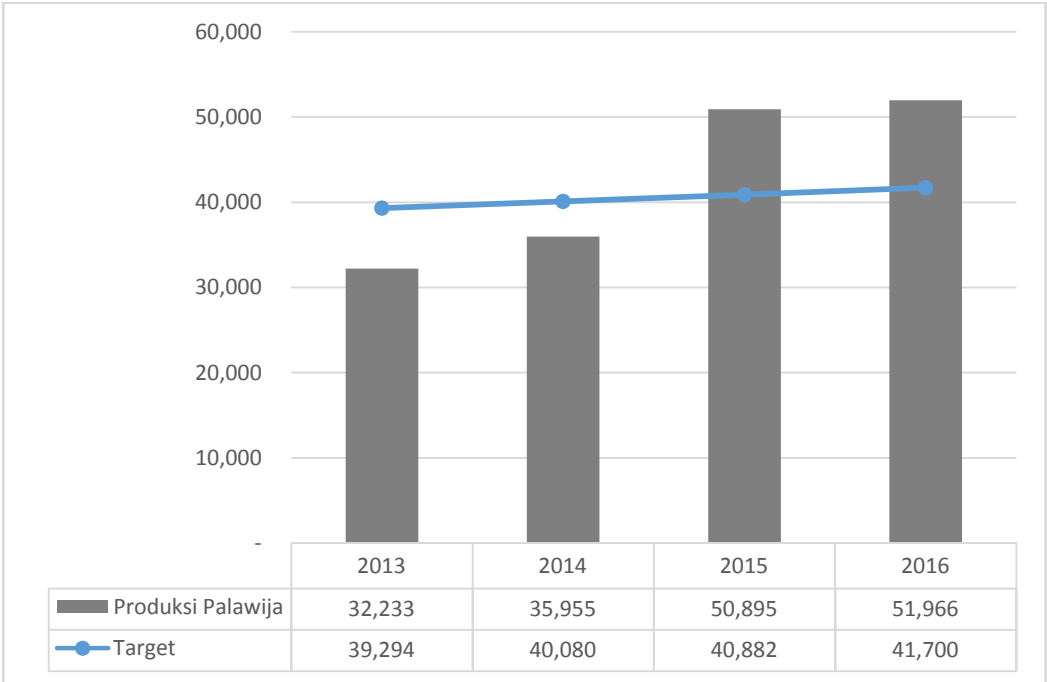
Gambar 11
Capaian Produktivitas Padi 1



Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi palawija mencapai 51.966 ton/tahun atau 124,62 % dari target. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas. Peningkatan produksi palawija tersebut didukung melalui kegiatan intensifikasi dan penyediaan sarana produksi yang memadai. Terjadinya peningkatan produksi palawija tersebut didukung melalui kegiatan pengembangan intensifikasi budidaya tanaman jagung hibrida seluas 2.000 ha. Selain pengembangan jagung juga dilaksanakan kegiatan intensifikasi budidaya tanaman kedelai seluas 250 ha.

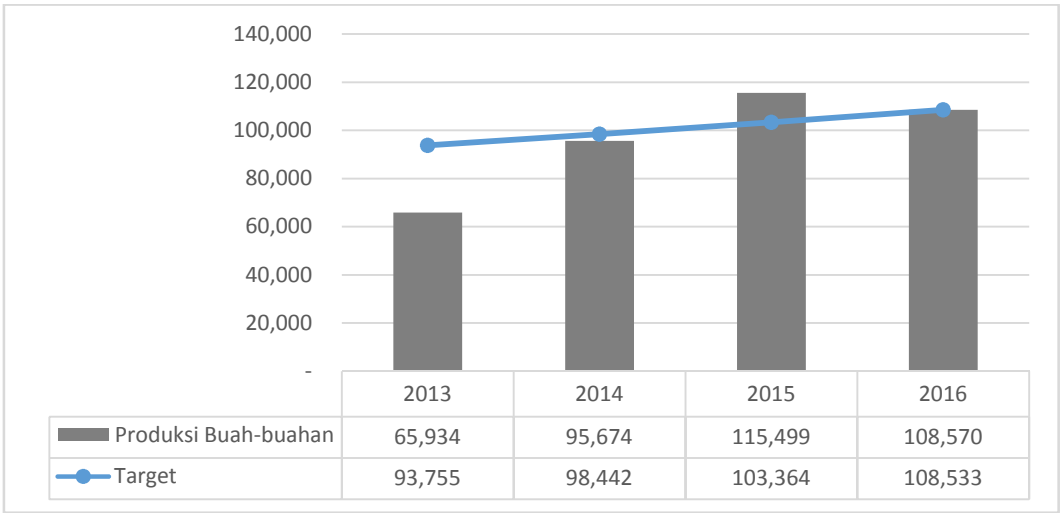
Gambar 12
Capaian Produktivitas Padi 2



Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi buah-buahan diperoleh dengan cara mengalikan luas panen dengan produktivitas. Hasil yang diperoleh mencapai 108.570 ton atau 100,03 % dari target. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini adalah perluasan areal tanam yang dilakukan oleh petani dan juga tidak terlepas dari penerapan hasil SL GAP yang dilakukan oleh petani.

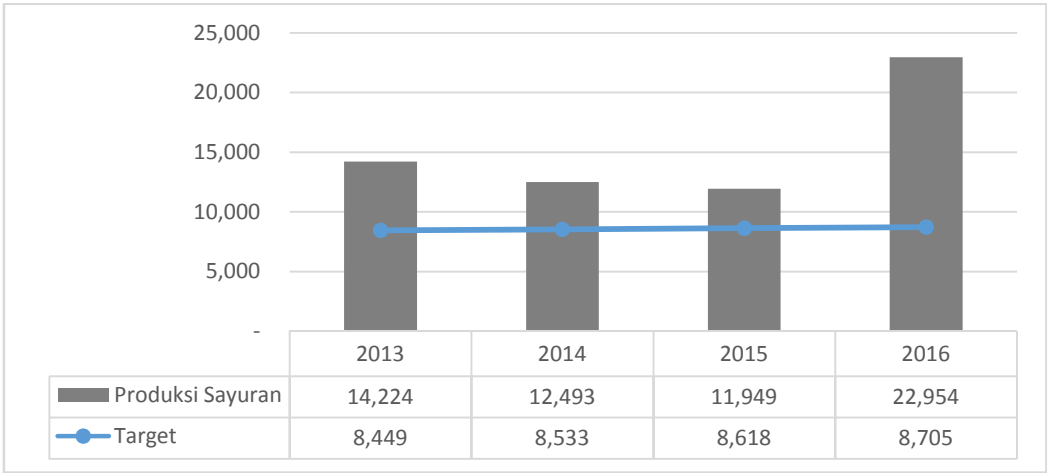
Gambar 13
Capaian Produksi Buah-buahan



Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi sayur-sayuran mencapai 22.954 ton atau 263,68 % dari target. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dengan mengalikan luas panen dengan produktivitas. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini adalah kenaikan produksi di beberapa komoditas sayuran seperti cabai rawit merah, cabai besar dan wortel. Peningkatan ini disamping karena bertambahnya luas tanam juga disebabkan penerapan SL GAP oleh petani serta dampak stabilnya harga cabai merah di pasaran.

Gambar 14
Grafik Capaian Produksi Sayur-sayuran



Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak diantaranya sapi potong, ayam buras, babi, kambing, ayam ras, itik dan kerbau rata-rata tidak mencapai target. Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran jumlah populasi ternak disebabkan beberapa hal diantaranya adalah adanya pemutahiran data Sensus Pertanian dan program PSPK yang mendata keseluruhan pemilik sapi potong dan kerbau sampai ketingkat rumah tangga sehingga terjadi perubahan data karena perhitungan estimasi yang biasa digunakan diperbaiki, selain itu harga ternak sapi di pasar yang cukup tinggi sehingga peternak cenderung menjual ternaknya, gairah peternak untuk membudidayakan ternak menurun karena harga pakan yang berkualitas harganya mahal, SDM generasi muda yang enggan melanjutkan budidaya peternakan dan mereka lebih memilih menjadi pekerja disektor industri ataupun lainnya, sehingga dengan kondisi ini maka laju pertumbuhan peternakan terhambat serta penerapan teknologi pada sektor ini menurun.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi daging mencapai 11.173,15 ton atau 103,60 % dari target. Perhitungan produksi daging merupakan penjumlahan produksi daging sapi potong, ayam buras, babi, kambing, ayam ras, itik dan kerbau. Perhitungan produksi daging ternak besar dan kecil, dihitung dengan mengkalikan jumlah ternak yang dipotong dengan karkas. Karkas adalah bagian dari hewan ternak setelah disembelih dan dikurangi kepala, kaki, kulit, tulang, jeroan dan semua bagian yang tidak lazim dimakan. Tercapainya target disebabkan meningkatnya kebutuhan daging ayam ras, hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan peningkatan konsumsi daging ayam sebagai alternatif pilihan akibat terjadinya peningkatan harga daging sapi dan babi.

Pencapaian indikator kinerja sasaran jumlah produksi telur mencapai 1.180,50 ton atau 77,99 % dari target. Perhitungan produksi telur diperoleh dari penjumlahan telur ayam buras, ayam ras petelur dan telur itik. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan disebabkan peternak ayam buras maupun ayam ras petelur serta peternak itik memelihara dalam jumlah yang kecil dan belum skala usaha.

Untuk penyelenggaraan Urusan Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja Langsung sebesar Rp. 13.413.396.819 dan terealisasi sebesar Rp. 12.918.162.278 atau 96,31 persen, yang terdiri atas : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 462.075.000 dan terealisasi Rp. 451.070.000, atau 97,61 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.

11.274.639.955,57 dan terealisasi Rp. 10.956.129.278 atau mencapai 97,17 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp. 1.676.681.863 dan terealisasi Rp. 1.510.963.000 atau 90,11 persen.

Pembangunan di Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, didukung dengan personil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 74
Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Pertanian

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
a.	PNS	158 orang
b.	- Pegawai Harian	1 orang
	- Kontrak Daerah	45 orang
	- Kontrak Pusat	53 orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
	Pembina Tk.I (IV/b)	5 orang
	Pembina	16 orang
	Penata Tk. I	38 orang
	Penata	36 orang
	Penata Muda Tk.I	25 orang
	Penata Muda	14 orang
	Pengatur Tk.I	3 orang
	Pengatur	8 orang
	Pengatur Muda Tk.I	10 orang
	Juru Tk.I	1 orang
	Juru	1 orang
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	7 orang
	SI/D4	83 orang
	D3	9 orang
	D1	7 orang
	SMA/SMK/MTs	48 orang
	SMP/MI	4 orang
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1 orang
	Eselon IIIa	1 orang
	Eselon IIIb	5 orang
	Eselon Iva	16 orang
	Pejabat Fungsional	
	2. Fungsional Umum	56 orang
	3. Fungsional Arsiparis	1 orang
	4. Fungsional medik Veteriner	1 orang

	5. Fungsional POPT	9 orang
	6. Fungsional PPL	68 orang

Sumber data : Distanak Kabupaten Buleleng, 2016

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD. DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan Pertanian adalah cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD sejumlah Rp. 32.792.077.524,43. Aset yang dipergunakan / kondisi baik sebesar Rp. 32.582.730.510,00 dan Aset yang tidak dipergunakan Rp. 209.347.014,43.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Masih adanya gangguan penyakit baik pada tanaman pangan, hortikultura maupun pada ternak.
Pengalaman menunjukkan bahwa tahun-tahun terakhir ini kondisi iklim sulit diprediksi. Anomali iklim sulit diramalkan dengan tepat (baik kapan terjadi maupun intensitasnya). Gangguan anomali iklim erat kaitannya dengan perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit ternak yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan secara tuntas.
2. Skala usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi.
Luas pemilikan lahan rata-rata relatif kecil (lebih kurang 0,30 Ha), akan mengakibatkan pengelolaan usaha tani tidak efisien dan akan berdampak pada produksi/produktivitas. Disamping itu dengan sifat produksi pertanian yang bersifat musiman akan mempengaruhi fluktuasi harga.
3. Penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal.

Teknologi yang ada belum diaplikasikan secara optimal oleh petani, yang berdampak belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada. Beberapa faktor yang diperkirakan menghambat penerapan teknologi oleh petani adalah karena keterbatasan petani seperti permodalan, aksesibilitas terhadap sumber informasi keterampilan petani dan insentif harga yang diterima.

4. Degradasi sumber daya air.

Sumber daya air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Debit air untuk irigasi juga berkurang.

5. Terbatasnya sarana / prasarana.

Dalam upaya penyediaan sarana produksi terutama benih dan bibit bermutu belum handal dan belum memiliki prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat, dan harga. Demikian pula halnya dengan Alsin (alat dan mesin) pertanian relatif masih terbatas.

6. Pangsa pasar ekspor produksi pertanian masih kecil, sementara produksi yang dimiliki cukup besar.

7. Pondasi pasar agribisnis belum tersentuh dengan kokoh sehingga sistem dan usaha agribisnisnya belum berkembang seperti yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan langkah alternatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

1. Mengadakan penyikapan, pengamatan, pengawasan, pencegahan, pengendalian dan pengobatan serta pemberantasan penyakit baik pada tanaman maupun pada ternak/ hewan.
2. Optimalisasi dan intensifikasi pengelolaan lahan.
3. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen, pengolahan hasil dan mengembangkan produksi sesuai potensi pasar.
4. Berkoordinasi dengan sumber-sumber inovasi teknologi.
5. Meningkatkan penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani.
6. Mengembangkan pilot proyek dan percontohan penerapan teknologi usaha tani.
7. Mengembangkan sistem pelayanan bagi petani (kelompok tani dan usaha agribisnis Off Farm seperti pelayanan penyediaan modal usaha (kredit).
8. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan kemandirian petani dalam usaha pertanian.
9. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan usaha pada bidang pemasaran hasil pertanian.

10. Pengembangan bantuan sarana dan prasarana pertanian (alsintan, cubang, embung, perbaikan jaringan irigasi ditingkat petani).
11. Meningkatkan pelayanan informasi pasar dan promosi hasil-hasil pertanian.
12. Penyebaran bibit ternak: sapi, babi, ayam buras dan pengamanan betina produktif.

3. URUSAN KEHUTANAN.

Program dan Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang kehutanan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 4 program dan 10 kegiatan, yaitu :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

- Kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu.
- Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
- Kegiatan pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan.

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

- Kegiatan pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan.
- Kegiatan penanaman pohon pada kawasan hutan industry dan hutan wisata / dalam kawasan dan luar kawasan.
- Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.

- Kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan.

4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

- Kegiatan pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan.
- Kegiatan pengembangan data statistik hutan dan lahan.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Luas hutan di Kabupaten Buleleng sampai Tahun 2016 mencapai 51.436,21 Ha yang terdiri atas hutan alam seluas 42.387,61 Ha dan Hutan Tanaman seluas 9.048,60 Ha. Cakupan luas hutan di Kabupaten Buleleng meliputi kawasan Hutan Bali Barat ; RPH Sumberklampok seluas 12.832,57 Ha, RPH Sumberkima ; 7.692,91 Ha, RPH Gerokgak ; 7.997,75 Ha, RPH Seririt ; 5.942,54 Ha, RPH Dapdap Putih ; 7.186,23 Ha. Kemudian Kawasan

Hutan Yeh Leh – Yeh Lebah ; RPH Dapdap Putih seluas ; 98 Ha. Kawasan Hutan Gunung Batukaru ; RPH Banjar seluas 2.232,45 Ha, RPH Sukasada ; 1.094,66 Ha. Kawasan Hutan Gunung Mungsu ; RPH Banjar seluas ; 68,34 Ha, RPH Sukasada ; 1.065,66 ha. Kawasan Hutan Puncak Landep seluas 590 Ha, Kawasan Hutan Gunung Silanjana seluas ; 11,28 Ha. RPH Kubutambahan di kawasan hutan Gunung Batukaru seluas ; 2.590,15 Ha, di kawasan hutan Gunung Silangjana seluas 403,72 Ha dan Kawasan Hutan Penulisan Kintamani pada RPH Tejakula seluas 1.629,95 Ha. Berdasarkan fungsinya hutan di Kabupaten Buleleng terbagi atas Hutan Lindung seluas 31.936,32 Ha, Hutan Produksi seluas 4.731,95 Ha dan Hutan lainnya seluas 13.763,54 Ha. **Untuk menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sampai Tahun 2016 telah dilaksanakan usaha reboisasi pada Hutan dan lahan kritis seluas 100 Ha.** Sedangkan total luas hutan dan kritis sampai Tahun 2016 sejumlah 19.031,84 Ha. Untuk luas kerusakan kawasan hutan Tahun 2016 seluas 2 Ha dari keseluruhan luas kawasan hutan yang berjumlah 51.436,21 Ha.

Untuk penyelenggaraan Urusan Kehutanan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp.13.805.518.647,89 dan terealisasi sebesar Rp.11.792.891.863 atau 85,42 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.7.138.626.000 dan terealisasi Rp. 7.040.305.367 atau 98,62 persen dan belanja langsung sebesar Rp. 6.666.892.647,89 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp.4.752.586.495 atau mencapai 71,29 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.313.515.000 dan terealisasi Rp.305.395.000, atau 97,41 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp.5.997.877.647,89 dan terealisasi Rp.4.111.982.495 atau mencapai 88,58 persen, Belanja Modal dengan anggaran Rp.355.500.000 dan terealisasi Rp.335.209.000 atau 94,29 persen.

Pembangunan di bidang kehutanan daerah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng, dengan dukungan pegawai sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 75
Kondisi Pegawai Yang Menangani Urusan kehutanan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	84
	Pegawai Harian /Kontrak	25
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	5
	Pembina	13
	Penata Tk. I	19
	Penata	13
	Penata Muda Tk.I	14
	Penata Muda	3
	Pengatur Tk.I	2
	Pengatur	3
	Pengatur Muda Tk.I	8
	Pengatur Muda	1
	Juru Tk.I	1
	Juru	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	7
	SI/D4	43
	D3	8
	SMA/SMK/MTs	44
	SMP/MI	6
	SD	1
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	5
	Eselon Iva	17
	Pejabat Fungsional	
	1. Penyuluh Kehutanan (PKL)	14
	2. Penyuluh Perkebunan (PPL)	13

Sumber data : Dinas Dishutbun Kabupaten Buleleng, 2016

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPDP Tahun 2016. RKPDP

digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan kehutanan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp 2.640.418.000,00, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp 2.640.418.000,00 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp 11.200.000,00.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara prinsip tidak ada namun lebih nkepada ketersediaan sarana prasarana yakni masih kurangnya gedung atau bangunan untuk gudang penyimpanan barang. Solusinya adalah dianggarkannya belanja modal untuk pembuatan gedung dan bangunan.

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang energi dan SDM pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 1 program dan 2 Kegiatan, Yaitu **Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).** Program ini dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 22.162.776.989 dan terealisasi sebesar Rp. 21.298.564.058 atau 96,10 persen. Realisasai anggaran untuk tiap kegiatan meliputi Kegiatan Pemeliharaan Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 17.988.468.189 dan terealisasi Rp. 17.125.525.808 atau 95,20 persen dan capaian fisiknya 100 persen. Hasil kegiatannya adalah Terpasangnya dan Terpeliharanya LPJU di 1500 Titik/12 Bulan. Sedangkan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.174.308.800 dan terealisasi sebesar Rp. 4.173.038.250 atau 99,97 dengan capaian fisik 100 persen. Hasilnya adalah terwujudnya Pemasangan Energi Perdesaan di 9 Kecamatan.

Salah Satu sumber energi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng adalah Energi Listrik yaitu Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), yang bertujuan memberikan penerangan pada ruas-ruas jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten pada malam hari, guna memperlancar arus lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan dan kriminalitas serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memasang lampu penerangan jalan umum, melakukan pemeliharaan dan memasang jaringan dengan meterisasi.

Adapun pemasangan dan pemeliharaan LPJU pada 9 kecamatan sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebanyak 12.013 titik. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebanyak 12.089 titik. Sedangkan pelayanan LPJU sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebanyak 12.240 titik.

Luas areal pertambangan di Kabupaten Buleleng khususnya Bahan Galian Batuan sesuai dengan data informasi pertambangan Dinas PU Propinsi tahun 2007, diperoleh data sebaran dan potensi bahan galian batuan seluas 4.606 Ha, dengan cadangan tereka 497.675.000 tersebar di 9 Kecamatan. Potensi tersebut masih merupakan indikasi tereka dan masih perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pemetaan terukur untuk mengetahui jenis dan potensinya secara pasti. Data terukur potensi bahan galian batuan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa di Dusun Abasan Desa Sangsit Kecamatan Sawan mempunyai potensi Jenis Galian Batu abu Taro/ Paras dengan Volume cadangan 539.708,20 M³ seluas ± 4.500 Ha dan Dusun Dajan Rurung Desa Banjarasem Kecamatan Seririt terdapat Tanah urug dengan volume cadangan 174.911,80 M³, Breksit dengan volume cadangan 149.924,40 M³, Batu Andesit dengan volume cadangan 3.508.094,60 M³, dengan Luas areal ± 8.62 Ha. Selanjutnya di Dusun Alas Sari Desa Pacung Kecamatan Tejakula terdapat potensi Batu Kali seluas 59,50 Ha, Batu Kerikil seluas 8 Ha, Batu Pilah seluas 30,30 Ha, Batu Merah seluas 5,63 Ha dan Sirtu seluas 5 Ha.

Jumlah kegiatan usaha pertambangan bahan galian batuan yang sudah berijin sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 15 penambang. Dan diprediksi akan terus bertambah pada tahun 2016 menjadi 18 penambang. Sedangkan untuk pemanfaatan air tanah sampai dengan tahun 2015, jumlah pemakai air tanah yang sudah dibina adalah 407 pengusaha dan sudah memiliki ijin sebanyak 379 pengusaha, sedangkan sampai akhir tahun 2015 diprediksi menjadi 420 pengusaha yang sudah berijin dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menghitung luas areal dan volume bahan tambang Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan geologi sehingga dapat diketahui potensinya secara pasti dan terukur. Lokasi bahan galian batuan di Kabupaten Buleleng yang telah dilakukan pemetaan potensinya secara terukur adalah Kecamatan Gerokgak, Tejakula, Seririt, Sukasada dan Kubutambahan, seluas 4.606 Ha dari luasan tereka dengan potensi cadangan sebesar 497.675.000 m³. Data tersebut masih merupakan prediksi dan masih perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pemetaan terukur untuk mengetahui potensinya secara pasti.

Pembangunan di bidang energi dan SDM dilaksanakan oleh Dinas PU Kabupaten Buleleng, dengan jumlah personil yang mendukung pelaksanaan kegiatan berjumlah 18 orang ; 10 PNS dan 8 orang Pegawai Kontrak. Pangkat dan Golongan PNS yang ada yakni ; Pembina Utama Muda (IV/c) ; 1 orang, Pembina (IV/a) ; 2 orang, Penata ; 2 orang, Penata Muda ; 1 orang, Pengatur ; 2 orang dan Pengatur Muda Tk.I ; 2 Orang. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki adalah Sarjana (S1) ; 5 orang, D3 ; 1 orang dan SMA/SMK ; 4 orang. Terdapat 3 pejabat struktural dalam susunan organisasi yakni Pejabat eselon IIIb ; 1 pejabat dan eselon IVa ; 2 pejabat.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2015. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas PU Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan energy dan SDM ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD untuk penanganan Urusan energy dan SDM sejumlah Rp. 530.304.675.505,88 dan tidak ada asset yang tidak digunakan.

Dalam Proses Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang didukung dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan diatas terdapat Permasalahan yaitu masih banyaknya penambang-penambang yang tidak mempunyai ijin.

5. URUSAN PARIWISATA.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Pariwisata pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 3 program dan 11 kegiatan, yaitu :

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

- Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata.
- Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
- Kegiatan Pengembangan jaringan kerja sama promosi.
- Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
- Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

- Kegiatan Pengembangan obyek pariwisata unggulan.
- Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
- Kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.

3) Program Pengembangan Kemitraan.

- Kegiatan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.
- Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwisata.
- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Capaian kinerja Bidang Pariwisata ditunjukkan melalui pencapaian indikator berikut ini :

- Jumlah kunjungan wisata Tahun 2016 baik domestik maupun mancanegara berjumlah 355.621 orang, yang terdiri atas wisatawan mancanegara ; 218.260 orang dan wisatawan domestik berjumlah 137.361 orang.
- Jumlah Obyek wisata yang merupakan andalan bagi Kabupaten Buleleng dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berjumlah 43 Obyek Wisata sebagaimana termuat dalam tabel 76.

Tabel 76
Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Buleleng

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Jenis	Lokasi
KEC. GEROKGAK			
1	Makam Jaya Prana	Wisata Budaya / Sejarah	Desa Sumber Klampok
2	Air Panas Banyuwedang	Wisata Alam	Desa Pejarakan
3	Lingkungan Pura Pulaki	Wisata Budaya / Sejarah	Desa Banyupoh
4	Bendungan Renon	Wisata Buatan	Desa Gerokgak
5	Bendungan Titab	Wisata Buatan	Desa Titab
KEC. BANJAR			
6	Yeh Panes Nirmala Banjar	Wisata Alam	Desa Banjar
7	Brahma Wihara Arama	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Banjar Tegeha
8	Air Terjun Melanting	Wisata Alam	Desa Munduk
9	Perkebunan Anggur Rakyat Dencarik	Wisata Buatan	Desa Dencarik
10	Desa Tua Sidatapa	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Sidatapa
11	Desa Tua Pedawa	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Pedawa
12	Desa Tua Cempaga	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Cempaga
13	Desa Tua Banyuseri	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Banyuseri
14	Desa Tua Tigawasa	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Tigawasa
15	Air Terjun Singsing	Wisata Alam	Desa Temukus
KEC. SUKASADA			
16	Monkey Forest Wanagiri	Wisata Alam	Desa Wanagiri
17	Air Terjun Gitgit	Wisata Alam	Desa Gitgit
18	Air Terjun Bertingkat/Multitier Waterfall	Wisata Alam	Desa Gitgit
19	Ricefield Terraces Ambengan	Wisata Alam	Desa Ambengan
20	Air Terjun Ambengan	Wisata Alam	Desa Ambengan
21	Desa Ambengan-Sambangan	Wisata Alam	Desa Ambengan-Sambangan
22	Tugu Bhuana Kerta	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Panji
23	Monumen Tri Yuda Sakti	Wisata Buatan	Kelurahan Sukasada
KEC. BULELENG			
24	Tugu Singa Ambara Raja	Wisata Sejarah / Budaya	Kelurahan Paket Agung
25	Gedong Kirtya	Wisata Sejarah / Budaya	Kelurahan Paket Agung

26	Museum Buleleng	Wisata Sejarah / Budaya	Kelurahan Paket Agung
27	Eks. Pelabuhan Buleleng	Wisata Sejarah / Budaya	Kelurahan Kampung Bugis
28	Pantai Kerobokan	Wisata Alam	Desa Kerobokan
29	Pantai Penimbangan	Wisata Alam	Desa Panji
KEC. SAWAN			
30	Lingkungan Pura Beji	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Sangsit
31	Lingkungan Pura Dalem Sangsit	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Sangsit
32	Desa Wisata Sudaji	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Sujadi
33	Lingkungan Pura Dalem Jagaraga	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Jagaraga
KEC. KUBUTAMBAHAN			
34	Lingkungan Pura Meduwe Karang	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Kubutambahan
35	Air Terjun Carat	Wisata Alam	Desa Tamblang
KEC. TEJAKULA			
36	Lingkungan Pura Ponjok Batu	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Pacung
37	Desa Tua Sembiran	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Sembiran
38	Desa Tua Julah	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Julah
39	Desa Tua Pacung	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Pacung
40	Desa Tua Madenan	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Madenan
41	Permandian Kuda	Wisata Sejarah / Budaya	Desa Tejakula
42	Air Terjun Les	Wisata Alam	Desa Les
43	Air Terjun Yeh Mampeh	Wisata Alam	

Sumber data : Disbudpar Kabupaten Buleleng, 2016

- Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berjumlah 542 meliputi ; Pondok Wisata sejumlah 316, Hotel Melati ; 214, Hotel Berbintang ; 12.
- Jumlah Restaurant dan Bar di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berjumlah 327 buah yang terdiri atas ; restaurant ; 202, Bar ; 125.
- Pelaksanaan Kegiatan Penataan Obyek Wisata.

Kegiatan penataan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berada di empat lokasi kegiatan diantaranya :

- 1. Rehabilitasi toilet dan shelter di Daya Tarik Wisata Danau Tamblingan, anggaran sebesar Rp. 168.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.166.095.000,- (98,87%)
- 2. Penataan areal parkir dan sodetan air di kawasan Patung Dolpin Lovina sebesar Rp. 224.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 216.000.000,- (96,43%)
- 3. Penataan lanjutan areal parkir dan pembersihan pagar, candi bentar Gedung Kesenian Gde Manik sebesar Rp. 721.248.000,- realisasi sebesar Rp. 718.094.000,- (99,56%)
- 4. Pembangunan Wantilan di Daya Tarik Wisata Eks. Pelabuhan Buleleng sebesar Rp. 609.796.000,- realisasi sebesar Rp. 600.846.000,- (98,53%)
- 5. Rehab Gedung Mr. Puja di Daya Tarik Wisata Eks.Pelabuhan Buleleng sebesar Rp. 168.000.000,- realisasi sebesar Rp. 159.913.000,- (95,19%)
- 6. Rehab Bangunan Tourist Information Service (TIS) di Lingkungan Puri Seni Sasana Budaya sebesar Rp. 84.000.000,- realisasi sebesar Rp. 83.160.000,- (99,00%)

Pembangunan di bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dengan kekuatan SDM sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 77
Kondisi Pegawai Pelaksana Urusan Pariwisata

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	33
	Pegawai Harian /Kontrak	51
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	1
	Penata Tk. I (III/d)	5
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk.I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	2
	Pengatur Tk.I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	3
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	8

	Pengatur Muda (II/a)	1
	Juru Tk.I (I/d)	5
	Juru Muda (I/a)	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	3
	SI/D4	11
	D3	1
	D2	1
	D1	1
	SMA/SMK/MTs	11
	SMP/MI	5
	SD	1
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIb	1
	Eselon IIIa	1
	Eselon IIIb	1
	Eselon IVa	7

Sumber data : Disbudpar Kabupaten Buleleng, 2016

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan pariwisata ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 29.814.627.543,83, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 17.839.830.245,83 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 55.604.620.

Permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan program tersebut antara lain :

- Terkait dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng sehingga belum optimalnya penataan dan pengembangan potensi-potensi pariwisata

baik potensi di daratan maupun yang ada di sepanjang pantai / laut Buleleng;

- Belum adanya regulasi penataan daya tarik wisata
- Belum maksimalnya pemahaman para stake holder terkait akan makna dan implementasi dari pada pariwisata yang berbasis budaya;
- Belum optimalnya promosi produk-produk budaya maupun pariwisata yang dimiliki Kabupaten Buleleng baik secara domestik maupun mancanegara;
- Kurangnya kerjasama lembaga dan pengusaha usaha pariwisata.

Demikian kami telah melaksanakan upaya-upaya penanganan agar permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan program kegiatan yaitu :

- Menyusun regulasi penataan daya tarik wisata.
- Melaksanakan kerjasama lembaga yang bergerak pada sektor usaha pariwisata.
- Mengembangkan potensi-potensi pariwisata dengan menata daya tarik wisata.
- Peningkatan intensitas promosi baik dalam maupun luar negeri.

6. URUSAN PERDAGANGAN.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Perdagangan pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

a. Program Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan.

- Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
- Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah.

b. Program Peningkatan Program Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

- Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional.

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

- Kegiatan Peningkatan 468system dan jaringan informasi Perdagangan.

d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

- Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2016.

Tabel 78
Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Buleleng

Jenis Komoditi	Satuan	Tahun		
		2014	2015	2016
Barang Pokok				
Beras	Kg	107.875.700	108.584.190	109.292.680
Gula Pasir	Kg	12.127.700	12.207.690	12.287.680
Garam	Kg	3.829.800	3.855.060	3.880.320
Minyak Goreng	Liter	8.936.200	8.995.140	9.054.080
Daging	Kg	1.276.600	1.285.020	1.293.440
Terigu	Kg	5.744.700	5.782.590	5.820.480
Ikan Asin	Butir	1.276.600	1.285.020	1.293.440
Telur	Kg	1.276.600	1.285.020	1.293.440
Barang Strategis	Ton	319.150	321.255	323.360
Barang Umum Lain	Ton	351.065	353.380	355.695

Sumber data : Diskopdagrin Kabupaten Buleleng, 2016.

Pembiayaan untuk pelaksanaan Urusan Perdagangan dialokasikan melalui Belanja langsung di Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.510.000 dan terealisasi Rp. 11.000.000 atau 51,14 persen, Belanja barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 480.847.725 dan terealisasi Rp. 235.603.490 atau 48,99 persen. Serta anggaran belanja modal sebesar Rp. 15.193.933.890 yang terealisasi sebesar rp. 10.977.955.120 atau 72,73 persen.

Pembangunan di bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng. Jumlah personil /SDM pada Tahun 2016 tersaji berikut ini.

Tabel 79
Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Perdagangan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	11 orang
	Pegawai Harian /Kontrak	3 orang
2.	Pembina	1 orang

	Penata Tk. I	5 orang
	Penata	3 orang
	Penata Muda Tk.I	1 orang
	Pengatur Muda Tk.I	1 Orang
3.	Tingkat Pendidikan PNS	
	SI/D4	7 orang
	SMA/SMK/MTs	4 orang
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIIb	1 orang
	Eselon IVa	4 orang
	Eselon IVb	1 orang
	Pejabat Fungsional	
	a. Penyuluh Perindag Penyelia	1 orang
	b. Fungsional Umum	1 orang

Sumber data : Diskopdagrin Kabupaten Buleleng, 2016

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan perdagangan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 3.954.618.433,83, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 3.954.543.433,83 dan Total Aset yang tidak dipergunakan Rp. 75.000.

Dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan pada Tahun 2016 tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

7. URUSAN INDUSTRI.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang industri pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a. **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.**
 - Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri.
- b. **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.**
 - Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi Industri.
 - Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi Industri.
- c. **Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial.**
 - Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

Jumlah Perusahaan, Buruh, Investasi, dan Nilai Produksi Tahun 2011-2016 di Kabupaten Buleleng secara rinci tersaji pada tabel 80.

Tabel 80
Komponen Urusan Industri

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Buruh	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Produksi (Rp)
2011	738	5.038	11.915.203	115.235.201
2012	783	5.331	13.857.626	121.970.551
2013	827	5.515	15.520.681	136.416.377
2014	888	5.744	18.001.281	155.086.363
2015	927	5.954	19.423.274	163.653.045
2016	954	6.089	20.439.529	167.716.095

Sumber data : Diskopdagrin Kabupaten Buleleng

Pembiayaan untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian dialokasikan melalui Belanja langsung di Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.700.000 dan tidak ada realisas, dan Belanja barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 383.095.300 dan terealisasi Rp. 305.958.500 atau 79,86 persen. Pembangunan di bidang industri dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi pegawai pada Tahun 2016 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 81
Kondisi Kepegawaian Pelaksana Urusan Industri

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	
	PNS	7 orang
	Pegawai Harian /Kontrak	2 orang
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina	1 orang
	Penata Tk. I	2 orang
	Penata	1 orang
	Penata Muda Tk.I	2 orang
	Penata Muda	1
3.	Tingkat Pendidikan	
	SI/D4	6 orang
	SMA/SMK/MTs	1 orang
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIIb	1 orang
	Eselon IVa	3 orang

Sumber data : Diskopdagrin Kabupaten Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan perdagangan ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 111.844.963,28, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 111.844.963,28.

Dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan pada Tahun 2016 tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

8. URUSAN TRANSMIGRASI.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan bidang Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2016 meliputi 2 program dan 4 kegiatan, yaitu :

a. Program Transmigrasi Lokal.

- 1) Penyuluhan Transmigrasi Lokal.
- 2) Pengerahan dan Pengangkutan Transmigrasi.

b. Program Transmigrasi Regional.

- 1) Pemberangkatan / Penempatan Transmigrasi.
- 2) Peningkatan Lokasi Transmigrasi.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 075/29/KB/2016 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/30/KS/2016 tanggal 24 Nopember 2016, telah berhasil diberangkatkan 9 Kepala Keluarga dari Kabupaten Buleleng ke UPT Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Realisasi Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

a. Program Transmigrasi Lokal, program ini dibiayai dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 95.543.935 dan terealisasi Rp. 89.836.100 atau 94,03 persen. Realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi :

- Penyuluhan Transmigrasi Lokal, kegiatan ini dibiayai dengan anggaran Rp. 62.043.935 dan terealisasi Rp. 60.075.400 atau 96,83 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Hasilnya adalah meningkatnya animo 350 orang masyarakat untuk bertransmigrasi.
- Pengerahan dan Pengangkutan Transmigrasi, kegiatan ini dibiayai dengan anggaran Rp. 33.500.000 dan terealisasi Rp. 29.760.700 atau 88,84 persen dengan realisasi fisik 93,33 persen. Hasilnya adalah meningkatnya keterampilan 14 calon transmigran.

- b. Program Transmigrasi Regional**, program ini dibiayai dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 78.497.000 dan terealisasi Rp. 71.328.500 atau 90,87 persen. Realisasi anggaran untuk tiap kegiatan meliputi :
- Pemberangkatan / Penempatan Transmigrasi, kegiatan ini dibiayai dengan anggaran Rp. 33.410.500 dan terealisasi Rp. 30.594.000 atau 91,57 persen dengan realisasi fisik 60 persen. Hasilnya adalah terwujudnya penempatan 9 KK transmigran di lokasi transmigrasi.
 - Peningkatan Lokasi Transmigrasi, kegiatan ini dibiayai dengan anggaran Rp.45.086.500 dan terealisasi Rp. 40.734.500 atau 90,35 persen dengan realisasi fisik 100 93,33. Hasilnya adalah Terfasilitasinya pengerahan dan pengangkutan 14 KK transmigran.

Pembangunan di bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Jumlah pegawai pada Tahun 2016 yang melaksanakan Urusan transmigrasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 82
Pegawai Pelaksana Urusan Transmigrasi

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	7
	PNS	4
	Pegawai Harian /Kontrak	3
2.	Pangkat dan Golongan	
	Pembina	1
	Penata Tk. I	1
	Penata	2
3.	Tingkat Pendidikan	
	S2	1
	SI/D4	3
	SMA/SMK/MTs	4
4.	Jumlah Pejabat	
	Pejabat Setruktural :	
	Eselon IIIb	1
	Eselon IVa	3

Sumber data : Disnakertrans Kab. Buleleng

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan urusan ini melalui mekanisme termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Selanjutnya melalui proses Forum SKPD usulan program dan kegiatan dibahas forum dan

disepakati menjadi bagian kegiatan dalam Renja SKPD, selanjutnya dibahas melalui Musrenbang Kabupaten menghasilkan RKPD Tahun 2016. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS yang dalam prosesnya mendapatkan masukan dan kesepakatan dari DPRD. Hasil KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan RAPBD.DPRD dengan hak budgetnya bersama eksekutif membahas RAPBD dan kemudian menetapkan menjadi APBD. Selanjutnya disusun RKA SKPD untuk penjabaran pelaksanaan kegiatan.

Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng di dalam menunjang pelaksanaan urusan transmigrasi ; cukup. Total Aset yang dikuasai SKPD Rp. 93.619.550, Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik Rp. 93.619.550 atau tidak ada asset yang tidak dipergunakan.

Dalam pelaksanaan Urusan Transmigrasi pada Tahun 2016 tidak ada permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI.

1. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah.

Fokus ; Peraturan tentang ketertiban dan penataan ruang.

IKK ; Keberadaan Perda IMB dengan capaian kinerja ; ada

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tentram dan tertib secara umum akan terwujud apabila adanya dukungan berbagai komponen masyarakat dan aparatur terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya peraturan – peraturan sebagai produk hukum daerah yang nantinya mengatur dan membatasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tercakup dalam aspek tersebut adalah Peraturan Daerah mengenai penataan ruang. Penataan ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 merupakan urusan strategis yang menyangkut pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada (RTRWK, RDTR, RTBL) sehingga pemanfaatan ruang oleh semua pihak perlu dikendalikan. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menjabarkan kebijakan ini melalui penerbitan IMB sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan penataan bangunan – bangunan yang selanjutnya diatur dengan *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan*. Penerbitan Peraturan daerah ini adalah langkah nyata pencapaian sasaran penyelenggaraan urusan Penataan Ruang yaitu terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dijabarkan melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, program ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan ruang. Perkembangan jumlah Ijin Mendirikan Bangunan menjadi hal yang sangat penting dalam penataan ruang. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan ruang.

IKK ; Rasio Rumah Ber IMB, dengann capaian kinerja 7,18 persen.

Sampai dengan Tahun 2016 Rasio rumah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Buleleng dengan jumlah seluruh rumah

sebesar 7,18 persen. Dari perhitungan terakhir jumlah seluruh rumah di Kabupaten Buleleng adalah 171.218 rumah, sedangkan rumah yang sudah ber-IMB sampai dengan Tahun 2016 sebesar 12.310 rumah. Pencapaian ini meningkat dibandingkan tahun 2015 dimana rasio rumah ber-IMB hanya mencapai 6,94 persen. Sebagai catatan angka ini merupakan angka yang tercatat setelah Tahun 1999, karena seperti diketahui bahwa arsip mengenai jumlah pasti kepemilikan ijin IMB di Kabupaten Buleleng ikut terbakar pasca rusuh Tahun 1999.

IKK ; Keberadaan PERDA RTRW, capaian kinerja ; ada.

Untuk pengaturan tata ruang wilayah di Kabupaten Buleleng telah berpedoman pada *PERDA RTRW Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033*.

Fokus ; Peraturan Tentang Kependudukan,

IKK ; Pengurusan E- KTP, capaian kinerja; 99,81 persen.

Bagian yang tak kalah pentingnya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum adalah tertib administrasi kependudukan. Begitu banyaknya masalah yang terjadi sebagai akibat belum tertatanya tertib administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka mengantisipasi persoalan yang timbul dari masalah kependudukan telah mengesahkan *Peraturan Daerah tentang kependudukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016*. Tertibnya administrasi kependudukan juga tidak terlepas dari ketepatan pelayanan aparatur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan E-KTP sebagai program baru kependudukan dari Pemerintah, maka sampai keadaan *Desember 2016 data penduduk Kabupaten Buleleng yang sudah terekam E-KTP berjumlah 592.017 orang dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP yang berjumlah 593.142 orang atau tercapai 99,81 persen*. Pencapaian ini meningkat dibandingkan dengan pada Tahun 2015 yang hanya mencapai 79,14 persen.

IKK ; Biaya KTP, capaian kinerja; Gratis.

Untuk biaya pengurusan KTP Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tidak ingin biaya tersebut menjadi beban bagi masyarakat sehingga kebijakan Pemkab *kepengurusan KTP sebagaimana diatur dalam PERDA No.3 tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil* , pengurusan KTP tidak dipungut biaya / Gratis.

Fokus ; Personil Sat Pol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum),

IKK ; *Rasio Personil Sat Pol PP terhadap jumlah penduduk, capaian kinerja; 0,85 per 10.000.*

Selanjutnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat vital, karena diperlukan tindakan – tindakan yang refesentatif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng dirasakan bahwa diperlukan adanya penambahan terhadap jumlah personil Sat Pol PP yang ada saat ini. *Sampai Tahun 2016 jumlah personil Sat pol PP (PNS) Kabupaten Buleleng berjumlah 74 orang jika harus dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berjumlah sekitar 869.282 jiwa,* sangatlah memungkinkan diperlukan penambahan personil. Dan hal ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan di Tahun Anggaran 2017.

Fokus ; Kebijakan Bidang Penanganan PSK, PKL atau PMKS,

IKK ; *Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS, capaian kinerja ; ada.*

Masalah PSK,PKL atau PMKS selalu menjadi kendala dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya aturan –aturan yang akan menjadi acuan dalam rangka meminimalisasi terhadap pelanggaran – pelanggaran yang disebabkan oleh PSK, PKL atau PMKS.Untuk mewujudkan rasa aman, tertib dan tentram pada masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PSK, PKL atau PMKS, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan *Peraturan Daerah yang mengatur tentang PSK melalui Perda No. 6 Tahun 2009 tentang ketertiban umum dan Perda No. 7 Tahun 2009 yang mengatur tentang penanggulangan pelacuran.*

Fokus ; Peraturan Tentang Kebersihan Kabupaten,

IKK ; *Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten, capain kinerja ; ada.*

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung sinerginya pelaksanaan pemerintahan daerah. Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten terluas di Provinsi Bali berhasil dalam rangka mewujudkan penataan kebersihan wilayah melalui pengakuan

pemerintah dengan Penghargaan Tropy Adipura Tahun 2016.

Mengacu pada keberhasilan yang telah dicapai tentunya tidak bisa dipisahkan dengan Kebijakan – Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penataan kebersihan wilayah yang dituangkan melalui *Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 17 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan dan Perda No 1 Tahun 2013 tentang pengolahan persampahan.*

Aspek Keselarasan dan Efektifitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, Serta Antara Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

Fokus ; Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah

IKK ; Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007,

Dalam rangka keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah maka penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di dalam menyampaikan informasi pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Laporan ini nantinya akan dipakai sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2016 disampaikan tepat pada waktunya.*

Fokus ; Penyampaian laporan Keuangan dan Kinerja.

IKK ; Ketepatan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan berdasarkan PP No. 8 tahun 2006.

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja kepada pemerintah juga dinilai berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian laporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja adalah 2 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir, *Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memenuhi kewajiban tersebut dan menyampaikan laporan tepat waktu.*

Fokus ; Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

IKK ; Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah, *capaian kinerja ; 15 urusan.*

Sebagai penjabaran PP Nomor 38 Tahun 2007 *tentang PEMBAGIAN*

URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dari 26 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, maka implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), diukur melalui indikator jumlah urusan wajib yang sudah ditetapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. *Pemerintah Kabupaten Buleleng sampai tahun 2016 sudah menerapkan 15 SPM untuk pelaksanaan urusan wajib.*

Fokus ; Hubungan Antar Daerah

IKK ; *Kerjasama dengan daerah lain; capaian kinerja 5 MOU.*

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Sub. Bagian Kerjasama yang dibentuk berdasarkan PP 41 Tahun 2007 telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah. MOU dengan daerah lain yang masih berlaku sampai dengan tahun 2016 yakni :

- 1. MOU dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/19/KB/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah*
- 2. MOU dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah melalui perjanjian kerjasama nomor : 075/11/KS/2013 – 28 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh Kec. Rungan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.*
- 3. MOU Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.*
- 4. MOU Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.*
- 5. MOU Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung.*

Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah.

Fokus ;Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah

IKK ; Kesesuaian Prioritas Pembangunan, capaian kinerja; 72,73 persen.

Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah maka Kabupaten Buleleng sebagaimana dituangkan dalam *RKPD Tahun 2016 menetapkan 8 prioritas pembangunan yang sesuai dari 11 Prioritas Pembangunan Nasional atau 72,73 persen dari prioritas pembangunan nasional.*

Fokus ; Kewenangan

IKK; Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah, capaian kinerja 25 urusan.

Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2007 *tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* terdapat 26 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Untuk Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan 25 urusan wajib, 1 urusan yang tidak dilaksanakan adalah Urusan Statistik. Untuk urusan Statistik, terkait pengumpulan data statistik telah diadakan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng.

IKK ; Waktu Penetapan PERDA APBD, capaian kinerja ; tepat.

ABPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 telah dituangkan dalam *Ketetapan Perda No.11 tahun 2015 tentang APBD Th 2016 Tanggal 30 Desember 2015.* Batas penetapan APBD Tahun 2016 adalah 31 Desember 2015 sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD TA. 2016.

IKK ; Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP No 58 Tahun 2005, capaian kinerja ; ada.

Penjabaran terhadap PP No. 5 Tahun 2005 telah dituangkan dalam *Peraturan daerah 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Fokus ; Keuangan

IKK ; Belanja Pelayanan Dasar, capaian kinerja ; 60,53 persen.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh *perbandingan belanja pelayanan dasar dengan APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang mencapai 60,53 persen, berkurang 1,50 persen dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 62,03 persen.* Pelayanan dasar ini dimaksud sebagai pelayanan umum (public service)

yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, sosial, tenaga kerja, koperasi, sat pol pp dan kependudukan dan catatan sipil. Untuk Tahun Anggaran 2016 jumlah total belanja pelayanan dasar sebesar Rp. 1.331.953.665.200,68 Perincian Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016 meliputi :

No	Urusan Pemerintahan	Belanja Pelayanan Dasar (Rp)	
1.	Pendidikan	:	965.076.099.504,19
2.	Kesehatan	:	171.433.968.285,49
3.	Lingkungan Hidup	:	35.603.995.000
4.	Pekerjaan Umum	:	89.566.256.035
5.	Sosial	:	22.460.781.380
6.	Tenaga Kerja	:	8.194.677.935
7.	Koperasi	:	23.073.816.291
8.	Pol PP	:	9.227.000.670
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil	:	7.317.070.100
	Jumlah		1.331.953.665.200,68

Dan total *Belanja APBD Kabupaten Buleleng tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 sehingga* belanja pelayanan dasar mencapai 60,53 persen dari total belanja APBD TA. 2016.

IKK ;*Belanja Untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan, capaian kinerja; 51,65 persen.*

Perbandingan total belanja urusan pendidikan dan kesehatan dengan total belanja APBD mencapai 51,65 persen, berkurang 2,38 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 54,03 persen. Dengan rincian untuk total *Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp. 1.136.510.067.789,68 dan total Belanja APBD Kabupaten Buleleng tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43.*

Fokus Pelayanan Publik

IKK Keberadaan PERDA/Perka tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan belum ada , capaian kinerja ;

ada.

Sampai saat ini Kabupaten Buleleng sudah ditetapkan Peraturan Bupati tentang standar pelayanan publik, dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk selalu menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima.

Fokus Kepegawaian

IKK *Ratio PNS terhadap penduduk, capaian kinerja ; 0,01*

Perbandingan antara jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 0,01. Hal ini berdasarkan data bahwa *jumlah PNS di Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2016 mencapai 9.912 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berjumlah 869.282 jiwa.*

IKK ; *Sistem Informasi Kepegawaian, capaian kinerja; ada.*

Dalam rangka penataan kepegawaian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kabupaten Buleleng yang memuat data seluruh aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Buleleng.

Fokus ; Kelembagaan

IKK ; *Penataan SKPD, capaian kinerja ; 39 SKPD.*

Sebagaimana yang diamanatkan PP No 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini dituangkan dalam PERDA No. 11 Th. 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Buleleng yang terdiri atas : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Inspektorat, 15 Dinas Daerah , 9 Badan, 1 Kantor, Sat Pol PP, RSUD, dan 9 Kecamatan. Jadi Satuan Kerja Perangkat Kerja Kabupaten Buleleng berjumlah 39 unit. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah Kabupaten Buleleng telah berhasil menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2016 pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng.

Aspek Efektifitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD

Fokus ; Produk Peraturan Perundang – Undangan.

IKK ; PERDA yang ditetapkan, capaian kinerja ; 11 Perda.

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bukti kemitran eksekutif dan legeslatif. Dimana dalam legitimasinya merupakan hasil sinkronisasi kebijakan antara keduanya. Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan berjumlah 11 PERDA yang meliputi :

1. Perda Kabupaten Buleleng No. 1 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
2. Perda Kabupaten Buleleng No. 2 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3. Perda Kabupaten Buleleng No. 3 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Perda Kabupaten Buleleng No. 4 Th. 2016 Tentang Perlindungan Anak
5. Perda Kabupaten Buleleng No. 5 Th. 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Perda Kabupaten Buleleng No. 8 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
7. Perda Kabupaten Buleleng No. 9 Th. 2016 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol
8. Perda Kabupaten Buleleng No. 10 Th. 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
9. Perda Kabupaten Buleleng No. 11 Th. 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan
10. Perda Kabupaten Buleleng No. 12 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

11. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 Th. 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Fokus ; Ranperda yang diajukan tahun berjalan.

IKK ; *Ranperda yang disetujui DPRD Tahun 2016, capaian kinerja ; 100 persen.*

Ranperda yang disetujui DPRD dalam tahun 2016 tercapai 100 persen, karena dari 7 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tahun berjalan semuanya disetujui oleh DPRD, yaitu :

- 1) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perlindungan Anak
- 2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Perda kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penertiban Penebangan Pohon dan Bambu di Luar Kawasan Hutan
- 5) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 6) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Buleleng
- 7) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

Fokus Keputusan DPRD Yang ditindak lanjuti

IKK ; *Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti, capaian kinerja ; 100 persen.*

Tahun 2016 dari 17 Keputusan yang dihasilkan DPRD semuanya atau 100 persen ditindak lanjuti sebagai penjabaran fungsi DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aspek Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala

Daerah Beserta Tindak Lanjut Hasil Keputusan.

Fokus Tindak Lanjut Keputusan Bupati

IKK ; *Keputusan Bupati Yang Ditindaklanjuti, capaian kinerja; 100 persen.*

Keputusan kepala daerah adalah produk hukum yang mengatur tatanan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalamnya terkandung muatan hukum yang mengatur jalannya roda pemerintahan daerah yang bersinergi dan selalu berlandaskan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahun 2016 dalam proses pengambilan keputusan oleh Bupati sebagai kepala daerah menghasilkan 818 keputusan yang semuanya telah ditindak lanjuti.

Fokus Tindak Lanjut Peraturan Bupati

IKK ; *Peraturan Bupati yang Ditindak lanjuti, capaian kinerja; 100 persen.*

Peraturan Bupati yang juga merupakan dasar kebijakan – kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 berjumlah 81 Peraturan Bupati. Dan semua telah ditindak lanjuti.

Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pada Peraturan Perundang – Undangan

Fokus ; Perda yang Dibatalkan

IKK *Jumlah Perda Yang Dibatalkan, capaian kinerja ; 0 persen.*

Tidak ada PERDA yang dibatalkan dalam Tahun 2016.

Intensitas dan efektifitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Setrategis dan relevan Untuk daerah.

Fokus Perda tentang Konsultasi Publik

IKK *Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik, capaian kinerja ; ada.*

Sampai tahun 2016 belum ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang konsultasi publik. Tetapi Pemerintah daerah telah melaksanakan konsultasi publik dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan DPRD juga telah melaksanakan konsultasi publik dalam rangka pembahasan Ranperda dan Perda.

Fokus Media Informasi pemda yang dapat diakses public,

IKK ; *Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik (website kabupaten, majalah, tabloid, leaflet/brosur) capaian kinerja; ada*

Informasi terkini tentang jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2016 dapat diakses melalui media informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah baik melalui **website. *www.bulelengKabupatengo.id* maupun dari majalah Singa Manggala dan Tabloid Kabar Buleleng.**

Aspek Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil

Fokus Serapan Dana Perimbangan

IKK *Dana Perimbangan yang diserap dibanding yang direncanakan, capain kinerja; 90,04 persen.*

Penyerapan dana perimbangan dari pusat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 mencapai 90,04 persen. Dimana penyerapan dana perimbangan Tahun 2015 yang ditargetkan Rp. 1.449.970.563.193 realisasinya Rp. 1.305.606.678.444.

Fokus ; Alokasi Belanja APBD dari DAU

IKK ; *Belanja Publik terhadap DAU, capaian kinerja ; 94,23 persen.*

Proporsi Alokasi Belanja Publik dalam APBD Kabupaten Buleleng terhadap Dana Alokasi Umum mencapai 94,23 persen. Tahun 2016 Alokasi Belanja Publik berjumlah Rp. 768.123.331.943,04 dan Dana Alokasi Umum yang berjumlah Rp. 868.511.959.000.

Fokus ; Alokasi Belanja pada APBD

IKK ; *Alokasi Belanja Langsung terhadap total APBD, capaian kinerja ; 42,08 persen.*

Perbandingan Belanja Langsung dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 mencapai 42,08 persen, Alokasi Belanja langsung tahun 2016 sebesar Rp. 926.008.941.682,38 dari Total Belanja APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang besarnya Rp. 2.200.355.657.347,43.

Aspek Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan Sumber – Sumber PAD dan Pinjaman / Obligasi Daerah

Fokus ; Besaran Pendapatan Asli Daerah

IKK ; *Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (realisasi) , capaian kinerja; 13,65 persen.*

Tahun 2016 Realisasi PAD Kabupaten Buleleng berjumlah Rp. 282.111.205.871,44 Besaran PAD Tahun 2016 terhadap total pendapatan dalam APBD tercapai 13,65 persen. Total Realisasi pendapatan dalam APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38.

Aspek Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan APBD.

Fokus ; Kewajaran Laporan Keuangan.

IKK ; *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, capaian kinerja 2015 :WTP, 2015: Belum ada hasil.*

Opini BPK berdasarkan hasil audit Tim BPK di Kabupaten Buleleng terhadap efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD kewajaran laporan keuangan daerah untuk Tahun 2015 adalah Wajar tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan Tahun 2016 opini BPK belum ada.

Fokus ; Besaran Silpa

IKK ; Rasio Silpa terhadap total pendapatan, capaian kinerja ; 1,38 persen.

Besaran SilPA dalam APBD Kabupaten Buleleng dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 28.627.296.354,29 atau mencapai 1,38 persen dari total pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38

Fokus ; Realisasi Belanja

IKK ; *Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja, capaian kinerja;92,66 persen.*

Anggaran Belanja Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang direncanakan sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 terealisasi sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 atau mencapai 92,66 persen.

Fokus Pengawasan Inspektorat Kabupaten

IKK ; *Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti, capaian kinerja; 81,34 persen*

Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah temuan BPK RI atas efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha,

pertanggungjawaban dan pengawasan APBD Kabupaten Buleleng berjumlah 1.222 rekomendasi dan temuan yang sudah ditindak lanjuti pada tahun 2016 adalah 994 rekomendasi.

Aspek Pengelolaan Potensi Daerah

Fokus Peta Potensi daerah.

IKK ; *Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD, capaian kinerja; 100,32 persen.*

Potensi PAD pada APBD tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 281.216.000.000 dan Realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 282.111.205.871,44. Sehingga rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD mencapai 100,32 persen.

Fokus ; Peningkatan PAD

IKK ; *Peningkatan PAD, capaian kinerja ; 7,69 persen.*

PAD untuk Tahun Anggaran 2016 realisasinya mengalami penurunan terhadap PAD tahun sebelumnya yaitu mencapai 3,7 persen, dimana realisasi PAD untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 292.976.512.018,40 meningkat pada Tahun 2016 mencapai 282.111.205.871,44

Aspek terobosan / inovasi baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Fokus Penghargaan

IKK ; *Penghargaan dari Pemerintah yang diterima pemerintah Daerah dalam tahun 2016, capaian kinerja ; 13 penghargaan*

Penghargaan yang diterima Kabupaten Buleleng dari pemerintah, sebagai pengakuan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam tahun 2016 meliputi:

1. Penghargaan **BKN Award** Predikat Terbaik I Kategori **Implementasi Assessment Center** Tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2016
2. Piagam Penghargaan Opini **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"** dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015
3. Penghargaan Anugrah Adipura Buana
4. Penghargaan **Kalpataru** kategori pengabdian Lingkungan Hidup (diraih/ diterima oleh Petugas Penyuluh di Dishutbun atas nama

Neneng Anengsih).

5. Penghargaan **Narwasita Tantra Award** Tahun 2016 Tingkat Kabupaten sebagai juara I.
6. Penghargaan **Manggala Karya Kencana** dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
7. Penghargaan **Prakerti Madya** sebagai juara harapan II dalam lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan, indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Nasional.
8. Anugerah **Bunda PAUD Nasional** Tahun 2016.
9. Trophy **Wahana Tata Nugraha** Tahun 2016 kategori Lalu Lintas dan angkutan.
10. Trophy dan sertifikat **Gerakan Nasional Program Kampung Iklim (Proklim)** Tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
11. **Anugerah Dana Rakca** Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan
12. Penghargaan **Program Adiwiyata** Tingkat Nasional
13. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 dengan predikat nilai B (Baik)

Fokus Pengadaan Barang dan Jasa

IKK ; Keberadaan E-procurement, capaian kinerja ; ada.

Proses pengadaan barang dan jasa yang telah menggunakan sistem e-procurement dimaksudkan untuk mendukung transparansi dalam melakukan lelang tender pekerjaan, karena semakin sedikitnya kesempatan untuk melakukan negosiasi antara panitia pengadaan dan peserta lelang tender. Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menggunakan sistem e-procurement.

Fokus Daya saing Daerah

IKK ; Jumlah Persetujuan Investasi, capaian kinerja ; 155 ijin investasi.

Daya saing daerah akan semakin terlihat dari banyaknya investasi yang berkembang di daerah. Meningkatnya investasi akan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2015 ijin investasi yang mendapat rekomendasi berjumlah 155 ijin, yang berarti terjadi penurunan dari ijin investasi yang diterbitkan pada Tahun 2014 yang berjumlah 157 ijin investasi.

2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri atas 8 Aspek, 17 Fokus dan 21 Indikator Kinerja Kunci yang meliputi :

Aspek Pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.
2. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN.
3. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH.
4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT.

Fokus Pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

1. Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD.
2. Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK.
3. Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN).
4. Pengisian struktur jabatan.
5. Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait.
6. Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD.
7. Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD.
8. Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD.
9. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran.
10. Alokasi anggaran.
11. Besaran belanja modal.
12. Besaran belanja pemeliharaan.
13. Laporan keuangan SKPD.
14. Manajemen asset SKPD.
15. Penggunaan Asset SKPD.
16. Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat.
17. Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat.

IKK Pada Tataran Pelaksana Kebijakan

1. Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD.
2. Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP).
3. Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN.
4. Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi.
5. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD.
6. Rasio PNS kabupaten
7. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.
8. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.
9. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD.
10. Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD.
11. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD.
12. Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD.
13. Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD.
14. Belanja modal terhadap total belanja SKPD.
15. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa.
16. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD.
17. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk).
18. Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD.
19. Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD.
20. Jumlah fasilitas / prasarana informasi .
21. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Tataran Pelaksana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng tersaji pada lampiran LPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016.

3. TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN.

A. URUSAN WAJIB

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	64,09%
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	31,36%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81,32%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,77%
5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	69,06%
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,40%
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,49%
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,02%
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,99%
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	93,33%
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90,40%
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,32%
15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	69,65%
16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88,13%
17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72,30%
18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,39%
22	Cakupan kunjungan bayi	98,84%
23	Penanganan sampah	96,6%
24	Kebersihan	16,67%

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,07%
26	Penegakan hukum lingkungan	100%
27	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	78,69%
28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60,56%
29	Rumah Tangga Per Sanitasi	8,06%
30	Kawasan Kumuh	0,069%
31	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	42,14%
32	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada
33	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada
34	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada
35	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	495,45%
36	Rumah tangga pengguna air bersih	78,16%
37	Lingkungan pemukiman kumuh	0,07%
38	Rumah layak huni	89,05%
39	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0,03
40	Lapangan olahraga .	0,47
41	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-876,751%
42	Koperasi aktif	59,06%
43	Usaha Mikro dan Kecil	60,23%
44	Kepemilikan KTP	99,81%
45	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	44,32 per 1000
46	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah
47	Pelayanan kepersertaan jaminan social bagi pekerja /buruh	36,80%
48	Pencari kerja yang ditempatkan	60%
49	Regulasi ketahanan pangan	ada
50	Ketersediaan pangan utama	157,60

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
51	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	42,16%
52	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	0,27%
53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0,40%
54	Prevalensi peserta KB aktif	84,33%
55	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB) di setiap desa	1,09%
56	Angkutan darat	0,11
57	Web site milik pemerintah daerah	Ada
58	Pameran/expo	34 kali
59	Luas lahan bersertifikat	59,32%
60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100%
61	Penyelesaian Ijin Lokasi	100%
62	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 Keg.
63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Keg.
64	Sistim Informasi Manajemen Pemda	29 buah
65	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ADA
66	PKK aktif	100%
67	Posyandu	100%
68	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	19 buah
69	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	11,52%
70	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	61,13%
71	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	29 kali
72	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	16 buah
73	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %
74	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada
75	Buku "PDRB kabupaten"	Ada
76	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	100%

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
77	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 kegiatan
78	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,50
79	Pengunjung perpustakaan	0,014
B. URUSAN PILIHAN		
1	Produksi perikanan	104,27%
2	Konsumsi ikan	100,29%
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/Ha
4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2014**)	22,86%
5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,09 %
6	Kerusakan Kawasan Hutan	0,0039%
7	Pertambangan tanpa ijin	37,40%
8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2014**)	1,21%
9	Kunjungan wisata	555.080 wisatawan
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2014**)	17,92%
11	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2014**)	5,97%
12	Pertumbuhan Industri	2,83%
13	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2014**)	11,43%
14	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$ 393.904
15	Transmigran swakarsa	60 %

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

a. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Bidang Perikanan dan Kelautan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dalam tahun 2016 memperoleh Program/Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan (TP) dengan total anggaran sebesar Rp.1.915.000.000, namun berdasarkan surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI No.479/PRL.5/IV/2016 tanggal 25 April 2016, terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 641.525.000, dimana sudah diajukan RKA/KL ke pusat, namun setelah disetujuinya DIPA/RKA-KL tanggal 26 Juli 2016 efisiensinya menjadi Rp.728.985.000, sehingga total anggaran setelah efisiensi sebesar Rp.1.186.015.000,

Dasar Hukum dari Program Pengelolaan Ruang Laut adalah SP DIPA – 032.07.4.229175/2016, Tanggal 07 Desember 2016 dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dasar Hukum dari Program Pengelolaan Ruang Laut adalah SP DIPA Revisi 01 – 032.07.4.229175/2016, Tanggal 26 Juli 2016 dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Pemberi tugas dari program/kegiatan yang bersumber dari dana Tugas pembantuan (TP) yaitu Program Pengelolaan Ruang Laut, dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha diberikan oleh Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Program /Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan(TP) yaitu Program Pengelolaan Ruang Laut, dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan pulau Pulau Kecil, dengan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha dengan Anggaran sebesar Rp.1.186.015.000, Realisasi fisik mencapai 100,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.1.017.061.458,- atau mencapai 85,75% dengan sisa anggaran sebesar Rp.168.953.542,- Adapun kegiatan fisiknya berupa pengadaan Geoisolator 17.100 m², pengadaan traktor 2 unit, pembangunan gudang garam 1 paket, pengadaan kendaraan roda dua 2 unit. Kegiatan fisik tersebut dihibahkan

kepada Koperasi Produsen Bumi Putih Nusantara Desa. Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari dana APBN dengan jumlah total anggaran yang diperoleh sebesar Rp.1.186.015.000,-

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan yang bersumber dari dana Tugas pembantuan (TP) adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan dukungan personil Pegawai Negeri Sipil : 65 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak Daerah/Pusat : 61 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 31 orang, D3 : 10 orang, SMA sederajat : 21 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:43 orang, Golongan II:15 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 26 orang (Eselon II : 1 orang, Eselon III : 5 orang, Eselon IV : 20 orang) dan Pejabat Fungsional 16 orang.

Secara umum kondisi sarana prasarana yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya : mobil dinas 5 unit, sepeda motor 47 unit, komputer 18 unit, laptop/notebook 19 unit, printer 22 buah, mesin ketik 2 unit, Infokus 1 unit, layar 1 buah, kamera 10 buah, Almari 33 buah, brankas 11 buah, filling cabinet 20 buah, meja dan kursi 214 buah, AC 19 unit, gedung kantor 4 unit, kolam 105 petak, kapal serta keleengkapannya 1 paket.

2. Bidang Ketenagakerjaan.

Dengan dasar hukum DIPA Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016 No. SP DIPA – 026.04.4.220149/2016, Tanggal : 7 Desember 2015, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penugasan ini dituangkan melalui Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja yang dijabarkan melalui Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari dana APBN yaitu DIPA Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.762.175.000,00. Realisasi anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebesar .731.480.400 atau 98,26 persen dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100 persen.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng selaku Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan didukung oleh personil Jumlah Pegawai PNS : 5 Orang, Jumlah Pegawai Non PNS / Kontrak : 5 orang. Kualifikasi pendidikan : SMA : 5 orang; DIII : 1 orang; Sarjana : 4 orang. Pangkat dan Golongan : Golongan II : 1 orang, Golongan III : 4 orang.

Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas pembantuan ini masih kurang, sehingga permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yakni usulan masyarakat belum sepenuhnya dapat diakomodasi dan solusinya Pemerintah Daerah memberikan suntikan dana sehingga usulan masyarakat untuk Program Padat Karya secara bertahap bisa diakomodasi. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Padat karya sangat positif harapannya kegiatan ini terus berlanjut.

3. Bidang Pertanian.

A. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Tahun 2016.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 tertuang dalam Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 dengan nomor SP DIPA-018.04.4.229034/2016 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034); tanggal 7 Desember 2015 dengan perubahan Revisi 03 tanggal 30 September 2016;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229034) tahun anggaran 2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 65/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016;
4. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 520/29/HK/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Penetapan Kuasa Penggina Anggaran

Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng
Tahun Anggaran 2016;

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/13/Horti/Distanak tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/12/Horti/Distanak tanggal 7 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/754/Horti/Distanak tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kawasan Jeruk dan Desa Organik dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/755/Horti/Distanak tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Kawasan Jeruk dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/868/Horti/Distanak tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabai Rawit Merah Dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :

188.4/869/Horti/Distanak tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Penerima Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah dan Cabai Rawit Merah dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/3372/Horti/Distanak tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kawasan Jeruk (APBN-P) dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/3373/Horti/Distanak tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lahan/CPCL Kawasan Jeruk (APBN-P) dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Lingkup Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
13. Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2016;
14. Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2016;
15. Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2016;

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 adalah Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng dituangkan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura serta Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016. Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebesar Rp. 4.142.500.000, dengan jumlah anggaran masing-masing kegiatan meliputi Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan jumlah anggaran Rp. 2.382.500.000, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan jumlah anggaran Rp. 140.000.000, dan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan jumlah anggaran Rp. 1.620.000.000.

Dari pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas ada beberapa target output yang harus dicapai yang tertuang ke dalam beberapa sub kegiatan antara lain dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan adalah Kawasan Bawang Merah target output 30 Ha, Kawasan Aneka Cabai target outputnya 40 Ha. Dari Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura targetnya adalah Dokumen Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian target outputnya 1 jenis dokumen, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura target outputnya 2 laporan dan Layanan Perkantoran target outputnya 12 bulan layanan. Selanjutnya dari Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain Kawasan Jeruk target outputnya 65 Ha, terdiri dari Kawasan jeruk seluas 50 Ha dan Kawasan jeruk (APBN-P) seluas 15 Ha, Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura target outputnya 2 desa. Dari alokasi anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan program dan kegiatan terealisasi sebesar 98,31 persen, dimana dari anggaran sebesar Rp. 4.142.500.000 terealisasi sebesar Rp. 4.072.549.849 dengan capaian fisik yang terealisasi 100 persen.

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang terdiri dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura serta Kegiatan Peningkatan Produksi

Buah dan Florikultura dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang terdiri dari Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura serta Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain :

1. Terbatasnya sumber air untuk pengembangan kawasan jeruk
2. Cuaca yang sangat ekstrim sepanjang tahun 2016 menyebabkan tingginya serangan OPT pada tanaman bawang dan cabai rawit merah.
3. Beberapa petani belum terbiasa menerapkan teknologi budidaya yang baik dan benar (GAP) dan penanganan pasca panen yang baik dan benar (GHP) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
4. Petani belum banyak tahu informasi pasar sehingga posisinya lemah dalam pemasaran dan petani berjalan sendiri-sendiri dalam pemasaran sehingga sering kali dipermainkan oleh para pembeli.
5. Beberapa petani masih sulit untuk menggunakan bahan-bahan organik dalam budidaya cabai rawit merah karena merasa perlu tenaga dan waktu yang lebih.

Usaha – usaha dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu ;

1. Melakukan fasilitasi sarana prasarana pengembangan sumber air berupa bak penampungan air dan jaringan perpipaan.
2. Meningkatkan pengamatan dan melaksanakan pengendalian OPT lebih intensif.
3. Diadakan sekolah lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP) dan sekolah lapang Good Handling Practices (SL-GHP) bagi petani yang besumber dari dana APBD Kabupaten Buleleng.
4. Melakukan pembinaan kepada petani agar lebih jeli mencari informasi pasar sehingga produksi dapat dipasarkan dengan harga yang bersaing. Dan disarankan agar dalam proses pemasaran jangan sendiri-sendiri tetapi dikelola oleh kelompok sehingga tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak.
5. Melakukan pembinaan kepada petani untuk tentang pentingnya bahan-bahan organik dalam upaya memperbaiki lingkungan pertanaman dan dengan adanya kegiatan pengembangan

kawasan ini mereka terdorong untuk memanfaatkan bahan-bahan organik dalam budidaya tanaman.

B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016.

Sebagai dasar pelaksanaan Tugas Pembantuan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 dengan nomor SP DIPA-018.03.4.229071/2016 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) tanggal 7 Desember 2015 dengan perubahan Revisi 04;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Kertas Kerja Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) tahun anggaran 2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 65/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan dana tugas pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
4. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 520/29/HK/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/116/PPPw/DISTANAK tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Personalia Pengelola Anggaran pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1230/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompok tani Penerima Bantuan Pengembangan Budidaya Kedelai Tahun Anggaran 2016;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1231/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompok tani

- Penerima Bantuan Penanaman Padi Jajar Legowo (Jarwo) Tahun Anggaran 2016;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1232/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompok tani Penerima Bantuan Gerakan Pengembangan Desa Pertanian Organik Untuk Padi Tahun Anggaran 2016;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1233/PPPw/DISTANAK tentang Pengesahan Kelompok tani Penerima Bantuan Pengembangan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2016;
 10. Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi Tahun 2016;
 11. Petunjuk Teknis Teknologi Tanam Jajar Legowo Tahun 2016;
 12. Petunjuk Teknis Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida 2016;
 13. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016;

Yang memberikan Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng (229071) Tahun Anggaran 2016 adalah Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta.

Program Tugas Pembantuan yang diberikan pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan tiga kegiatan yang terdiri dari : Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan.

Pembiayaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal, dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016.

Total anggaran untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 5.627.464.000,- realisasinya sebesar 5.039.866.325,- (89,56%) yang dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Produksi aneka kacang dan umbi dengan jumlah dana Rp. 320.731.000,- realisasinya 253.500.750,- (79,04%), Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dengan jumlah dana Rp. 5.187.842.000,- realisasinya sebesar 4.690.786.500,- (90,42%) dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan pagu dananya sebesar Rp.118.891.000,- realisasinya sebesar Rp. 95.579.075,- (80,39%).

Dari pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas ada beberapa target output yang harus dicapai yang tertuang kedalam beberapa sub kegiatan antara lain dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Pengembangan Budidaya Kedelai target outputnya 250 Ha. Dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal sub kegiatan yang menjadi target output kegiatan antara lain Pengembangan Budidaya Kedelai target outputnya 250 Ha, Bantuan Padi Provitas target outputnya 7.000 Ha dan bantuan dalam rangka Gerakan Pengembangan Desa Pertanian Organik untuk Padi target outputnya 40 Ha. Pengembangan Jagung Hibrida target outputnya 2.000 Ha. Dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan targetnya adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan target outputnya 1 Dokumen, Penyusunan Dokumen Keuangan dan Perlengkapan Target outputnya 12 bulan. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Data Informasi target outputnya 1 Tahun. Target output dari seluruh kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik berkat adanya dukungan dari semua pihak.

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan umbi terletak di kecamatan Buleleng, dan Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal terletak di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan Sukasada, Buleleng, Banjar, Seririt, Busungbiu dan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Dana yang digunakan dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran

2016. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebesar Rp. 5.627.464.000, dan terealisasi sebesar Rp. 5.039.866.325, atau 89,56 dan capaian fisik kegiatan mencapai 100 persen.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi antara lain :

1. Para petani belum sepenuhnya mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman pangan sesuai anjuran.
2. Lahan pertanian sawah yang semakin sempit akibat terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke non pertanian.
3. Penerapan alih teknologi dari Sistem Tanam Biasa menjadi Sistem Tanam Legowo 2 : 1 untuk tanam padi belum mampu terlaksana secara berkelanjutan disebabkan karena biaya upah tanam yang relative mahal.
4. Sumberdaya manusia (petani) sangat lemah dan semakin berkurang hal ini disebabkan karena pendidikan Petani rendah dan kebanyakan umurnya sudah lanjut serta statusnya kebanyakan penggarap.
5. Kondisi iklim yang sangat ekstrim berdampak terhadap kekeringan berkepanjangan mengakibatkan debit air irigasi semakin menurun dan berpotensi terhadap gagal panen.
6. Terjadinya serangan OPT pada tanaman pangan yang semakin meluas akibat minimnya para petani tentang informasi varietas unggul baru yang tahan terhadap serangan OPT.
7. Masih adanya keraguan dari para petani dalam mengusahakan komoditi jagung untuk panen tua karena khawatir harga yang diperoleh tidak sesuai dan cenderung berkeinginan untuk panen muda.
8. Terjadinya persaingan komoditas dari tanaman pangan ke non tanaman pangan yang lebih menguntungkan.
9. Adanya pemblokiran anggaran/pemotongan anggaran yang mengakibatkan realisasi anggaran satker 229071 kurang dari 90%.

Upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu :

1. Dilaksanakannya kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu untuk padi dan jagung agar para petani memahami secara baik dan benar terhadap penerapan teknologi tepat guna untuk pengembangan tanaman pangan.
2. Pembinaan kepada masyarakat petani dilakukan secara berkesinambungan dan menghimbau agar lahan-lahan produktif tidak dialih fungsikan ke non pertanian melalui pemberian insentif berupa kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya usaha tani padi.
3. Dalam penerapan alih teknologi dari tanam biasa ke Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 agar disediakan insentif ongkos tanam untuk mendorong minat petani melaksanakan Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 secara berkelanjutan.
4. Status petani di tingkatkan dari status penggarap 25%,30% ditingkatkan menjadi 50% atau bagi hasil supaya petani bergairah.
5. Provitas dan Produksi harus meningkat secara maksimal khususnya di PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) agar para generasi muda mau bertani (Usaha Tani harus menjanjikan)
6. Terus diupayakan melakukan perbaikan terhadap Infrastruktur Jaringan Irigasi dan pemberian bantuan alat mesin pertanian berupa pompa air bagi wilayahnya yang tersedia sumber mata air sehingga dampak kekeringan dapat diantisipasi.
7. Pendampingan dan pengawalan kegiatan terus dilakukan secara terus menerus untuk antisipasi serangan OPT melalui diseminasi terhadap varietas unggul baru yang tahan serangan OPT dan mempunyai potensi produksi tinggi.
8. Dilakukan upaya melalui Temu Usaha antara para kelompok tani dengan pengusaha/ assosiasi yang bergerak di bidang pemasaran komoditas tanaman pangan sehingga produksi dapat diserap dengan harga yang memadai.
9. Pembinaan pada kelompok tani/ masyarakat petani agar senantiasa disinergikan dengan pemahaman analisa usaha tani sehingga para petani dalam mengusahakan komoditinya lebih fokus pada yang lebih menguntungkan.

4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Tugas pembantuan yang dituangkan melalui Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dan

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program – Program tersebut dituangkan melalui kegiatan ; pengembangan optimalisasi lahan, pengembangan perluasan areal, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar dan penanamn kapas.

Sumber anggaran dialokasikan melalui anggaran APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp. 1.650.000.000 yang realisasinya mencapai 100 persen. SKPD pelaksana tugas pembantuan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng, yang didukung oleh personil sebanyak 12 orang; Kualifikasi Pendidikannya meliputi : SMA 5 orang, Sarjana 1 orang; Pangkat dan Golongan sebagai berikut : Pembina (IV/a) 1 orang, Penata Tk. I (III/c) 3 orang, Penata Muda Tk. I (III/b) 1 orang.

Sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pembantuan ini cukup memadai, namun masih terdapat permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu ; nilai PPMPBK (Bansos) tidak mencukupi untuk melaksanakan masing – masing kegiatan dan musim hujan datangnya terlambat, sehingga kegiatan yang terkait penanaman pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada akhir Bulan Desember 2016. Solusi yang telah diambil dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada adalah meningkatkan peran masyarakat / anggota kelompok tani penerima manfaat kegiatan untuk berswadaya lebih besar guna dapat terlaksananya kegiatan yang telah diberikan oleh pemerintah dan meningkatkan kegiatan gotong royong dengan cara tanpa mengambil upah sehingga upah dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan fisik.

b. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tahun Anggaran 2016 tidak ada kegiatan pemberian tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkat pertukaran pengetahuan dan teknologi.

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak bergulirnya otonomi daerah menuntut adanya suatu pola kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan antar daerah untuk membangun daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pola kerjasama yang lazim diselenggarakan oleh Pemkab Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten /Kota lainnya diantaranya melalui kegiatan studi banding yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka peningkatan kapasitas pencapaian kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada berbagai fungsi atau urusan pemerintahan seperti bidang pertanian, perencanaan pembangunan, Penatausahaan keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat desa, pariwisata, penataan kelembagaan perangkat daerah, Kehumasan dan politik dalam negeri. Adapun dasar hukum dilaksanakannya kerja sama antar daerah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Kerjasama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;

3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 130/1014/HK/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Perjanjian Antar Daerah yang telah dilakukan dan masih berlaku sampai dengan Tahun 2016, yaitu :

1) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai penjabaran Pelaksanaan Urusan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/19/KB/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Maksud dan tujuan pelaksanaan kerjasama antara kedua daerah adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Morowali, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut. **Jangka waktu pelaksanaan kerjasama adalah dari tahun 2012-2016**, dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam pelaksanaan program Transmigrasi Regional yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng melalui kegiatan Pemberangkatan/ Penempatan Transmigrasi dan Peninjauan Lokasi Transmigrasi dengan anggaran pembiayaan dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.845.300,00 atau 95,38%. Sumber daya atau pegawai yang terlibat didalam pelaksanaan kerjasama ini adalah 4 orang PNS dengan Golongan Ruang ; Pembina Tk I ; 1 orang, Pembina ; 1 orang, Penata Tk.I ; 1 orang dan Penata ; 2 orang. Dengan Tingkat Pendidikan : S2 ; 1 orang, S1 ; 3 orang dan SMA ; 1 orang. Serta dibantu staf kontrak sebanyak 3 orang. Hasil kerjasama yang dilaksanakan adalah :

- a) Diberangkatkannya 13 KK transmigran asal Kabupaten Buleleng ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Tersedianya lahan bagi para transmigran asal Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan dengan perolehan lahan seluas 2 Ha untuk tiap kepala keluarga dengan perincian : lahan pekarangan seluas 0,10 Ha, lahan usaha I (siap olah) seluas 0,90 Ha, lahan usaha II (kondisi belum siap) seluas 1 Ha.

Sarana prasarana yang dipergunakan didalam mendukung pelaksanaan kerjasama cukup memadai dan belum ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama.

2) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2013 berdasarkan perjanjian kerjasama nomor : 075/11/KS/2013 – 28 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh Kec. Rungan Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng mengadakan kerjasama bidang transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan peningkatan lokasi transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 61.320.000,00. Penyelenggaraan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng maupun di kabupaten Gunung Mas, dengan jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang bulan sebelum perjanjian ini berakhir. Sumber daya atau pegawai yang terlibat didalam pelaksanaan kerjasama ini adalah 4 orang PNS dengan Golongan Ruang ; Pembina Tk I ; 1 orang, Pembina ; 1 orang, Penata Tk.I ; 1 orang dan Penata ; 2 orang. Dengan Tingkat Pendidikan : S2 ; 1 orang, S1 ; 3 orang dan SMA ; 1 orang. Serta dibantu staf kontrak sebanyak 3 orang. Hasil pelaksanaan kerjasama ini :

- a) Diberangkatkannya 15 KK transmigran asal Kabupaten Buleleng ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Tumbang Jutuh SP.1

Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- b) Tersedianya lahan siap olah bagi transmigran asal Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan dengan perolehan lahan seluas 2 Ha per KK dengan perincian : lahan pekarangan seluas 0,25 Ha , lahan usaha I ; 0,75 Ha, lahan usaha II ; 1 Ha, dan rumah tipe 36 M2.

Sarana prasarana yang dipergunakan didalam mendukung pelaksanaan kerjasama cukup memadai dan belum ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama.

3) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 181/28/XI/2016-075/29/KB/2016 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/29/XI/2016-075/30/KS/2016 tanggal 24 Nopember 2016. Ruang lingkup kerjasama yaitu penyelenggaraan transmigrasi di lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sinyonyoi Kecamatan kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju menyediakan bagi 10 KK dari Kabupaten Buleleng sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain atau bermasalah dengan perolehan lahan seluas 2 Ha tiap KK dengan perincian ; lahan pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan usaha I seluas 0,75 Ha dan lahan usaha II seluas ; 1 Ha (dalam bentuk hutan).

4) Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan kesepakatan bersama Nomor 15/KB/HK/2016-075/22/KB/2016, dan perjanjian kerjasama Nomor :16/PKS/HK/2016-075/23/KS/2016, tanggal 19 September 2016, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Ngada melaksanakan kesepakatan bersama melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian berbasis agribisnis dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian berbasis agribisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan, perekonomian daerah

dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Buleleng. Kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama tentang pengembangan usaha tani anggur berbasis manajemen dan teknologi. Tujuan dilaksanakannya kerjasama ini adalah untuk menghasilkan produk usaha tani anggur yang dilakukan melalui konsep manajemen dan teknologi serta menciptakan produk – produk unggulan daerah yang berorientasi agrobisnis sebagai upaya perwujudan sarana penunjang ekonomi masyarakat. Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi pengembangan usaha tani anggur dengan pemanfaatan lahan melalui sharing pengetahuan tentang pengembangan usaha tani anggur, sharing pengetahuan tentang system agrobisnis lahan melalui teknologi pengolahan tanah, pengairan, pemeliharaan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemupukan pada usaha tani anggur ; dari hulu berupa input sarana prasarana dan sarana produksi sampai hilir berupa teknologi panen, pasca panen dan pemasaran.

5) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 075/17/KB/2016-134.4/2840/KB/Ad.Prem.Um/2016, tanggal 29 Juli 2016 tentang Distribusi dan Pemasaran Pangan antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan perpaduan yang sinergi saling membantu dalam distribusi dan pemasaran pangan, sejalan dengan spirit pola pembangunan semesta berencana. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mempercepat distribusi dan pemasaran pangan sehingga akses pangan masyarakat di Bali dan khususnya di Kabupaten Buleleng dan Badung menjadi lebih terjamin. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini yaitu ; memantapkan sinergi kerjasama antara Kabupaten Buleleng dengan Badung sejalan dengan spirit pola pembangunan semesta berencana, penyediaan informasi tentang ketersediaan dan pemasaran pangan khususnya beras, cabai, kopi dan komoditas lainnya, memperkuat system yang telah dibangun melalui Tim Penanggulangan Inflasi Daerah di masing – masing kabupaten, memperkuat system smart city yang akan dibangun

sehingga terwujud pola connecting, controlling dan manajemen di bidang pangan serta memantapkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan masyarakat.

B. Kerjasama Antar Pemerintah.

Kerjasama Antar Pemerintah yang telah dilakukan dan masih berlaku sampai dengan Tahun 2016, yaitu :

1) Bidang Kesehatan.

1. Dalam bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bupati Buleleng dengan Gubernur Bali Nomor 075/2484/pem/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Kerjasama Praktik Klinik Kebidanan dan Keterampilan Dasar Praktik Klinik. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan pendidikan kebidanan dalam rangka meningkatkan keterampilan mahasiswa kebidanan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat; Tujuan perjanjian adalah memperoleh sumber daya manusia yang terampil di bidang kebidanan. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani atau sampai Tahun 2016.
2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 075/32/KS/2016-075/33/PKS/B.Pem/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang pembiayaan peserta penerima bantuan iuran (PBI) daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menyediakan dana pembayaran iuran peserta penerima bantuan iuran daerah dalam integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara ke Program Jaminan Kesehatan Nasional. Ruang lingkup kerjasama ; mengintegrasikan program Integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan anggaran untuk pembayaran iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah dan melakukan pembayaran iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai jumlah peserta yang menjadi

tanggungan. Peserta penerima bantuan iuran daerah Kabupaten Buleleng berjumlah 117.439, dengan besaran iuran per peserta Rp. 23.000 per bulan. Persentase sharing pembayaran bantuan iuran daerah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali 51,97 persen berbanding 48,03 persen. Dana yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama ini adalah Rp. 16.845.121.330,80.

3. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/28/KS/2016-075/25/PKS/B.Pem/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, tentang pelaksanaan pelayanan penderita tuberculosis multi drug resistance (TB MDR) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kerjasama ini dimaksudkan untuk mengembangkan program penanggulangan tuberculosis multi drug resistance dengan tujuan untuk menemukan, mengobati dan merawat pasien tuberculosis multi drug resistance. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan tuberculosis multi drug resistance; pelayanan pasien penderita tuberculosis multi drug resistance di RSUD Kabupaten Buleleng ; pelayanan pasien tuberculosis multi drug resistance diperuntukkan hanya untuk WNI. Segala biaya yang timbul untuk kegiatan bersumber dari anggaran Global Fund ATM, Komponen TB fase Ner Funding Model (NFM) 2016/2017.
4. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/12/KS/2016-075/15/PKS/B.Pem/X/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentang Tenaga Pengajar dan Praktek Mahasiswa UPT. Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pelaksanaan kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembelajaran teori dan praktikum di kelas/Lab UPT. Akademi Kebidanan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pembelajaran teori dan praktikum kebidanan dalam tatanan pelayanan nyata di fasilitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan RSUD Kabupaten Buleleng. Tujuannya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia

yang kompeten di bidang kebidanan dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa Diploma III Kebidanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2) Bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Kesepakatan Bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Gubernur Bali dan Bupati Buleleng. Bidang kerjasama yaitu Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan Gas Metan dari Sanitary Landfill TPA Sampah untuk bahan bakar dan Pembangkit Listrik di TPA Bengkala, Desa Bungulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. SKPD Pelaksana Kerjasama adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng. Hasil kerjasama adalah termanaftakannya gas metan di TPA Bengkala sebagai pembangkit enerrgi alternatif bagi masyarakat di sekitar TPA Bengkala. Saat ini tindaklanjut kerjasama sudah pada fase melaksanakan tahap uji kinerja Peralatan Pembangkit Listrik dengan Gas Metan.

3) Bidang Kepegawaian.

1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kementerian Pertanian RI, yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor : 075/24/KB/2016-13.1/MOU/09/2016 tanggal 2 September 2016, tentang Pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah kabupaten Buleleng dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dari THL-TB Penyuluh Pertanian, yang bertujuan ubtuk memenuhi kebutuhan Penyuluh Pertanian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berkualitas dan berkompeten. Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan penempatan CPNS dari Pelamar THL-TB Penyuluh Pertanian.
2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kementerian Kesehatan RI, yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor : 075/04/KB/2016-HK.0501/11/875/2016 tanggal 5 April 2016, tentang Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Pegawai Tidak Tetap Pusat. Nota

kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan PNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT pusat yang masih aktif terhitung mulai 1 September 2015.

4) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/14/KS/2016-075/16/PKS/B.Pem/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang pembinaan bahasa/penyuluh bahasa, aksara dan sastra Bali. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan budaya Bali untuk melestarikan, mengembangkan bahasa, aksara dan sastra Bali agar tidak punah dari ancaman globalisasi. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi ; pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Bali, penempatan tenaga penyuluh bahasa bali di desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Buleleng.

5) Bidang Penyediaan Air Minum.

Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/13/PKS/B.PEM/VI/2016-075/10/KS/2016-415.4 /01 /PKS /Pem /2016, tanggal 15 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan system Penyediaan Air Minum Regional Titab Provinsi Bali. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan percepatan kelengkapan sarana dan prasarana SPAM Regional Titab Provinsi Bali, mensinergikan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali, mewujudkan efesiensi, efektifitas dan produktifitas dalam penyediaan layanan air minum, memenuhi kebutuhan air secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, perluasan pelayanan air minum secara berkelanjutan di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi ; pengaturan tentang pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali, Pengembangan dan pengelolaan SPAM Regional Titab Provinsi Bali untuk Kabupaten Buleleng dan Jembrana meliputi unit air baku, unit produksi, unit

distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan. Pembiayaan yang ditimbulkan akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan melalui anggaran APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten Buleleng dan APBD Kabupaten Jembrana.

C. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.

- 1) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT Tropical Ocean Prawn (PT. TOP), dengan dasar hukum Perjanjian kerjasama antara PT Tropical Ocean Prawn (PT. TOP) dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Buleleng Nomor : 523.3/903/Diskanla/2013 tentang Perjanjian Sewa Pakai Fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Sewa pakai fasilitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit berupa 1 unit rumah jaga, kios, mess dan satu areal lahan di sebelah selatan SPDN yang digunakan sebagai kantor untuk fasilitas pengembangan udang dengan system aquapot. Dengan nama kegiatan sewa pakai fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIb : 1 orang, Eselon IIIb : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian sewa pakai fasilitas di Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Sangsit selama 5 tahun terhitung sejak 11 Pebruari 2013 sampai dengan 11 pebruari 2018. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah adanya penerimaan dari perjanjian sewa pakai fasilitas di PPI Sangsit sebesar Rp.12.960.000,- per tahun. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.
- 2) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Bahari, Dengan dasar hukum yaitu Perjanjian

kerjasama antara Pemkab. Buleleng dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Bahari Nomor : 028/2702/Perl/2012 - 024/KPN-MB/VII/2012 tentang Pemanfaatan/Pengelolaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Pemanfaatan atau pengelolaan Solar Pocked Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Dengan nana kegiatan pemanfaatan/pengelolaan Solar Pocked Dealer Nelayan (SPDN) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangsit. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIB : 1 orang, Eselon IIIB : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian pemanfaatan/ pengelolaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di PPI Sangsit selama 15 tahun terhitung sejak Tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 2 Juli 2027. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.

- 3) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Yayasan Reef Chek Indonesia, dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan Yayasan Reef Check Indonesia Nomor : 075/32/KS/PEM/2014 - 15/12-1/MOU/YRCI-3 Tentang Dana Bantuan Penelitian di Bidang Kelautan dan Terumbu Karang di Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Dana bantuan penelitian di bidang kelautan dan terumbu karang di Kabupaten Buleleng. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIB : 1

orang, Eselon IIIb : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian dana bantuan penelitian di bidang kelautan dan terumbu karang di Kabupaten Buleleng selama 3 tahun terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2017. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah tersedianya hasil penelitian tentang terumbu karang di Kabupaten Buleleng. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.

- 4) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan alamat Jalan Letkol Wisnu Nomor 2 Singaraja. Dengan dasar Hukum yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : 027/146/Kominfo/2016, Tanggal : 14 Januari 2016 dan Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor : 027/135/Kominfo/2016, Tanggal : 13 Januari 2016. Bidang Kerjasama yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi bidang kerjasama yang dilakukan adalah sewa jaringan internet Desa/Kelurahan dan kegiatan Fasilitas Penyebarnya Informasi bidang kerjasama yang dilakukan adalah penyediaan bandwidth untuk akses internet. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng, yang didukung oleh personil sebanyak 8 orang, dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, pendidikan S1 sebanyak 3 orang, pendidikan D3 sebanyak 1 orang, pendidikan SMA/SMK sebanyak 2 orang. Pegawai dengan golongan golongan III sebanyak 8 orang. Sumber dana pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016, DPPA Nomor :1.25/01/78/DPPA/2016 dengan Kode Rekening : 1.25.1.25.01.15.02.5.2.2.10.0011. Jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp 105.754.000, dan Sumber dana pada Kegiatan Fasilitas Penyebarnya Informasi adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016, DPPA Nomor :1.25/01/78/DPPA/2016 dengan Kode Rekening : 1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.03.0006. Jumlah Anggaran yang digunakan sebesar Rp553.443.000. Jangka Waktu Kerjasama yaitu sewa jaringan online sistem pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah selama 12 (sebelas) bulan kalender terhitung mulai bulan 14 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016

dan jangka waktu kerjasama penyediaan bandwidth untuk akses internet pada Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi adalah selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016. Hasil (Output) dari kerjasama pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi adalah berfungsinya jaringan komunikasi dan informasi (online) Pemkab sebanyak 95 titik. Hasil (Output) dari kerjasama pada Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi adalah lancarnya akses informasi melalui internet dan multimedia dan terlayannya akses internet bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya desa yang belum terjangkau oleh jaringan kabel Telkom sehingga kurang lancarnya akses informasi internet dan multi media. Dengan adanya masalah diatas diharapkan adanya pengembangan jaringan kabel Telkom dengan di buatkannya repearter / antena penerus untuk daerah-daerah yang belum di jangkau oleh kabel sehingga jaringan komunikasi dan informasi dan akses informasi melalui internet dan multimedia dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

- 5) Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/21/KS/2016 – 33/KTR/XI-09/2016, tentang Pemanfaatan KTP Elektronik dan database kependudukan yang berbasis NIK dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten Buleleng dan BPJS Cabang Singaraja dalam pemanfaatan KTP-el dan database kependudukan yang berbasis NIK untuk mengefektifkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 6) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/19/KB/2016 – 0658/SPK/DIR/DJA/2016, tertanggal 26 Juli 2016 tentang Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara online dan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran pajak daerah. Perjanjian kerjasama ini untuk memberikan kemudahan bagi Kabupaten Buleleng dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari PT. BPD Bali terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak setiap bulannya.

- 7) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT Baruna Indonesia yang dituangkan melalui Kesepakatan Bersama Nomor 075/07/KB/2016 tertanggal 18 Mei 2016, tentang pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara Letkol Wisnu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk memberdayakan potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng dan PT. Baruna Indonesia dalam penggunaan dan pengembangan lahan serta pariwisata. Sedangkan tujuan dari perjanjian kerjasama ini yaitu untuk dapat memberikan suatu manfaat yang besar terutama dalam hal penggunaan dan pengembangan lahan – lahan dan Bandar Udara Letkol Wisnu sehingga dapat menghasilkan secara optimal serta dapat memberikan pelayanan secara optimal bagi peningkatan perekonomian daerah dengan mempertahankan dan memelihara kelestarian alam dan budaya serta kekhususan daerah sebagai kawasan pariwisata alami, unik dan anggun.
- 8) Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/34/KS/2016 – 47/KTR/XI-09/2016, tertanggal 19 Desember 2016, tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan sebagai PBI Daerah dalam Program JKN. Ruang lingkup kerjasama meliputi kepesertaan PBI Daerah Program JKN, pelayanan kesehatan peserta PBI Daerah JKN dan pembayaran iuran peserta PBI daerah. Jumlah maksimal peserta PBI Daerah di Kabupaten Buleleng sejumlah 117.439 jiwa, sedangkan jumlah awal yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Buleleng sejumlah 86.258 jiwa. Besaran iuran penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 23.000 per jiwa per bulan. Jumlah total iuran yang harus disetorkan Pemerintah Kabupaten Buleleng per bulan sebesar Rp. 1.983.934.000.000,00.
- 9) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Panji Sakti Singaraja, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor 075/06/KS/2016 – 055/UNIPAS/UM.01.01/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Panji Sakti

Singaraja dan meningkatkan efesiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama meliputi Bidang Pendidikan yakni pengembangan kompetensi sumber daya manusia, Bidang penelitian meliputi ; kegiatan ilmiah dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi bakti social dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 10) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor : 075/25/KS/2016-419/II.4/UND/IX/2016 tertanggal 24 September 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kerjasama dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi, khususnya Universitas Nasional Denpasar sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Buleleng. Tujuan pelaksanaan kerjasama adalah meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Nasional Denpasar dan meningkatkan efesiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Buleleng.

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.

- 1) Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem , dengan dasar hukum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Besar Penelitian Pengembangan Budidaya Laut Gondol Nomor 075 / 34 / KS / PEM / 2014 - 31 / BALITBANG KP /BBPPBL / TU.210 /2014 Tentang Pemanfaatan Zona Penelitian Budidaya di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak,Kabupaten Buleleng. Bidang kerjasama adalah Pemanfaaaatan zone penelitian budidaya di Duusun Goldol, desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dengan nana kegiatan pemanfaatan zona penelitian budidaya di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleleng. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai,

Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIB : 1 orang, Eselon IIIB : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian pemanfaatan zone penelitian budidaya di Dusun Gondol Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng selama 5 tahun, terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2019. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah tersedianya dokumen hasil penelitian budidaya laut oleh Balai Besar Riset Budidaya Laut Gondol. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan koordinasi.

- 2) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, dengan dasar hukum Perjanjian Kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dengan Balai Produksi Udang unggul dan Kekerangan Karangasem Nomor : 075 / 35 / KB / Pem / 2014 - I/BPIU2K.K/HK/2014/XII/2014 tentang Pengembangan Instalasi Budidaya Kekerangan Wilayah Laut, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Bidang dan kegiatan kerjasama adalah Pengembangan instalasi budidaya kekerangan wilayah laut desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Penyelenggara kerjasama yang dilaksanakan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng dengan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan yang dilibatkan meliputi Pegawai Negeri Sipil : 66 orang, Pegawai Honor Daerah : 3 orang, Pegawai Kontrak : 52 orang. Tingkat Pendidikan : S2 : 2 orang, S1 : 30 orang, D3 : 9 orang, SMA sederajat : 24 orang, SMP sederajat : 1 orang, Golongan IV:8 orang, Golongan III:41 orang, Golongan II:16 orang, Golongan I:2 orang Pejabat Struktural : 27 orang (Eselon IIB : 1 orang, Eselon IIIB : 5 orang, Eselon IV : 21 orang) dan Pejabat Fungsional 17 orang. Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ini tidak terdapat pembebanan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng (DPA Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng). Perjanjian pengembangan instalasi budidaya kekerangan wilayah laut Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak,

Kabupaten Buleleng terhitung sejak 3 Desember 2014 sampai dengan 3 Desember 2019. Hasil pelaksanaan kerjasama adalah adanya pengembangan budidaya kekerangan di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dan belum ada permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan kerjasama.

- 3) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara. Dengan dasar hukum PP Nomor 99 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buleleng dengan Kantor Regional X BKN Denpasar, Nomor : 800/897/BKD & Nomor : 96/KR.X.K/2016. Materi pelaksanaan koordinasi Pembuatan Soal, Lembar Jawaban, Pengawasan dan Pemeriksaan Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dan Pembinaan Pegawai Daerah melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. SKPD Pelaksana koordinasi adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng, yang didukung personil sejumlah 40 orang, dengan pangkat / golongan ; III/a ; 31 orang, II/c ; 8 orang dan II/a ; 1 orang. Dengan kualifikasi pendidikan S1 ; 31 orang, D3 ; 1 orang dan SMA ; 8 orang. Anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan koordinasi berasal dari APBD Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 25.000.000,00, Sedangkan hasil pelaksanaan koordinasi adalah terlaksananya ujian penyesuaian ijazah.
- 4) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali, melalui kesepakatan bersama Nomor : KEP-124/WPB.21/BD.03/2016-075/26/KB/2016 tertanggal 3 Oktober 2016, tentang penggunaan system informasi kredit program (SIKP). Materi koordinasi adalah pelatihan penggunaan SIKP, penatausahaan calon debitur potensial KUR dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP di Kabupaten Buleleng. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untuk melaksanakan dan mengimplementasikan SIKP dengan lancar untuk mendukung Program KUR yang mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan memanfaatkan SIKP secara optimal khususnya dalam rangka monitoring dan evaluasi pembiayaan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

- 5) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, melalui kesepakatan bersama Nomor : 075/26/KB/2016 – 51081.001/KB/2016 tertanggal 4 Januari 2016, tentang pengembangan data dan informasi pembangunan. Materi koordinasi adalah Koordinasi dan sinkronisasi serta penyusunan data dan informasi pembangunan di bidang ekonomi, social, budaya, hukum, pemerintahan serta fisik dan sarana prasarana. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan kualitas dan pengelolaan data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng guna memperoleh data statistic yang akan dijadikan bahan analisa dan evaluasi berbagai program pembangunan daerah dan sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 6) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Balai Taman Nasional Bali Barat, yang dituangkan ke dalam kesepakatan bersama Nomor : KB 478/BTNBB-1/2016 – 075/03/KB/2016, tertanggal 4 Maret 2016 tentang Pemanfaatan Zona Religi/Budaya/Sejarah Taman Nasional Bali Barat untuk tujuan ritual keagamaan Umat Hindu dalam rangka penguatan fungsi kawasan pelestarian alam. Materi koordinasi meliputi perlindungan kawasan, tumbuhan dan satwa di Kawasan Taman Nasional Bali Barat, pelestarian keanekaragaman hayati dan pelaksanaan ritual keagamaan Umat Hindu serta sosialisasi bersama tentang ruang lingkup kerjasama. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah untuk mendukung amanat peraturan yang berlaku khususnya penguatan fungsi kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan zona religi, budaya dan sejarah untuk Umat Hindu di Kabupaten Buleleng dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat.

E. Pembinaan Batas Wilayah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah, bahwa penegasan batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, berbatasan langsung dengan 5 (lima) kabupaten lain di Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah di Sebelah Barat Kabupaten Jembrana, Sebelah Utara Laut Bali, Sebelah

Timur Kabupaten Karangasem dan di Sebelah Selatan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Memperhatikan kondisi tersebut maka penetapan dan penegasan batas wilayah memiliki fungsi yang setrategis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan pada berbagai fungsi bidang pemerintahan. Kebijakan yang ditempuh terkait penetapan dan penegasan batas wilayah diarahkan dalam rangka menginventarisasi, mengkaji, dan menetapkan dasar hukum tertulis maupaun tidak tertulis yang nantinya akan dijadikan dasar hukum dalam mensosialisasikan mekanisme penetapan dan penegasan batas wilayah tersebut. Dalam rangka penataan batas wilayah dengan Kabupaten lain, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Buleleng yang dituangkan melalui Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/7/HK/2016. Terkait batas wilayah Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lainnya di Bali telah dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri RI pada tanggal 13 s/15 Pebruari 2013 di Balairung Jakarta Timur, yang diikuti oleh perwakilan dari 4 provinsi dan 17 perwakilan kabupaten / kota termasuk Kabupaten Buleleng. Dari hasil rapat tersebut bahwa melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar Kabupaten Kota di Provinsi Bali dilaksanakan pada tahun 2013, dimana anggaran kegiatan pelaksanaan penegasan batas daerah dialokasikan melalui Anggaran Dana DEKON Tahun Anggaran 2013.

Untuk kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali ditegaskan untuk membantu dengan melibatkan instansi terkait sehingga pelaksanaan penegasan batas daerah tidak terjadi permasalahan serta dibuatkan Berita Acara Rapat dan Data Cakupan Wilayah Perbatasan Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Terkait hal tersebut selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Pertemuan/ Rapat Kordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi penegasan Batas Daerah secara pasti di lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2013 di Hotel Harrads Denpasar, yang dihadiri oleh Para Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se – Bali, Para camat yang ada di Perbatasan yaitu 6 (enam) Camat dari Kabuapen Buleleng, 3 (tiga) Camat dari Kabupaten Tabanan, 4 (empat) Camat dari Kabupaten Jembrana, 1 (satu) Camat dari Kabupaten Badung, 1 (satu) Camat dari Kabupaten Bangli, Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penegasan Batas Daerah Provinsi Bali dan Instansi terkait di Provinsi

Bali. Dalam pertemuan tersebut beberapa hal yang dibahas antara lain Sosialisasi Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah oleh Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kementrian dalam Negeri. Kemudian Kebijakan Penegasan Batas Daerah dan Teknis Penegasan Batas Daerah Oleh Sub. Dit. Batas Wilayah II Direktorat Wilayah Administrasi Perbatasan Ditjen Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri. Serta penentuan segmen batas untuk Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung serta Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli. Kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013 dan 3 Juli 2013 meliputi panjang batas 81,4 Km dengan medan batas meliputi Gunung Bakungan, Gunung Penginuman, Gunung Bangkiangjaran, Gunung Banyuwedang, Gunung Pengumbahan, Gunung Merebuk, Gunung Pangkung lesung dan Gunung Lesung. Untuk penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013 dan 5 Juli 2013, meliputi panjang batas 48,2 Km dengan medan batas meliputi Tukad Yeh Leh, Tukad Yeh Aya, Tukad Saba, Tukad Getas, Tukad Dati, Gunung Sengayang, Gunung Pohan dan Gunung Pengelengan. Penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan kabupaten Badung dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 meliputi panjang batas 5,5 Km dengan medan batas meliputi Gunung Pengelengan dan Gunung Catur. Tanggal 4 Juli 2013 dilaksanakan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli meliputi panjang batas 42,6 Km dengan medan batas meliputi Tukad Bon, Tukad Sagae, Tukad maesam, Tukad Bangkah, Tukad Samuh dan Tukad Yeh batu. Terhadap hasil lacak lapangan terhadap batas daerah antara kabupaten Buleleng dengan kabupaten Jembrana, badung, Tabanan dan Bangli telah dibuatkan berita acara penegasan dan penetapan batas daerah, yang nantinya dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri RI untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Untuk batas wilayah antara Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan penegasan dan penetapan pada Tahun 2006 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006, tentang batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 bertempat di Kantor Gubernur Bali dengan dihadiri Pemerintah Provinsi Bali, Ditjen PUM Kementrian Dalam

Negeri RI, Taopdam IX Udayana, Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bangli, Karangasem, Klungkung, Tabanan serta Dinas Kehutanan Provinsi Bali, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka klarifikasi hasil verifikasi lapangan dan verifikasi kartometrik batas daerah di wilayah Provinsi Bali antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung serta verifikasi hasil perapatan batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Karangasem. Dan pada tanggal 18 s/d 21 Nopember 2015 bertempat di Goodway Hotel dan Resort Nusa Dua telah dilaksanakan rapat koordinasi batas daerah kabupaten di wilayah Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka verifikasi tahap akhir terhadap koordinat titik batas antara Kabupaten Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung dan Jembrana dan verifikasi terhadap nama desa, nama kecamatan serta obyek – obyek geogarfis yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh perwakilan masing – masing kabupaten sebelum dituangkan ke dalam draf Permendagri tentang batas daerah kabupaten.

Dalam kaitannya dengan penataan batas wilayah kabupaten dan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor T.005/ 1131/BAK dan sesuai dengan Surat Tugas Nomor 800/221/III/ST/HP/2016, maka Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng menghadiri Rapat Pembahasan dan Harmonisasi Permendagri dan Peta Batas Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI bertempat di Hitel Grand Cemara, Jakarta pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2016. Rapat Pembahasan dan Harmonisasi Permendagri dan Peta Batas Daerah dihadiri oleh Para Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, Topdam IX Udayana, Dittopad TNI AD, Badan Informasi Geospasial, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktur Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Ibu Dra. Hajjah Endang. S, MM. Rapat Pembahasan dan Harmonisasi Permendagri dan Peta Batas Daerah, berhasil menuangkan beberapa kesepakatan berupa Segmen batas yang dibahas yang meliputi batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana, batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan, batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung, batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Bangli

dan batas daerah antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana. Proses pembahasan segmen batas daerah dilakukan secara bersama – sama dengan melakukan klarifikasi dan harmonisasi serta menyepakati titik koordinat batas, jalur batas dan toponimi batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan, Bangli, Jembrana dan Badung yang tertuang dalam Rancangan Permendagri tentang batas daerah beserta lampiran petanya. Peserta rapat sepakat untuk segera memproses penerbitan Rancangan Permendagri batas daerah beserta lampiran petanya sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan prosedur perundangan yang berlaku. Kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan dan Harmonisasi Permendagri dan Peta Batas Daerah yang ditandatangani oleh Para Pejabat dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, Topdam IX Udayana, Dittopad TNI AD, Badan Informasi Geospasial, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Bahwa dengan terbentuknya Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 130/7/HK/2016, maka tugas pertama Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 adalah menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa dan kelurahan. Berdasarkan hasil inventarisasi tim bahwa dasar hukum tertulis yang berupa hukum positif yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa, disamping dasar hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan batas desa yakni : UU No. 69 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2001, Permendagri No. 27 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015.

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 yang masih menyisakan permasalahan terkait penetapan batas antara Desa Banjar dan Desa Dencarik di Kecamatan Banjar, maka pada Tahun 2016 kegiatan diprioritaskan bagi desa – desa yang mempunyai tingkat permasalahan kecil terkait batas desa. Perencanaan dimaksud penting untuk tercapainya sasaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2016. Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016 menetapkan perencanaan untuk kegiatan penetapan

dan penegasan batas desa difokuskan di wilayah Kecamatan Kubutambahan meliputi segmen batas antara Desa Mengening – Tajun, Mengening – Tamblang, Mengening – Bontihing, Mengening-Pakistan dan Mengening – Satra (Kabupaten Bangli). Wilayah Kecamatan Sawan meliputi segmen batas antara Desa Giri Emas – Desa Bungulan, Desa Giri Emas – Desa Sangsit dan melanjutkan penataan terhadap penetapan dan penegasan batas antara Desa Tampekan, Desa Sidetapa dan Desa Banjar Tegeha di Kecamatan Banjar.

Selanjutnya berdasarkan surat dari Badan Informasi Geospasial Nomor : B-21.3/PBW/IGD/7/2016 tertanggal 21 Juli 2016 perihal pemberitahuan temu kerja kegiatan survey deleniasi batas desa di Kabupaten Buleleng, maka pada tanggal 27 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng dilaksanakan temu kerja antara Perwakilan Badan Informasi dan Geospasial dengan Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016. Pada kesempatan dimaksud Perwakilan Badan Informasi dan Geospasial menyampaikan maksud, tujuan dan teknis pelaksanaan kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan pada Tahun 2016 di Kabupaten Buleleng. Kegiatan deleniasi batas desa merupakan penarikan garis batas secara kartometrik pada peta kerja yang nantinya disepakati oleh desa – desa yang berbatasan yang dapat dipakai sebagai dasar penegasan batas desa. Seluruh Anggaran kegiatan ini bersumber dari Alokasi Anggaran pada Badan Informasi dan Geospasial, Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga kegiatan ini dapat dituntaskan pada akhir Bulan Agustus 2016.

Pada Bulan April 2016 Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng juga telah melaksanakan tahapan pelacakan dan pemasangan pilar batas desa antara Desa Tampekan – Sidetapa dan Tampekan – Banjar Tegeha. Sedangkan pelacakan Batas Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016. Acara diawali dengan pengecekan Peta Blok di Ruang rapat Kantor Desa Giri Emas yang dihadiri oleh Perbekel Bungulan, Perbekel Giri Emas dan Staf dari Kecamatan Sawan, didampingi oleh perwakilan dari Topdam kemudian dilanjutkan dengan pelacakan ke lapangan bersama-sama. Pelacakan pertama di lakukan di daerah pantai batas Desa Giri Emas dengan Desa Bungulan terus lanjut keselatan sampai Kuburan Cina dan dilanjutkan pelacakan batas antara Desa Giri Emas dengan Desa Jagaraga. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng

selanjutnya mengakomodasikan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Mengening di Kecamatan Kubutambahan. Desa Mengening berbatasan langsung dengan Desa Tamblang, Desa Tajun dan Desa Satra di wilayah Kabupaten Bangli. Terkait kegiatan dimaksud maka bentuk fasilitasi yang dilaksanakan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dan Kelurahan Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan penetapan titik batas antara Desa Mengening dengan Desa Tajun, Desa Mengening dengan Desa Tamblang pada tanggal 11 Mei 2016 melalui pembacaan peta yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penetapan Garis Batas Desa. Fasilitasi terhadap penegasan batas melalui pemasangan patok batas serta pengambilan titik koordinat untuk kepastian titik batas. Pelacakan lapangan ini juga melibatkan komponen masyarakat desa yang berkompeten untuk mengetahui secara rinci dan dapat menunjukkan lokasi titik – titik batas secara jelas diantaranya Kelian Subak Abian, Pemuka Masyarakat dan Perangkat Desa. Dalam kegiatan ini Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan Topografi Kodam IX/Udayana untuk pengerjaan teknis terkait penentuan titik koordinat melalui satelit citra.

Untuk penetapan segmen batas antara Desa Giri Emas dengan Desa Bungkulan ternyata menyisakan permasalahan dimana kedua desa yang berbatasan ini belum menemui kesepakatan terkait posisi titik batas kedua desa. Pada tanggal 13 Mei 2016 Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng menfasilitasi pertemuan antara kedua desa bertempat di Ruang Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng. Dari hasil pertemuan tersebut ternyata kedua desa masih tetap bertahan dengan asumsi masing – masing terkait titik batas kedua desa sehingga belum bisa diambil kesepakatan. Disepakati oleh kedua desa untuk kembali melaksanakan lacak lapangan bersama – sama yang akan difasilitasi oleh Camat Sawan selaku anggota Tim Penetapan dan Pegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng dan diharapkan akan ada kesepakatan yang tertuang dalam berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas antara Desa Giri Emas -.Desa Bungkulan. Diharapkan seluruh komponen desa utamanya para pemuka desa yang mengetahui sejarah dalam kaitannya dengan perbatasan kedua desa untuk bersinergi sehingga permasalahan terkait batas kedua desa dapat dicarikan solusi yang nantinya menguntungkan kedua desa.

Pada tanggal 25 Juli 2016 dilaksanakan sosialisasi deleniasi batas wilayah administrasi desa dan kelurahan oleh Badan Informasi Geospasial bersama Rekanan yakni PT. Fasade Internasional bertempat di Ruang Rapat

Unit IV Kantor Bupati Buleleng diikuti oleh Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng dan Anggota Forum Komunikasi Desa Kabupaten Buleleng. Materi sosialisasi menitikberatkan pada teknis kegiatan deleniasi yang meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng. Untuk pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 s/d 1 Agustus 2016 mengambil locus di 3 (tiga) kecamatan setiap harinya. Pada tanggal 29 Juli 2016 sosialisasi Kegiatan Delineasi Batas Administrasi Desa/Kelurahan diselenggarakan di Kecamatan Banjar, Sukasada dan Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan serentak sehingga untuk mengakomodasikan maka Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng harus dibagi menjadi 3 untuk dapat mendampingi Rekanan BIG yakni PT. Fasade Internasional menyampaikan sosialisasi di ketiga kecamatan dimaksud. Dalam pelaksanaan sosialisasi di ketiga kecamatan tersebut, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng didampingi oleh Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan. Peserta sosialisasi yang terdiri dari Para Perbekel dan seorang perangkat desa dan kasi pemerintahan kelurahan dari masing – masing desa serta kelurahan yang ada di Kecamatan Buleleng, Sukasada dan Banjar. Pemaparan secara menyeluruh disampaikan oleh perwakilan PT. Fasade Internasional selaku rekanan BIG yang merupakan pelaksana teknis dari kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan. Pada kesempatan tersebut kepada para perbekel/Lurah dibagikan peta wilayahnya masing – masing yang telah berisikan garis indikatif batas desa/kelurahan yang nantinya harus dipelajari dan dimusyawarahkan kembali di desa/kelurahan untuk mendapatkan masukan terkait garis batas yang benar dan pasti. Peta hasil koreksi nantinya agar dibawa kembali pada saat pelaksanaan deleniasi dengan jadwal untuk Kecamatan Banjar tanggal 8 Agustus 2016, Kecamatan sukasada tanggal 9 Agustus 2016 dan Kecamatan Buleleng pada tanggal 18 Agustus 2016. Dan pada saat pelaksanaan deleniasi batas desa/kelurahan diminta agar Perbekel/Lurah hadir dengan tanpa mewakilkan dengan membawa stempel karena akan dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan dan ataupun berita acara ketidak sepakatan. Pada tanggal 30 Juli 2016 sosialisasi Kegiatan Delineasi Batas Administrasi Desa/Kelurahan diselenggarakan di Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Gerokgak. Dan tanggal 1 Agustus 2016 merupakan sesi terakhir pelaksanaan sosialisasi bertempat di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan dan Sawan. Dengan mekanisme dan tahapan pelaksanaan sama dengan pelaksanaan di ketiga kecamatan sebelumnya. Secara umum

pelaksanaan sosialisasi berjalan sesuai harapan dan mendapat animo yang cukup besar dari perangkat desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil sosialisasi deliniasi batas desa/kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s/d 1 Agustus 2016 di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng maka mulai dipetakan batas – batas desa dalam satu kecamatan dan batas – batas desa/kelurahan antar kecamatan. Pemetaan ini penting mengingat kegiatan deliniasi batas desa/kelurahan merupakan penggambaran batas di atas peta berupa garis secara kartometrik sehingga pemetaan batas awal sangat diperlukan. Dengan cakupan 129 desa dan 19 kelurahan serta bentangan wilayah yang cukup luas sangat diperlukan kesiapan awal yang nantinya berorientasi pada hasil yang diharapkan. Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Gerokgak diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2016, bertempat di Kantor Camat Gerokgak. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekcam Gerokgak juga menghadirkan Kapolsek Gerokgak dan Unsur Koramil Gerokgak serta Para Perbekel dari 10 desa di wilayah kecamatan Gerokgak. Sedangkan PT. Fasade Internasional selaku rekanan BIG sebagai pelaksana teknis kegiatan didampingi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng. Kegiatan yang dipandu langsung oleh para teknisi dari PT Fasade Internasional diawali konfirmasi terhadap peta kerja yang telah dibagikan pada saat sosialisasi. Penggambaran garis batas indikatif berdasarkan peta BIG Tahun 2000 ternyata masih menyisakan kesalahan walaupun dalam prosentase kecil dan bisa diperbaiki dan kemudian disepakati antar desa yang berbatasan. Dalam kegiatan ini berhasil ditetapkan dan disepakati melalui penandatanganan berita acara kesepakatan titik batas batas desa sejumlah 35 titik. Untuk permasalahan yang ada yang meliputi penentuan beberapa titik batas antara Desa Celukanbawang dan Desa Pengulon akan dimusyawarahkan kembali antar desa yang bersangkutan. Demikian halnya permasalahan titik batas antara Desa Gerokgak dengan Desa Pejarakan belum dicapai kata sepakat dan akan diadakan pertemuan kembali yang akan difasilitasi oleh Camat Gerokgak.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Seririt diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2016, bertempat di Kantor Camat Seririt. Pertemuan yang dipimpin oleh Camat Seririt juga menghadirkan Unsur Polsek Seririt dan Unsur Koramil Seririt serta Para Perbekel dari 20 desa dan 1 kelurahan di wilayah kecamatan Seririt. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan Gerokgak maka di Kecamatan Seririt berhasil ditetapkan 80 titik batas yang disepakati yang dituangkan

melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 23 titik batas yang belum disepakati. Beberapa permasalahan terkait penentuan garis batas diantaranya Desa Tangguwisia dengan Sulanyah, Desa Banjarasem dengan Desa Kalisada, Desa Patemon dengan Desa Bubunan, belum bisa disepakati antar kedua desa sehingga dituangkan dalam berita acara ketidaksepakatan yang akan dibahas lebih lanjut dengan difasilitasi oleh Camat Sukasada.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Busungbiu diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2016, bertempat di Kantor Camat Busungbiu. Pertemuan yang dipimpin oleh Camat Seririt juga menghadirkan Unsur Polsek Busungbiu dan Unsur Koramil Busungbiu serta Para Perbekel dari 15 desa di wilayah kecamatan Busungbiu serta difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan Seririt maka di Kecamatan Busungbiu berhasil ditetapkan 62 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 7 titik batas yang belum disepakati, dikarenakan Perbekel desa bersangkutan berhalangan hadir. Secara keseluruhan proses deleniasi berjalan sesuai ekspektasi awal sebagaimana yang diharapkan.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Banjar diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2016, bertempat di Kantor Camat Banjar. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekcam Banjar menghadirkan Para Perbekel dari 17 desa di wilayah kecamatan Banjar, Desa Kalibukbuk (Kec. Buleleng), dan 4 desa di Kecamatan Sukasada serta difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan lainnya maka di Kecamatan Banjar berhasil ditetapkan 54 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 36 titik batas yang belum disepakati, dikarenakan Perbekel desa bersangkutan berhalangan hadir ataupun karena memang belum adanya kesepakatan antar desa. Diantara titik batas yang belum disepakati meliputi titik batas antara Desa Dencarik dengan Desa Banjar, Desa Banjar dengan Desa Banjar Tegeha, Desa Banyuatis dengan Desa Kayuputih, dan beberapa titik batas dengan desa – desa yang berada di wilayah kecamatan lain.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Buleleng diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2016, bertempat Ruang

Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Perbekel dan Lurah di wilayah Kecamatan Buleleng. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan lainnya maka di Kecamatan Buleleng berhasil ditetapkan 134 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel dan Lurah. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 7 titik batas yang belum disepakati, perubahan alih fungsi lahan menyebabkan banyak penada batas antar desa dan antar kelurahan maupun antar desa dengan kelurahan tidak ditemukan lagi atau hilang, sehingga diperlukan pelacakan ulang kembali untuk menemukan dan menentukan titik batas yang dulu sudah disepakati.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Sukasada diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2016, bertempat Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Perbekel dan Lurah di wilayah Kecamatan Sukasada dan beberapa desa dari wilayah Kecamatan Buleleng dan Sawan. Proses deleniasi berlangsung sebagaimana proses yang dilaksanakan di kecamatan lain yakni konfirmasi terhadap garis batas indikatif yang digambarkan secara katrometrik. Kesepakatan maupun ketidaksepakatan lanjut dituangkan dalam berita acara yang ditandatanganinya para perbekel dan lurah.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Kubutambahan diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2016, bertempat Kantor Camat Kubutambahan. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Para di wilayah Kecamatan Kubutambahan. Sebagaimana proses deleniasi di Kecamatan lainnya maka di Kecamatan Kubutambahan berhasil ditetapkan 50 titik batas yang disepakati yang dituangkan melalui berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Perbekel. Dari keseluruhan titik batas wilayah desa masih menyisakan 18 titik batas yang belum disepakati, yang akan dibahas lebih lanjut melalui musyawarah antar desa dengan difasilitasi oleh Camat Kubutambahan.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Sawan diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2016, bertempat Kantor Camat Sawan. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Para Perbekel di wilayah Kecamatan Sawan. Proses deleniasi berlangsung

sebagaimana proses yang dilaksanakan di kecamatan lain yakni konfirmasi terhadap garis batas indikatif yang digambarkan secara katrometrik. Kesepakatan maupun ketidaksepakatan lanjut dituangkan dalam berita acara yang ditandatanganinya para perbekel.

Kegiatan deleniasi batas desa dan kelurahan Tahun 2016 di Kecamatan Tejakula diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2016, bertempat Kantor Camat Tejakula. Pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, menghadirkan Para Perbekel di wilayah Kecamatan Tejakula. Proses deleniasi berlangsung sebagaimana proses yang dilaksanakan di kecamatan lain yakni konfirmasi terhadap garis batas indikatif yang digambarkan secara katrometrik. Kesepakatan maupun ketidaksepakatan lanjut dituangkan dalam berita acara yang ditandatanganinya para perbekel. Dalam proses dimaksud berhasil ditetapkan 29 titik batas yang disepakati dan 17 titik batas yang belum disepakati.

Berdasarkan hasil kegiatan deliniasi batas desa/kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus s/d 23 Agustus 2016 di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng maka dapat diinventarisasi titik – titik batas yang belum disepakati maupun sudah disepakati namun belum dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan. Terhadap kondisi tersebut maka Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng melaksanakan pertemuan untuk memfasilitasi terwujudnya administrasi batas desa. Pada tanggal 5 September 2016 dilaksanakan pertemuan di Kantor Desa Bebetin dalam rangka memfasilitasi tercapainya kesepakatan penentuan garis batas antara Desa Bebetin dengan beberapa desa di Kecamatan Sawan (Desa Sawan, Sudaji, Sekumpul, Galungan dan Menyali) dan 2 Desa di Kecamatan Kubutambahan (Desa Bontihing dan Pakisan). Pertemuan ini dilaksanakan karena pada saat pelaksanaan deleniasi batas desa untuk Kecamatan Sawan, Perbekel Bebetin berhalangan hadir sehingga dari hasil koordinasi dengan Tim dari PT. Fasade Internasional dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, disepakati pelaksanaan pertemuan di Kantor Desa Bebetin. Tanggal 13 September 2016 dilaksanakan pertemuan di Kantor Camat Banjar untuk memfasilitasi Desa Banjar dengan Desa Cempaga dan Desa Sidetapa yang administrasi batas desanya belum ada hasil sebagai tindak lanjut deleniasi pada tanggal 8 Agustus 2016. Inventarisasi terhadap pelaksanaan penataan batas desa/ kelurahan yang difasilitasi oleh PT. Fasade Internasional selaku rekanan BIG ternyata menyisakan beberapa permasalahan yakni masih ada titik batas

desa / kelurahan yang belum disepakati yang berjumlah 113 titik tersebar di 9 kecamatan. Untuk kelengkapan administrasi masih ada berita acara kesepakatan / ketidaksepakatan yang belum ditandatangani oleh Perbekel / Lurah ataupun belum ada stempel desa/kelurahan. Masih ada desa yang belum mengikuti kegiatan deleniasi batas karena alasan tertentu sehingga harus dijadwalkan ulang.

Dari inventarisasi kegiatan dimaksud maka direncanakan untuk melaksanakan kegiatan deleniasi lanjutan dengan jadwal yang disusun menyesuaikan dengan agenda kegiatan di Bagian Pemerintahan, guna memfasilitasi desa / kelurahan yang belum mencapai kesepakatan ataupun masih kekurangan dalam aspek kelengkapan administrasinya baik berupa tanda tangan maupun stempel. Perencanaan kegiatan lanjutan ini diupayakan pelaksanaannya di Kantor Bupati dengan menghadirkan seluruh desa/kelurahan yang belum tuntas administrasi batas desa/kelurahan. Untuk beberapa desa kegiatan lanjutan ini direncanakan untuk pelaksanaannya di Kantor Camat masing – masing. Diantaranya untuk memfasilitasi Desa Banjar dengan Desa Cempaga dan Desa Sidetapa yang administrasi batas desanya belum ada hasil kegiatan deleniasi lanjutan akan dilaksanakan di Kantor Camat Banjar. Sedangkan untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan penentuan garis batas antara Desa Bebetin dengan beberapa desa di Kecamatan Sawan (Desa Sawan, Sudaji, Sekumpul, Galungan dan Menyali) dan 2 Desa di Kecamatan Kubutambahan (Desa Bonthing dan Pakisan) maka pertemuan direncanakan di Kantor Desa Bebetin dengan jadwal yang akan disusun selanjutnya. Pertemuan ini dilaksanakan karena pada saat pelaksanaan deleniasi batas desa untuk Kecamatan Sawan, Perbekel Bebetin berhalangan hadir sehingga dari hasil koordinasi dengan Tim dari PT. Fasade Internasional dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng, disepakati pelaksanaan pertemuan di Kantor Desa Bebetin. Tanggal 18 Nopember 2016 dilaksanakan pertemuan di Kantor Camat Banjar untuk memfasilitasi Desa Banjar dengan Desa Cempaga dan Desa Sidetapa yang administrasi batas desanya belum ada hasil sebagai tindaklanjut deleniasi pada tanggal 8 Nopember 2016.

Berdasarkan hasil kegiatan deliniasi batas desa/kelurahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus s/d 23 Agustus 2016 di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng maka dapat diinventarisasi titik – titik batas yang belum disepakati maupun sudah disepakati yang dituangkan dalam berita acara. Untuk optimalisasi pencapaian sasaran kegiatan yakni tercapainya penyelesaian dan kesepakatan penataan batas antar desa /

kelurahan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di 148 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, maka Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng akan menyusun penetapan tentang penentuan segmen batas desa yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Bupati Buleleng. Belum adanya data yang diserahkan oleh Rekanan BIG selaku pelaksana deleniasi batas desa di Kabupaten Buleleng merupakan kondisi mengapa belum adanya penetapan dan penegasan batas desa yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Buleleng. Rentang waktu yang singkat dan adanya permasalahan di lapangan menjadikan sasaran awal penyelesaian pekerjaan oleh rekanan BIG tidak bisa terpenuhi sehingga hasil yang sudah ada belum bisa dilaporkan. Koordinasi ke BIG yang telah dilaksanakan belum bisa merealisasikan rencana untuk segera menetapkan dan menegaskan batas desa / kelurahan di Kabupaten Buleleng. Sehingga rancangan kegiatan untuk segera bisa mewujudkan cetak peta desa/kelurahan akhirnya tidak bisa direalisasikan.

Selanjutnya koordinasi dalam pembahasan terkait serah terima data geospasial berupa peta desa dan kelurahan di Badan Informasi dan Geospasial (BIG) di Cibinong, Bogor pada tanggal 21 Desember 2016. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng diterima oleh Bapak Ade Komara selaku Kabid Pemetaan Batas Wilayah Negara, dan beliau secara terbuka menyampaikan bahwa BIG selaku instansi yang berwenang dalam pembuatan peta di Indonesia merasa gembira bilamana ada daerah yang mau memakai ataupun memanfaatkan hasil pekerjaan BIG dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun tetap ada kehati – hatian terhadap distribusi dari data – data yang dimiliki BIG sebagai sebuah asset Negara yang tentunya harus dipertanggungjawabkan didalam pemanfaatannya. Sehingga sebelum data yang telah disiapkan tersebut diserahkan terlebih dahulu harus atas ijin dan sepengetahuan Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama BIG selaku bidang yang berwenang untuk mengeluarkan data dimaksud. Di Bidang Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama BIG, Tim diterima langsung oleh Bapak Suranto selaku staf yang ditugaskan untuk memfasilitasi penyusunan draf kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara BIG dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka pemanfaatan data geospasial BIG oleh Kabupaten Buleleng. Berdasarkan penjelasan bahwa draf kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama BIG dengan Kabupaten Buleleng saat ini sudah pada posisi di Bagian Hukum BIG. Dan secara lisan hal tersebut sudah dilaporkan terkait rencana pelaksanaan kerjasama kepada

Kepala BIG dan rencana ini sudah di acc dan petunjuk untuk ditindaklanjuti. Sebagai hasil koordinasi maka rekaman data digital scan draf peta kerja deleniasi batas desa Kabupaten Buleleng (geotif), scan berita acara deleniasai batas desa Kabupaten Buleleng, file geodatabase deleniasi dan peta kerja hasil deleniasi batas desa Kabupaten Buleleng, dengan tariff Rp. 0,- yang dimohon dalam rangka tindaklanjut penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng telah diberikan dalam bentuk soft copy.

Anggaran yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Buleleng untuk pembiayaan kegiatan ini berupa belanja langsung yang berjumlah sebesar Rp. 237.950.000 dan terealisasi sebesar Rp. 215.863.270 atau mencapai 90,72 persen. Untuk Tahun 2016 sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Desa/Kelurahan, telah disusun draf Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan draf Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mengening Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Segmen batas Desa Tampekan meliputi Batas Desa Tampekan dengan Desa Dencarik yang di mulai dari Batas paling Selatan terletak di simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Dencarik, Desa Tampekan dan Desa Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya saluran air ke arah Utara sampai pada PABU 01 dengan Koordinat 114o 58' 20.654" BT dan 08o 11' 55.064" LS, yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 02 dengan Koordinat 114o 58' 22.734" BT dan 08o 11' 52.970" LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 03 dengan Koordinat 114o 58' 22.746" BT dan 08o 11' 53.135" LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU 04 dengan Koordinat 114o 58' 27.427 " BT dan 08o 11' 52.146" LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PABU 04 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 05 dengan Koordinat 114o 58' 27.525" BT dan 08o 11' 52.035" LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU 06 dengan Koordinat 114o 58' 31.491 " BT dan 08o 11' 53.349" LS yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PABU 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU 07 dengan Koordinat 114o 58' 31.668" BT dan 08o 11' 52.863" LS

yang terletak di Desa Dencarik dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara menyusuri saluran air sampai pada PABU 08 dengan Koordinat 114o 58' 33.044 " BT dan 08o 11' 55.794" LS yang terletak di simpul Batas tiga Desa yaitu Desa Dencarik , Desa Tampekan dan Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Batas Desa Tampekan dengan Desa Sidetapa, dimulai dari Batas paling Selatan terletak di Jalan Desa Tampekan dengan Desa Sidetapa yang ditandai dengan PBU 01 dengan Koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14,334" LS, yang terletak di Desa Tampekan dan di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Barat pada PBU 02 dengan Koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14,334" LS yang terletak di Desa Tampekan dengan Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 03 dengan Koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14,334" LS yang terletak di Desa Tampekan dengan Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada PABU 04 dengan Koordinat 114o 58' 2.695 " BT dan 08o 12' 14.334" LS yang terletak di Desa Sidetapa dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 05 dengan Koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14.334" LS yang terletak di Desa Sidetapa dengan Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Batas Desa Tampekan dengan Desa Banjar Tegeha, Batas Desa Tampekan dengan Desa Banjar Tegeha, dimulai dari batas paling selatan pada PABU 06 dengan koordinat 114o 58' 21.695" BT dan 08o 12' 14.334" LS selanjutnya menyusuri aliran Tukad Tampekan ke arah utara samapai pada simpul pada batas antara Batas Desa Banjar Tegeha, Desa Tampekan dan Desa Sidetapa.

Batas Desa Mengening dengan Desa Tajun, di mulai dari Batas paling Selatan terletak di simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Satra Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan dan Desa Mengening Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya menyusuri jalan raya ke arah Utara sampai pada PBU 01 dengan Koordinat 115o 15' 10.057" BT dan 08o 09' 56.608" LS, yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan sampai sampai pada PBU 02 dengan Koordinat 115o 15' 08.826" BT dan 08o 09' 54.129" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PBU 02 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 03

dengan Koordinat 115o 14' 54.119" BT dan 08o 09' 40.721" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 04 dengan Koordinat 115o 14' 54.054 " BT dan 08o 09' 40.753" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan raya sampai pada PABU 05 dengan Koordinat 115o 14' 52.838" BT dan 08o 09' 34.921" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 06 dengan Koordinat 115o 14' 50.975" BT dan 08o 09' 27.753" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri tanah tegalan sampai pada PABU 07 dengan Koordinat 115o 14' 21.962" BT dan 08o 08' 44.076" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 08 dengan Koordinat 115o 14' 22.128 " BT dan 08o 08' 43.524" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan desa sampai pada PABU 09 dengan Koordinat 115o 14' 9.206" BT dan 08o 08' 25.598" LS yang terletak di simpul Batas tiga Desa yaitu Desa Mengening, Desa Tajun dan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Batas Desa Mengening dengan Desa Tamblang di mulai dari Batas paling Timur terletak di simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Tajun, Desa Mengening dan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan setapak sampai pada PABU 10 dengan Koordinat 115o 14' 6.895 " BT dan 08o 08' 23.765" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sampai pada PABU 11 dengan Koordinat 115o 13' 54.589" BT dan 08o 08' 29.213" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 12 dengan Koordinat 115o 13' 52.497 " BT dan 08o 08' 29.594" LS yang terletak di Desa Mengening dengan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. PABU 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan setapak sampai pada TK dengan koordinat 115o 13' 49.621" BT dan 08o 08' 30.005" LS yang terletak di simpul tiga Batas Desa yaitu Desa Bontihing, Desa Mengening dan Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten

Buleleng. Batas Desa Mengening dengan Desa Tambakan dimulai dari simpul tiga batas Desa yaitu Desa Mengening, Desa Tambakan dan Desa Pengejaran Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ke arah utara menyusuri Tukad Aya sampai di simpul tiga batas Desa, yaitu Desa Mengening, Desa Tambakan dan Desa Pakisan. Batas Desa Mengening dengan Desa Pakisan dimulai dari simpul tiga batas Desa yaitu Desa Mengening, Desa Tambakan dan Desa Pakisan menyusuri ke arah Utara Tukad Aya sampai pada simpul tiga batas Desa, yaitu Desa Mengening, Desa Pakisan dan Desa Bintiing, selanjutnya ke arah utara menyusuri Tukad Aya sampai pada TK 01 dengan koordinat 115o 13' 49.621" BT dan 08o 08' 30.005" LS yang terletak di simpul tiga batas Desa, yaitu Desa Mengening, Desa pakisan dan Desa Bontihing.

F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat gejala alam yang terjadi. Kabupaten Buleleng dari letak geografis, keadaan geologis, iklim dan fisiografi yang "Nyegara Gunung " merupakan daerah yang sering terjadi kerawanan terhadap bencana alam dimana terdapat wilayah perbukitan yang sering longsor, sering terjadi gelombang pasang, banjir, kekeringan, angin puting beliung. Sepanjang Tahun 2016 bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng meliputi :

- Tanah longsor ; Desa Munduk, Desa Lemukih, Desa Gitgit, Desa Tegallinggah, Desa Sangsit, Desa Pemuteran, Desa Tamblang, Desa Sudaji, Desa Pegadungan, Desa Selat, Desa Mayong, Kelurahan Banyuning, Desa Pegayaman, Desa Kayuputih, Desa Sepang, Desa Tista, Desa Penuktukan, Desa Pedawa, Desa Kedis, Desa Bondalem, Desa Tajun, Desa Mengening, Kelurahan Banjar Tegal, Kelurahan Sukasada, Desa Pancasari, Desa Kaliasem, Desa Kayuputih, Desa Gesing, Desa Ringdikit, Desa Bestala, Desa Unggahan, Desa Tinggarsari,
- Angin Putting Beliung ; Desa Kubutambahan, Desa Sulanyah, Desa Kedis, Desa Gobleg, Desa Bestala,
- Banjir ; Desa Tukadmungga, Kelurahan Seririt, Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, Desa Musi, Desa Sudaji, Desa Lokapaksa, Desa temukus,

Desa Baktiseraga, Desa Pancasari, Desa Kaliasem, Desa Banjarasem, Desa Pangkungparuk, Desa Patas,

- Kebakaran ; Desa Gesing, Desa Bondalem, Desa Bukti, Desa Pakisan, Desa Gobleg, Desa Pengastulan, Desa Pejajaran, Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Desa Pemaron, Desa Sudaji, Desa Sekumpul, Desa Kalibukbuk, Kelurahan Banjar Tegal, Desa Penuktukan, Desa Bebetin, Kelurahan Kampung Kajian, Desa Tajun, Desa Galungan, Kelurahan Banjar Tegal, Desa Kaliasem, Kelurahan Seririt, Desa Patas, Desa Selat, Desa Silangjana, Desa Tinga – Tinga, Desa Gerokgak,
- Kekeringan ; Desa Sembiran, Desa Madenan, Desa Pangkungparuk,
- Gelombang Pasang dan Abrasi ; Desa Bukti, Desa Sangsit, Desa Tukadmungga, Desa Kalisada, Desa Umeanyar,

Sepanjang Tahun 2016 akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah, maka kerugian yang diderita secara materi berkisar sekitar Rp. 25.000.000.000,00.

Sedangkan bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disasters) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh.

Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya. Berbagai konflik dan kerusuhan sosial beberapa tahun terakhir masih sering terjadi, khususnya konflik sosial horizontal antar penduduk. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan daerah, disamping itu yang termasuk dalam ruang lingkup bencana sosial adalah kebakaran rumah, orang terlantar, orang terdampar akibat kecelakaan perahu. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Langkah-langkah penanganan akibat terjadinya bencana alam yang terjadi

berupa bantuan tanggap darurat dan pemberian sembako oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan PMI Kabupaten Buleleng.

BPBD yang merupakan sebuah instansi yang berwenang dalam kaitan dengan penanggulangan bencana memiliki TUPOKSI yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan. Sehubungan dengan itu dalam rangka untuk mempermudah koordinasi penanganan bencana baik yang termasuk dalam fase pra bencana, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dengan Menyikapi amanat UU 24 Tahun 2007 yang antara lain menyebutkan bahwa fungsi dari BPBD adalah koordinasi, komando, dan pelaksana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana daerah.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 ini, sepenuhnya dianggarkan melalui APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dengan rincian alokasi belanja yang terdiri atas alokasi belanja daerah sebesar Rp.7.898.874.368,89 dan terealisasi sebesar Rp. 7.659.362.797,00 atau 96,97 persen, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.4.617.868.857,76 dan terealisasi Rp.4.604.428.415,00 atau 99,71 persen dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.281.005.529,13 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp.3.054.934.382,00 atau mencapai 93,11 persen, yang meliputi : Belanja Pegawai dengan anggaran Rp.332.150.000,00 dan terealisasi Rp.329.790.000,00 atau 99,29 persen, Belanja Barang dan jasa dengan anggaran Rp 2.948.855.529,13 dan terealisasi Rp. 2.725.144.382,00 atau mencapai 92,41 persen.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku perangkat daerah yang menangani pencegahan dan penanggulangan bencana, pada Tahun 2016 didukung oleh personil sejumlah 62 Orang dengan Kualifikasi Pendidikan : S1 : 39 orang, SMA : 23 Orang, Pangkat dan Golongan Golongan ; IV: 29 Orang, Gol. III : 11 Orang dan Gol. II : 22 Orang.

G. Pengelolaan Kawasan Khusus.

Kawasan Khusus yang ada di Kabupaten Buleleng bukan merupakan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat, tetapi lebih merupakan arahan pemanfaatan kawasan agar jelas peruntukannya berdasarkan karakteristik dan potensi daya dukungnya. Pengelolaan kawasan khusus ini merupakan

kebijakan daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Propinsi Bali maupun Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng dalam rangka penyusunan Rencana Kawasan Induk Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, maka pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kawasan meliputi :

1. Kawasan budidaya seluas 89.593,67 Ha atau 65,59% dari luas wilayah kabupaten, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 4.731,95 Ha; meliputi hutan produksi terbatas seluas 3.207 Ha yang terdapat di Kecamatan Gerokgak; 2.910,40 Ha, Kecamatan Seririt ; 112 ha dan Kecamatan Tejakula 185,55 Ha, dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 1.524 Ha, yang terdapat di Kecamatan Gerokgak seluas 1.274,40 Ha dan di Kecamatan Seririt ; 249,60 Ha.
 - b. Kawasan hutan rakyat, terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40%, pada kawasan berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan lainnya, meliputi Kecamatan Gerokgak, Seririt, Sukasada dan Kubutambahan.
 - c. Kawasan peruntukan pertanian dirancang seluas 48.741,51 Ha atau 35,68% dari luas wilayah Kabupaten Buleleng, terdiri atas :
 - 1) Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas sekitar 11.070 Ha, dengan jenis tanaman pangan yang banyak dikembangkan adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ketela pohon dan ubi jalar.
 - 2) Kawasan peruntukan hortikultura seluas 5.391 Ha. Komoditas tanaman buah-buahan: mangga (Mangga Arumanis dan Lalijiwa/Madu) dan rambutan di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, sawan dan Gerokgak. Tanaman pisang hampir di semua kecamatan. Durian, wani dan manggis di Kecamatan Sawan, Banjar dan Busungbiu. Pembibitan tanaman buah-buahan di Desa Suwug, Sinabun dan Sudaji Kecamatan Sawan; Desa Bila Kecamatan Kubutambahan; dan Desa Les Kecamatan Tejakula. Komoditi sayur-sayuran dataran tinggi di Kecamatan Sukasada, dan sayuran dataran rendah di Kecamatan Kubutambahan, Sawan dan Seririt. Tanaman hias banyak

dikembangkan di Kecamatan Sukasada dan Banjar. Tanaman biofarmaka banyak dikembangkan di Kecamatan Seririt, Busungbiu dan Banjar.

- 3) Kawasan peruntukan perkebunan seluas sekitar 20.274 Ha, meliputi pengembangan Komoditas kopi Robusta pada dataran sedang dan Arabika pada dataran tinggi di Kecamatan Busungbiu, Banjar, Sukasada, dan Kubutambahan. Komoditas kakao di kawasan perkebunan dataran sedang di setiap kecamatan. Komoditi cengkeh dan vanili di Kecamatan Busungbiu, Banjar, Sukasada, Kubutambahan, dan Tejakula. Komoditi tembakau Virginia di Kecamatan Buleleng, Sukasada dan Sawan. Komoditi kelapa dan jambu mete tersebar di dataran rendah dan sedang hampir di setiap kecamatan.
- 4) Kawasan peruntukan peternakan, meliputi potensi ternak yang ada dan sudah berkembang selama ini yaitu Ternak besar : sapi, babi, kambing dan kerbau. Ternak unggas : ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik.
- d. Kawasan peruntukan perikanan, Kabupaten Buleleng memiliki pantai sepanjang $\pm 157,05$ Km atau $\pm 1.166,75$ Km² luas radius 4 mil perairan laut yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Desa Sumberkelompok di Kecamatan Gerokgak sampai Desa Tembok di Kecamatan Tejakula.
- e. Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan pariwisata, meliputi 3 (tiga) kawasan, yaitu : Kawasan Pariwisata Kalibukbuk, meliputi : Desa Kalibukbuk, Pamaron, Tukad Mungga dan Anturan di Kecamatan Buleleng, dan Desa Kaliasem, Temukus, dan Tigawasa di Kecamatan Banjar. Desa Kayuputih Melaka di Kecamatan Sukasada, dipromosikan menjadi bagian dari kawasan pariwisata kalibukbuk. Kawasan Pariwisata Batu Ampar meliputi Desa Penyabangan, desa Banyupoh, desa Pemuteran, desa Sumberkima dan desa pejarakan di Kecamatan Gerokgak dan Kawasan Pariwisata Air Sanih meliputi : Desa Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Bondalem, Tejakula, Julah, Sembiran dan Pacung di Kecamatan Tejakula, dan Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan.
- 1) Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) Meliputi : Desa Pancasari dan Wanagiri di Kecamatan Sukasada, Desa

Munduk, Gesing dan Gobleg di Kecamatan Banjar, dan Desa Umejero di Kecamatan Busungbiu.

- 2) Daerah Tujuan Wisata (DTW) terdiri dari : Wisata Alam meliputi Monkey Forest, Air Terjun Gitgit, Air Terjun Bertingkat Gitgit, Air Terjun Sambangan, Wisata Alam Ambengan-Sambangan, Ricefield Terraces Ambengan, Air Terjun Carat di Kecamatan Kubutambahan, Air Terjun Melanting, Munduk Air Panes BGanyuwedang, Yeh Panes Nirmala Banjar, Air Terjun Singsing di Kecamatan Banjar, Air Terjun Les, Air Terjun Yeh Mampeh di Kecamatan Tejakula, Pantai Penimbangan, Pantai Kerobokan, Wisata Alam Sudaji di Kecamatan Sawan. Wisata Budaya/Sejarah Meliputi : Makam Jayaprana dan Lingkungan Pura Pulaki di Kecamatan Gerokgak, Brahma Wihara Asrama, Desa Tua Sidatapa, Desa Tua Pedawa, Desa Tua Cempaga, Desa Tua Banyuseri, dan Desa Tua Tigawasa di Kecamatan Banjar, Tugu Bhuana Kerta di Kecamatan Sukasada, Lingkungan Pura Beji, Lingkungan Pura Dalem Sangsit, Lingkungan Pura Dalem Jagaraga di Kecamatan Sawan, Lingkungan Pura Medue Karang di Kecamatan Kubutambahan, Eks Pelabuhan Buleleng, Tugu Singa Ambara Raja, Gedong Kertya, Museum Buleleng, di Kecamatan Buleleng, Lingkungan Ponjok Batu, Pemandian Kuda, Desa Tua Sambiran, PACung, MADenan dan Desa Tua Julah di Kecamatan Tejakula dan Wisata Buatan yang meliputi ; Bendung Renon di Kecamatan Seririt, Rencana Bendungan Titab di Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu, Perkebunan Rakyat komoditas Anggur di Desa Dencarik Kecamatan Bajar, Tugu Tri Yuda Sakti di Kecamatan Sukasada
- f. Kawasan peruntukan pertambangan berupa pertambangan skala kecil, meliputi : Lokasi kawasan pertambangan batuan tersebar di Wilayah Kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing meliputi : Pertambangan Batu Kapur, batu andesit, dan batu mulia di Kecamatan Gerokgak, Batu apung, batu merah, dan batu lahar, batu andesit di Kecamatan Kubutambahan, Batu pilah dan batu andesit di Kecamatan Tejakula, Tanah liat, dan batu andesit di Kecamatan Buleleng dan Seririt dan di tegaskan lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan, Lokasi

kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air; dan Kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

- g. Kawasan peruntukan industri mencakup kawasan : Kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang yang meliputi : Desa Patas, Tinga-tinga, Celukan Bawang, Pengulon dan Tukad Sumaga di Kecamatan Gerokgak seluas sekitar 1.762 Ha. Sentra-sentra industri kecil kreatif dan kerajinan rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya yang lokasinya tersebar pada kawasan permukiman dan Pengembangan agroindustri di kawasan Agropolitan Depeha, Tista, Banjar dan Pancasari.
- h. Kawasan peruntukan pemukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang di arahkan seluas 10.960,72 Ha atau 8,03 % dari luas wilayah Kabupaten meliputi :
 - 1) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi kehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan , terdiri atas :
 - a) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKW di perkotaan Singaraja;
 - b) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKL di perkotaan Seririt;
 - c) Kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PKK meliputi kawasan perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk, Pancasari, Kubutambahan, Sangsit dan Tejakula.
 - 2) Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi kehidupan dan penghidupan beserta

pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL, Kawasan Agropolitan maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL. Agropolitan dan Kawasan perdesaan lainnya.

- 3) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman, Kawasan ini merupakan bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan meliputi : a) fasilitas perdagangan dan jasa, b) fasilitas perkantoran dan pemerintahan, c) fasilitas pendidikan, d) fasilitas kesehatan, e) fasilitas peribadatan, dan e) fasilitas rekreasi dan olahraga.
- i. Kawasan peruntukan lainnya, meliputi : Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdapat di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kelurahan Banyuning dan Banjar Tegal di Kecamatan Buleleng, dan Kawasan Dodiklat TNI AD di Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak; Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang luasnya minimal 30% dari luas kawasan perkotaan; Kawasan minapolitan; Kawasan agropolitan; dan Kawasan andalan.

H. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Imbas dari aura reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan kehidupan social masyarakat, dimana masyarakat begitu mudah merespon suatu hal bahkan terkadang terlalu responsive. Hal ini jika tidak ada penanganan secara dini akan menimbulkan gejolak social di masyarakat. Situasi tentram dan tertib secara umum akan terwujud apabila adanya dukungan berbagai komponen masyarakat dan aparatur terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah.

Secara umum situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Buleleng Tahun 2016 berlangsung kondusif, dalam hal ini pemerintah daerah berhasil mengantisipasi secara dini setiap kemungkinan akan terjadinya konflik. Sehingga situasi tentram dan

tertib tetap terjaga dalam kelangsungan penyelenggaraan pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat, dan tidak terjadi konflik-konflik baik yang berbasis sara, anarkisme, dan separatisme dalam kehidupan masyarakat. Selama tahun 2016 gangguan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban lebih banyak di timbulkan oleh masalah-masalah social yang memegang potensi berkembang karena berhubungan dengan kehidupan perekonomian masyarakat, diantaranya adalah gangguan karena adanya gelandangan dan pengemis (gepeng) yang merupakan eksodus dari daerah lain, pelanggaran oleh pedagang kaki lima dan gangguan akibat keberadaan wanita tuna susila (WTS).

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Buleleng diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Instansi terkait lainnya dalam rangka Pengamanan dan Penegakan Pelaksanaan Peraturan Daerah. Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibiayai dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 999.970.000. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang yaitu Kabid Perlindungan Masyarakat, Kabid Ketertiban Umum, Kabid Sumber Daya Aparatur, Kabid Peraturan daerah, dan 3 Kepala Sub. Bagian yaitu Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, Kasubag Umum, 8 Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, Dan Penyuluhan, Kasi Penyeledikan Dan Penyidikan, Kasi Operasional Dan Pengendalian, Kasi Kerjasama, Kasi Pelatihan Dasar, Kasi Teknis Fungsional, Kasi Pengarahan Dan Pengendalian dan Kasi Bina Potensi Masyarakatserta di bantu 153 orang staf /anggota yang terdiri dari 58 orang staf administrasi dan 95 orang anggota Sat Pol PP. Dari 169 orang Pegawai pada Sat Pol PP 74 Orang PNS, 6 orang tenaga harian dan 89 orang Tenaga Kontrak. Tingkat pendidikan pegawai pada Sat Pol PP S2 berjumlah 6 orang, S1 berjumlah 30 orang, Diploma III berjumlah 4 orang, Diploma II berjumlah 1 orang, SMA berjumlah 119 orang, SMP berjumlah 2 orang dan SD berjumlah 1 orang. Pangkat Dan Golongan pegawai pada Sat Pol PP Gol. IV/c berjumlah 1 orang, Gol. IV/b berjumlah 1 orang, Gol. IV/a berjumlah 6 orang, Gol. III/d berjumlah 5 orang, Gol. III/c berjumlah 3 orang, Gol. III/b berjumlah 4

orang, Gol III/a berjumlah 1 orang Gol. II/d berjumlah 3 orang, Gol. II/c berjumlah 24 orang, Gol. II/b berjumlah 19 orang, Gol. II/a berjumlah 4 orang, dan Gol. I/d berjumlah 2 orang, Gol. I/a berjumlah 1 orang. Bahwa untuk kelancaran dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu menetapkan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban (Pedagang Kaki Lima, Gelandangan dan Pengemis dan Wanita Tuna Susila) di Kabupaten Buleleng oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui pembinaan secara rutin, apabila dari hasil pembinaan masih ditemukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat dilaporkan ke Tim Yustisi Kabupaten Buleleng untuk mendapat tindak lanjut.

Kendala yang terjadi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban diantaranya adalah para gepeng yang telah di amankan dan di bina serta dikembalikan ke daerah asalnya ternyata kemudian balik kembali dan melakukan aktivitas di Kabupaten Buleleng dan hal ini terjadi secara kontinyu. Sedangkan untuk penataan pedagang kaki lima sering terjadi kesalahpahaman antara petugas dan pedagang di karenakan para pedagang kaki lima kurang memahami aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, sehingga sering terjadi adu agumentasi dengan tensi tinggi dan main kucing-kucingan antara petugas dan pedagang. Selanjutnya dalam penanganan para wanita tuna susila, sama halnya dengan daerah lain berbagai upaya, pembinaan dan sangsi yang dikenakan terkadang mentah dan mubasir karena ternyata masih saja ada penduduk/anggota masyarakat yang kemudian menampung kembali.

Namun terlepas dari semua kendala tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng melalui berbagai pendekatan dan usaha berupaya untuk secara terus menerus melaksanakan pengamanan dan penegakan peraturan daerah sehingga kondisi tentram dan tertib dalam tatanan kehidupan Buleleng bisa terwujud. Dalam penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat Sat Pol PP selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini dengan Kepolisian Republik Indonesia Resort Buleleng dan kepolisian sektor Buleleng yang ada di 9 kecamatan.

BAB VI

PENUTUP

Terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam Tahun Anggaran 2016 dengan tingkat capaiannya termasuk pencapaian agenda/prioritas pembangunan telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam laporan ini sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp. 2.066.054.109.742,38, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.449.970.563.193,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.606.678.444,00 atau 90,04 persen, yang terdiri dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar Rp. 982.698.080.000,00 atau 47,56 persen dari total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dan realisasi dana alokasi khusus sebesar Rp. 293.888.358.759,00. Sumber pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp. 315.526.783.349,70 terealisasi sebesar Rp. 282.111.205.871,44 atau 89,41 persen. Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah dikarenakan di beberapa pos pendapatan realisasinya kurang maksimal, yakni pada pos hasil pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar 76,19 persen dan retribusi daerah terealisasi 78,41 persen. Sedangkan untuk lain – lain pendapatan daerah yang sah dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 450.660.832.929,19 dan terealisasi Rp. 478.336.225.426,94 atau 106,14 persen.
2. Alokasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 berjumlah sebesar Rp. 2.374.587.023.431,23 dan terealisasi sebesar Rp. 2.200.355.657.347,43 atau mencapai 92,66 persen. Belanja Daerah Kabupaten Buleleng terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.369.560.719.162,71 yang terealisasi sebesar Rp. 1.274.346.715.665,05 atau 93,05 persen, meliputi Belanja Pegawai dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.052.739.186.901,40 dan terealisasi Rp. 961.075.607.179,00 atau 91,29, kemudian Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp. 82.499.834.000,00 dan terealisasi Rp. 81.808.234.000,00 atau 99,16 persen,

Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan anggaran Rp. 15.347.391.380,00 yang realisasinya mencapai 100 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan partai Politik, yang dialokasikan sebesar Rp. 215.838.828.057,15 dan terealisasi Rp. 214.928.828.057,18 atau 99,58 persen serta Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp. 2.985.478.824,16 dan terealisasi Rp. 1.186.655.048,90 atau 35,79 persen.

3. Untuk Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2016 dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.005.026.304.268,52 terealisasi Rp. 926.008.941.682,38 atau tercapai 92,14 persen. Yang terdiri atas Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 49.544.098.198,90 dan terealisasi Rp. 56.935.214.561,07 atau 114,92 persen. Selanjutnya Belanja Barang dan jasa yang direncanakan dengan anggaran sebesar Rp. 547.829.973.574,92 dan terealisasi Rp. 523.004.439.475,35 atau 96,47 persen serta Belanja Modal dengan anggaran Rp. 407.652.232.494,70 dan terealisasi Rp. 346.068.287.645,96 atau 84,89 persen.
4. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng meningkat dari tahun ke tahun. Selama tahun 2011-2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng cenderung mengalami peningkatan. Hingga puncaknya pada Tahun 2013 laju pertumbuhan mencapai 7,15 persen. Kemudian mengalami perlambatan pada Tahun 2014 yang mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96 persen. Dan Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mencapai 6,11 persen. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada Tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng lebih tinggi 0,7 poin dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mencapai 6,04 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 didorong oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 9,81 persen. Kemudian diikuti oleh jasa pendidikan yang mencapai sebesar 9,09 persen. Sedangkan kategori lainnya memiliki pertumbuhan dibawah 9 persen pada Tahun 2015. Bahkan terdapat satu kategori yang mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2015 yaitu pertambangan dan penggalian dengan kontraksi sebesar 7,70 persen. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengeluarkan larangan terhadap usaha – usaha penggalian pasir liar yang tidak memiliki ijin usaha.
5. Sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng dituntut untuk memiliki tingkat perekonomian yang tinggi yang dapat dilihat

melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tercatat PDRB Kabupaten Buleleng pada Tahun 2015 sebesar 25,49 triliun rupiah. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk Tahun 2014 mencapai 22,33 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 3,16 triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada Tahun 2015, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,39 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali. Sementara potret perekonomian Kabupaten Buleleng tanpa melihat pengaruh perubahan harga, Kabupaten Buleleng mencatat angka PDRB Tahun 2015 sebesar 18,82 triliun rupiah. Nilai ini juga mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 17,74 triliun rupiah. Hal ini merupakan gambaran yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

6. PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Atas dasar harga Berlaku pada Tahun 2015 tercatat sebesar 34,78 juta rupiah. Angka ini masih dibawah PDRB Perkapita Provinsi Bali yang mencapai 42,66 juta rupiah. Namun disisi lain angka ini merupakan peningkatan sebesar 4,67 juta rupiah atau 14,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selama Tahun 2011 – 2015 rata – rata pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 31 juta rupiah. Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, maka PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng Tahun 2015 sebesar 29,13 juta rupiah. Laju peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai 5,47 persen masih jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng yang hanya mencapai 0,6 persen.
7. Disamping keberhasilan yang telah dicapai, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan umum pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang masih kita hadapi. Tentunya hal ini dapat diatasi dengan menumbuhkembangkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang meliputi penyelenggaran urusan desentralisasi yang mencakup pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, tugas – tugas pembantuan serta tugas – tugas umum pemerintahan telah terlaksana dengan baik, hal ini terjadi melalui kerja sama dan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Buleleng dalam kerangka Good Governance berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.